

Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik

Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat

**SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)
THE HABIBIE CENTER (THC)**

Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik

Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat

**SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)
THE HABIBIE CENTER (THC)**

TIM PENELITI

Rudi Sukandar
Fathun Karib
Nurina Vidya Hutagalung
Sofyan Cholid
Imron Rasyid
Sopar Peranto
R. Praditya Andika Putra
Mohammad Hasan Ansori
Johari Efendi



SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN INDONESIA

KAPASITAS LEMBAGA DAN DINAMIKA PENCEGAHAN KONFLIK: STUDI KASUS KALIMANTAN BARAT DAN NUSA TENGGARA BARAT

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)

The Habibie Center (THC)

Tim Peneliti

Rudi Sukandar

Fathun Karib

Nurina Vidya Hutagalung

Sofyan Cholid

Imron Rasyid

Sopar Peranto

R. Praditya Andika Putra

Mohammad Hasan Ansori

Johari Efendi

Diterbitkan dengan kerja sama antara

THE HABIBIE CENTER

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 12560, Indonesia

Telp. 62 21 780 8125/62 21 781 7211 | Fax. 62 21 780 8125/62 21 781 7212

E-mail: nvms@habibiecenter.or.id | www.habibiecenter.or.id

[@habibiecenter](https://facebook.com/habibiecenter)

SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN

Cetakan pertama Mei 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang

Tim SNPK-THC

Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik:

Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) - The Habibie Center (THC)

Jakarta, SNPK-THC 2015

xvi+172 hlm.; 15,5cm x 24cm

ISBN: 978-602-14261-5-9

Kata Pengantar

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR kepada Tuhan Yang Maha Esa, studi tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik dengan mengambil kasus di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat dapat diterbitkan. Mengingat semakin kompleksnya penanganan konflik di Indonesia, peran lembaga menjadi strategis untuk melaksanakan hal tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sendiri menyatakan bahwa penanganan konflik meliputi upaya-upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Mengingat pencegahan konflik merupakan bagian terpenting dari penanganan konflik, kami dari Tim Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan-The Habibie Center (SNPK-THC) memandang perlu diadakan studi tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan kapasitas mereka dalam pencegahan konflik.

Sesuai dengan apa yang digariskan UU di atas, pencegahan konflik sebagai salah satu tahapan dalam penanganan konflik diimplementasikan melalui peran lembaga dan strategi pencegahan yang dilakukannya. Dengan demikian, penelitian tentang pencegahan konflik ini dipilih sebagai bagian awal dari rangkaian penelitian tentang penanganan konflik. Selain itu, studi tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Indonesia masih belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur yang ada.

Studi tentang kapasitas lembaga ini terlaksana sebagai bagian dari program SNPK-THC. Program ini merupakan kerja sama antara The Habibie Center dan Kedeputan I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), didukung oleh The World Bank serta kemitraan antara Australian Department of Foreign Affairs and Trade (*DFAT*) dan The Asia Foundation (*TAF*). Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama tersebut.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya penelitian dan penulisan hasil studi ini. Di Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamka dan Ibu Yooce Febrina Tutkey; Bapak Fubertus Ipur dan Ibu Anne dari Elpagar di Pontianak; Bapak Aqla Maududi di Sambas. Di Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif Apriaman dan Bapak Lalu Sofyan Ardi di Lombok; Bapak Prima Adikusnan dan Bapak

Irvan Amirullah di Bima; Ibu Sukarti, Bapak Mainuddin, dan Bapak Abdul Haris di Sumbawa. Kami juga berterima kasih atas masukan kritis dari Bapak Dadang Trisasongko; Bapak Budi Wijarjo; Dr. Thung Ju Lan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Dr. Marwan Syaukani, Bapak Nelwan Harahap, dan Bapak Mafud Salatunlayl dari Kemenko PMK; Bapak Adrian Morel dan Bapak Wahyu Handoyo dari The World Bank; serta Bapak Happy Hendrawan dari Swandiri Institute dan Dr. Ismail Ruslan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi informasi dan membantu jalannya penelitian. Terakhir, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pengurus dan staf The Habibie Center atas bantuan mereka, terutama kepada Ibu Rahimah Abdulrahim, Bapak Hadi Kuntjara, Bapak Ghazali Hasan Moesa, Ibu Natassa Irena Agam, Ibu Asvida Nurlaela, dan Ibu Rahma Simamora.

Akhirnya, kami berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam membangun kapasitas kelembagaan di masa depan untuk menangani konflik sosial di Indonesia.

Salam damai,
Tim SNPK-THC

Ringkasan Eksekutif

REFORMASI TELAH MENGANTARKAN Indonesia memasuki era demokratisasi. Transisi ke arah demokrasi dan kehidupan pasca-Reformasi diwarnai oleh maraknya konflik kekerasan, baik vertikal maupun horizontal. Meningkatnya konflik kekerasan dan sulitnya upaya deeskalasi konflik kekerasan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor (World Bank, 2011): *tekanan*, yaitu perubahan secara nasional yang meliputi beberapa aspek, seperti proses demokratisasi, desentralisasi keuangan dan politik, serta tekanan ekonomi; *kerapuhan sosial*, yaitu ketidakmampuan masyarakat mengelola perubahan sosial dan perubahan demografis, serta menurunnya kelekatan sosial (*social cohesion*); *kelemahan institusional*, yaitu kinerja lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang kurang baik, keterbatasan kapasitas lembaga keamanan untuk melakukan intervensi dalam pencegahan kekerasan, dan keterlibatan aparat dalam eskalasi kekerasan.

Dari ketiga faktor yang disebutkan di atas, studi yang dilakukan Tim Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan-The Habibie Center (SNPK-THC) ini berfokus pada *faktor institusional* dengan melihat kapasitas kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, dalam penanganan konflik sosial, terutama aspek pencegahannya. Pilihan ini diambil karena berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, faktor *tekanan* dan *kerapuhan sosial* sudah banyak diteliti, sementara faktor *kelembagaan* masih belum banyak dikaji.

Lebih lanjut, bila dikaitkan dengan kapasitas kelembagaan, masalah yang muncul ke permukaan adalah adanya persepsi mengenai lemahnya lembaga-lembaga dalam pencegahan konflik. Padahal fungsi lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menjalankan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia. Seperti digariskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), “penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.” Mengingat pencegahan merupakan aspek terpenting dalam penanganan konflik, Tim SNPK-THC berpendapat bahwa studi tentang aspek pencegahan dalam bingkai kapasitas lembaga pemerintah dan nonpemerintah penting untuk dilakukan. Di samping itu, studi ini juga mempelajari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan konflik dengan memasukkan unsur sistem peringatan dini (*early warning system*). Peningkatan

kapasitas kelembagaan sendiri terdiri atas tiga unsur, yaitu kapasitas pemerintah, kapasitas sektor swasta, dan kapasitas komunitas masyarakat.¹

Berdasarkan latar belakang di atas, Tim SNP-K-THC melakukan studi di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian berfokus pada dua pertanyaan besar: bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah membangun upaya pencegahan konflik? Strategi apa yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah tersebut dalam upaya pencegahan konflik?

Kapasitas lembaga-lembaga dalam pencegahan konflik di kedua provinsi dapat dilihat dari lima langkah pencegahan konflik (Lan, Yanuarti, & Tryatmoko, 2013). *Pertama, kelembagaan pencegahan konflik*. Dalam hal ini beberapa lembaga telah dibentuk dalam upaya pencegahan konflik, di antaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Meskipun pada beberapa kasus lembaga-lembaga ini berperan dalam upaya deeskalasi konflik, efektivitas kerja mereka masih belum optimal karena terbatasnya dukungan dana. Di samping itu, kelembagaan pencegahan konflik lebih berorientasi pada lembaga formal, terutama di NTB, sehingga mengesampingkan peran lembaga-lembaga nonformal.

Kedua, pengenalan potensi konflik. Berkenaan dengan hal ini, di kedua provinsi telah dilakukan upaya pemetaan daerah rawan konflik pada level provinsi. Di Kalbar, upaya pemetaan ini diinisiasi oleh Kesbangpol provinsi, sementara di NTB oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi serta Kesbangpol kabupaten/kota. Di samping itu, beberapa instansi keamanan, misalnya kepolisian, juga melakukan upaya pemetaan sendiri. Yang masih harus dibenahi adalah upaya sosialisasi hasil pemetaan tersebut di lembaga-lembaga terkait. Kurangnya sosialisasi ini dapat dilihat di Kalbar, di mana informasi hasil pemetaan yang sudah dibukukan dan diterbitkan belum diterima oleh lembaga-lembaga lain baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, di NTB upaya pemetaan hanya mencakup 5 dari 10 kabupaten/kota karena keterbatasan waktu dan dana. Sebagai langkah awal, upaya pemetaan daerah rawan konflik sosial ini merupakan panduan bagi pencegahan konflik, terutama dalam rangka deteksi dini secara sistematis berdasarkan data.

Ketiga, manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik. Langkah ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik. Masing-masing lembaga pemerintah memiliki data yang masih belum dikumpulkan dalam satu unit pemrosesan terpusat. Meskipun masing-masing lembaga tersebut mengaku saling berbagi informasi, tidak terpusatnya data dapat menyulitkan upaya manajemen pe-

1 Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS), p. 20.

ngetahuan dalam pencegahan konflik. Hal ini dapat juga berimbas pada kualitas keputusan yang diambil untuk mengatasi potensi konflik di masyarakat.

Keempat, perancangan strategi pencegahan konflik berdasarkan isu yang terpadu. Langkah ini masih belum partisipatif sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi masalah besar ketika lembaga-lembaga nonpemerintah yang memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan konflik sesuai afiliasi dan fokus mereka belum dilibatkan dalam perancangan strategi. Akibatnya, upaya menyelesaikan akar permasalahan penyebab konflik—misalnya, kesenjangan ekonomi, kesenjangan akses terhadap layanan publik, perebutan akses sumber daya, politik identitas, dan lain-lain—belum mengakomodasi masukan dan memanfaatkan potensi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kelima, tindakan pencegahan konflik. Langkah-langkah dalam tahap ini masih didominasi oleh pendekatan keamanan, sehingga upaya pencegahan operasional dan deeskalasi konflik dengan memanfaatkan cara-cara politik atau militer masih tinggi. Secara umum, beberapa lembaga di Kalbar dan NTB telah mengaplikasikan strategi pencegahan melalui aspek-aspek politik, sosial budaya, dan pendidikan. Namun demikian, langkah-langkah tersebut pada tataran antarlembaga masih belum tersinergikan sehingga belum dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, pencegahan struktural melalui perangkat pembangunan atau ekonomi guna mengatasi akar penyebab konflik terkesan masih belum sepenuhnya terpadu dan cenderung dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu saja. Misalnya, intervensi ekonomi di Kalbar dilakukan secara aktif dan agresif oleh lembaga nonpemerintah, seperti lembaga keuangan *Credit Union* Pancur Kasih yang tersebar di seluruh provinsi. Adapun upaya intervensi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di NTB masih bertumpu pada kebijakan pemerintah dan investasi luar, sehingga peningkatan partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah lokal masih belum terlihat.

Temuan di lapangan menunjukkan tiga strategi utama dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat yang dianggap turut berkontribusi menciptakan kondisi damai di kedua provinsi tersebut. *Pertama, pembangunan sistem peringatan dini* dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pemerintah dan nonpemerintah sampai ke tingkat desa. *Information sharing* telah dilakukan antara lembaga-lembaga terkait namun masih bersifat parsial dan belum diproses secara terpusat. *Kedua, pengembangan penyelesaian perselisihan alternatif* dengan mengikutsertakan seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Beberapa kasus kekerasan antarwarga di daerah penelitian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tidak bereskalasi dan tidak meluas ke daerah lain. Dalam implementasinya, ketiga strategi tersebut telah melibatkan

partisipasi masyarakat. *Ketiga*, tujuan pencegahan konflik yaitu membangun sistem peringatan dini dan pengembangan penyelesaian perselisihan alternatif dapat berjalan dengan lebih maksimal melalui mekanisme strategi *koordinasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah*. Pembangunan koordinasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah ini dilakukan melalui forum-forum yang dibentuk seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD atau FOKORPIMDA) Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD) Kabupaten/Kota, Kominda, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Upaya koordinasi dan komunikasi juga dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat masing-masing etnis dan lembaga-lembaga keamanan masyarakat. *Keempat*, selain ketiga strategi itu, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengupayakan *keterlibatan partisipasi masyarakat umum*. Cara pandang dan upaya ke arah ini menjadi penting sebagai bagian membangun ketahanan (*resilience*) masyarakat dalam menghadapi potensi konflik yang mereka hadapi sendiri di dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kapasitas pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat sangat bergantung pada perbaikan peran lembaga dan strategi-strategi di atas, terutama berkenaan dengan penyediaan dana, sosialisasi program dan temuan pemetaan, pembagian dan pemrosesan informasi, dan koordinasi strategis dalam memformulasikan langkah-langkah terpadu pencegahan konflik berdasarkan isu.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konsep dan Kajian Literatur	7
1.2.1. Kapasitas Lembaga	7
1.2.2. Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik	8
1.3. Metodologi Penelitian	11
1.3.1. Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	11
1.3.2. Pemilihan Daerah Penelitian	13
1.3.3. Strategi Sampling	16
1.4. Sistematika Penulisan	17
BAB II	
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	19
2.1 Kalimantan Barat	20
2.1.1. Kondisi Geografis Kalimantan Barat	20
2.1.2. Kondisi Demografis Kalimantan Barat	22
2.1.3. Sejarah dan Potensi Konflik di Kalimantan Barat	26
2.1.3.1. Konflik Tionghoa–Dayak pada 1967	26
2.1.3.2. Konflik Dayak–Madura pada 1979	27
2.1.3.3. Konflik Dayak–Madura pada 1996 hingga 1997	28
2.1.3.4. Konflik Melayu–Madura pada tahun 1999	31
2.1.4. Potensi dan Dinamika Konflik Pasca-Reformasi di Kalimantan Barat	32
2.1.5. Dinamika Kelembagaan	42
2.1.5.1. Lembaga Pemerintah	43
2.1.5.2. Lembaga Nonpemerintah	44
2.2. Nusa Tenggara Barat (NTB)	45
2.2.1. Kondisi Geografi Nusa Tenggara Barat	45
2.2.2. Kondisi Demografis Nusa Tenggara Barat	48
2.2.2 Sejarah dan Potensi Konflik di Nusa Tenggara Barat	50

2.2.2.1. Kasus Kekerasan Antarkelompok di Lombok	51
2.2.2.2. Kasus Kekerasan Antarkelompok di Bima	53
2.2.2.3. Sumbawa	55
2.2.3. Dinamika dan Potensi Konflik di NTB	57
2.2.4. Dinamika Kelembagaan	59
2.2.4.1 Lembaga Pemerintah	60
2.1.4.2. Lembaga Nonpemerintah	61

BAB III

KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT	65
3.1. Peran Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat	66
3.2. Strategi Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat	76
3.2.1. Koordinasi Antar-Lembaga (Pemerintah dan Nonpemerintah)	76
3.2.2. Pembangunan Sistem Peringatan Dini	82
3.2.3. Penyelesaian Perselisihan Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i> , ADR)	85
3.3. Kerangka Kerja Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat	88

BAB IV

KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT	91
4.1. Peran Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Nusa Tenggara Barat	91
4.2. Strategi Pencegahan Konflik di Nusa Tenggara Barat	102
4.2.1. Koordinasi dan Sinergi Antarlembaga	103
4.2.2. Pembangunan Sistem Peringatan Dini	110
4.2.3. Penyelesaian Perselisihan Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i> , ADR)	117
4.3. Kerangka Kerja Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Nusa Tenggara Barat	119

BAB V

REFLEKSI ATAS PERAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT DAN NUSA TENGGARA BARAT	123
5.1. Refleksi Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat	124
5.1.1. Peran dan Strategi Lembaga dalam Pencegahan Konflik	124

5.1.2. Tantangan Pencegahan Konflik dan Kekerasan di Kalimantan Barat di Masa Depan	130
5.2. Refleksi Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Nusa Tenggara Barat	133
5.2.1. Peran dan Strategi Lembaga dalam Pencegahan Konflik	133
5.2.2. Tantangan Pencegahan Konflik dan Kekerasan di Nusa Tenggara Barat di Masa Depan	136
5.3. Refleksi Penutup	137
 BAB VI	
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	143
6.1. Simpulan	143
6.2. Rekomendasi	146
6.2.1. Rekomendasi Akademis	146
6.2.2. Rekomendasi Praktis	147
 Referensi	151
Indeks	157
Lampiran-lampiran	161
Profil Peneliti dan Penulis	169
Tentang The Habibie Center (THC) dan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)	171

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1.1. Perubahan Tren Konflik Kekerasan di Sembilan Provinsi (Periode 1999-2013)	2
Gambar 1.2. Tren Konflik Kekerasan di Daerah Pantauan SNPK 2005-2013	2
Gambar 1.3. Jumlah Insiden Kekerasan Komunal Terkait Isu Identitas Periode 1998-2013	3
Gambar 1.4. Perbandingan Insiden Kekerasan Komunal Terkait Isu Identitas Periode 1998-2004 dan 2005-2013	3
Gambar 1.5. Insiden Konflik Kekerasan di Kalimantan Barat 1997-2013	13
Gambar 1.6. Insiden dan Dampak Konflik Kekerasan di Kalimantan Barat Periode 1999-2013	14
Gambar 1.7. Insiden Konflik Kekerasan di NTB 2005-2013	14
Gambar 1.8. Insiden dan Dampak Konflik Kekerasan di NTB Periode 2005-2013	15
Gambar 1.9. Diagram Pencar Intensitas Insiden Konflik Kekerasan dan Intensitas Keberhasilan Intervensi	15
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kalimantan Barat	21
Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (<i>Kalimantan Barat dalam Angka</i> , 2014)	22
Gambar 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2013 (<i>Kalimantan Barat dalam Angka</i> , 2014)	25
Gambar 2.4. Konflik Identitas Terkait Pengungsi di Kota Pontianak, Periode 2000-2001	35
Gambar 2.5. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	46
Gambar 2.6. Persentase Luas Wilayah per Kabupaten/Kota di NTB (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	47
Gambar 2.7. Jumlah Kecamatan per Kabupaten/Kota (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	47
Gambar 2.8. Jumlah Desa/Kelurahan per Kabupaten/Kota (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	47
Gambar 2.9. Piramida Penduduk NTB 2013 (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	48
Gambar 2.10. Penduduk Berdasarkan Agama (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	49

Gambar 2.11. Tren Jumlah Penduduk Miskin NTB 2002-2013 (<i>NTB dalam Angka</i> , 2014)	49
Gambar 2.12. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB	50
Gambar 2.13. Insiden Konflik Identitas di NTB 2005-2014	50
Gambar 2.15. Insiden Konflik Identitas di Wilayah Bima, 2005-2014	53
Gambar 2.16. Insiden Konflik Identitas Sumbawa, 2005-2014	56
Gambar 3.1. Kerangka Kerja Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat	90
Gambar 4.1. Pemetaan Konflik Kabupaten Lombok Tengah	110
Gambar 4.2. Buku Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014	112
Gambar 4.3. Buku Saku Babinkamtibmas tentang ISIS 2014	115
Gambar 4.4. Buku Saku untuk Masyarakat tentang ISIS 2014	116
Gambar 4.5. Kerangka Kerja Pencegahan Konflik di Pulau Lombok	120
Gambar 5.1. Tren dan Isu Konflik Kekerasan di 13 Provinsi Pantauan SNPK (2005-2013)	123
Gambar 5.2. Masalah dalam Pelaksanaan Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik	139
Tabel 2.1. Jumlah Suku yang ada di Kalimantan Barat	23

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi telah mengantarkan Indonesia memasuki era demokratisasi setelah terbelenggu rezim otoritarian selama lebih dari tiga dekade. Transisi ke arah demokrasi ini diwarnai dinamika di masyarakat, terutama berkenaan dengan kebebasan dalam hak politik, hak mengeluarkan pendapat, dan hak berorganisasi. Namun demikian, langkah transisi tersebut juga diiringi dengan maraknya kekerasan akibat konflik vertikal antara kelompok separatis dengan pemerintah pusat, serta konflik horizontal di antara kelompok-kelompok masyarakat dengan mengeksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (lihat misalnya Bertrand, 2004; Collier, Hoeffler, & Söderbom, 2006; Diprose, 2007 & 2009b).

Secara historis, data SNPK di sembilan provinsi memperlihatkan konflik kekerasan berkepanjangan (*extended violent conflict*) berskala besar yang berkenaan dengan isu konflik komunal (di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara) dan separatisme (di Aceh, Papua, Papua Barat) di masa transisi ke era Reformasi telah cenderung berganti menjadi konflik kekerasan episodik (*episodic violent conflict*) berskala kecil yang berhubungan dengan isu sumber daya, politik, dan identitas (**Gambar 1.1**).^{1,2} Perubahan tren konflik kekerasan berkepanjangan ini disebabkan, antara lain oleh perjanjian damai antara pihak-pihak yang bertikai, otonomi daerah, dan desentralisasi pada era Reformasi.³

Namun demikian, kekerasan berskala kecil dan bersifat episodik masih terus berlangsung, fluktuatif, serta cenderung meningkat di beberapa provinsi

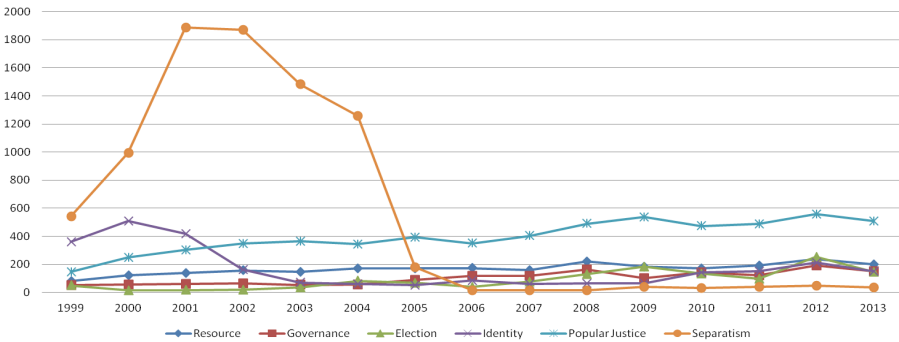
1 *National Strategy to Consolidate Peace: National Development Priorities and the Need for a Strategy to Consolidate Peace*. The Habibie Center, 2011.

2 Data SNPK ini berdasarkan data yang diunduh dari www.snpk-indonesia.com pada 11 Maret 2014. Data yang disajikan di gambar 1.1. hanya meliputi provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah karena dari 34 provinsi yang dipantau, hanya sembilan provinsi tersebut yang datanya tersedia dari tahun 1998. Selain provinsi NTT, provinsi-provinsi lainnya merupakan wilayah terjadinya konflik kekerasan berkepanjangan.

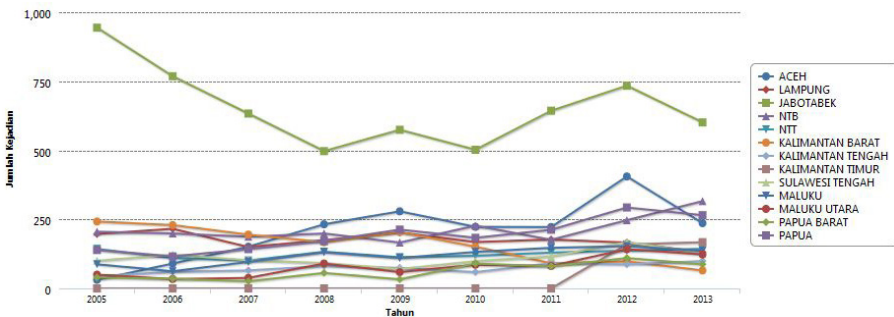
3 Misalnya, perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, serta perjanjian Malino II pada 12 Februari 2002 antara pihak-pihak yang bertikai di Maluku. Selain itu Diprose (2009a), berdasarkan kasus di Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa desentralisasi memberikan hasil positif karena mengurangi ketegangan antarkelompok dan keluhan melalui otonomi lokal dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

lain yang berada dalam pantauan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK). Terkait konflik kekerasan episodik selama periode 2005-2013, data SNPK di 13 provinsi mencatat konflik kekerasan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (**Gambar 1.2**).⁴ Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa beberapa provinsi yang angka konflik kekerasannya cenderung meningkat adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Gambar 1.1. Perubahan Tren Konflik Kekerasan di Sembilan Provinsi (Periode 1999-2013)



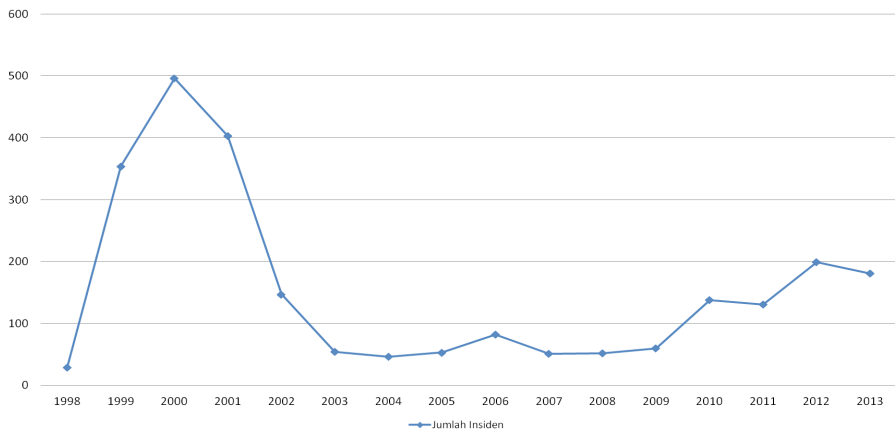
Gambar 1.2. Tren Konflik Kekerasan di Daerah Pantauan SNPK 2005-2013



Bila dianalisis lebih lanjut, konflik-konflik komunal berbasis identitas masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan data SNPK, konflik komunal berkepanjangan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2003. Akan tetapi, tren kekerasan cenderung meningkat kembali setelah tahun 2005, meski dengan skala yang lebih rendah (**Gambar 1.3**).

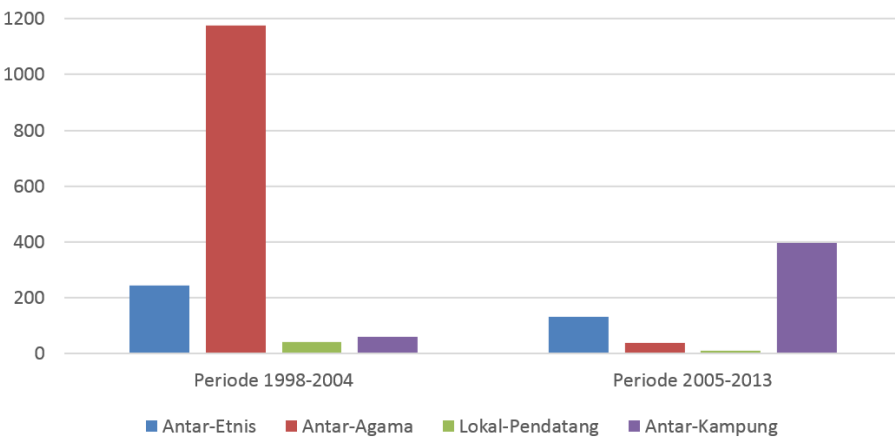
4 Data SNPK ini terkait kategori konflik-konflik kekerasan seperti sumber daya, tata kelola pemerintahan, pemilihan dan jabatan, identitas, main hakim sendiri, dan konflik lainnya, kecuali kategori konflik kekerasan separatisme. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan konflik kekerasan episodik pada periode 2005-2013, sedangkan kategori konflik kekerasan separatisme merupakan bagian dari kekerasan berkepanjangan.

Gambar 1.3. Jumlah Insiden Kekerasan Komunal
Terkait Isu Identitas Periode 1998-2013



Selain perubahan dari segi skala dan sifat kekerasan, data SNPK juga menunjukkan adanya pergeseran isu yang melatarbelakangi konflik pada kedua periode tersebut. Kekerasan pada masa konflik komunal berkepanjangan dipicu oleh masalah antaragama dan antaretnik, sedangkan pada masa setelahnya lebih banyak terjadi karena isu antarkampung dan antaretnik (**Gambar 1.4**).⁵

Gambar 1.4. Perbandingan Insiden Kekerasan Komunal Terkait
Isu Identitas Periode 1998-2004 dan 2005-2013



Secara umum, meningkatnya konflik kekerasan dan sulitnya melakukan deeskalasi konflik kekerasan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut (World Bank, 2011):

5 Jika ditelusuri lebih jauh, data SNPK sepanjang 2005-2013 mencatat insiden-insiden kekerasan komunal berbasis agama (88%) dominan terjadi di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Selanjutnya, lihat kajian Tim SNPK-THC Maret 2014 tentang “Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik di Ambon.”

1. **Tekanan.** Perubahan secara nasional di mana beberapa aspek seperti proses demokratisasi, desentralisasi keuangan dan politik, serta tekanan ekonomi membuat masyarakat rentan terhadap gesekan yang muncul di antara mereka. Tekanan akibat perubahan secara nasional dapat dilihat secara jelas pada periode pasca-Reformasi. Faktor-faktor politik seperti otonomi daerah dan desentralisasi dalam proses demokratisasi dapat memberikan tekanan bagi masyarakat. Tekanan ini dapat dirasakan pada saat berlangsungnya peristiwa politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres), di mana kepentingan politik elite dapat mendorong terjadinya konflik dan kekerasan.⁶
2. **Kerapuhan sosial.** Ketidakmampuan masyarakat mengelola perubahan sosial dan perubahan demografis akibat migrasi berskala besar serta modernisasi struktur negara, mengurangi legitimasi dan efektivitas penyelesaian konflik secara informal. Kerapuhan sosial juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah memakai jalan kekerasan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Upaya untuk mengurangi kerapuhan sosial dengan meningkatkan kohesi sosial perlu dilakukan tidak hanya dengan membangun relasi yang baik, toleransi, dan kepercayaan antarlembaga, tetapi juga dengan mengatasi masalah keadilan, pendidikan, pemerataan kemakmuran, dan tata kelola pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 sendiri menyebutkan bahwa harmoni sosial dan antarberagama belum tercapai sehingga pemerintah harus lebih proaktif dalam meningkatkan toleransi dan kepercayaan dengan menangani akar permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan konflik yang mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu menguatkan kapasitas pemerintah dalam meningkatkan dan menguatkan kohesi sosial.
3. **Kelemahan institusional,** berupa kinerja lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang kurang baik, keterbatasan kapasitas lembaga keamanan untuk melakukan intervensi dalam pencegahan kekerasan, dan kurang optimalnya keterlibatan aparat dalam eskalasi kekerasan.

Dari ketiga faktor yang disebutkan oleh World Bank di atas, studi ini akan memfokuskan pada *faktor institusional* dengan melihat kapasitas kelembagaan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam pencegahan konflik sosial. Pemilihan faktor tersebut didasarkan pada beberapa alasan berikut. *Pertama*, *faktor tekanan* sudah menjadi fokus studi beberapa peneliti, misalnya Bertrand

6 Untuk kajian komprehensif mengenai kekerasan terkait pemilu, pileg, dan pilpres, silakan lihat Catatan Kebijakan The Habibie Center edisi Agustus 2013 dan Juli 2014.

(2004) dan Tanasaldy (2012) yang memperlihatkan pengaruh perubahan-perubahan makro yang didorong oleh proses politik seperti demokratisasi dan faktor ekonomi seperti krisis keuangan.⁷ *Kedua*, mengenai *faktor kerapuhan sosial*, Tim THC-SNPK pada tahun 2014 telah mengeluarkan hasil studi *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik di Ambon* yang memperlihatkan bahwa kerapuhan sosial dalam bentuk segregasi sosial memiliki potensi bagi munculnya kekerasan baru. *Ketiga*, salah satu masalah yang muncul ke permukaan dalam upaya deeskalasi konflik kekerasan adalah lemahnya kapasitas lembaga dalam upaya penanganan konflik. Padahal kapasitas lembaga ini sangat penting dalam kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia sebagaimana digariskan oleh undang-undang.

Definisi penanganan konflik menurut UU Nomor 7 Tahun 2012⁸ tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.” Pasal 4 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa tindakan penanganan meliputi tiga upaya, yaitu *pencegahan konflik*, *penghentian konflik*, dan *pemulihan pascakonflik*.

Dari ketiga jenis penanganan konflik yang disebutkan dalam UU PKS tersebut, Tim SNPK-THC berpendapat bahwa studi tentang aspek pencegahan dalam bingkai kapasitas lembaga pemerintah dan nonpemerintah penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama*, aspek pencegahan konflik merupakan tahapan yang paling penting dalam penanganan konflik, dibandingkan tahap-tahap penghentian dan pemulihan konflik. Hal ini didasari pemikiran bahwa penyelesaian konflik akan jauh lebih sulit daripada meresponsnya pada tahap awal (van Walraven & van der Vlugt, 1996).

Kedua, beberapa studi dalam lingkup nasional juga menunjukkan pentingnya peran beberapa lembaga untuk secara formal mencegah konflik. Peran tersebut dilakukan tidak hanya oleh lembaga-lembaga formal, tetapi juga oleh lembaga-lembaga dari masyarakat sipil, seperti lembaga keagamaan (Sic-cama, 1996; Carter, 2001). Partisipasi lembaga-lembaga tersebut juga dapat dilihat dari upaya-upaya mereka dalam merespons konflik dan membangun

7 Tim SNPK-THC dalam beberapa publikasi hasil penelitiannya telah memperlihatkan faktor tekanan dalam aspek politik seperti pemilukada dan aspek ekonomi seperti perebutan sumber daya alam. Lihat publikasi SNPK-THC: (1) “Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku” tahun 2015; (2) Kajian Perdamaian dan Kebijakan edisi 04/Agustus 2013; “Peta Kekerasan di Indonesia (Januari–April 2013) dan Kekerasan dalam Pemilukada”; (3) Kajian Perdamaian dan Kebijakan edisi 05/November 2013; “Peta Kekerasan di Indonesia (Mei–Agustus 2013) dan Konflik Lahan Antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur”; (4) Kajian Perdamaian dan Kebijakan edisi 07/Juni 2014; “Peta Kekerasan di Indonesia (Januari–April 2014) dan Kekerasan Pemilu Legislatif 2014”.

8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS).

sistem peringatan dini untuk mengantisipasi munculnya konflik (Rusu, 2001; Whittall, 2010). Upaya-upaya pencegahan konflik kekerasan ini tidak hanya berhubungan dengan penyiapan lembaga-lembaga terkait, tetapi juga upaya proaktif negara melalui pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebijakan yang sensitif konflik (Boyce, 2008).

Ketiga, naskah akademik yang mendasari pembuatan UU PKS memperlihatkan bahwa kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik merupakan hal penting. Naskah akademik tersebut menyatakan, strategi dasar pencegahan konflik dalam fase prakonflik adalah “peningkatan kapasitas kelembagaan melalui *civic education* yang berorientasi *early warning system* dan bersifat antisipatif, proaktif, dan preventif.” Kapasitas yang harus ditingkatkan dalam pencegahan konflik meliputi (1) kapasitas pemerintah; (2) kapasitas sektor swasta; (3) kapasitas komunitas masyarakat.⁹ Peningkatan kapasitas ketiga unsur dalam naskah akademik tersebut menjadi landasan bagi keterlibatan peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 UU PKS mengenai empat upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, Tim SNP-K-THC memandang perlunya diadakan penelitian tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik. Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah membangun upaya pencegahan konflik?
2. Strategi apa yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam upaya pencegahan konflik?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam membangun upaya pencegahan konflik, terutama berkenaan dengan peringatan dini, identifikasi potensi konflik, dan koordinasi antarlembaga.
2. Mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi fokus lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam melakukan upaya pencegahan konflik.
3. Mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam upaya pencegahan konflik.

9 Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS), p. 20.

10 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), pasal 6 ayat (1): Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c) meredam potensi konflik; (d) membangun sistem peringatan dini. Ayat 2, Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis:

- a. Secara umum, penelitian ini akan menjadi tambahan literatur yang penting dan/atau mengisi kekosongan literatur mengenai kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik kekerasan di Indonesia.
- b. Secara khusus, penelitian ini akan mencoba memberikan perspektif baru dalam mengkaji kesiapan lembaga terkait pencegahan konflik kekerasan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Tersedianya informasi mengenai kapasitas dan kesiapan lembaga dalam proses intervensi dan dampaknya terhadap proses eskalasi dan deeskalasi konflik kekerasan, serta keterlibatan lembaga-lembaga lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun nasional dalam proses tersebut.
- b. Tersedianya masukan dan rekomendasi mengenai perlunya perubahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas lembaga dalam mencegah konflik kekerasan.
- c. Tersedianya rujukan bagi lembaga-lembaga pembangunan, para pengambil kebijakan, LSM, pemerintah lokal dan pusat, serta para *stakeholder* pembangunan lainnya yang bekerja untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam upaya pencegahan konflik kekerasan.

1.2. KONSEP DAN KAJIAN LITERATUR

Bagian berikut akan membahas konsep dan kajian literatur. Pembahasan tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kapasitas lembaga dan kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik.

1.2.1. Kapasitas Lembaga

Kapasitas lembaga didefinisikan sebagai kemampuan lembaga untuk melaksanakan fungsi utamanya secara efisien dan efektif (World Bank, 2011). Studi tentang peran masyarakat sipil dalam *peacebuilding* di Indonesia sudah banyak dilakukan (lihat misalnya Agustiana & Pakpahan, 2005; Cahyono, 2008), sedangkan riset sistematis yang secara khusus menelaah aspek kapasitas lembaga formal maupun informal dalam menangani konflik sesuai Pasal 4 UU PKS masih belum banyak dilakukan. Di samping itu, studi lain tentang masalah-masalah krusial yang berhubungan dengan kapasitas lembaga seperti konsultasi *multi-stakeholder*, penyediaan informasi, peran gender, dan dukungan terhadap mekanisme peringatan khas lokal (Nyheim, 2009) juga masih belum banyak dieksplorasi.

Peran lembaga dalam lingkup sosialnya sendiri merupakan bagian yang penting dalam membangun kapasitas lembaga. Jenson dan Mérand (2010) menyebutkan ada tiga tipologi kelembagaan yang muncul, yaitu (1) kelembagaan formal, yang berfokus pada pekerjaan dan pengaruh dari lembaga-lembaga hukum dan politik; (2) kelembagaan pilihan rasional, yang berfokus pada rancangan rasional dari lembaga-lembaga formal; (3) kelembagaan konstruktivis, yang berfokus pada pengaruh norma dan wacana dalam proses institusionalisasi. Ketiga tipologi ini menawarkan berbagai perspektif dalam melihat lembaga. Misalnya, tipologi pertama menawarkan perspektif analitis yang berfokus hampir selalu pada aturan dalam organisasi formal dengan menganalisisnya tanpa melibatkan masyarakat. Dalam tipologi kedua, aktor ada dalam perspektif ini, namun dianggap semata sebagai pelaku yang hanya memajukan preferensi mereka. Dengan demikian, lembaga merupakan ciptaan individu atau kelompok yang ingin memaksimalkan manfaat lembaga tersebut dengan membuat aturan formal dan bertahan lama sesuai pilihan rasional mereka. Terakhir, tipologi ketiga menawarkan perspektif yang memanusiakan norma, identitas, atau ide, dan membuat ketiga hal tersebut beroperasi dalam hubungan langsung satu sama lain tanpa intervensi aktor atau mediasi struktur sosial.

Bila dihubungkan dengan kapasitas lembaga dalam menangani konflik, maka dapat dilihat bahwa ada beberapa aspek dari ketiga tipologi tersebut yang menjadi bagian penting bagi pembangunan kapasitas lembaga. Bagian tersebut, misalnya, pentingnya pengaruh dari lembaga-lembaga hukum dan politik, aturan formal dan bertahan lama, serta norma, identitas, atau ide dalam penanganan konflik. Namun demikian, salah satu kritik yang harus diperhatikan adalah masalah terkait kemampuan lembaga itu sendiri dalam mengelola konflik dan menjaga perdamaian. Kendati terdapat lembaga-lembaga yang kooperatif, keberadaan mereka bersifat perifer karena peran mereka banyak merefleksikan, bukan membentuk, distribusi kekuasaan (lihat Acharya, 1999).

1.2.2. Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik, dalam Pasal 1 Ayat 1 UU PKS, didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.” Pencegahan konflik menjadi aspek yang paling krusial karena dapat mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah konflik yang akan berujung pada korban jiwa dan kerugian material. Menurut Lan, Yanuarti, dan Tryatmoko (2013, p. 8), ada tiga hal yang harus dibangun dalam upaya pencegahan konflik, yaitu:

- a. Pengembangan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas dan eskalasi konflik.

- b. Pembangunan mekanisme peringatan dini agar tiap lembaga dapat memantau hubungan-hubungan yang ada di tingkat masyarakat dan negara.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat yang rawan konflik.

Lan, Yanuarti, dan Tryatmoko (2013) juga menyatakan bahwa ada lima langkah prioritas yang harus dilakukan dalam tindakan pencegahan konflik, yaitu kelembagaan pencegahan konflik, pengenalan potensi konflik, manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik, perancangan strategi pencegahan konflik berdasarkan isu, dan tindakan pencegahan konflik itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan strategi besar pemerintah dalam pencegahan konflik, strategi dasar prakonflik dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. *Pertama*, kapasitas pemerintah berfokus pada upaya menyelenggarakan kebijakan nasional dan lokal serta memfasilitasi dialog di antara para *stakeholder* (misalnya pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat) dalam mengatasi beberapa isu struktural yang berpotensi konflik, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam beberapa hal kapasitas lembaga, terutama lembaga-lembaga pemerintah, menjadi sangat strategis. Misalnya, dalam pengimplementasian *policing* yang tepat waktu dan efektif agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap menurunnya kekerasan dalam jangka waktu yang lama (Weidmann & Salehy, 2010). Kapasitas pemerintah dapat diperluas ke dalam tiga cakupan, yaitu kapasitas militer, kapasitas birokratis-administratif, serta koherensi dan kualitas kelembagaan politik (Hendrix, 2010). Dengan demikian, kapasitas lembaga-lembaga pemerintah terkait penanganan konflik harus ditingkatkan, terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Kedua, kapasitas sektor swasta berfokus pada kemampuan mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal. Salah satunya adalah kemungkinan sektor swasta mendanai kegiatan yang bertujuan memajukan keberagaman, toleransi, dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, kapasitas komunitas masyarakat berfokus pada kegiatan penyelenggaraan dialog-dialog seperti forum warga, forum masyarakat adat, atau forum lintas agama sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga perdamaian.¹¹ Kapasitas lembaga masyarakat juga memuat kemampuan pihak terkait dalam mengeksplorasi penggunaan mekanisme penyelesaian konflik pada level lokal dan nasional (Komnas HAM, 2008; Diprose, 2009; Delima, 2013). Partisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut dapat dilihat misalnya dalam keterlibatan lembaga-lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan forum masyarakat. Efendi (2013) menyatakan bahwa

11 Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS).

untuk kasus masyarakat di daerah pascakonflik seperti Ambon, keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dan tata kelola yang kolaboratif (*collaborative governance*) dapat dimanfaatkan untuk membangun perdamaian.

Selanjutnya, sebagai salah satu bagian utama dari upaya pencegahan konflik, peringatan dini menjadi langkah awal yang penting agar pihak berwenang dapat mengetahui terlebih dahulu munculnya ancaman terhadap perdamaian (Dorn, 2008). Peringatan dini sendiri didefinisikan sebagai tindakan memperingatkan pihak berwenang tentang ancaman baru atau diperbarui terhadap perdamaian pada tahap yang awal sehingga pihak berwenang tersebut dapat melakukan tindakan pencegahan (Dorn, 2008). Dalam hal ini, ada tiga komponen yang harus dilihat dalam peringatan dini (Woocher dalam Wulf & Debiel, 2009), yaitu:

- a. Perkiraan tingkat dan waktu risiko ancaman yang muncul.
- b. Analisis karakteristik ancaman dan skenario penanganan yang dapat diterima.
- c. Pengomunikasian analisis peringatan kepada pengambil keputusan (koordinasi).

Beberapa studi juga melihat hubungan antara peran pencegahan konflik kekerasan dengan intervensi, misalnya pengalaman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam pencegahan konflik kekerasan (Dorn, 2008, p. 1). Selain itu, terdapat beberapa studi lain tentang peran lembaga seperti PBB dalam menyiapkan diri untuk merespons konflik (Zenko & Friedman, 2011); tindakan Uni Eropa dalam menyiapkan cetak biru upaya pencegahan dan penanganan konflik (European Commission, 2013); pentingnya sistem peringatan dini yang mencakup indikator politik, sosial, militer, dan kemanusiaan di Afrika agar dapat menganalisis pembangunan dan merekomendasikan tindakan yang sesuai (Nathan, 2009).

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mengupayakan sistem peringatan dini adalah manajemen data. Belajar dari pengalaman PBB, Zenko dan Friedman (2011), misalnya, menyatakan ada banyak data peringatan dini yang harus dianalisis oleh lembaga terkait. Data tersebut dapat diproduksi secara periodik, baik harian, mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Dengan pengolahan data yang konsisten dan berkelanjutan, upaya-upaya peringatan dini dapat lebih mudah direncanakan. Dalam konteks ini, sistem peringatan dini sendiri dapat berarti segala inisiatif tindakan yang berfokus pada pengumpulan data yang sistematis, analisis, dan/atau formulasi rekomendasi, termasuk kegiatan menilai risiko dan berbagi informasi (Whittall, 2010). Oleh karenanya, pengolahan data menjadi bagian penting dari penelitian ini, terutama terkait kapasitas lembaga-lembaga penanganan konflik dalam mengelola data tentang konflik untuk upaya pencegahan.

Lebih jauh Wulf dan Debiel (2009) menyimpulkan bahwa ada tiga jenis pencegahan, yaitu:

1. Pencegahan operasional, merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dengan memanfaatkan cara-cara politik atau militer untuk mencegah konflik dan mende eskalasi konflik.
2. Pencegahan struktural, merupakan upaya-upaya melalui perangkat pembangunan atau ekonomi untuk mengatasi akar penyebab konflik. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan memperbaiki kerangka peraturan.
3. Pencegahan sistemik, merupakan upaya pengurangan konflik berbasis global dan berada di luar mekanisme yang berfokus pada kondisi tertentu.

Menurut Wulf dan Debiel (2009), pencegahan struktural dan sistemik menargetkan pada penyebab-penyebab utama konflik dengan perspektif jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, kedua jenis pencegahan ini tidak sesuai untuk menangani permasalahan yang memerlukan tindakan dini. Sementara itu, pencegahan operasional berfokus pada upaya-upaya untuk melokalisir atau mende eskalasi konflik kekerasan dengan menggunakan beberapa tindakan seperti sanksi atau insentif ekonomi dan kekuatan militer (Campbell & Meier dalam Wulf & Debiel, 2009).

1.3. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas metodologi penelitian. Pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data, pemilihan daerah penelitian, serta strategi sampling.

1.3.1. Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dihadirkan lebih memerlukan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan sisi kedalaman (*depth*) daripada pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan sisi keluasan (*width*). Di samping itu, pendekatan kualitatif dianggap sangat cocok untuk mengeksplorasi secara intensif isu yang kompleks (lihat Denzin & Lincoln, 2005; Marshal & Rossman, 1989; Creswell, 1994; Kvale, 1996; Charmaz, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009), termasuk isu yang berkenaan dengan penanganan konflik.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengikuti dua tipologi riset kualitatif evaluatif, yaitu evaluasi summatif dan evaluasi formatif (Patton, 2002). Tipologi pertama berupaya menentukan efektivitas dari sebuah intervensi, misalnya aspek-aspek program, kebijakan, personalia, dan produk, dengan berfokus pada tujuan dari intervensi. Sementara itu, tipologi kedua berupaya

memberikan masukan demi perbaikan intervensi tersebut dengan berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan dari aspek-aspek yang telah disebutkan.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer pada prinsipnya dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Khusus untuk data primer, wawancara dilakukan guna membangun hubungan dan pengertian dengan para responden sehingga dapat berfokus pada pengungkapan perspektif mereka sendiri atas apa yang mereka alami (Denzin, 2001; Wiseman & Aaron, 2001; Beale, Cole, Hillege, McMaster, & Nagy, 2004; Patton, 2002). Data wawancara akan ditranskripsi sesuai dengan format yang ada di Lampiran 4 "Form Interview Transcript." Penelitian ini mengadopsi beberapa rekomendasi dari Kumar (1989), terutama berkenaan dengan pembangunan kerangka konseptual, penyiapan panduan wawancara, dan pemilihan informan kunci. Di samping itu, aspek validitas dan reliabilitas juga dipertimbangkan dalam membangun pertanyaan wawancara agar dapat menangkap esensi dari fokus dan tujuan penelitian (Best & Kahn, 1998). Dengan demikian, berdasarkan situasi dan karakteristik informan, maka wawancara dapat mengambil bentuk wawancara percakapan informal, wawancara dengan panduan pertanyaan umum, dan wawancara terbuka terstandar (Patton, 2002). Panduan pertanyaan umum untuk wawancara dapat dilihat di Lampiran 1.

Penelitian ini juga menggunakan *focus group discussion* (FGD) dalam pengumpulan data. FGD merupakan wawancara terbuka (*open-ended*) dengan sekelompok informan (berjumlah lima sampai delapan orang) di mana para informan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan masukan atas permasalahan terfokus yang diberikan oleh peneliti (Patton, 2002). Menurut Kumar (1987), FGD berguna dalam pengumpulan data untuk tujuan *assessment* sebuah inovasi, *monitoring* dan *evaluating*, serta menginterpretasi data kuantitatif yang tersedia. Mengingat salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi, maka FGD dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pengumpulan data dengan protokol seperti dijelaskan di Lampiran 6.

Terakhir, data sekunder digali dari berbagai sumber, termasuk dokumen, laporan, publikasi akademis, majalah, dan surat kabar baik cetak maupun *online*, yang merupakan sumber data penting dalam berbagai bidang penelitian (Best & Kahn, 1998). Data sekunder dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara, FGD, dan wawancara kelompok. Data sekunder dapat menjadi tambahan informasi dalam memformulasikan pertanyaan serta membuka jalan bagi upaya-upaya penambahan data (Patton, 2002). Lebih jauh, Altheide (2000) mengemukakan bahwa analisis dokumen ditujukan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan maksud

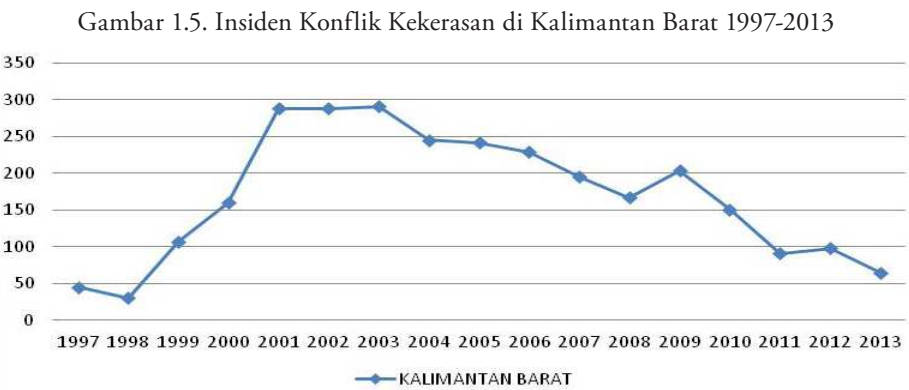
mencari arti, pola, dan proses dari kejadian tersebut. Di samping itu, analisis dokumen juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mungkin merupakan penyebab terjadinya suatu fenomena, tindakan, atau peristiwa (Best & Kahn, 1998).

1.3.2. Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasan pemilihan kedua provinsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

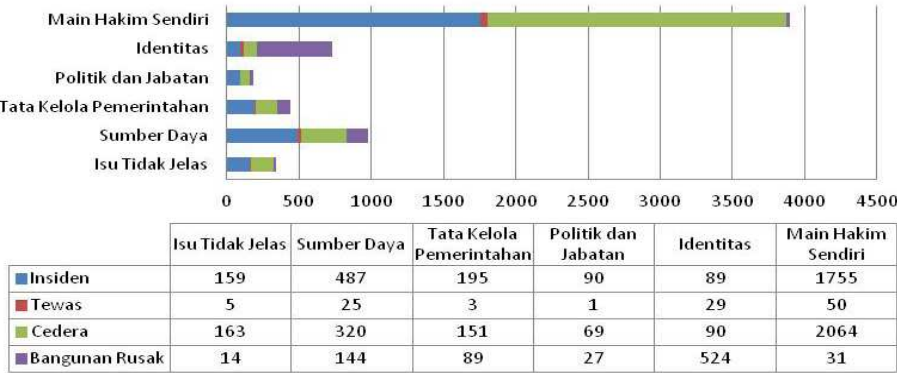
Pertama, tim peneliti menganggap bahwa Kalbar mewakili daerah dengan sejarah konflik berkepanjangan (*extended violence*), sedangkan NTB mewakili daerah dengan karakter kekerasan episodik. Dari aspek historis, di Provinsi Kalbar pernah terjadi konflik besar di akhir 1990-an dan awal 2000-an. Di samping itu, menurut Alqadri (2013), dibanding dengan daerah lain di Indonesia, khususnya empat provinsi lain di Kalimantan, Kalbar memiliki potensi konflik kekerasan terbesar. Sementara itu, meskipun bukan merupakan daerah pascakonflik, NTB memiliki kekerasan sporadis yang terjadi secara konsisten dan cenderung meningkat (lihat Gambar 1.7). Dengan demikian, kedua provinsi ini menjadi wilayah studi kasus yang tepat mewakili wilayah pascakekerasan berkepanjangan dan wilayah dengan kekerasan episodik.

Kedua, secara umum kedua provinsi tersebut memiliki kecenderungan yang bertolak belakang dalam tren kekerasan sampai 2013, di mana Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun, sedangkan NTB cenderung meningkat (lihat **Gambar 1.5**). Secara khusus, tren kekerasan berdasarkan data SNPK di Kalbar dapat dilihat pada gambar berikut:



Untuk jenis konfliknya sendiri, data SNPK menggambarkan jumlah insiden dan dampaknya sebagai berikut:

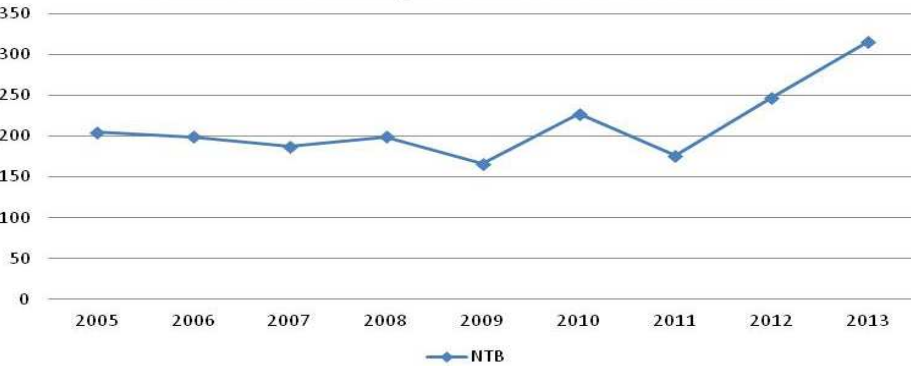
Gambar 1.6. Insiden dan Dampak Konflik Kekerasan di Kalimantan Barat Periode 1999-2013



Gambar 1.6 menunjukkan bahwa konflik kekerasan di Provinsi Kalbar sangat didominasi oleh main hakim sendiri dengan jumlah insiden 1.755. Data SNPK juga menyebutkan tiga daerah dengan kekerasan tertinggi di Provinsi Kalbar adalah Kota Pontianak (1.411 insiden), Kabupaten Pontianak (529 insiden), dan Kabupaten Kubu Raya (264 insiden).

Adapun untuk Provinsi NTB, data SNPK menunjukkan adanya tren peningkatan seperti diilustrasikan dalam gambar berikut (**Gambar 1.7**):

Gambar 1.7. Insiden Konflik Kekerasan di NTB 2005-2013

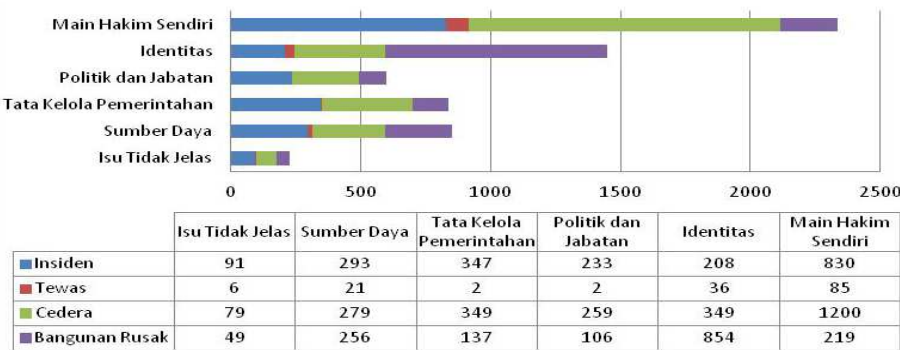


Untuk jenis konfliknya sendiri, data SNPK menggambarkan jumlah insiden dan dampaknya pada Gambar 1.8. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa konflik kekerasan didominasi oleh main hakim sendiri dengan jumlah 830 insiden. Menurut data SNPK, tiga daerah dengan kekerasan tertinggi di Provinsi NTB adalah Kabupaten Bima (310 insiden), Lombok Tengah (282 insiden), dan Kota Bima (267 insiden).

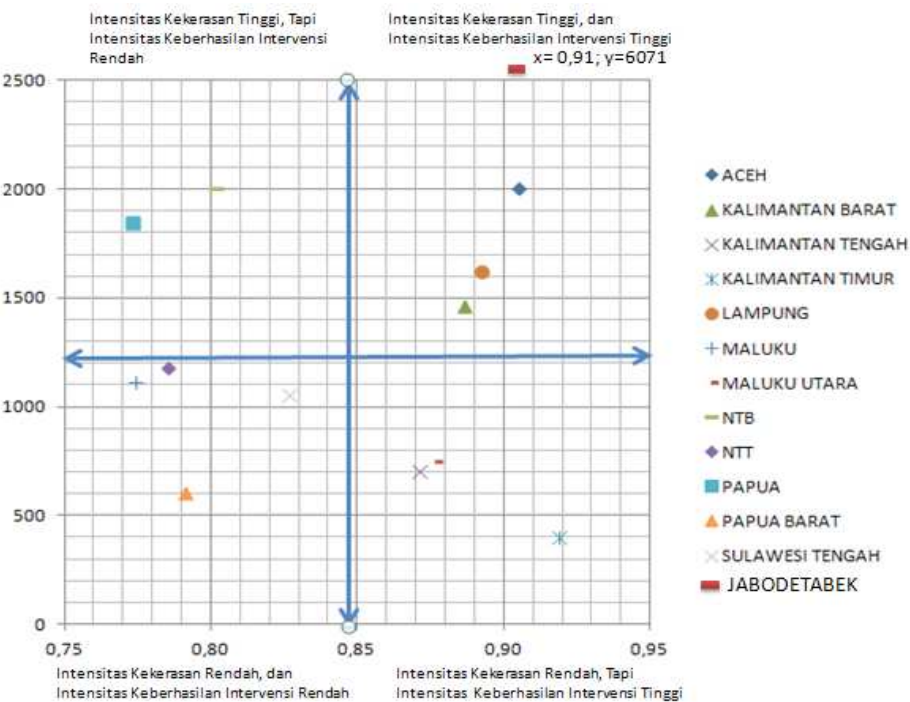
Ketiga, dari segi tindakan intervensi, data SNPK menunjukkan bahwa kedua provinsi memiliki intensitas kekerasan yang tinggi, namun berbeda dalam tingkat keberhasilan intervensi (**Gambar 1.9**). Temuan ini menggambarkan

bagaimana aspek kelembagaan dengan pendekatan keamanan berperan dalam mende eskalasi konflik, terutama bila dikaitkan dengan sinyalemen World Bank (2011) tentang kelemahan institusional dalam menangani konflik. Hal ini menggarisbawahi bagian pertama dari pendapat Wulf and Debiel (2009) tentang tiga jenis pencegahan, yaitu pencegahan operasional, yang bersifat jangka pendek dengan memakai cara-cara politik atau militer untuk mence-
gah dan mende eskalasi konflik.

Gambar 1.8. Insiden dan Dampak Konflik Kekerasan di NTB Periode 2005-2013



Gambar 1.9. Diagram Pencar Intensitas Insiden Konflik Kekerasan dan Intensitas Keberhasilan Intervensi



Keterangan Aksis: X=Intensitas Keberhasilan Intervensi;
Y=Intensitas Insiden Konflik Kekerasan

Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, Tim SNP-K-THC menganggap bahwa kedua daerah itu layak menjadi lokasi penelitian studi tematik mengenai kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, daerah penelitian meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas. Sementara itu, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah penelitian meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa, yang mencakup seluruh kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Lombok Utara.

1.3.3. Strategi Sampling

Untuk mendapatkan dan menentukan para informan, strategi sampling yang digunakan adalah *purposeful sampling* dengan penekanan pada *critical case sampling*. Hal ini diperlukan karena di dalam studi ini ada upaya evaluasi yang memerlukan pembatasan pada lokasi penelitian yang dapat menghasilkan informasi terbanyak dan memiliki pengaruh terbesar dalam upaya pembangunan pengetahuan atas kasus yang diteliti (Patton, 2002). Informan kunci (*key informant*) sendiri diambil dari perwakilan unsur-unsur yang dianggap berhubungan dengan topik penelitian. Secara umum, informan kunci untuk penelitian ini diambil dari dua unsur menurut UU PKS Pasal 47 dan 48, yaitu pihak pemerintah daerah dan pihak masyarakat. Calon informan kunci dari pihak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

1. Bupati/wali kota;
2. Ketua DPRD kabupaten/kota;
3. Instansi pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
4. Kepala kepolisian resor;
5. Komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan
6. Kepala kejaksaan negeri.

Adapun unsur masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), terdiri atas:

1. Tokoh agama;
2. Tokoh adat;
3. Tokoh masyarakat;
4. Penggiat perdamaian; dan
5. Wakil pihak yang berkonflik (untuk daerah pascakonflik).

Untuk tingkat provinsi, calon informan kunci dari unsur pemerintah daerah terdiri atas:

1. Gubernur; ketua DPRD provinsi; instansi pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; kepala kepolisian daerah;
2. Panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
3. Kepala kejaksaan tinggi; dan

4. Unsur pemerintah daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Adapun calon informan kunci dari unsur masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen), terdiri atas:

1. Tokoh agama;
2. Tokoh adat;
3. Tokoh masyarakat;
4. Penggiat perdamaian; dan
5. Wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Secara khusus, informan kunci akan diseleksi berdasarkan keterwakilan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dengan mendasarkan pada kebutuhan data yang tertera dalam tiap-tiap pertanyaan penelitian. Pertanyaan wawancara dapat dilihat di Lampiran 1, sementara indikator evaluasi dapat dilihat di Lampiran 2. Pengumpulan data wawancara dan dokumen di masing-masing provinsi dilakukan dalam dua tahap. Untuk Kalimantan Barat pengumpulan data tahap pertama dilakukan pada 21-29 September 2014 dan tahap kedua pada 8-11 Februari 2015 dengan narasumber secara keseluruhan berjumlah 45 orang. Untuk Nusa Tenggara Barat pengumpulan data tahap pertama dilakukan pada 20-27 Oktober 2014 dan tahap kedua pada 8-11 Februari 2015 dengan narasumber secara keseluruhan berjumlah 33 orang.¹²

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bagian selanjutnya dari buku ini berisi pembahasan atas hasil penelitian. Bab II akan membahas tentang gambaran umum daerah penelitian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Bab III akan membahas tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan strategi pencegahan konflik di Kalimantan Barat. Bab IV berisi pembahasan tentang peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat dan strategi pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat. Bab V merupakan bagian refleksi Tim SNPK-THC atas peran lembaga dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Terakhir, Bab VI berisi simpulan dan rekomendasi.

12 Sebagai tambahan, data dari penelitian yang dilakukan pada 3-6 Februari 2014 di Lombok Tengah untuk keperluan penulisan Catatan Kebijakan The Habibie Center edisi 06/6 Maret 2014 tentang konflik antarkelompok di Indonesia juga dimasukkan sebagai data tambahan. Dalam studi periode 3-6 Februari 2014 ini narasumber wawancara berjumlah 11 orang. Apabila digabungkan, maka jumlah total narasumber untuk Nusa Tenggara Barat adalah 44 orang.

Gambaran Umum Daerah Penelitian

PENELITIAN INI BERFOKUS pada peran lembaga di dua provinsi yang berbeda secara geografis maupun demografis, yakni Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bentuk konflik dan dinamika yang terjadi di kedua wilayah tersebut juga berbeda. Oleh sebab itu, sebelum membahas peran lembaga di kedua provinsi, Tim Peneliti SNPK-THC akan menggambarkan dan menjelaskan secara detail perbedaan-perbedaan yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menggambarkan konteks penelitian ini sehingga memudahkan pembaca memahaminya.

Sebagai pengantar, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya berada di daratan Pulau Kalimantan, sedangkan Nusa Tenggara Barat didominasi oleh dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap eskalasi konflik di kedua wilayah. Sebagai contoh, ketika konflik terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, konflik dengan cepat meluas ke wilayah sekitarnya. Sementara itu, konflik yang terjadi di NTB lebih bersifat lokal dalam satu pulau dan tidak meluas ke wilayah pulau lainnya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan pemekaran daerah. Pemekaran di kedua wilayah ini juga dipahami agar pembaca dapat memahami potensi konflik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, misalnya pergeseran tren dari konflik identitas menjadi konflik sumber daya alam dan lahan.

Lebih lanjut, pemahaman atas situasi kependudukan di kedua provinsi juga harus dibangun sebelum masuk ke inti pembahasan penelitian ini. Persentase penduduk, heterogenitas etnis, dan dinamika hubungan antarkelompok yang berbeda menyebabkan kondisi konflik di kedua wilayah memiliki sisi uniknya masing-masing dan berbeda satu sama lain. Kedua provinsi juga sama-sama memiliki pengalaman konflik individu yang kemudian bereskalasi menjadi konflik antarkelompok, tetapi bentuk konflik tersebut berbeda. Konflik di Kalimantan Barat sering berpusat di ranah etnis dan dinamika hubungan antaretnis,¹ sedangkan konflik di NTB lebih berpusat pada identitas geografis,

1 Menurut peneliti Kalimantan Barat, Syarif Ibrahim Al Qadrie, konflik di Kalimantan Barat melibatkan kelompok etnis (bukan etnis secara umum). Hal ini dapat dilihat dari penyebaran konflik yang tidak terjadi di semua kabupaten/kota. Misalnya, konflik kelompok etnis di Kabupaten Sambas yang melibatkan kelompok etnis Melayu, Dayak, dan Madura, tidak terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, dan lainnya.

seperti kampung, desa, dan lain-lain. Dengan demikian, pembahasan tentang sejarah dan potensi konflik menjadi relevan dalam memberikan gambaran umum tentang situasi konflik di kedua provinsi.

Selanjutnya, aspek lain yang perlu dicermati adalah dinamika kelembagaan, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini penting dilakukan karena eskalasi dan upaya deeskalasi konflik tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan deskripsi di atas, bab ini akan membahas *kondisi geografis dan demografis, sejarah dan potensi konflik*, serta *dinamika kelembagaan* dari masing-masing provinsi.

2.1 KALIMANTAN BARAT

2.1.1. Kondisi Geografis Kalimantan Barat

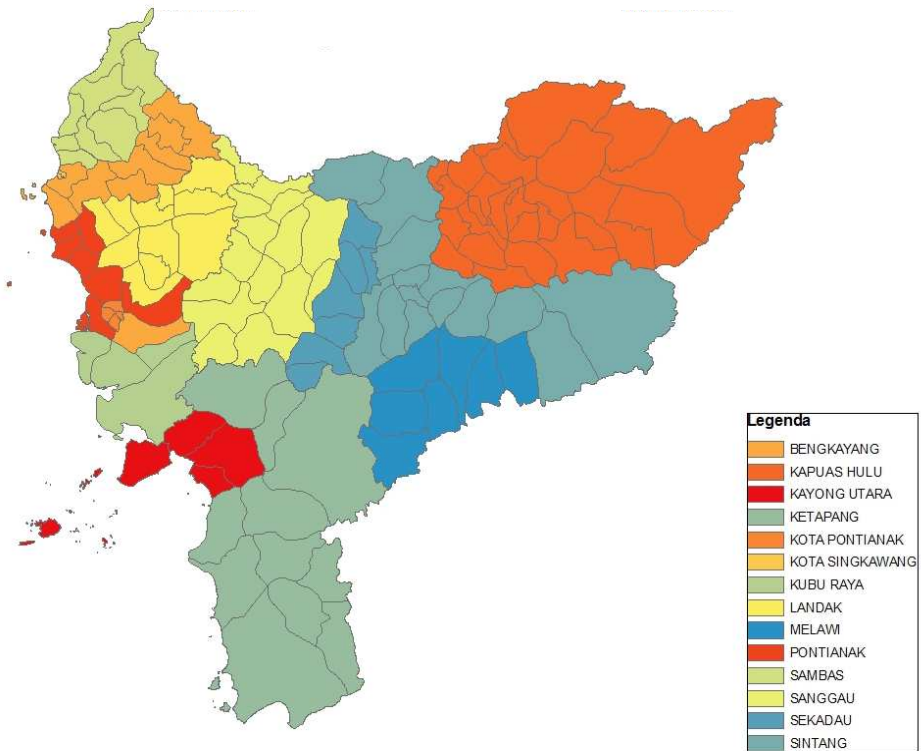
Provinsi Kalimantan Barat terletak di Pulau Kalimantan, dengan letak astronomis antara 2°08' LU dan 3°02' LS serta antara 108°30' BT dan 114°10' BT. Letak astronomis ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya di atas Kota Pontianak (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014, p. 3). Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Dengan luas tersebut, Kalimantan Barat merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah di sebelah selatan dan provinsi Kalimantan Timur di sebelah timur. Provinsi ini juga merupakan provinsi yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara lain, yaitu Malaysia. Selain memiliki perbatasan darat dengan wilayah lain, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan serta Laut Natuna dan Selat Karimata di sebelah barat.

Provinsi yang beribu kota Pontianak ini dibagi menjadi 14 wilayah administratif tingkat II (**Gambar 2.1**) dengan tiga wilayah terbesar yaitu Kabupaten Ketapang (31.240,74 km² atau 21,28%), Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33%), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74%) (**Gambar 2.2**). Pembagian wilayah administratif tingkat II yang ada saat ini merupakan buah dari otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2011. Pada kurun waktu tersebut, jumlah kabupaten/kota bertambah tujuh wilayah. Ketujuh wilayah administratif tingkat II yang merupakan hasil pemekaran ini adalah:

1. Kabupaten Bengkayang, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sambas pada tahun 1999;
2. Kabupaten Landak, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 1999;

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kalimantan Barat



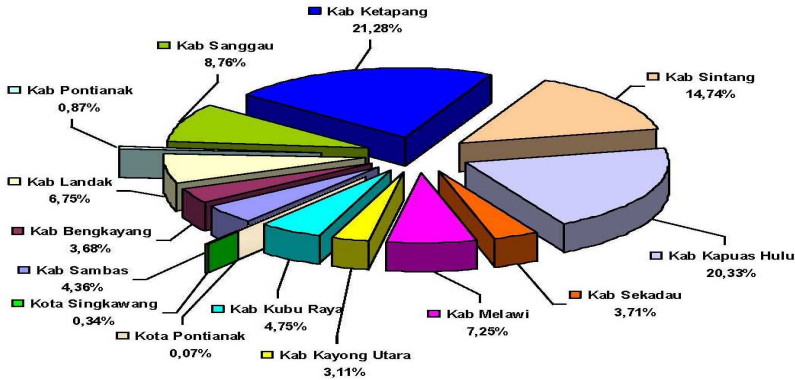
3. Kota Singkawang, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkayang pada tahun 2001;
4. Kabupaten Melawi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang pada tahun 2003;
5. Kabupaten Sekadau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sanggau pada tahun 2003;
6. Kabupaten Kayong Utara, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007; dan
7. Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2007.

Dalam penelitian ini, studi kasus Kalimantan Barat berfokus pada wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah,² dan Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Sambas dipilih karena merupakan wilayah yang pernah mengalami konflik komunal. Kota Pontianak merupakan wilayah yang terkena dampak besar dari konflik di wilayah Sambas. Adapun Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Ambawang) dan Kabupaten Mempawah (Sungai Pinyuh) dipilih karena tidak terkena dampak

² Sebelumnya disebut Kabupaten Pontianak.

besar dari konflik tersebut. Khusus untuk Kabupaten Sambas, diskusi tentang sejarah konflik akan merujuk pada wilayah prapemekaran, sedangkan potensi konflik akan berfokus pada wilayah pascapemekaran, yaitu Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (*Kalimantan Barat dalam Angka, 2014*)



Seperti yang telah disebutkan di atas, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999. Pemekaran ini merupakan yang pertama pasca-Reformasi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas pemberian wewenang kepada daerah untuk melakukan otonomi daerah (Percik, 2007, p.3). Pemekaran Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang ditetapkan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999. Penetapan ini dilakukan pascakonflik komunal yang terjadi.

Setelah Kabupaten Bengkayang berdiri, pemekaran terhadap wilayah ini juga terjadi. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001, terbitlah UU No. 12 Tahun 2001 yang mengesahkan terbentuknya daerah administratif baru di Kalimantan Barat, yaitu Kota Singkawang. Kota ini memiliki luas wilayah 504,00 km² (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014, p. 9). Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah timur dan selatan, Laut Natuna di sebelah barat, dan Kabupaten Sambas di utara.

2.1.2. Kondisi Demografis Kalimantan Barat

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kalimantan Barat per 2013 adalah 4.641.393 jiwa, di mana sekitar 2.366.292 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.275.101 jiwa perempuan (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014, p. 9). Jumlah ini meningkat dari sensus pada tahun 2010 yang menyebutkan

jumlah penduduk Kalimantan Barat sebanyak 4.395.983 jiwa (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014, p. 9).

Persebaran penduduk di Kalimantan Barat tidak merata. Separuh dari total jumlah penduduk provinsi ini mendiami daerah pesisir, yang mencakup Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang, dengan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 38 jiwa per kilometer persegi. Wilayah lainnya, kecuali Kota Pontianak, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih jarang. Jumlah penduduk daerah-daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: Kabupaten Sambas 505.444 jiwa, Kota Singkawang 194.743 jiwa, Kabupaten Kubu Raya 529.320 jiwa, Kabupaten Mempawah 245.924 jiwa, dan Kota Pontianak 587.169 jiwa (Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, 2013).

Wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sedikit menjadikan Kalimantan Barat pada khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya, sebagai tujuan utama program transmigrasi baik yang diadakan oleh pemerintah maupun mandiri (Braithwaite, 2010, p. 296). Sebenarnya, transmigrasi ke Pulau Kalimantan sendiri telah dimulai jauh pada masa prakemerdekaan, tepatnya di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi ini merupakan warga dari Pulau Jawa dan Madura. Akan tetapi, Nooteboom dan White (2009) menyebutkan bahwa perpindahan warga Madura ke Kalimantan lebih dikarenakan keinginan mereka sendiri. Sampai tahun 2006, wilayah dengan jumlah masyarakat Madura terbanyak adalah Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang), serta Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang (Hubb & Nooteboom, 2006, p. 459).

Sebelum warga Madura bertransmigrasi ke wilayah Kalimantan Barat, komposisi etnis di provinsi ini didominasi oleh etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Pascatransmigrasi, Kalimantan Barat merupakan wilayah yang lebih heterogen dengan etnis-etnis besar meliputi Dayak, Melayu, Madura, Tionghoa, dan Bugis. Komposisi etnis di Kalimantan Barat per tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut.³

Tabel 2.1. Jumlah Suku yang ada di Kalimantan Barat

No	Etnis	Persentase	Jumlah
1.	Melayu	33,75	1.259.890
2.	Dayak	33,75	1.259.802

3 Permintaan Tim Peneliti SNPK-THC atas data terkini tentang jumlah etnis dan persebarannya pascakonflik komunal tidak dikabulkan oleh pihak-pihak terkait. Alasan penolakan adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Barat karena di beberapa wilayah isu etnis masih dianggap sensitif. Oleh karena itu, tim peneliti tidak dapat menemukan data terbaru dan hanya bisa menggunakan data yang tersedia untuk tahun 2003.

No	Etnis	Persentase	Jumlah
3.	Tionghoa	10,01	373.690
4.	Jawa	9,41	351.690
5.	Madura	5,51	205.550
6.	Bugis	3,20	123.000
7.	Sunda	1,21	45.090
8.	Banjar	0,66	24.756
9.	Batak	0,56	20.824
10.	Lainnya	1,85	69.194

Sumber: Biro Pusat Statistik (dalam Bamba, 2008, p. 24)

Etnis-etnis ini menyebar di Kalimantan Barat dengan konsentrasi etnis tertentu di beberapa wilayah, misalnya etnis Melayu di Sambas dan Dayak di Bengkayang. Persebaran etnis di Kalimantan Barat mengalami perubahan di beberapa wilayah pascakonflik komunal. Sebagai contoh, wilayah Kabupaten Sambas sebelum konflik merupakan salah satu wilayah dengan jumlah etnis Madura terbesar. Pascakonflik jumlah etnis Madura di sana berkurang drastis. Hal ini terjadi karena pengungsian besar-besaran etnis Madura ke daerah-daerah di luar Sambas pada saat konflik. Pascakonflik, mereka masih belum diizinkan untuk kembali tinggal di Sambas. Walaupun demikian, di wilayah Sei Kelambu beberapa keluarga Madura masih dapat bertahan, padahal ketika konflik terjadi wilayah tersebut berjarak hanya beberapa kilometer dari Kota Tebas yang merupakan pusat konflik (Hendry, 2013, p. 193). Tidak diketahui pasti jumlah masyarakat Madura di Sambas saat ini, tetapi masyarakat Madura yang masih tinggal di Sambas hanya mereka yang pada saat prakonflik telah berasimilasi dengan warga Melayu setempat.⁴

Etnis besar di Kalimantan Barat lainnya adalah Etnis Dayak. Etnis ini tersebar di semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki subsuku yang beragam. Menurut penelitian yang diadakan oleh Institut Dayakologi, jumlah subsuku Dayak sebanyak 151 subsuku. Pembagian subsuku ini mengacu pada aspek bahasa, adat-istiadat, dan budaya materi (Bamba, 2008, p. 26). Walaupun demikian, ada hubungan yang dekat antara satu subsuku dengan subsuku lainnya. Sejak zaman kolonial, masyarakat telah melakukan generalisasi dengan menyebut seluruh subsuku tersebut sebagai satu kelompok besar, yaitu suku Dayak. Begitu pula dengan penerapan hukum dan adat-istiadatnya. Padahal, setiap subsuku memiliki hukum adat dan tradisi yang berbeda.

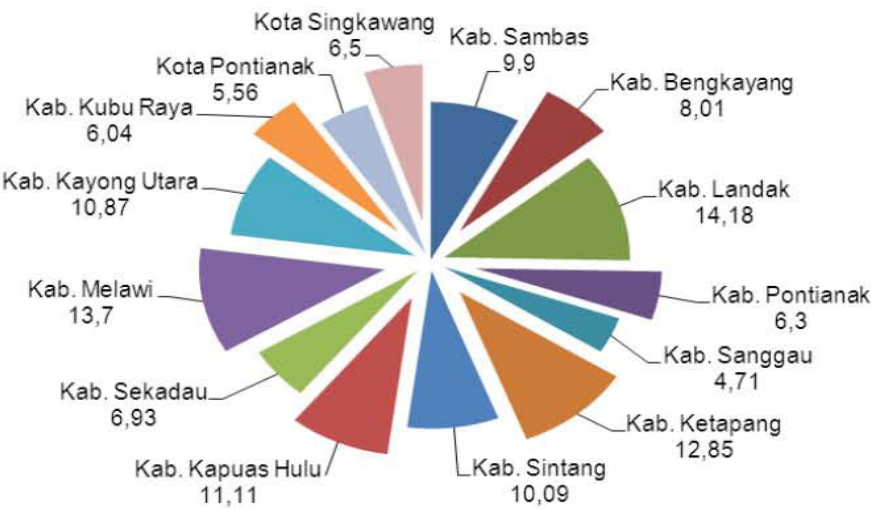
Selain etnis Madura dan Dayak, komposisi etnis di Kalimantan Barat juga didominasi oleh etnis Melayu yang dibagi menjadi dua, yaitu Melayu migran dan Melayu lokal atau Melayu pribumi. Melayu migran merupakan masyarakat Melayu yang datang dari berbagai wilayah di Sumatera, Kepu-

⁴ Tokoh masyarakat Sambas, FGD 8 Februari 2015.

lauan Riau, Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur (Serawak dan Sabah), dan Brunei Darussalam. Adapun Melayu pribumi merupakan mereka yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat Dayak (Ahyat, 2014, p.1). Ada istilah yang dinamakan *turun Melayu* untuk menyebut warga etnis Dayak yang memeluk agama Islam.⁵

Dari sisi keragaman agama, jumlah agama dengan pemeluk terbanyak di Kalimantan Barat per 2014 adalah Islam (3.131.046 jiwa), diikuti oleh Katolik (1.195.764 jiwa), Kristen (604.106 jiwa), Budha (359.303 jiwa), Konghucu (12.014 jiwa), Kepercayaan (7.444 jiwa), dan Hindu (3.655 jiwa).⁶ Masyarakat beragama Islam di Kalimantan Barat didominasi oleh Madura dan Melayu. Adapun Katolik didominasi oleh Dayak.⁷

Gambar 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2013 (*Kalimantan Barat dalam Angka*, 2014)



Dari segi ekonomi, pertumbuhan sektor ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. PDRB Kalimantan Barat tahun 2013 mencapai Rp 84,96 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 66,92 triliun pada 2011 dan Rp 74,97 triliun pada 2012. PDRB Kalimantan Barat dihasilkan oleh berbagai unit produksi,

5 Menurut Abror (2003) yang dikutip oleh Ibrahim, beberapa tahun terakhir definisi "masuk Melayu" telah bergeser. Seorang Dayak yang masuk Islam tidak lagi secara otomatis melepaskan identitas kesukuannya dan menjadi Melayu. Bahkan saat ini kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang masuk Islam tidak disebut "masuk Melayu" tetapi disebut "Dayak Islam". Fenomena munculnya Ikatan Keluarga Dayak Islam pada tahun 2000 merupakan indikasi bahwa anggapan masuk Islam otomatis masuk Melayu tidak selamanya bisa diterima.

6 <http://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik.html> diakses pada 25 Maret 2015.

7 Tidak diketahui dengan pasti jumlah komposisi pemeluk agama di tiap daerah di Kalimantan Barat. Hal ini masih terkait dengan persebaran dan komposisi etnis yang dirahasiakan pasca-konflik komunal.

di mana kontribusi terbesar adalah dari sektor pertanian (23,08%), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (22,34%), serta sektor industri pengolahan (16,27%) (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014, p. 389). Kabupaten/kota dengan jumlah PDRB terbesar adalah Kota Pontianak, yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, dan Kabupaten Kubu Raya. Meningkatnya PDRB tersebut seiring dengan menurunnya jumlah kemiskinan di provinsi ini. Per 2013, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 65.096 jiwa dengan tingkat penurunan sebesar 0,78% dari tahun 2012. Adapun jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di atas (**Gambar 2.3**).

2.1.3. Sejarah dan Potensi Konflik di Kalimantan Barat

Dinamika sosial politik yang terjadi di Kalimantan Barat saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik masa lalu. Konflik yang terjadi merupakan bagian dari dinamika di antara empat kelompok etnis yang tinggal di Kalimantan Barat, yaitu Dayak, Melayu, Madura, dan Tionghoa. Faktor geografis dan demografis yang membentuk hubungan antarkelompok etnis tidak bisa dikesampingkan apabila kita ingin melihat dinamika sejarah konflik di provinsi ini.

Potensi konflik di Kalimantan Barat sudah berakar sejak lama dan tidak dipicu atau disebabkan oleh faktor tunggal. Heterogenitas etnis, agama, ekonomi, politik, dan permasalahan sosial lainnya merupakan akar konflik di provinsi ini. Selama kurun waktu Orde Baru hingga Reformasi, terjadi banyak konflik di Kalimantan Barat. Tidak hanya konflik-konflik kecil, tapi juga konflik-konflik besar yang eskalasinya membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dari sekian banyak konflik yang terjadi, setidaknya, dalam jangka waktu tersebut terjadi empat konflik besar yang menimbulkan pergeseran sosial politik di Kalimantan Barat.

2.1.3.1. Konflik Tionghoa–Dayak pada 1967

Konflik besar pertama merupakan konflik antara Tionghoa dan Dayak di Kabupaten Sambas pada tahun 1967. Konflik ini lebih bernuansa politis karena terkait dengan memburuknya hubungan dengan etnis Tionghoa pasca peristiwa G-30S/PKI. Berkembangnya komunisme di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan etnis Tionghoa dalam Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS), yaitu kelompok relawan yang dibentuk untuk membantu pemerintah Indonesia saat konfrontasi dengan Malaysia pada periode 1963 hingga 1965. Akan tetapi, karena kuatnya hubungan mereka dengan jaringan komunis Tionghoa dan Malaysia, serta teror terhadap pemerintah yang mereka buat, PGRS pun menjadi target penumpasan komunis di Kalimantan Barat, selain PKI.

Teror yang dilakukan oleh PGRS di Kalimantan Barat menewaskan seorang tokoh Dayak. Hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan etnis Dayak. Akibatnya, terjadi gerakan perlawanan oleh etnis Dayak. Gerakan ini dinamakan Gerakan Mangkok Merah; bersifat spontan dan melibatkan seluruh etnis Dayak yang telah menerima mangkuk merah (La Ode, 2013, p. 122). Gerakan ini bertujuan untuk melakukan aksi pembersihan terhadap anggota PGRS.

Namun demikian, Gerakan Mangkok Merah yang semula hanya mengincar anggota PGRS, kemudian meluas ke seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah pedalaman. Operasi pembersihan ini menewaskan ratusan, bahkan ribuan orang Tionghoa, dan lebih dari 50.000 lainnya dipaksa meninggalkan wilayah pedalaman yang sekarang dikenal dengan nama Landak dan Bengkayang (Tasanaldy, 2012, p. 209). Tanah beserta harta benda yang mereka tinggalkan kemudian diperebutkan oleh warga Dayak dan Madura. Kedua etnis ini pun berkonflik untuk menguasai lahan tersebut pada periode akhir 1967 hingga 1968 (Davidson dalam Braithwaite et al., 2010, p. 295).

2.1.3.2. Konflik Dayak–Madura pada 1979

Konflik besar yang kedua terjadi antara Dayak dan Madura pada tahun 1979 di Samalantan, Bengkayang. Berawal dari penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Madura terhadap seorang Dayak, konflik ini berkembang menjadi konflik komunal (de Jonge & Nooteboom, 2006, p. 463) yang melibatkan masyarakat dari kedua etnis tersebut. Masyarakat dari sekitar sepuluh desa terlibat dalam konflik yang berlangsung hampir selama satu minggu. Konflik ini menewaskan 20 orang dan menyebabkan 92 rumah habis terbakar (De Jonge & Nooteboom, p. 463). Penghentian konflik ini dilakukan melalui kesepakatan damai antara masyarakat Dayak dan Madura, yang disimbolkan dengan dibangunnya tugu perdamaian di Samalantan. Sayangnya, kesepakatan ini tidak mampu menyelesaikan akar konflik. Pada tahun 1983 dan 1993, sempat terjadi lagi konflik di antara kedua warga etnis tersebut (De Jonge & Nooteboom, p. 463). Walaupun konflik yang terjadi di dua kurun waktu tersebut dapat dibilang kecil, dampak dari konflik tersebut memperburuk hubungan warga Dayak dan Madura.

Hubungan antara warga Dayak dan Madura memang sangat sensitif. Sejak migrasi warga Madura ke Pulau Kalimantan pada periode 1900-an, masyarakat Madura lainnya mulai banyak yang pindah ke pulau ini untuk mencari penghidupan. Masyarakat Madura di Kalimantan Barat, pada awalnya bekerja untuk pemerintah Belanda dengan membuka lahan hutan guna dijadikan perkebunan. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai kuli atau pedagang kecil. Setelah memiliki uang yang cukup, mereka membeli atau menyewa lahan dari orang-orang Dayak atau Melayu untuk ditanami padi, jagung, lada, kelapa,

dan buah-buahan. Lahan yang dimiliki masyarakat Madura di Kalimantan Barat semakin lama semakin meluas seiring dengan meningkatnya tingkat perekonomian mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak dan Melayu. Seiring dengan menguatnya tingkat perekonomian mereka, masyarakat Madura juga mulai terlibat dalam perpolitikan lokal di Kalimantan Barat.

2.1.3.3. Konflik Dayak–Madura pada 1996 hingga 1997

Pada akhir 1996, konflik antara Dayak dan Madura kembali pecah di Bengkayang. Konflik dipicu oleh pertikaian antarpemuda, di mana sekelompok pemuda Madura yang menggoda seorang pemuda Dayak mendapat teguran dari sekelompok pemuda Dayak yang tidak menyukai perbuatan itu. Akan tetapi, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pemuda Madura sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda Dayak. Tiga minggu setelah pertikaian awal tersebut, kelompok pemuda yang bertikai tadi terlibat juga dalam pertikaian lain di sebuah pertunjukan musik yang berlangsung di desa Tanjung, Ledo. Dalam insiden ini, dua orang Dayak terluka.

Provokasi terjadi saat tersebar berita di kalangan masyarakat Dayak bahwa dua orang yang terluka tersebut meninggal dunia, padahal keduanya sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berita tidak benar tentang meninggalnya pemuda Dayak ini kemudian memancing kemarahan masyarakat Dayak. Keesokan paginya, kerumunan massa masyarakat Dayak mendatangi markas kepolisian sektor (Polsek) Ledo untuk menuntut penangkapan atas warga Madura yang melakukan penganiayaan. Sebenarnya, pihak kepolisian telah menangkap pelaku, tetapi mereka tidak mengumumkannya karena khawatir kelompok masyarakat Dayak akan melakukan penyerangan, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap Polsek Ledo. Keputusan ini ternyata berdampak buruk. Pertikaian antarkelompok pemuda tersebut kemudian bereskalasi menjadi konflik antarkelompok etnis Dayak dan Madura. Pada sore harinya, masyarakat Dayak melakukan penyerangan besar-besaran terhadap pemukiman Madura. Mereka membakar beberapa rumah warga Madura dan menyebabkan satu orang terluka.

Penyerangan terjadi selama empat hari dan menhanguskan setidaknya 248 rumah di Sanggau Ledo (*Republika*, 1997).⁸ Etnis Madura setempat pun diungsikan ke Lapangan Udara Singkawang II. Konflik ini kemudian semakin meluas dengan tensi yang memanas. Konflik juga terjadi di Dusun Jirak, Margamulya, Sindu, Simpang Terado, Monterado, hingga ke Kecamatan Samalantan, yang terletak 101 km dari Sanggau Ledo. Akibat insiden tersebut sekitar 1.129 rumah rusak dan 22 orang Madura tewas (*Republika*, 1997).⁹

8 “Sanggau Ledo Rusuh di Kampung Jagung,” dimuat dalam koran *Republika*, Januari 1997.

9 “Sanggau Ledo Rusuh di Kampung Jagung,” dimuat dalam koran *Republika*, Januari 1997.

Untuk menghentikan konflik, aparat keamanan dan pemerintah bersama-sama melakukan upaya deeskalasi. Pada tanggal 2 Januari 1997 Bupati Sambas telah mengeluarkan pengumuman resmi yang berisi imbauan agar masyarakat tidak terpancing isu-isu negatif yang beredar. Masyarakat juga diimbau untuk tidak berkumpul bergerombol dan membawa senjata. Upaya deeskalasi konflik salah satunya dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama di antara kedua kelompok etnis yang bertikai yang dibacakan di depan tugu perdamaian di Samalantan. Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 8 Januari 1997 tersebut memuat pernyataan sebagai berikut (Putra & Djuweng, 1999).

1. Mengutuk dan menyesalkan pelanggaran perjanjian perdamaian yang dimonumenkan di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan dengan terjadinya peristiwa Ledo, Kecamatan Ledo.
2. Bersumpah untuk menaati isi perjanjian perdamaian yang dimonumenkan di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan.
3. Bersumpah untuk memelihara dan membina kerukunan bersama, mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melakukan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, serta tidak menampung pendatang baru yang tidak mempunyai identitas jelas.
4. Menolak budaya/kebiasaan-kebiasaan yang merugikan sesama manusia, antara lain membawa senjata tajam atau senjata dalam bentuk lain.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain kesepakatan, sejumlah upacara adat juga dilakukan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sambas. Tidak hanya di pusat-pusat huru-hara seperti Sanggau Ledo dan Samalantan, tetapi juga di Kecamatan Tujuh Belas, Sungai Raya, Bengkayang, Pemangkat, dan Ledo. Rangkaian upacara tersebut berakhir di titik awal kerusuhan, yaitu Sanggau Ledo dan Ledo, pada 9 Januari 1997 (*Republika*, 13 Januari 1997).¹⁰

Akan tetapi, kesepakatan dan upacara adat yang telah dilakukan ternyata belum mampu meredam ketegangan di antara kedua kelompok etnis. Pembakaran masih terjadi di mana-mana, bahkan menyebar ke luar Samalantan dan Ledo. Pada 29 Januari 1997 terjadi perusakan dan penganiayaan di Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKYPK), Siantan Tengah, Pontianak, yang dilakukan oleh warga Madura. Dua orang wanita Dayak terluka dan bangunan asrama rusak berat. Pada saat yang bersamaan, penyerangan terhadap etnis Dayak juga terjadi di Mempawah. Tiga rumah dibakar. Pada keesokan harinya, 30 Januari 1997, etnis Madura memblokir jalan dan melakukan *sweeping*

10 "Legenda Mangkuk Merah Berembus," dimuat di koran *Republika*, 13 Januari 1997.

di Peniraman, sekitar 32 km dari Pontianak. Lima orang Dayak tewas dalam insiden ini. Penyerangan meluas hingga ke Singkawang dan menewaskan satu warga Dayak, merusak enam rumah, dan menghancurkan satu rumah (Tasanaldy, 2012, p. 212). Tentu saja masyarakat Dayak tidak tinggal diam. Mereka kemudian juga melakukan penutupan jalan Mempawah dan Ngabang, serta menggelar *sweeping* terhadap masyarakat Madura. Selain itu, penyerangan balasan juga terjadi di Landak. Selama kurun waktu Januari hingga awal Februari 1997, total terjadi 23 insiden, menewaskan 666 jiwa, menyebabkan 398 orang luka-luka, dan menghancurkan 2.501 bangunan¹¹

Bereskalasinya konflik disebabkan oleh tidak mengakarnya penyelesaian masalah dan provokasi yang justru dilakukan oleh para tokoh etnis yang bertikai.¹² Perjanjian damai yang dibuat tidak dapat menghentikan konflik karena masih ada hal-hal yang secara adat belum dipenuhi.¹³ Perbedaan kebudayaan di antara kedua etnis tersebut membuat konflik ini semakin rumit untuk diselesaikan. Sementara itu, penanganan hukum masih jauh dari harapan.

Mudahnya konflik bereskalasi menjadi konflik komunal antaretnis tidak hanya disebabkan oleh provokasi, tetapi juga akumulasi dari kesenjangan sosial ekonomi dan stereotip yang ada di antara mereka. Oleh masyarakat Madura, orang-orang etnis Melayu dan Dayak dipandang sebagai pemalas dan bodoh. Sementara itu, oleh masyarakat Dayak dan Melayu masyarakat Madura dipandang sebagai masyarakat yang kasar, angkuh, dan tidak dapat dipercaya (Pelly, 1999, p. 31). Pelabelan buruk satu sama lain juga telah ditanamkan sejak kecil di kedua kelompok masyarakat. Misalnya, untuk melarang anak bermain di tempat gelap, orang Dayak akan menakut-nakuti anaknya dengan mengatakan bahwa orang Madura ada di sana. Mereka menyebut orang Madura *pencoreng*, yaitu orang yang suka mencari anak-anak kecil untuk dimasukkan ke dalam karung dan dijadikan tumbal jembatan.¹⁴ Hal serupa juga terjadi di antara masyarakat Madura dan Melayu, dan diperburuk oleh adanya kecemburuan atas keberhasilan orang Madura secara ekonomi.

Pascakonflik, warga Dayak mengalami kebangkitan identitas etnis sehingga solidaritas dan persatuan di antara mereka menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Posisi Dayak di perpolitikan pun mulai mengalami pergeseran. Mengingat masih besarnya potensi konflik, para anggota DPRD di dua daerah pascakonflik sepakat untuk memilih warga Dayak sebagai kepala daerahnya. Kebangkitan etnis dan kemajuan politik Dayak ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan etnis Melayu. Ketegangan politik di antara kedua etnis pun semakin meningkat walaupun tidak sampai menimbulkan konflik terbuka.

11 Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK).

12 Tokoh organisasi keagamaan, wawancara 22 September 2014.

13 Tokoh organisasi adat, wawancara 23 September 2014.

14 Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat, wawancara 21 September 2014.

2.1.3.4. Konflik Melayu–Madura pada tahun 1999

Konflik besar yang terakhir adalah konflik antara Melayu dan Madura yang terjadi pada tahun 1999. Konflik ini bermula ketika seorang Madura dikeroyok oleh warga Melayu di Parit Setia, Sambas, karena mencuri di rumah salah seorang Melayu pada tanggal 17 Januari 1999. Dua hari kemudian, 19 Januari 1999, terjadi serangan balasan terhadap warga Parit Setia oleh warga desa Rambaian yang terdiri atas etnis Madura. Menurut data SNPK, tiga orang tewas dan dua orang cedera dalam penyerangan ini.

Insiden ini tidak meluas karena terjadi pada perayaan hari raya Idul. Meski demikian, aparat keamanan dan pemerintah langsung meresponsnya. Pada 23 Januari 1999 dilakukan pertemuan di antara para pemimpin etnis dari dua desa yang terlibat pertikaian. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menyerahkan provokator dari kedua belah pihak. Warga Melayu menyerahkan delapan orang yang terlibat dalam pengeroyokan dan Madura menyerahkan satu orang yang melakukan pembunuhan terhadap tiga orang Melayu dalam penyerangan yang terjadi (Akcaya dan Purwata dalam Tanasaldy, 2012, p. 213). Ketegangan di antara kedua etnis dari dua desa tersebut mereda, tetapi mereka tetap waspada akan insiden yang tidak diduga-duga dan tetap melakukan jaga malam.

Pada 21 Februari 1999 pertikaian yang melibatkan warga Madura dan Dayak terjadi di Desa Tebas, Sambas. Seorang warga Madura melakukan penusukan terhadap seorang kernet yang berasal dari etnis Dayak. Hal ini dipicu oleh warga Madura yang tidak mau membayar ongkos angkutan umum sehingga memicu perkelahian di antara mereka. Antipati antaretnis yang masih tinggi menyulut kembali isu etnis yang pernah bergulir sebelumnya. Keesokan harinya, terjadi kerusuhan antara etnis Dayak dengan Madura di Desa Tebas Sungai, Desa Sungai Kelambu, dan Desa Tebas Kuala, Sambas. Tiga orang tewas, tiga rumah dibakar, dan tiga orang luka-luka. Insiden ini meluas ke Sebangau, Semparuk, Kabupaten Pemangkat. Tujuh belas rumah dibakar (Akcaya, Petebang, & Sutrisno dalam Tanasaldy, 2012, p. 213).

Pada 23–24 Februari 1999 pemerintah menginisiasi pertemuan antara pemimpin etnis Dayak, Madura, dan Melayu di Tebas dan Pemangkat. Akan tetapi, pertemuan ini tidak mampu meredakan ketegangan di antara ketiga etnis ini. Penyerangan semakin meluas dan terus terjadi hingga berpuncak pada Maret 1999. Bahkan, warga Melayu yang sebelumnya tidak terlibat dalam pertikaian antaretnis ini ikut serta setelah desa mereka diserang oleh warga Madura (Akcaya, Petebang, & Sutrisno dalam Tanasaldy, 2012, p. 214). Konflik pun semakin meluas. Data SNPK mencatat, terjadi 17 insiden selama bulan Maret. Insiden-insiden tersebut menewaskan 390 orang, melukai 118 orang, dan merusak 1.192 bangunan. Selain itu, insiden ini juga membuat

warga Madura mengungsi secara besar-besaran, hingga semua warga Madura di Sambas harus meninggalkan kabupaten tersebut.

Pasukan militer pun diturunkan untuk mengamankan situasi di Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah terjadinya konflik terbuka. Pasukan TNI dari luar Kalimantan Barat dan Pulau Jawa dikerahkan dengan persenjataan¹⁵ dan diizinkan untuk melakukan penembakan terhadap massa yang tidak mematuhi perintah aparat (Akcaya dalam Tanasaldy, 2012). Suasana di Kalimantan Barat semakin mencekam. Ditambah dengan keikutsertaan Dayak yang merapat ke sisi etnis Melayu. Dalam penelitiannya, Davidson (dalam Braithwaite, 2010, p. 299) mengungkapkan keraguannya bahwa pembersihan etnis yang terjadi merupakan rencana awal etnis Melayu; melainkan insiden ini berkembang setelah momentum pengusiran terjadi.

Aset-aset Madura yang ditinggalkan diambil alih oleh warga Melayu dan Dayak. Tokoh adat Melayu melarang warga Madura kembali ke Sambas. Pelarangan ini masih berlangsung hingga saat ini. Warga Madura yang masih trauma dengan konflik pun enggan kembali ke sana. Seorang narasumber dari etnis Melayu mengatakan bahwa konflik yang terjadi berkaitan dengan penguasaan sumber-sumber perekonomian secara tidak adil.¹⁶ Dari sisi politik, etnis Melayu berharap konflik ini mampu menjadi kebangkitan politik mereka, seperti apa yang terjadi pada etnis Dayak pada tahun 1997 (Davidson dalam Braithwaite, 2010, p. 299). Bermunculannya organisasi-organisasi dengan latar belakang etnis, sebagai buah dari Reformasi, semakin memperkuat posisi Melayu dalam perpolitikan. Ketegangan politik antara Melayu dan Dayak pun kemudian menjadi satu potensi konflik tersendiri di Kalimantan Barat hingga saat ini.

2.1.4. Potensi dan Dinamika Konflik

Pasca-Reformasi di Kalimantan Barat

Sejarah konflik Kalimantan Barat di atas memperlihatkan bahwa konfigurasi dan hubungan antarkelompok etnis memainkan peranan penting dalam terjadinya konflik dan kekerasan. Pascakonflik 1999, keamanan di Kalimantan Barat membaik. Pertikaian massa bernuansa etnis besar sudah tidak lagi terjadi. Akan tetapi, provinsi ini masih memendam potensi konflik yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu komposisi kelompok etnis di masyarakat, kondisi sejarah pascakekerasan komunal, dan pola konflik baru di era desentralisasi dan otonomi daerah. Dinamika ketiga faktor ini dapat memunculkan kemungkinan terulangnya konflik kekerasan berskala besar.

Pertama, komposisi kelompok etnis merupakan faktor laten yang melekat dalam struktur masyarakat Kalimantan Barat. Keberadaan empat kelompok

15 Akademisi IAIN Pontianak, wawancara 29 September 2014.

16 Tokoh lembaga adat, wawancara 23 September 2014.

etnis besar—Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura—membentuk hubungan antarkelompok yang khas di Kalimantan Barat. Dalam konteks ruang dan waktu tertentu, hubungan antarkelompok yang ada dapat membentuk konfigurasi relasi kekuasaan dan hubungan mayoritas—minoritas yang berbeda. Konfigurasi sosial ini bersinggungan dengan dimensi politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di Kalimantan Barat dan di Indonesia.

Konfigurasi antarkelompok di Kalimantan Barat saat ini berbeda dengan zaman Orde Baru. Tanasaldy (2012, p. 5) melihat politik identitas kelompok Dayak di Kalimantan Barat dipengaruhi/dibatasi oleh sifat dan karakter rezim nasional yang sedang berkuasa. Dalam studinya, Tanasaldy (2012, p. 6) melalui penelusuran sejarah politik di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa perubahan rezim di ibu kota nasional secara substantif memiliki konsekuensi pada politik lokal, terutama kelompok Dayak; perubahan pada rezim tertentu dapat meningkatkan kesempatan politik kelompok Dayak, sedangkan perubahan lainnya dapat menghambat. Dengan kata lain, runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru memberikan ruang bagi terbukanya artikulasi politik lokal dan rekonfigurasi hubungan antarkelompok etnis di Kalimantan Barat. Selain itu, kebangkitan wacana politik identitas sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam proses transisi demokrasi di Indonesia juga membuka ruang bagi kelompok masyarakat lokal untuk membangun basis kekuatan politiknya.

Kedua, terkait dengan faktor pascakonflik komunal, konfigurasi hubungan antarkelompok di Kalimantan Barat mengalami pergeseran. Salah satu contoh di bidang politik, setelah melewati konflik komunal 16 tahun yang lalu, kelompok etnis Madura menderita kekalahan baik dari kelompok Dayak maupun dari Melayu. Mereka pun menjadi kelompok yang dianggap minoritas dan terbatas pengaruhnya dalam bidang politik. Dayak dan Melayu menjadi dua kelompok yang memiliki kekuatan di bidang politik setelah pengaruh sentralistik politik nasional rezim Orde Baru menghilang. Konflik tahun 1997 antara Dayak–Madura dimanfaatkan oleh elite kelompok Dayak untuk mendorong pemerintah memperbaiki posisi politik mereka, sedangkan konflik etnik 1999 antara Melayu–Madura memberikan kesempatan bagi kelompok Melayu mengimbangi pengaruh politik kelompok Dayak (Tanasaldy, 2012, hal 268, 300, 312).

Selain membentuk kontestasi di antara kedua kelompok di bidang politik, kondisi pascakonflik komunal di Kalimantan Barat masih menyimpan beberapa fragmen permasalahan. Keretakan hubungan antarkelompok etnis di tingkat masyarakat bawah masih belum sepenuhnya pulih. Dampak yang diakibatkan oleh konflik komunal pada tahun 1997 dan 1999 masih menyisakan prasangka antaretnis dan ingatan traumatis pada masyarakat Kalimantan Barat. Menurut salah satu tokoh DPRD Kota Pontianak, setiap hal kecil apa pun, seperti persoalan kriminal, bisa dialihkan ke masalah antaretnis dan

agama.¹⁷ Hal ini dapat mendorong munculnya persoalan yang lebih besar dan mengarah kepada konflik. Pihak Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat juga melihat masih adanya unsur laten seperti prasangka etnis di masyarakat. Narasumber ini mengatakan, bila terjadi perkelahian masyarakat tidak akan melihat apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian tersebut, melainkan mempertanyakan etnisitas pelakunya.¹⁸ Wakil dari Ikatan Kelompok Budaya Madura (IKBM) merasakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari sering muncul prasangka terhadap orang Madura. Ia memberikan contoh, bila terjadi tabrakan di jalanan, masyarakat secara umum akan bertanya apakah orang Madura terlibat dalam insiden tersebut.¹⁹

Kondisi orang Madura pascakonflik 1999 di Sambas merupakan salah satu isu yang penting untuk diperhatikan. Pemulihan mendasar dari dampak kekerasan komunal yang terjadi di tahun 1999 belum secara menyeluruh dirasakan oleh kelompok etnis Madura. Ada tiga permasalahan utama terkait keluarnya orang Madura di Sambas. *Pertama*, secara pidana kasus kekerasan yang terjadi akibat konflik komunal Melayu–Madura tidak terselesaikan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas mengatakan, secara hukum kasus tersebut tidak ditangani oleh kepolisian dan jaksa. *Kedua* adalah masalah akses orang Madura untuk kembali ke Sambas setelah menjadi pengungsi internal keluar dari Kabupaten Sambas. *Ketiga*, selain masalah pidana dan akses untuk kembali, kepemilikan properti orang Madura di Sambas, seperti lahan, masih menjadi polemik. Terkait kasus Melayu–Madura, pengamat dari IAIN Pontianak melihat hak-hak dasar kelompok Madura belum dipulihkan. Misalnya, mereka belum dapat kembali ke Sambas. Pemulihan hak-hak dasar ini terutama terkait aset-aset Madura yang mereka tinggalkan. Dari penelitian yang dilakukan, tidak semua orang Madura mau kembali ke Sambas untuk mengurus aset mereka. Sebagian lebih memilih hidup mereka yang sekarang karena masih kuatnya trauma konflik.

Seorang narasumber melihat, secara sosial ada kesepakatan di antara masyarakat bahwa konflik yang terjadi di tahun 1999 sudah tidak perlu lagi dibahas-bahas. Semua golongan masyarakat menginginkan kedamaian dan telah merasakan konflik yang pernah terjadi memiliki dampak besar. Oleh karena itu, mereka punya moto, konflik tersebut adalah yang pertama dan terakhir. Proses pemulihan keadaan sosial dan sikap saling menerima diharapkan secara alamiah berjalan karena luka yang ada di antara kelompok masyarakat membutuhkan waktu untuk pemulihan. Adapun kebijakan untuk menerima kembali orang Madura tinggal di Sambas, belum ada wacana tentangnya di tengah masyarakat Sambas. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Madura sudah terlihat banyak yang datang dan singgah

17 Tokoh lembaga adat, wawancara 24 September 2014.

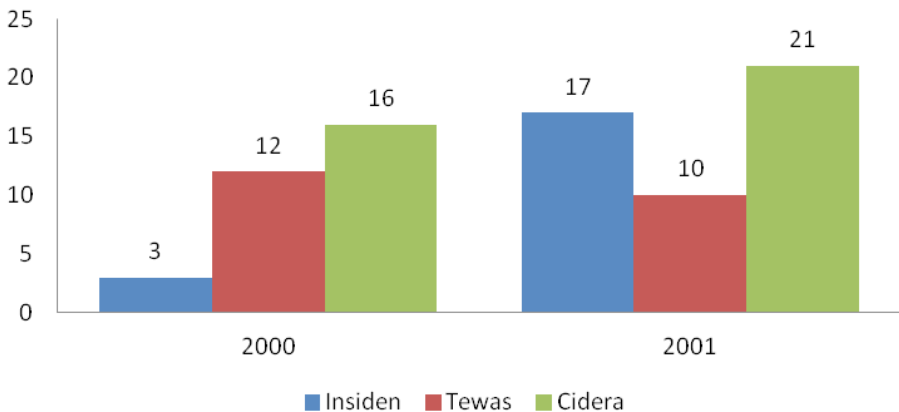
18 Staf Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, wawancara 24 September 2014.

19 Tokoh masyarakat etnis Madura, wawancara 26 September 2014.

beberapa waktu di Sambas, tetapi upaya untuk membuka kembali ruang agar mereka dapat hidup berdampingan masih memerlukan proses.²⁰

Gelombang pengungsian Sambas ke daerah-daerah lain di Kalimantan Barat memunculkan konflik baru. Banyak dari mereka mulai berdagang di pasar-pasar di daerah pengungsian, misalnya di Kota Pontianak. Hal ini menimbulkan kegelisahan di antara kelompok Dayak dan Melayu di kota tersebut. Data SNPK mencatat, pada periode 2000-2001 di Kota Pontianak terjadi 20 insiden konflik yang berlatar belakang identitas dan menewaskan 22 orang. Rentetan peristiwa ini dipicu oleh sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga Melayu dan Madura. Walaupun berhasil diatasi dan tidak berkembang menjadi kekerasan berskala besar, tetapi insiden ini membuat asosiasi pemuda Dayak dan Melayu mengeluarkan peringatan supaya warga Madura meninggalkan Pontianak. Warga Madura sendiri menolak peringatan ini. Akibatnya, mereka dipaksa meninggalkan berbagai jenis usaha ekonominya di Pontianak. Bahkan, kios-kios mereka di pasar dibakar dan dikuasai oleh para pedagang Melayu. Warga Melayu juga mengambil alih bisnis transportasi dalam kota milik warga Madura, sedangkan bisnis transportasi antarkota milik warga Madura diambil alih oleh warga Tionghoa (Braithwaite, 2010).

Gambar 2.4. Konflik Identitas Terkait Pengungsi di Kota Pontianak, Periode 2000-2001



Gelombang pengungsi Madura memiliki dampak yang berbeda di antara Kota Pontianak dengan Kota Singkawang. Ketika konflik komunal terjadi pada periode 1996-2001, wilayah Kota Singkawang yang pada saat itu masih bersatu dengan Kabupaten Sambas bukan termasuk wilayah konflik. Sebenarnya, di wilayah ini sangat berpotensi terjadi konflik komunal karena masyarakatnya heterogen. Wilayah ini juga terdampak oleh konflik yang terjadi di Sambas dan Bengkayang karena harus menampung pengungsi dari

²⁰ Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

kedua wilayah tersebut. Akan tetapi, konflik terkait etnisitas sendiri tidak pernah pecah di sana. Hal ini dikarenakan masyarakat Singkawang memiliki toleransi agama maupun toleransi etnis yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat Sambas dan Bengkayang (Haryanto, 2012). Selain itu, masyarakat Singkawang lebih bersifat majemuk sehingga tidak terpancing untuk berkonflik satu sama lain.

Pascaperiode konflik komunal pun kondisi Singkawang masih relatif aman. Etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu dapat hidup tanpa permasalahan etnis yang tetap menjadi isu di wilayah lain. Pengungsi Madura yang lari dari Sambas pada masa konflik komunal pun sudah dapat hidup sejahtera di Singkawang. Mereka dapat melakukan kegiatan perekonomian tanpa ada tekanan dari etnis lain. Masyarakat Tionghoa dan Melayu di Sambas juga lebih cenderung menghindari konflik dan lebih mementingkan kelancaran kegiatan perekonomian mereka. Walaupun sifat masyarakatnya yang majemuk menyebabkan adanya eksklusivitas, seperti yang terjadi di pasar,²¹ tetapi eksklusivitas tersebut tidak sampai menimbulkan kesenjangan etnis. Di Singkawang tidak ada satu etnis yang terlalu menonjol secara ekonomi atau sosial. Dinamika sosial ekonomi masyarakat etnis di sana lebih dinamis dan merata.²²

Kota Singkawang baru mencuri perhatian karena konflik ketika terjadi konflik Patung Naga pada tahun 2010. Pada saat itu Wali Kota Singkawang yang merupakan keturunan Tionghoa, Hasan Karman, memberikan izin untuk pembangunan Patung Naga di perempatan Jalan Kempol Mahmud dan Jalan Niaga. Rupanya, pembangunan Patung Naga ini mendapat pertentangan dari kelompok masyarakat Melayu yang kemudian mendapatkan dukungan dari organisasi massa FPI. Mereka melakukan penolakan terbuka di lokasi Patung Naga karena Patung Naga dinilai sebagai simbol sakral etnis Tionghoa, sementara etnis Tionghoa bukanlah etnis mayoritas di Singkawang. Oleh karena itu, Patung Naga dinilai lebih pantas didirikan di wihara. Aksi penolakan ini ditanggapi oleh kelompok masyarakat yang mendukung pembangunannya dengan mendatangi DPRD Kota Singkawang. Ketegangan antarkelompok yang saling kontra ini pun sempat terjadi.

Konflik Patung Naga sebenarnya bukan serta-merta konflik agama atau etnis. Konflik ini lebih mengarah pada konflik politik, di mana terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menggulingkan Hasan Karman dari jabatan wali kota. Latar belakang etnis Hasan Karman yang merupakan Tionghoa, menjadikan isu ini dimainkan di ranah etnisitas. Selain itu, makalah yang pernah ditulis oleh Hasan Karman pada tahun 2008 terkait etnis Melayu dinilai mendiskreditkan etnis Melayu.²³ Namun demikian, permainan

21 Jajaran Kesbangpol Kota Singkawang, FGD 9 Februari 2015.

22 Jajaran Kesbangpol Kota Singkawang, FGD 9 Februari 2015.

23 <http://www.fadlie.web.id/singkawang-legenda-patung-naga-siapa-yang-salah.html> diakses tanggal 17 Maret 2015.

an isu ini tidak juga mampu memancing konflik yang meluas di masyarakat Singkawang. Konflik Patung Naga pun diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dengan kedua kelompok oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aparat terkait. Komunikasi ini mampu menyelesaikan konflik hingga kasus tersebut tidak pernah muncul lagi hingga saat ini.

Akan tetapi, seorang narasumber dari Kodim Singkawang justru melihat permasalahan etnis ini sebagai potensi konflik di Singkawang. Kemajemukan masyarakat Singkawang dapat memicu konflik di wilayah Singkawang di kemudian hari. Kurangnya kepekaan budaya dan agama,²⁴ terbatasnya komunikasi yang hanya di tingkat elite, dan kurang berjalannya forum-forum antarumat menyebabkan di level masyarakat rentan miskomunikasi yang dapat berujung pada konflik. Bukan tidak mungkin kasus serupa Patung Naga dapat muncul di kemudian hari apabila dari pihak etnis Tionghoa ada yang melakukan pembangunan yang mencirikan simbol etnis mereka.²⁵ Oleh sebab itu, Pasi Intel Kodim Singkawang menilai tidak menonjolnya etnis Tionghoa baik dalam ranah sosial maupun politik merupakan hal yang tepat.

Ketiga, terkait dengan dua faktor di atas, proses desentralisasi dan otonomi daerah yang terjadi setelah Reformasi dapat menjadi sumber bagi munculnya pola konflik baru di daerah seperti Kalimantan Barat. Implementasi desentralisasi memiliki potensi menimbulkan ketegangan karena menstimulasi terjadinya perubahan demografis melalui pemekaran unit administratif di tingkat subnasional dan bersinggungan dengan dinamika konflik yang ada di wilayah tertentu (Diprose, 2009). Menurut Diprose (2009, p. 130), berdasarkan studi kasusnya di wilayah Sulawesi Tengah, kondisi ini dapat memicu kompetisi di antara elite lokal yang kerap memobilisasi identitas dalam memperebutkan kekuasaan dan sumber daya. Politik identitas ini juga berlaku di Kalimantan Barat di dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, di mana calon yang berasal dari etnis dominan di kabupaten/kota tertentu memiliki potensi lebih besar untuk memenangkan pemilukada. Menurut salah satu aktivis muda Kota Pontianak, mekanisme politik dan kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan politik yang tengah berlangsung di Kalimantan Barat dapat menjadi sumber konflik baru. Persaingan politik ini dapat menyebar pada tingkat komposisi formasi CPNS, formasi PNS, dan perebutan posisi kunci di birokrasi pemerintahan daerah.²⁶

Salah satu aktivis Kota Pontianak juga melihat dampak dari proses desentralisasi di Kalimantan Barat adalah adanya pergeseran bentuk konflik dari kekerasan komunal menjadi diskriminasi yang mendorong terbentuknya

24 Jajaran Pimpinan Daerah Kota Singkawang, wawancara 9 Februari 2015.

25 Anggota Staf Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Singkawang, wawancara 8 Februari 2015.

26 Tokoh pemuda Tionghoa, wawancara 23 September 2014.

segregasi etnis di masyarakat.²⁷ Diskriminasi dan segregasi etnis ini muncul karena berkembangnya tuntutan pemekaran yang berbasis kepentingan kelompok etnis. Pemekaran Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang menandai secara politik munculnya proses segregasi secara sosial budaya di ketiga daerah tersebut. Dalam konteks ini, Kabupaten Sambas didominasi oleh kelompok Melayu, Kabupaten Bengkayang didominasi oleh kelompok Dayak, dan Kabupaten Singkawang didominasi oleh kelompok Tionghoa. Menurut aktivis Kota Pontianak tersebut, secara praktis kelompok etnis minoritas yang berada di kabupaten tertentu yang didominasi oleh kelompok etnis lain mengalami diskriminasi.

Kondisi yang terbentuk akibat desentralisasi ini memungkinkan terjadinya kontestasi klaim dan konflik kekerasan terkait sumber daya alam. Peluso (2007, p. 26) melihat bahwa proses desentralisasi menyiratkan meningkatnya lokalisasi atau regionalisasi terhadap kontrol atas sumber daya. Hasil pemetaan potensi kerawanan konflik sosial di Kalimantan Barat menunjukkan, pada periode 2011-2013 konflik sosial yang terjadi didominasi oleh permasalahan sumber daya alam terkait perkebunan kepala sawit (Kesbangpol Kalbar, 2013, p. 165).²⁸ Salah satu contoh konflik terkait perkebunan kelapa sawit adalah konflik di Kabupaten Bengkayang. Konflik ini terjadi karena ada ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan yang tidak memenuhi janji-janji mereka kepada masyarakat setempat.²⁹ Selain konflik sumber daya perkebunan, Kesbangpol Kalbar (2013, p. 174-179) juga mengidentifikasi potensi konflik pertambangan, konflik batas wilayah, konflik perbatasan negara, dan konflik bernuansa SARA. Salah satu contoh wilayah yang mengalami pergeseran konflik dari konflik etnis menjadi konflik batas wilayah adalah Kabupaten Sambas dan dua wilayah administrasi yang merupakan wilayah pemekarannya, yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Ambawang.³⁰

Di Kabupaten Sambas potensi konflik dan kekerasan terkait sumber daya alam mencakup permasalahan (1) klaim lahan perkebunan, (2) tapal batas desa, dan (3) lahan milik warga Madura yang telah keluar dari Sambas pasca-konflik komunal 1999. Permasalahan ini terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, hubungan antara perusahaan dan warga terkait perkebunan merupakan salah satu potensi terjadinya konflik. Kepala Kesbangpol Sambas mengatakan

27 Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat di Pontianak, FGD 21 September 2014.

28 Kesbangpol Kalbar menggunakan data resmi Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar mencatat dari 13 kabupaten/kota yang ada hanya Kota Pontianak yang tidak memiliki area perkebunan sawit, sedangkan daerah yang memiliki lahan kelapa sawit terbesar adalah Kabupaten Ketapang (278,525 Ha), Sanggau (220,231 Ha), dan Sintang (103,963 Ha). Lihat Kesbangpol Provinsi Kalbar (2013, p. 164).

29 Anggota Staf Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Singkawang, wawancara 8 Februari 2015.

30 Anggota Staf Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Singkawang, wawancara 8 Februari 2015.

pemerintah telah menetapkan sebuah sistem dalam pengaturan perkebunan di antara perusahaan dan warga. Sering kali sistem ini tidak diperhatikan sehingga menjadi masalah karena pihak perusahaan belum memenuhi janjinya kepada warga atau tidak melakukan proses ganti rugi yang sesuai sehingga memicu kemarahan warga. Isu konflik perkebunan merupakan dinamika yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Sambas, tetapi juga oleh provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. Konflik antara masyarakat dan perusahaan pemilik perkebunan menjadi masalah lahan utama di Singkawang. Tidak dipenuhinya janji-janji perusahaan terhadap masyarakat merupakan penyebabnya (Kesbangpol Provinsi Kalbar, 2013).

Masalah perkebunan antara warga dan perusahaan diakui oleh seorang narasumber sebagai salah satu potensi konflik yang berkembang di Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah menempatkan diri sebagai penengah di antara aktor-aktor konflik yang saling bertikai dan tidak bersikap diskriminatif terhadap salah satu pihak. Salah satu pemicu konflik adalah masalah perizinan, di mana transmigran atau perusahaan acap kali membuka lahan sebelum perizinan keluar. Pada saat yang bersamaan, warga sering memanfaatkan peluang dengan mengklaim wilayah lahan yang bernilai ekonomis.³¹

Kedua, terkait dengan permasalahan perkebunan, salah satu potensi konfliknya menyangkut batas lahan. Seorang narasumber menilai permasalahan tapal batas sebagai salah satu masalah yang sudah berlangsung lama. Kejelasan tapal batas desa, misalnya, mulai berkembang menjadi masalah ketika investasi perkebunan masuk Sambas; juga setelah adanya proses pemekaran yang melahirkan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Permasalahan administratif terkait lahan ini menjadi kendala, mengingat Sambas yang memiliki 195 desa memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Kalimantan Barat. Menurut Kesbangpol Sambas, lahan tanah mengalami perubahan nilai menjadi ekonomis karena munculnya perkebunan-perkebunan sawit. Sebelum terjadi perubahan ini, sebelumnya batas lahan dulunya tidak dipermasalahkan. Akibatnya, muncul saling klaim batas lahan antarkelurahan seperti yang pernah terjadi di antara Kecamatan Tekarang dan Kecamatan Jawai. Upaya menyelesaikan persoalan klaim ini kerap menemui kendala salah satunya karena patokan batas berupa hutan atau kebun yang punya potensi nilai ekonomi sehingga diperebutkan.³²

Terkait permasalahan tapal batas ini, seorang narasumber lain melihat bahwa wilayahnya memiliki potensi konflik batas dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat dan batas negara dengan Malaysia. Konflik lahan di area perbatasan ini juga menjadi permasalahan yang mesti dihadapi oleh pemerintah Kota Singkawang. Permasalahan ini semakin kompleks pada saat Un-

31 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

32 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

dang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 disahkan. Banyak wilayah dimekarkan menjadi desa baru, tetapi regulasi dan penentuan batas wilayahnya belum jelas. Selain itu, narasumber tersebut melihat, dengan adanya pembentukan kabupaten baru potensi tindak pidana dapat meningkat di daerah perbatasan, terutama peredaran minuman keras, narkoba, dan potensi *trafficking* anak. Masalah *trafficking* sangat khas di perbatasan karena orang tua atau suami-istri dari suatu keluarga bekerja di wilayah lain sehingga anak-anak mereka terlantar.³³

Dalam sebuah *focus group discussion*, para peserta menilai permasalahan batas lahan ini erat kaitannya dengan latar belakang kelompok identitas aktor-aktor yang terlibat. Permasalahan batas desa yang melibatkan kelompok identitas yang sama cenderung lebih mudah untuk diselesaikan daripada yang melibatkan dua kelompok identitas yang berbeda. Permasalahan tapal batas desa muncul karena wilayah yang diperebutkan memiliki aset atau sumber daya yang bernilai ekonomi, seperti rotan, pasir, dan yang lain-lain. Sumber daya, konfigurasi kelompok identitas, dan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan di Kabupaten Sambas membuka kemungkinan terjadinya konflik karena klaim dan perebutan sumber daya. Tingginya potensi sumber daya di Sambas dapat dilihat dari tren masuknya investasi perusahaan-perusahaan, terutama di sektor perkebunan sawit. Selain itu, permasalahan administratif juga dapat mendorong konflik lahan antara warga dengan pemerintah. Di satu pihak, batas sudah ada karena hutan yang biasanya berada di perbatasan dimiliki secara komunal berdasarkan kesepakatan warga. Namun di pihak lain, negara menginginkan adanya bukti administratif dengan patok batas yang jelas.

Terakhir, dampak dari konflik antara etnis Melayu dan Madura adalah adanya properti-properti milik warga Madura, seperti tanah/lahan, yang ditinggal akibat arus pengungsian keluar Sambas. Dalam sebuah *focus group discussion* yang dilakukan di Sambas, salah satu peserta mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah Sambas melindungi dan mengakui hak kepemilikan warga Madura atas properti yang ditinggalkan saat konflik komunal terjadi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah Sambas melimpahkan permasalahan ini kepada perangkat desa dengan kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab. Ada dugaan tanah-tanah yang ditinggalkan ini diperjualbelikan, termasuk oleh orang Madura pemilik tanah itu sendiri, yang memilih menetap di luar Kabupaten Sambas. Permasalahan muncul ketika laporan ke pemerintah daerah tidak ada, dan pada saat yang bersamaan pendataan juga tidak dilakukan oleh pihak terkait. Kendala administratif ini dapat berkembang menjadi potensi konflik saling klaim kepemilikan pada saat pihak-pihak yang melakukan transaksi tidak melaporkan dan mendaftarkan tanahnya. Hal ini

33 Pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

dapat menjadi semakin parah jika ada perusahaan yang masuk dan membuka lahan di daerah yang berdekatan dengan batas desa yang menjadi sengketa antardesa. Untuk itu, permasalahan administratif menjadi krusial untuk diselesaikan guna mencegah terjadinya kompleksitas konflik.

Potensi konflik lahan terkait pengungsi Madura juga terjadi di Singkawang. Konflik ini merupakan residu dari konflik komunal di Sambas dan Bengkayang. Dijadikannya Singkawang sebagai salah satu tempat penampungan pengungsi Madura, menimbulkan permasalahan terkait lahan yang digunakan sebagai wilayah pengungsian. Lahan yang digunakan merupakan tanah-tanah warga yang dipinjam oleh pemerintah Singkawang, yang kemudian dijadikan tempat tinggal sementara untuk para pengungsi. Namun, tidak adanya penanganan lanjutan menyebabkan para pengungsi tetap tinggal di wilayah penampungan tersebut. Salah satu kendala untuk menyelesaikan persoalan ini adalah ketidakmampuan pemerintah Kota Singkawang menyediakan tempat untuk merelokasi para pengungsi. Program rumah susun yang sebelumnya direncanakan belum bisa direalisasikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah Kota Singkawang tidak mampu membeli tanah untuk lokasi pembangunannya (Kesbangpol Provinsi Kalbar, 2013). Kondisi perekonomian pengungsi Madura yang kian membaik membuat para pengungsi itu kemudian mendirikan tempat tinggal di lokasi pengungsian tanpa menyelesaikan terlebih dahulu status kepemilikan tanahnya dengan masyarakat setempat. Masalah ini tentu saja menjadi potensi konflik di Kota Singkawang yang butuh penanganan segera.

Selain tiga faktor utama yang telah disebutkan—komposisi kelompok etnis di masyarakat, kondisi sejarah pascakekerasan komunal, dan pola konflik baru di era desentralisasi dan otonomi daerah—ketimpangan horizontal, terutama yang dirasakan secara umum oleh masyarakat arus bawah dan generasi muda di Kalimantan Barat, juga dapat memicu kriminalitas dan kekerasan rutin. Kriminalitas dan kekerasan rutin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat, bila tidak diatasi di masa yang akan datang dapat menjadi pemicu kekerasan antarkelompok etnis. Di Kabupaten Sambas, potensi konflik besar sebenarnya tidak terlepas dari permasalahan kecil yang tidak dicegah dan ditindaklanjuti sehingga membuka ruang terjadinya eskalasi. Menurut seorang narasumber dari Kesbangpol Sambas, banyak permasalahan menjadi masalah besar karena masalah pribadi atau kriminalitas individu tidak diatasi dengan cepat melalui proses hukum.³⁴ Narasumber ini juga melihat bahwa hal serupa juga terjadi pada tahun 1999, di mana kekerasan komunal besar dipicu oleh insiden kecil. Dalam hal ini, tersebarunya kabar tidak benar yang diembuskan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik kekerasan tentu saja memiliki andil. Kesbangpol sendiri mengidentifikasi

34 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

ada 9 kecamatan yang dianggap rawan konflik, yaitu Kecamatan Selakau, Pemangkat, Jawai, Sambas, Teluk Keramat, Galing, Subah, Paloh, Sejangkung, dan Tebas.

Narasumber dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas mengatakan bahwa konflik antarsuku/etnis sudah tidak ada di Sambas. Ia memandang, yang sering terjadi adalah konflik yang tidak prinsipil di kalangan masyarakat Sambas. Salah satunya adalah konflik antarpemuda karena perasaan egois yang tidak prinsipil, misalnya dipicu oleh perebutan remaja perempuan. Selain itu, ada juga demo guru-guru menuntut sertifikasi yang sebenarnya sedang dalam proses pembuatan.³⁵

Kriminalitas dan kekerasan rutin, termasuk konflik antarpemuda, sering kali dipicu oleh masalah minuman keras dan narkoba. Maraknya peredaran dan konsumsi narkoba dan miras dapat mempengaruhi dan mengubah sikap orang. Salah satu alasan orang mengonsumsi narkoba dan miras adalah untuk meningkatkan semangat dan keberanian. Di Sambas sendiri, dalam berbagai hiburan rakyat, seperti permainan sepak bola, banyak yang menikmatinya sambil meminum miras dan menggunakan narkoba. Hal ini tentu saja dapat mendorong terjadinya kekerasan. Nilai-nilai agama dan adat sebenarnya masih dapat berperan dalam meredam konflik. Namun jika orang sudah terpengaruh oleh minuman keras dan narkoba, pengarahannya pun sulit untuk diberikan. Potensi konflik yang dipicu minuman keras ini harus dengan cepat ditanggulangi jika tidak ingin berujung pada aksi kekerasan. Dalam acara hiburan rakyat, saling senggol saja dapat menjadi perkelahian dan tindak kekerasan hanya karena pengaruh minuman keras.

Melalui identifikasi secara umum potensi-potensi konflik yang ada di Kalimantan Barat, pola-pola konflik di masa datang akan dapat diketahui dan tindakan-tindakan pencegahan pun dapat dilakukan. Melalui pemetaan potensi konflik yang ada, Kesbangpol Kalbar (2013, p. 180-82) melihat adanya pergeseran pola-pola konflik di Kalimantan Barat, yaitu (1) terjadi transformasi konflik komunal yang masif menjadi konflik yang terlokalisasi dalam lokalitas yang terbatas, (2) motivasi konflik lokal yang lebih bersifat pragmatis ketimbang primordial (seperti harga diri), sehingga (3) penyebab konflik bukan sesuatu hal yang mendalam, melainkan permasalahan tidak terakomodasinya kepentingan kelompok tertentu.

2.1.5. Dinamika Kelembagaan

Pencegahan konflik sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Seperti yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 6 ayat 2, pencegahan konflik merupakan tanggung jawab pemerintah,

³⁵ Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pencegahan konflik, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah akan menjalankan upaya-upaya:³⁶

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

2.1.5.1. Lembaga Pemerintah

Salah satu elemen penting dalam pencegahan konflik adalah adanya sistem peringatan dini. Dalam penerapannya, sistem peringatan dini memerlukan peran pemerintah pusat dan daerah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem peringatan dini adalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda disahkan pada tahun 2002 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.³⁷ Kominda berada langsung di bawah tanggung jawab gubernur, namun penyelenggaraannya di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab bupati/wali kota.³⁸ Oleh karena itu, Kominda Provinsi Kalimantan Barat berada langsung di bawah tanggung jawab Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H. dan bupati/wali kota wilayah administratif tingkat II yang bersangkutan.

Di dalam struktur Kominda, para kepala daerah akan membawahi kepala Kesbangpol, unsur-unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya.³⁹ Walaupun Kesbangpol, unsur intelijen dari BIN, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, serta Bea dan Cukai menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi unsur-unsur tersebut tetap melakukan koordinasi baik formal maupun nonformal. Dalam menjalankan kegiatannya, Kominda mendapatkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk Kominda wilayah tingkat I, dan APBD kabupaten/kota untuk Kominda wilayah tingkat II.⁴⁰ Oleh karena itu, besarnya dana untuk Kominda berbeda-beda di tiap daerah. Tidak didapatkan data pasti seberapa besar dana Kominda untuk Provinsi Kalimantan Barat ataupun beberapa kabupaten/kota di bawahnya. Namun, di Kabupaten Sambas anggaran untuk Kominda sebesar Rp 75 juta per tahun.⁴¹

36 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 6 ayat 1.

37 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

38 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

39 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

41 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

Lembaga pemerintah yang merupakan elemen pencegahan konflik berikutnya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selain Kepala Kesbangpol berperan sekretaris Kominda,⁴² lembaga Kesbangpol Kalimantan Barat sendiri berperan dalam pencegahan dini dengan membuat penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial. Peran ini merupakan implementasi dari salah satu program strategis Kesbangpol, yaitu Fasilitasi Kewaspadaan Nasional. Selain itu, Kesbangpol juga memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Seharusnya, tiap-tiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki FKUB dan FKDM sendiri di wilayah mereka. Akan tetapi, per tahun 2015 baru 10 kabupaten/kota yang memiliki FKDM; 4 kabupaten/kota lainnya masih belum memiliki FKDM.⁴³ Adapun untuk FKUB, keempat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah memilikinya.

Beragamnya agama di Indonesia dan pengalaman konflik yang melibatkan umat beragama yang berbeda di Kalimantan Barat, menuntut keberadaan FKUB di provinsi untuk membangun dan memelihara kerukunan antarumat beragama⁴⁴ di Kalimantan Barat. Forum yang beranggotakan pemuka-pemuka agama setempat ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Koordinasi dalam FKUB, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun di tingkat kabupaten/kota, cukup berjalan. Seorang narasumber mengungkapkan, komunikasi di FKUB tingkat Provinsi Kalimantan Barat sering dilakukan sehingga informasi apa pun terkait permasalahan umat beragama di sana akan segera ditangani, baik pencegahan maupun penghentiannya, apabila mulai terjadi percikan-percikan konflik antarumat beragama.⁴⁵

2.1.5.2. Lembaga Nonpemerintah

Dinamika lembaga nonpemerintah di Kalimantan Barat sangat menarik untuk dibahas. Provinsi ini memiliki banyak lembaga nonpemerintah yang berperan dalam pencegahan konflik. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berlatar belakang agama maupun etnis. Lembaga-lembaga yang berlatar belakang agama, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,

42 Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 pasal 6.

43 Daftar Rekapitulasi Pembentukan FKDM Prov/Kab/Kota Se-Indonesia sampai dengan Oktober 2014, <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2015/330/Rekapitulasi-FKDM#> diakses pada 20 Maret 2015.

44 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

45 Tokoh agama Budha dan anggota Pengurus Walubi Kalimantan Barat, wawancara 24 September 2014.

Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK atau yang kemudian disebut Pancur Kasih), dan Walubi. Adapun lembaga-lembaga yang berlatar belakang etnis, di antaranya Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Dewan Adat Dayak (DAD).

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan lembaga-lembaga masyarakat dengan latar belakang agama Islam, sedangkan Walubi merupakan lembaga masyarakat yang berlatar belakang agama Budha. Ketiga lembaga ini telah berkembang di wilayah Kalimantan Barat sejak lama, mengingat jumlah pemeluk agama-agama tersebut cukup besar di provinsi ini. Sementara itu, Pancur Kasih baru didirikan pada 1981. Pancur Kasih sebenarnya bukan hanya berlatar belakang agama tertentu, tetapi juga berlatar belakang etnis Dayak. Karakteristik Pancur Kasih dibentuk oleh perpaduan antara filosofi Dayak dan aliran sosial yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Wahono, 2013, p. 15). Pancur Kasih tidak hanya bergerak di bidang sosial, tetapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik. Hingga 2011 Pancur Kasih telah menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Kalimantan Barat, antara lain melalui pembentukan Lembaga Pendidikan Santo Fransiskus Asisi pada 1981 (untuk tingkat SMP) dan pada 1984 (untuk tingkat SMA), *Credit Union* pada 1987, Institut Dayakologi pada 1991, dan Ruai TV pada 2007.

Selain lembaga-lembaga berlatar agama yang telah disebutkan, Kalimantan Barat juga memiliki lembaga-lembaga dengan latar belakang etnis, seperti Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) yang baru saja dibentuk pada 18 September 2005. Lembaga yang berikutnya adalah Majelis Adat Budaya Melayu (MABM). Lembaga ini dibentuk demi terwujudnya masyarakat Melayu Kalimantan Barat sebagai bagian bangsa Indonesia yang bertamadun, berpendidikan, serta sejahtera lahir dan batin.⁴⁶

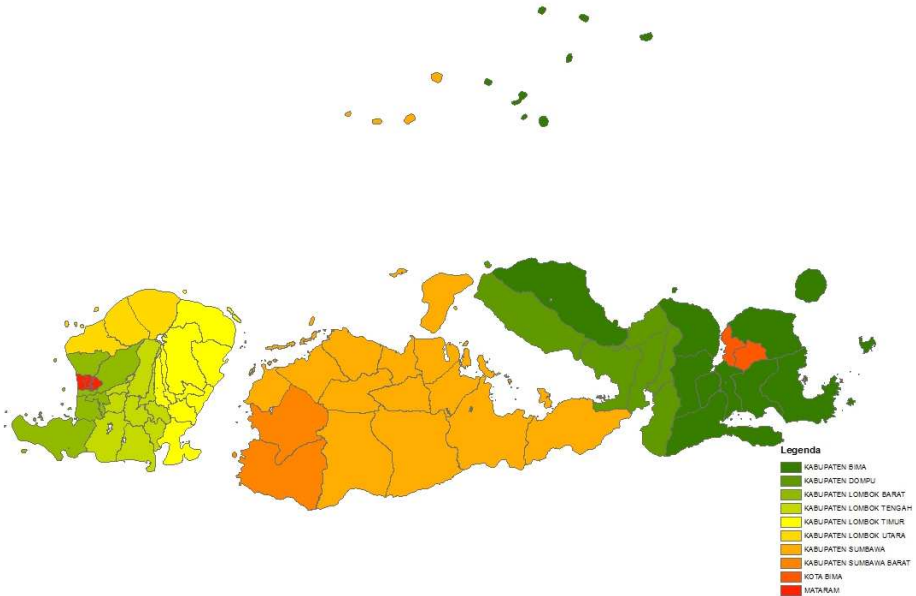
2.2. NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

2.2.1. Kondisi Geografi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di antara 115°46'–119°5' BT dan 8°10'–9°5' LS. Batas wilayah NTB adalah Selat Lombok/Provinsi Bali di sebelah barat dan Selat Sape/Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah timur, serta Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan.

⁴⁶ Anggaran Dasar Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, <http://mabmonline.org/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga/>, diakses pada 3 April 2015.

Gambar 2.5. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas sebesar 2.015.315 ha, meliputi delapan kabupaten dan dua kota (**Gambar 2.5**), yaitu:

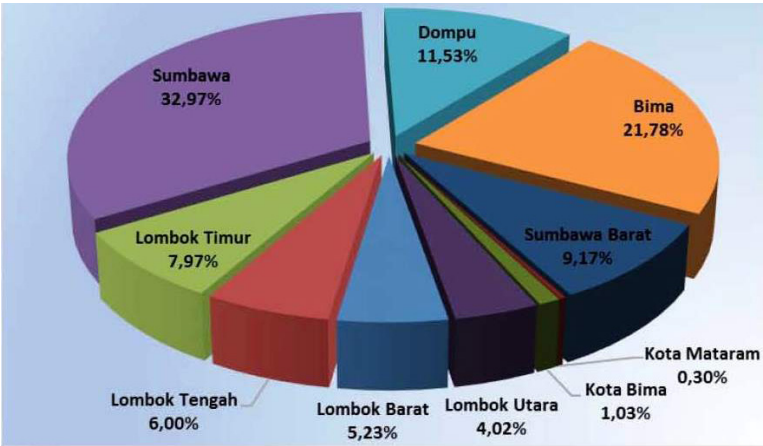
1. Kabupaten Lombok Barat
2. Kabupaten Lombok Tengah
3. Kabupaten Lombok Timur
4. Kabupaten Lombok Utara
5. Kabupaten Sumbawa
6. Kabupaten Dompu
7. Kabupaten Bima
8. Kabupaten Sumbawa Barat
9. Kota Mataram
10. Kota Bima

Apabila dilihat dari persentase luas wilayah, tiga kabupaten terluas di Provinsi NTB adalah Kabupaten Sumbawa (32,97% dari keseluruhan luas provinsi), Kabupaten Bima (21,78%), dan Kabupaten Dompu (11,53%) (**Gambar 2.6**).

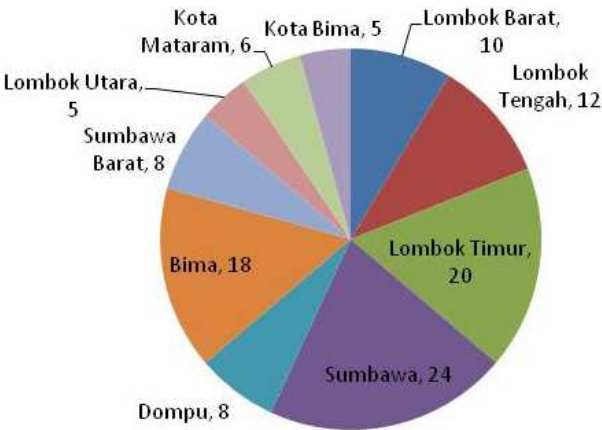
Untuk jumlah kecamatan di Provinsi NTB, tiga kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Sumbawa (24 kecamatan), Kabupaten Lombok Timur (20 kecamatan), dan Kabupaten Bima (18 kecamatan) (**Gambar 2.7**).

Adapun untuk jumlah desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB, tiga kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lombok Timur (254 desa/kelurahan), Kabupaten Bima (198 desa/kelurahan), dan Kabupaten Sumbawa (166 desa/kelurahan).

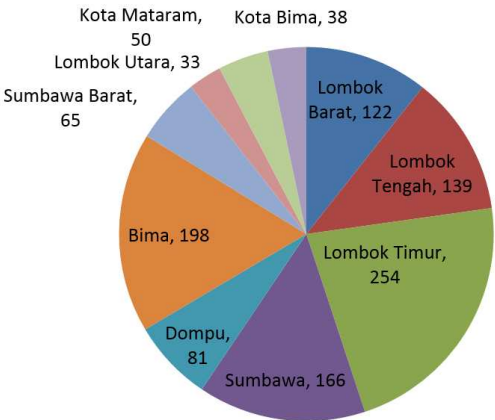
Gambar 2.6. Persentase Luas Wilayah per Kabupaten/ Kota di NTB (NTB dalam Angka, 2014)



Gambar 2.7. Jumlah Kecamatan per Kabupaten/Kota (NTB dalam Angka, 2014)



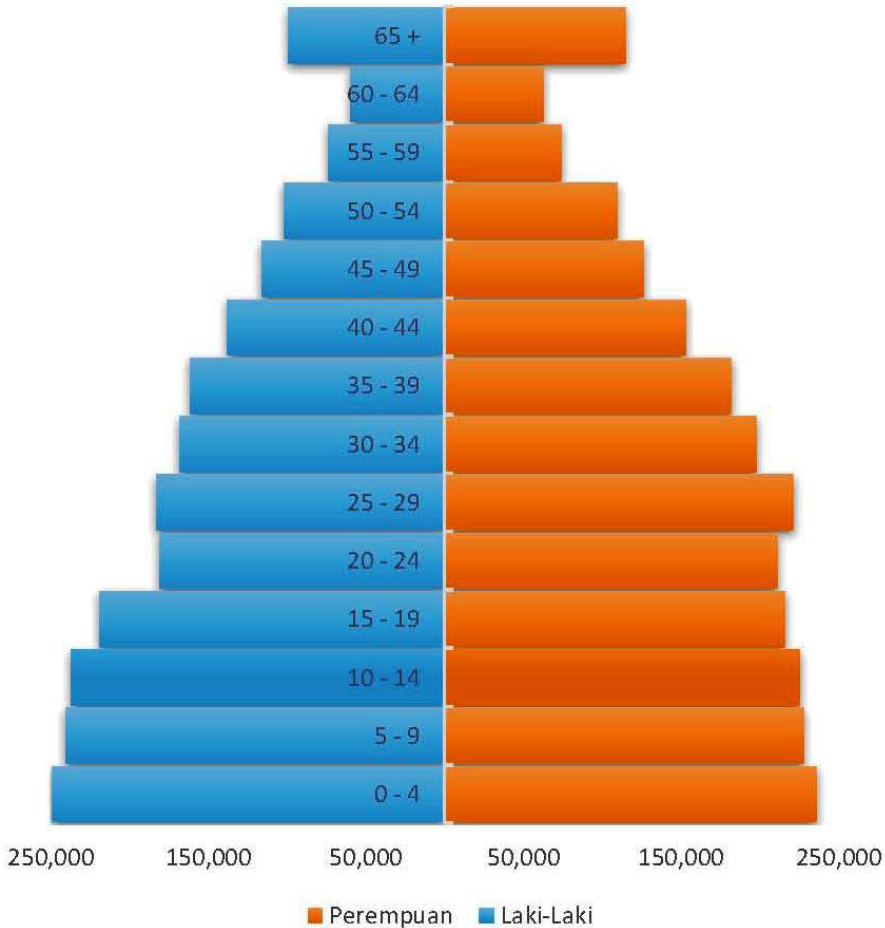
Gambar 2.8. Jumlah Desa/Kelurahan per Kabupaten/Kota (NTB dalam Angka, 2014)



2.2.2. Kondisi Demografis Nusa Tenggara Barat

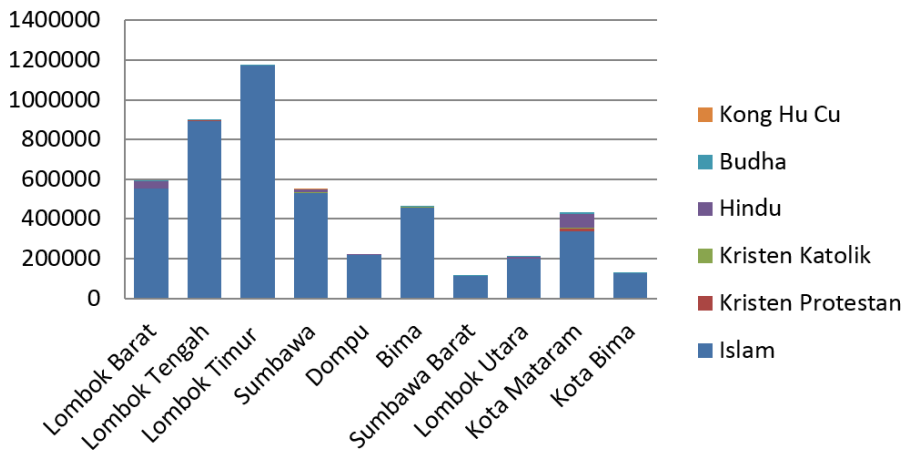
Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas beberapa etnis, antara lain Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Tionghoa, Bugis, dan lain-lain. Mayoritas masyarakat bersuku Sasak tinggal di Pulau Lombok, sedangkan suku Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa. Karena faktor historis, warga dari suku Bali bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Distribusi demografis berdasarkan usia dapat dilihat dari piramida penduduk berikut:

Gambar 2.9. Piramida Penduduk NTB 2013 (*NTB dalam Angka*, 2014)



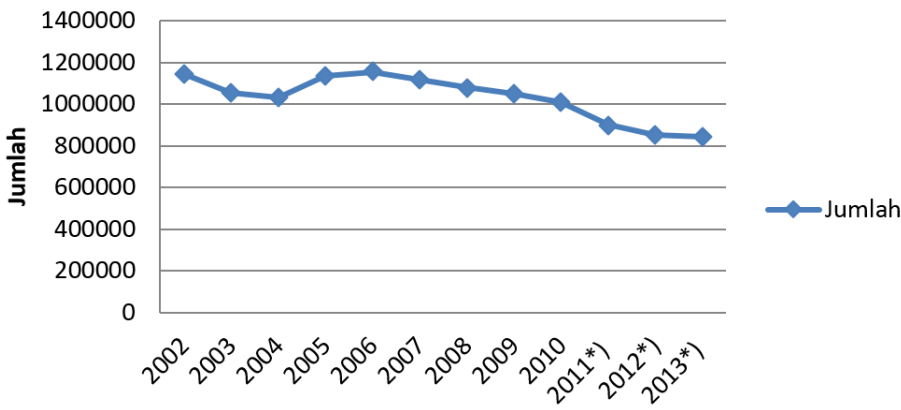
Berdasarkan agama dan kepercayaan, mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam. Adapun sebaran penduduk menurut kabupaten/kota dan agama dapat dilihat pada gambar di bawah ini (**Gambar 2.10**).

Gambar 2.10. Penduduk Berdasarkan Agama (NTB dalam Angka, 2014)



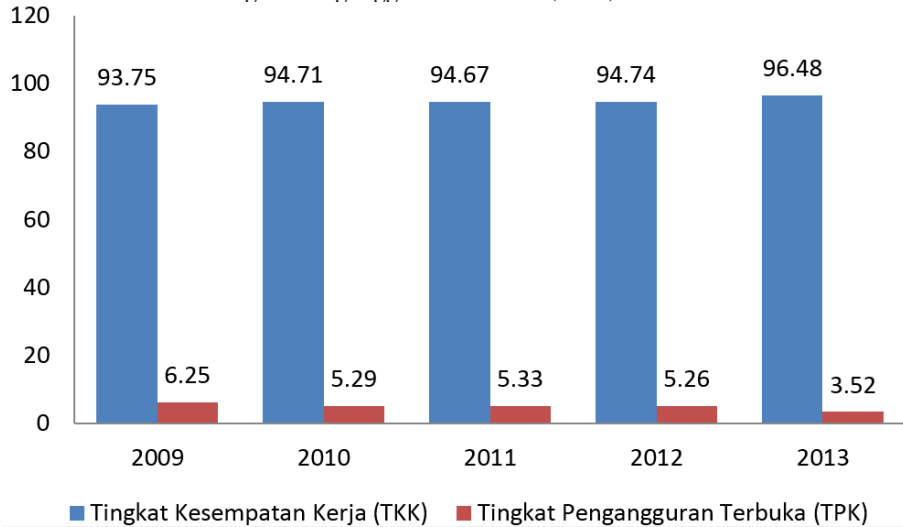
Berdasarkan laporan statistik, jumlah penduduk miskin di NTB cenderung menurun. Penurunan ini terlihat sejak tahun 2006. Persentase penduduk miskin pada tahun tersebut adalah 27,17%, dan menurun secara konsisten hingga mencapai angka proyeksi 17,97% pada tahun 2013 (**Gambar 2.11**).

Gambar 2.11. Tren Jumlah Penduduk Miskin NTB
2002-2013 (NTB dalam Angka, 2014)



Bila dilihat dari tingkat kesempatan kerja (TKK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTB, data statistik mencatat tingkat kesempatan kerja berkisar di atas 93% sejak tahun 2009 dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 96,48%; sementara tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun dari 6,25% pada tahun 2009 menjadi 3,52% pada tahun 2013 (**Gambar 2.12**).

Gambar 2.12. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB

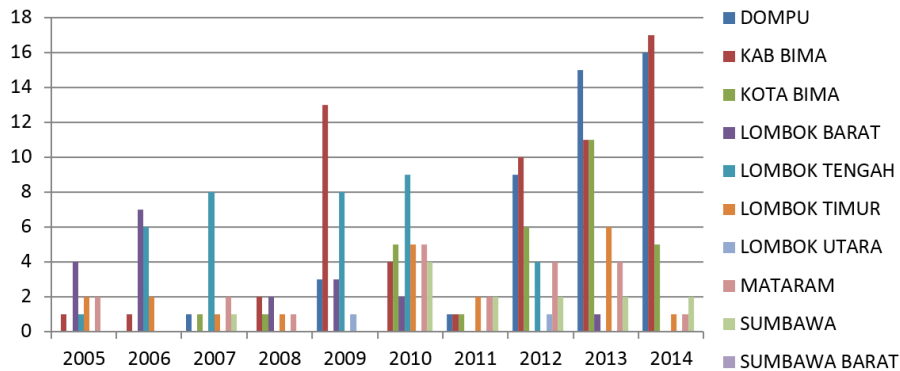


Deskripsi geografis dan demografis di atas dapat memberikan gambaran tentang beberapa hal yang berpotensi menyumbang munculnya konflik di wilayah Nusa Tenggara Barat.

2.2.2 Sejarah dan Potensi Konflik di Nusa Tenggara Barat

Isu identitas masih menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dengan kekerasan di Nusa Tenggara Barat. Secara spesifik, konflik identitas yang terjadi di NTB dapat dilihat pada grafik berikut (**Gambar 2.13**):

Gambar 2.13. Insiden Konflik Identitas di NTB 2005-2014



Dari insiden-insiden yang terjadi selama periode tersebut, bila ditelusuri lebih jauh, beberapa kasus konflik kekerasan yang mengemuka termasuk dalam klasifikasi *ethno-spatial* karena berhubungan dengan dinamika sosial masyarakat dari etnis tertentu yang merupakan mayoritas di tempat mereka

tinggal, misalnya suku Sasak di Pulau Lombok, suku Samawa di Kabupaten Sumbawa, serta suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Dompu. Di bagian selanjutnya akan dideskripsikan kasus kekerasan yang menjadi sorotan masyarakat di tiga wilayah NTB, yaitu Lombok, Bima, dan Sumbawa.

2.2.2.1. Kasus Kekerasan Antarkelompok di Lombok

Salah satu konflik yang mengemuka di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, adalah konflik antarkelompok. Secara umum, data SNPK 2005-2013 menyebutkan adanya 119 insiden kekerasan antarkelompok yang mengakibatkan 30 orang tewas, 289 cedera, dan 603 bangunan rusak. Dari total jumlah konflik antarkelompok tersebut, kekerasan antardesa/kampung mendominasi dengan angka 113 insiden dan mengakibatkan 28 tewas, 286 cedera, serta 116 bangunan rusak. Meskipun kekerasan antarkampung ini sebenarnya telah terjadi sejak zaman Orde Baru, intensitasnya semakin banyak pasca-Reformasi karena pers semakin terbuka melaporkan kejadian kekerasan di media massa.⁴⁷ Dari periode data SNPK di atas, intensitas tertinggi insiden kekerasan antarkampung di NTB terjadi pada tahun 2013. Dengan demikian, kekerasan antarkampung ini merupakan salah satu fenomena yang signifikan dalam upaya pemetaan jenis kekerasan dan konflik di NTB.

Apabila dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan antarkampung, Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan intensitas insiden tertinggi di NTB (**Gambar 2.14**). Kekerasan antarkampung di Lombok Tengah terkonsentrasi di Kecamatan Pujut, terutama di lima desa, yakni Ketara, Sengkol, Kawo, Tana Awo, dan Batujai. Biasanya, kekerasan terjadi antara warga Desa Ketara dan warga kampung-kampung lain (Sengkol, Kawo, Batujai, atau Tana Awo). Meskipun berdasarkan komposisi etnis/suku dan agama sebagian besar penduduk berasal dari suku Sasak dan beragama Islam, referensi identitas berdasarkan aspek geografis, terutama asal desa, lebih mengemuka.

Di antara insiden-insiden kekerasan antarkelompok, yang menonjol dalam kurun lima tahun terakhir adalah empat insiden kekerasan yang melibatkan warga Desa Ketara dan Kawo selama Mei hingga Juni 2012. Peristiwa kekerasan ini diawali oleh aksi pengeroyokan terhadap tiga terduga pelaku pencurian hingga tewas pada 16 Mei 2012 oleh warga Desa Kawo (*Lombok Pos*, 17 Mei 2012).⁴⁸ Karena salah seorang korban adalah warganya, para penduduk Desa Ketara marah dan berniat melakukan balas dendam.⁴⁹ Setelah pemakaman korban, ratusan warga Ketara melakukan penyerangan

47 Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wawancara 20 Januari 2014.

48 *Lombok Post*, 17 Mei 2012.

49 Tiga orang tersebut diduga melakukan pencurian sepeda motor di rumah salah satu warga sehingga dihakimi massa (wawancara, 5 Februari 2014), sedangkan warga Ketara meyakini bahwa mereka tidak hendak mencuri, melainkan hendak *midang* atau bertemu pacar di Desa Kawo (Tokoh Masyarakat Desa Kawo, wawancara 4 Februari 2014).

ke Desa Kawo. Mengetahui akan adanya serangan tersebut, warga Kawo melakukan antisipasi dengan menyiapkan persenjataan, seperti parang dan senapan angin. Bentrokan fisik antarwarga dua desa tersebut akhirnya terjadi pada sore hari, yang mengakibatkan dua warga cedera dan lima bangunan rusak. Aparat Kepolisian Resor Lombok Tengah dan pasukan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah NTB yang berada di sekitar lokasi mengalami kesulitan untuk menghentikan bentrokan karena bentrokan tersebut terjadi di areal persawahan dan tersebar di beberapa titik (*Liputan Enam*, 17 Mei 2012).⁵⁰ Bentrokan akhirnya berhenti ketika aparat memberikan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata pada kelompok-kelompok massa.

Pada 18 Mei 2012, bentrokan antara dua kelompok warga desa tersebut kembali terjadi di lokasi yang sama. Ratusan warga Desa Ketara menyerang warga Desa Kawo sekitar pukul 17.00 WITA (Elshintia, 18 Mei 2012).⁵¹ Dengan bersenjatakan parang, tombak, dan panah, warga Desa Ketara berupaya menerobos masuk ke dalam Desa Kawo sehingga bentrokan tidak terelakkan dan mengakibatkan dua orang cedera serta lima bangunan milik warga Desa Kawo rusak. Aparat kepolisian dibantu dua peleton TNI membuat barikade di sekitar perbatasan Desa Kawo untuk membubarkan kerumunan massa. Pascabentrokan tersebut, pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah memediasi upaya perdamaian di pendopo kantor bupati. Kedua kelompok warga desa bersepakat untuk tidak melakukan aksi saling serang lagi dan mendorong adanya tindakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Meskipun kesepakatan telah diperoleh, aparat keamanan tetap berjaga di wilayah perbatasan kedua desa tersebut.

Pada 7 Juni 2012, bentrokan kembali terjadi antara warga kedua desa. Insiden ini dipicu oleh kecurigaan warga Ketara terhadap warga Kawo yang hendak memanen kedelai di areal sawah di daerah perbatasan. Dalam melakukan aktivitasnya, warga Kawo dikawal oleh para anggota Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa) yang berasal dari luar Desa Kawo. Karena menganggap pengawalan tersebut merupakan upaya penggalangan kekuatan untuk menyerang desa mereka, ratusan warga Ketara mengambil inisiatif menyerang Desa Kawo pada pagi hari. Bentrokan antara kedua warga desa ini berlangsung hingga siang hari. Mengingat masifnya jumlah massa akibat pelibatan warga asal Ketara yang tinggal di desa-desa lain, aparat gabungan dari Kodim 1620 Wira Bhakti, Brimob Polda NTB, dan Kepolisian Resor Lombok Tengah baru berhasil menghentikan bentrokan pada sore hari. Insiden tersebut menyebabkan 15 orang luka dan 9 bangunan rusak. Selanjutnya, aparat TNI dan kepolisian ditempatkan di perbatasan kedua desa selama hampir satu bulan untuk mencegah munculnya bentrokan serupa. Karena

⁵⁰ Liputan6.com, 17 Mei 2012.

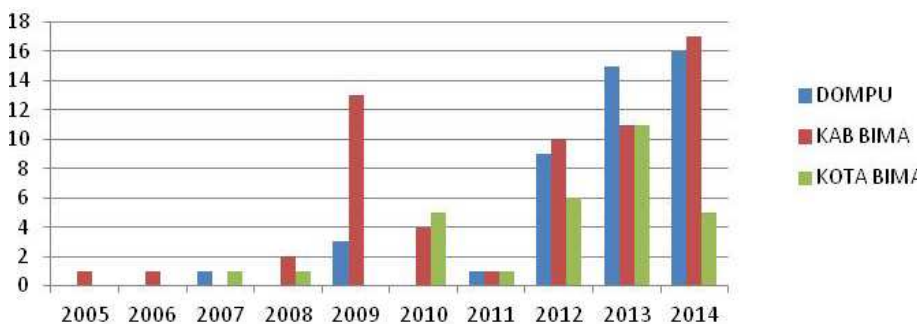
⁵¹ Elshintia.com, 18 Mei 2012.

beberapa kali menjadi sasaran penyerangan, warga Desa Kawo bersepakat akan melakukan penyerangan terhadap warga Desa Ketara kalau konflik serupa terjadi lagi di masa depan.⁵²

2.2.2.2. Kasus Kekerasan Antarkelompok di Bima

Berdasarkan data SNPK (**Gambar 2.15**), insiden konflik identitas di wilayah Bima cukup fluktuatif selama periode 2005-2014. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian terjadi adalah konflik dan kekerasan yang kerap terjadi antara warga Desa Nisa (Kecamatan Woha) dan Desa Cenggu (Kecamatan Belo). Misalnya, pada 11 Agustus 2013, menurut laporan beberapa media, bentrokan terjadi di perbatasan kedua desa di mana massa dari masing-masing desa mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan, senjata tajam, kayu, dan batu. Kedua kubu saling serang selama dua jam sampai akhirnya bentrokan dapat diredakan setelah aparat kepolisian dan TNI datang ke tempat kejadian. Insiden ini merupakan eksekusi dari insiden pengeroyokan terhadap seorang warga Desa Cenggu oleh warga Desa Nisa yang terjadi sebelumnya.⁵³

Gambar 2.15. Insiden Konflik Identitas di Wilayah Bima, 2005-2014



Selang beberapa minggu kemudian, bentrokan kembali pecah pada tanggal 28 Agustus 2013 di sekitar perbatasan kedua desa. Menurut laporan beberapa media,⁵⁴ warga Nisa yang jumlahnya lebih banyak mulai bergerak memasuki Desa Cenggu dan melakukan pembakaran terhadap tiga rumah warga, termasuk rumah Kepala Desa Cenggu. Tindakan aparat kepolisian yang mencoba meredam aksi tersebut dengan melepaskan tembakan justru semakin memperparah situasi karena ada tiga warga yang mengalami luka tembak. Warga yang mengamuk melewati markas kepolisian setempat, merusak pagar markas tersebut, serta merusak mobil pemadam kebakaran. Kepolisian dengan dukungan satuan Brimob dan anggota TNI diturunkan untuk meredam aksi tersebut.

52 Tokoh Desa Kawo, wawancara 5 Februari 2014.

53 *Bima Ekspres*, *Lombok Pos*, *Suara NTB*, 12 Agustus 2013.

54 *Bima Ekspres*, *Lombok Pos*, *Suara NTB*, 29 Agustus 2013.

Bentrokan besar kembali terjadi pada 30 Desember 2013 di Terminal Tente, Kecamatan Woha. Warga dari kedua desa bersitegang setelah terjadi pembacokan oleh warga Nisa terhadap tiga laki-laki dan seorang perempuan warga Cenggu. Hal ini menyebabkan aksi pembalasan, di mana seorang warga Desa Nisa menjadi korban pembacokan yang dilakukan warga Desa Cenggu di depan Kantor Pertanian Kecamatan Belo.⁵⁵

Menurut catatan, bentrokan lain terjadi dua kali di sepanjang tahun 2014. Pada 2 Agustus 2014, bentrokan terjadi antara warga kedua desa di Desa Cenggu. Warga Nisa melakukan pembakaran terhadap gudang kayu di Desa Cenggu. Aksi ini berujung pada kontak senjata api rakitan antarwarga. Bentrokan akhirnya dapat dihentikan oleh aparat Kepolisian dan TNI.⁵⁶ Pada keesokan harinya, bentrokan berlanjut. Warga kedua desa saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan di areal persawahan. Tiga warga Desa Cenggu (seorang di antaranya tewas) dan seorang warga Desa Nisa terkena peluru senjata rakitan. Dalam insiden ini tiga rumah warga Cenggu dibakar. Aparat Kepolisian dengan dukungan satuan Brimob berusaha mencegah dan menghentikan konflik, namun tidak berhasil.⁵⁷

Secara umum, berdasarkan pengamatan pihak Polres Kabupaten Bima, keberadaan pasar yang terletak di wilayah Nisa merupakan konteks geografis yang mewarnai bentrok antara Desa Cenggu dengan Desa Nisa. Keberadaan pasar itu juga yang menjadi daya tarik kaum pendatang di era 1970-an hingga 1980-an yang berdampak pada komposisi demografis desa. Keragaman terlihat baik dalam aspek lokal–pendatang, jenis pekerjaan terutama buruh pasar dan pedagang, maupun tingkat pendidikan warga yang kebanyakan hanya sampai pada jenjang pendidikan dasar. Orang-orang dari Kampung Tente di Nisa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga merasa cemburu terhadap warga Cenggu, mengingat penggerak ekonomi rata-rata berasal dari Cenggu.⁵⁸

Sementara itu, di Desa Cenggu terdapat lebih banyak penduduk lokal yang bekerja sebagai guru dan petani, serta memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Konflik yang kerap terjadi di ranah ekonomi tersebut ditengarai sebagai puncak dari kompetisi antarwarga dari kedua desa. Fenomena ini mulai terasa sejak tahun 2000-an ketika warga Cenggu juga mulai berdagang di pasar. Hanya saja ada faktor lain yang terlibat, yakni peran tokoh masyarakat dalam penyebaran kabar tidak jelas yang membuat konflik di tingkat lokal (Pasar Nisa) menjadi lebih besar sehingga berimbas pada penutupan jalan dan sebagainya.⁵⁹

55 *Bima Ekspres, Lombok Pos*, 31 Desember 2013.

56 *Bima Ekspres, Lombok Pos, Suara NTB*, 3 Agustus 2014.

57 *Bima Ekspres, Lombok Pos, Suara NTB*, 4 Agustus 2013.

58 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

59 Mantan Kepala Desa Nisa, wawancara 20 Oktober 2014.

Laporan tentang adanya provokator sudah disampaikan kepada aparat keamanan, identifikasi oknum tersebut pun sudah dilakukan, namun tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian.⁶⁰ Akibat tidak adanya tindak lanjut, beberapa saat kemudian konflik pun pecah. Pada saat warga Cenggu berjualan dan berbelanja, pasar diserang.⁶¹ Insiden ini menyebabkan satu orang meninggal, satu rumah dibakar, empat rumah terkena peluru, dan rusaknya alat produksi pembuat batu bata, tanaman bawang, serta kedelai milik petani.⁶² Ketegangan ini berlangsung lebih dari satu hari. Pada saat aparat datang dan membuka blokir jalan, penyerangan kembali terjadi.⁶³

Pada saat konflik, tindakan pengamanan dari aparat keamanan dianggap telah memberi dampak yang positif. Namun demikian, tindakan pimpinan kepolisian yang mengganti pasukan Brimob dengan pasukan Pengendalian Masyarakat (Dalmas) dipertanyakan karena satuan Dalmas dianggap belum mampu mengatasi masalah di lapangan.⁶⁴ Di samping itu, tindakan penegakan hukum pascakonflik masih lemah. Pihak Kesbangpol Kabupaten Bima sendiri telah mengambil langkah tegas untuk menangani konflik, namun tidak didukung oleh aparat yang lain, seperti terlihat dari dilepaskannya para pelaku penyerangan dan perusakan dari tahanan.⁶⁵ Hal ini menyebabkan munculnya persepsi masyarakat tentang rendahnya kredibilitas pihak keamanan dalam mengungkap dan memproses secara hukum para pelaku kekerasan.⁶⁶

Model penanganan yang dianggap kurang optimal tersebut, terutama pada konflik besar yang terjadi sebelumnya, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat. Sampai hari ini belum ada penyelesaian atas kerugian yang diderita masyarakat akibat konflik tersebut.⁶⁷ Pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan sekadarnya untuk para korban, terutama keluarga korban yang meninggal. Namun demikian, bantuan material masih dianggap kecil, terutama bagi warga yang rumahnya dirusak atau dibakar.⁶⁸

2.2.2.3. Sumbawa

Berdasarkan data SNPK 2005-2014 (**Gambar 2.15**), secara kuantitatif tidak banyak insiden karena persoalan identitas terjadi di wilayah Sumbawa. Namun demikian, secara kualitatif ada satu insiden berkenaan dengan identitas yang besar dan meluas di wilayah tersebut pada Januari 2013. Insiden

60 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

61 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

62 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

63 Mantan Kepala Desa Nisa, wawancara 20 Oktober 2014.

64 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

65 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Bima, wawancara 20 Oktober 2014.

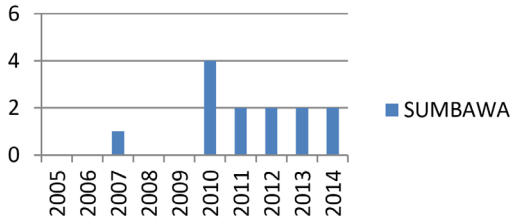
66 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Bima, wawancara 20 Oktober 2014.

67 Mantan Kepala Desa Cenggu, wawancara 19 Oktober 2014.

68 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Bima, wawancara 20 Oktober 2014.

kekerasan ini dipicu oleh adanya kabar burung dan provokasi tentang seorang perempuan warga etnis Sumbawa yang beragama Islam yang diperkosa dan dibunuh oleh seorang anggota Kepolisian Resor Sumbawa yang beragama Hindu. Isu tersebut beredar melalui SMS dan Blackberry Messenger (BBM) (Karsiman, 2014).

Gambar 2.16. Insiden Konflik Identitas Sumbawa, 2005-2014



Meskipun Kapolres Sumbawa sudah memberikan pernyataan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, warga tidak memercayainya. Pada siang hari 21 Januari 2013 massa dari warga Sumbawa Muslim mulai terkonsentrasi di beberapa titik di Kota Sumbawa. Ribuan warga ini kemudian melakukan serangkaian penjarahan dan perusakan terhadap harta benda milik warga keturunan Bali Hindu, termasuk merusak 478 bangunan, seperti tempat ibadah, rumah, toko, swalayan, hotel, bengkel, dan bangunan komersial lain, yang 70 di antaranya habis dirusak dan dibakar.⁶⁹ Para pelaku juga merusak dan membakar 14 sepeda motor dan 4 mobil. Ribuan aparat gabungan Kepolisian, Brimob, dan TNI diturunkan hingga akhirnya dapat meredam kerusuhan agar tidak meluas. Namun demikian, pada 22 Januari 2013 kerusuhan masih berlanjut di beberapa titik di wilayah Sumbawa. Massa melakukan perusakan terhadap satu toko dan membakar tiga rumah warga.⁷⁰

Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan warga Bali Hindu mengungsi ke markas Komando Distrik Militer (Kodim) Sumbawa, Polres Sumbawa, dan Kompi Senapan di Labuhan Sumbawa (Karisman, 2014). Warga yang mengungsi tersebut berjumlah 3.700 orang menurut satu sumber,⁷¹ dan 4.995 orang menurut sumber lain; mereka tersebar di delapan titik penampungan (Suada, 2013). Beberapa hari kemudian sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah mereka masing-masing (Suada, 2013). Kerusuhan ini mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi Sumbawa dan trauma yang mendalam, terutama dirasakan oleh para warga Bali Hindu yang mengalami tindakan kekerasan dalam konflik tersebut.

69 *Bima Ekspres*, *Gaung NTB*, *Kompas*, *Lombok Pos*, *Media Online JPNN*, dan *Suara NTB*, 23 Januari 2013.

70 *Bima Ekspres*, *Gaung NTB*, *Kompas*, *Lombok Pos*, *Media Online JPNN*, dan *Suara NTB*, 24 Januari 2013.

71 *AntaraNews*, 27 Januari 2013.

2.2.3. Dinamika dan Potensi Konflik di NTB

Dari beberapa kasus di atas, dapat dilihat bahwa beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami beberapa insiden yang berakibat pada adanya korban cedera dan meninggal serta kerusakan bangunan. Bila dilihat secara umum, potensi konflik di NTB melibatkan beberapa faktor yang saling berhubungan, antara lain kenakalan remaja, imbas kebijakan pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan identitas. Faktor-faktor ini menyumbang terhadap terjadinya konflik individu yang kemudian menjelma menjadi konflik komunal antarkampung atau antarkelompok.⁷² Penjelasan dari faktor-faktor tersebut dalam dilihat dari analisis berikut.

Pertama, kekerasan yang terjadi selama ini berawal dari perkelahian antarpemuda yang kerap dipengaruhi oleh minuman keras⁷³ dan dipicu oleh kenakalan remaja.⁷⁴ Latar belakang terjadinya konflik itu salah satunya karena adanya ketersinggungan antarpemuda yang membesar sehingga menyebabkan terjadi konsentrasi massa yang berujung pada bentrokan antarkelompok.⁷⁵ Namun demikian, pemicu tersebut tidak berdiri sendiri karena kerap dihubungkan dengan faktor-faktor lain. Misalnya, faktor politik yang berkenaan dengan pemilihan kepala desa. Sebagian besar konflik terjadi karena provokasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan pada pilkades tersebut, misalnya persaingan di antara calon kepala desa.⁷⁶

Kedua, faktor ekonomi, terutama akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi, serta angka pengangguran, juga cukup berkontribusi terhadap munculnya kekerasan antarkelompok, misalnya akibat kesempatan kerja didominasi oleh orang luar.⁷⁷ Konflik di Provinsi NTB berpotensi terjadi akibat kesenjangan sosial dan ekonomi, termasuk kesenjangan pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan kesenjangan-kesenjangan lainnya. Kemudian, hal yang juga berpotensi menjadi pemicu konflik adalah faktor pengangguran, tertutup maupun terbuka.⁷⁸ Walaupun merupakan salah satu pemicu konflik, pengangguran bukan faktor dominan⁷⁹ sebagaimana kemiskinan juga tidak dianggap sebagai faktor utama terjadinya konflik.⁸⁰

72 Namun demikian, pasca-Reformasi tahun 1998, pemicu konflik terjadi di Kabupaten Sumbawa relatif tidak terlalu beragam. Berdasarkan wawancara di lapangan, faktor pemicu yang lebih sering muncul hampir tidak memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Bahkan konflik yang terjadi tidak berujung pada terjadinya konflik dengan skala yang lebih luas. Hal ini antara lain disebabkan oleh keengganan sebagian kalangan warga Sumbawa menggunakan istilah “konflik” karena intilah tersebut berkonotasi adanya bentrokan besar antarmanusia (warga).

73 Pejabat Bidang Kesbangpol Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

74 Tokoh pemuda Desa Kawo, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

75 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

76 Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

77 Tokoh masyarakat Desa Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 4 Februari 2014.

78 Anggota DPRD Kota Mataram, wawancara 7 Februari 2015.

79 Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah, wawancara 4 Februari 2014.

80 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

Namun demikian, apabila dilihat lebih jauh, faktor kemiskinan masih dianggap sebagai biang terjadinya konflik. Hal ini biasanya didorong oleh kurangnya pendidikan masyarakat yang mengakibatkan mereka cenderung untuk bekerja sebagai pekerja kasar dengan penghasilan minim, di samping sedikitnya industri karena wilayah NTB yang terbatas. Dengan demikian, tumpuan sekarang diletakkan pada sektor pariwisata yang diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.⁸¹

Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak seimbang juga menciptakan potensi-potensi konflik. Dalam hal ini, pemerintah lebih kerap berpihak pada investor sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan. Masyarakat pun menjadi terbelah karena sebagian kelompok masyarakat mendukung, sebagian lagi menolak investor. Hal tersebut diperparah oleh adanya persoalan komunikasi antara pihak pemerintah, investor, dan masyarakat terutama, berkenaan dengan pengomunikasian kebijakan pemerintah, izin lokasi, dan hak pengelolaan oleh pihak investor.⁸²

Keempat, potensi konflik di NTB juga dipicu oleh lemahnya upaya penegakan hukum. Salah satu faktor penyebab munculnya konflik komunal adalah kurang tegasnya aparat, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Kemampuan aparat untuk menyelesaikan persoalan kecil dapat mencegah munculnya konflik komunal karena memungkinkan upaya pengerahan massa oleh pihak masyarakat dapat dihindari.⁸³

Kelima, identitas masih merupakan isu yang kerap menimbulkan konflik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama bila dikaitkan dengan etnisitas, agama dan kepercayaan, serta identitas antarkelompok/geografis. Konflik-konflik yang terjadi dapat dipicu oleh perkelahian antarkelompok, antar-kampung, dan antaragama. Misalnya, konflik berbasis identitas berkaitan dengan agama dan aliran kepercayaan yang terjadi pada tahun 2007, 2009, 2010, dan 2012.⁸⁴ Kecenderungan untuk terlibat dalam konflik komunal juga dipicu oleh tingginya solidaritas di antara para warga yang ingin membela anggota mereka yang terlibat konflik dengan anggota kelompok lain.⁸⁵ Di beberapa tempat di NTB, Lombok Tengah misalnya, terdapat aturan tidak tertulis yang menuntut setiap warga desa untuk terlibat pada saat terjadi konflik dengan kelompok lain. Sanksi sosial akan dikenakan kepada anggota masyarakat yang tidak ikut serta, misalnya dikucilkan dalam kegiatan desa hampir selama satu tahun.⁸⁶ Ancaman tersebut memaksa warga

81 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

82 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

83 Pejabat Kepolisian Resor Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

84 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 6 Februari 2015.

85 Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah, wawancara 4 Februari 2014.

86 Tokoh masyarakat desa di Lombok Tengah, wawancara, 4 Februari 2014.

untuk berpartisipasi karena tekanan warga lain yang besar dan ketakutan atas sanksi sosial.

Selain lima faktor di atas, pada tingkat provinsi, Tim Pemetaan Daerah Rawan Konflik dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat secara spesifik telah mengidentifikasi potensi konflik yang ada di NTB. Potensi ini dikelompokkan dalam empat kategori besar: konflik berbasis suku dan agama; konflik ekonomi, SDA, dan agraria; konflik politik, tata sosial, dan pemerintahan; konflik pemuda atau antarkampung (warga).⁸⁷ Rincian dari potensi-potensi konflik tersebut bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, berdasarkan upaya pemetaan yang mereka lakukan. Misalnya, di Kabupaten Lombok Tengah, potensi konflik yang telah dipe-
takan meliputi sembilan masalah, yaitu (i) pembalakan liar, (ii) sumber daya alam (galian C), (iii) Pamswakarsa, (iv) adat istiadat/perkawinan/keramaian umum, (v) sengketa tanah, (vi) distribusi minuman keras, (vii) tenaga kerja, (viii) Jamaah Ahmadiyah/Salafiyah, dan (ix) kepemilikan kayu gelondongan.⁸⁸

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram membagi potensi konflik di wilayahnya dalam empat kategori besar, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan gangguan kerukunan (Siswo, 2014). Kategori pertama meliputi konflik antaragama, konflik antarsuku, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Kategori kedua meliputi konflik antarpolisi politik, ormas, dan LSM. Kategori ketiga meliputi persaingan tidak sehat antarpengusaha, pedagang kaki lima yang mengganggu sarana dan kepentingan umum, dan hubungan tidak harmonis antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha. Kategori keempat meliputi hal-hal yang berhubungan dengan minuman keras/narkoba, kenakalan remaja, tindak kriminal, perkawinan antaragama, dan *nyongkolan* (arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita).

2.2.4. Dinamika Kelembagaan

Seperti tertera dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 6 ayat 2, pencegahan konflik merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Nusa Tenggara Barat harus menjalankan upaya-upaya memelihara kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimandatkan oleh UU tersebut.⁸⁹

⁸⁷ Pemetaan Daerah Rawan Konflik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2013.

⁸⁸ Peta Rawan Konflik Kabupaten Lombok Tengah. Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah.

⁸⁹ UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 6 ayat 1.

2.2.4.1 Lembaga Pemerintah

Seperti telah disebutkan, salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem peringatan dini adalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang disahkan pada tahun 2002 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.⁹⁰ Sesuai peraturan terkait tugas dan wewenang,⁹¹ Kominda Provinsi Nusa Tenggara Barat berada langsung di bawah tanggung jawab Gubernur NTB. Melalui Kominda, para kepala daerah akan membawahi Kepala Kesbangpol, unsur-unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya.⁹² Tugas koordinasi dilakukan oleh seluruh lembaga terkait dalam lingkup Kominda. Sesuai peraturan, untuk melaksanakan kegiatannya, Kominda mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk Kominda wilayah tingkat I, dan APBD kabupaten/kota untuk Kominda wilayah tingkat II.⁹³

Lembaga pemerintah yang berada dalam elemen pencegahan konflik berikutnya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), di mana pimpinannya merupakan sekretaris Kominda.⁹⁴ Lembaga Kesbangpol Nusa Tenggara Barat di tingkat I dan II berperan dalam pencegahan dini dengan membuat penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial. Peran ini merupakan implementasi dari salah satu program strategis Kesbangpol, yaitu memfasilitasi kewaspadaan nasional. Selain itu, Kesbangpol juga memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Meskipun mayoritas beragama Islam, penduduk NTB juga ada yang memeluk agama Hindu, Kristen Protestan, Katolik, dan Budha. Oleh karena itu, mengingat potensi konflik juga berhubungan dengan isu agama, maka keberadaan FKUB di provinsi ini diperlukan, terutama untuk membangun dan memelihara kerukunan antarumat beragama.⁹⁵ Forum yang beranggotakan pemuka-pemuka agama setempat ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Kegiatannya difasilitasi oleh pemerintah melalui pendanaan

90 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

91 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

92 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

93 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

94 Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 pasal 6.

95 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

dan penyediaan kantor. Koordinasi dalam FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berjalan cukup baik.

Terakhir, di tiap-tiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sendiri telah terbentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang beranggotakan Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPR, dan perwakilan dari TNI AL dan TNI AU. Melalui forum ini persoalan-persoalan daerah dibicarakan, termasuk diskusi tentang pencegahan konflik. Rapat koordinasi ini dilakukan secara reguler tiap bulan dan dapat ditambah apabila sewaktu-waktu terdapat masalah yang harus diselesaikan secepatnya. Selain itu, di NTB juga terdapat lembaga yang disebut *Regional Managament* (RM) Jonjok Batur yang beranggotakan kepala daerah kabupaten/kota. Lembaga ini merupakan wadah bagi para kepala daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi program pembangunan yang terintegrasi antarwilayah.^{96 97}

2.1.4.2. Lembaga Nonpemerintah

Perubahan kelembagaan tidak terlepas dari pengaruh perubahan politik nasional. Misalnya, menguatnya identitas etnis dan agama merupakan bagian dari fenomena baru di provinsi-provinsi di Indonesia pascaruntuhnya rezim Orde Baru (Nordholt & van Klinken, 2007, p. 21). Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Hal ini terlihat dari terbentuknya beberapa lembaga berbasis etnis, seperti Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) di Sumbawa, Lembaga Adat Masyarakat Donggo Raya (Lamdora) di Dompu,⁹⁸ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Majelis Adat Sasak (MAS) yang membawahi seluruh lembaga adat Sasak lain, seperti Desak Datu, Persatuan Pemuda Sasak (Pepasak), dan Gerakan Masyarakat Sasak (Gemas).⁹⁹

Di samping organisasi berbasis etnis, organisasi berbasis agama juga hadir di NTB. Misalnya, Nahdlatul Wathan (NW), sebuah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di NTB. Organisasi lokal ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada 1 Maret 1953. Organisasi ini sampai sekarang mengelola lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sepeninggal pendirinya, organisasi ini mengalami perpecahan sehingga terbagi menjadi

96 Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Barat, wawancara 27 Oktober 2014.

97 Misalnya, salah satu contoh aktivitas RM Jonjok Batur antara lain memfasilitasi terbentuknya 25 koperasi primer yang mengakomodasi produk unggulan, seperti kerajinan khas Lombok, pertanian (jagung dan singkong), peternakan kambing, dan perkebunan tembakau; juga memfasilitasi terbentuknya tiga koperasi sekunder yang berada pada tiap anggota kabupaten, yaitu Koperasi Sekunder Jonjok Batur Tengah, Koperasi Sekunder Jonjok Batur Barat, Koperasi Sekunder Jonjok Batur Timur, dengan total anggota sebanyak 7.800 KK (<http://regional.kompasiana.com/2012/02/26/harapan-baru-percepatan-ukm-di-singbebas-442485.html>).

98 <http://sarwon.com/2011/10/tokoh-donggo-ele-sambut-positif/>

99 <http://dewa-api.blogspot.com/2012/05/mas-jadi-payung-semua-lembaga-adat.html>

dua kubu, yaitu NW Pancor yang berpusat di Pancor, Lombok Timur, dan NW Anjani yang berpusat di Anjani, Lombok Timur. Perpecahan tersebut disinyalir akibat adanya persaingan internal organisasi dan kepentingan politik. Meskipun terjadi perpecahan, keberadaan NW justru semakin berkembang dan mulai dikenalkan ke daerah-daerah luar NTB. Hal ini sebagian didorong oleh keberhasilan politis para anggota NW sebagai pemimpin daerah dan politisi nasional dalam mengenalkan NW melalui komunikasi politik mereka. Oleh karena itu, keberadaan NW di NTB, terutama di Lombok, sangat diperhitungkan terutama bila dikaitkan dengan tujuan politik, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah (Hamdi, 2014).

Beberapa organisasi masyarakat sipil lain di NTB yang juga berciri keagamaan di antaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi keagamaan besar tersebut telah ada di NTB sejak lama. Untuk organisasi keagamaan lain yang lebih kontemporer, keberadaan mereka kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama menyangkut aspek legalitas keberadaan mereka. Misalnya, keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih dipersalahkan karena dianggap sebagai organisasi terlarang yang menyimpang dari ajaran Islam. Akibatnya, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa Barat belum merespons permohonan izin keberadaan organisasi tersebut karena belum adanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepala Kantor Kementerian Agama, ataupun Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).¹⁰⁰

Meninjau dinamika kelembagaan di NTB, salah satu fenomena yang patut diperhatikan adalah munculnya organisasi-organisasi paramiliter dan milisi yang berlabel Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa), terutama di Pulau Lombok.¹⁰¹ Setelah munculnya Pamswakarsa di Jakarta, beberapa bulan kemudian di Pulau Lombok organisasi-organisasi paramiliter/milisi didirikan untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Pamswakarsa Buru Jejak (Bujak) yang beranggotakan mantan kriminal dan preman jalanan. Sesuai namanya, pekerjaan mereka adalah memburu para pelaku kriminal yang melakukan tindakan pencurian dan lain-lain. Sebenarnya kelompok yang terdiri atas para mantan kriminal ini dibentuk pada tahun 1994. Bisnis utamanya adalah melacak barang curian yang kemudian akan ditebus oleh pemilik barang dan menyediakan jasa perlindungan. Kelompok ini dibubarkan polisi pada 1996, namun mulai beroperasi kembali

100 *Republika Online*, 6 Februari 2015 (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/06/njcd4w-bakesbangpoldagri-tunggu-putusan-mui-soal-status-gafatar>).

101 Penamaan organisasi ini sebagai Pamswakarsa merujuk saat Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu, memobilisasi massa dengan nama Pamswakarsa untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada November 1998.

setelah jumlah pencurian meningkat pada tahun-tahun selanjutnya (Hussein & Ikhwanto, 2012).

Kurangnya kepemimpinan moral yang kuat dan reputasi Bujak yang buruk membuat sebagian anggota masyarakat terinspirasi untuk membentuk Pamswakarsa baru bernama Amphibi (Amankan Masyarakat, Pemerintah, Hukum Indonesia Berdasarkan Iman) (Prabowo & Khafid, 2000). Amphibi kemudian menjadi Pamswakarsa terbesar di Lombok, bahkan salah satu organisasi milisi terbesar di Indonesia (McDougal, 2007, p. 293). Amphibi sendiri merupakan milisi antikejahatan yang diklaim mendapat legitimasi dari sisi keagamaan karena didirikan oleh tuan guru yang merupakan tokoh agama Islam yang dihormati di Lombok.

Persinggungan lingkup kerja dan persaingan pengaruh atau bisnis memunculkan kekerasan antarkelompok di antara Pamswakarsa-Pamswakarsa ini. Misalnya, pada 2 Agustus 1999 para anggota Amphibi dan Bujak terlibat dalam bentrokan di Keruak, Lombok Timur. Bentrokan ini dipicu oleh masuknya anggota Amphibi untuk menangkap perahu yang membawa ternak curian yang mendarat di wilayah kelompok Bujak. Akibat bentrokan ini, sedikitnya enam orang tewas dan beberapa rumah anggota Bujak dibakar (Prabowo & Khafid, 2000). Tidak hanya itu, konflik antardesa kemudian melibatkan anggota kelompok Pamswakarsa yang berasal dari luar desa-desa yang bertikai. Contohnya, pertikaian antara satu kelompok Pamswakarsa dan warga Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada Rabu malam awal Januari 2001. Insiden ini sebenarnya diawali oleh bentrokan antara warga Desa Bongor dan Desa Perampuan. Tidak lama kemudian beberapa truk terbuka berisi anggota Pamswakarsa dari beberapa desa dengan bersenjata tajam tiba di Desa Perampuan dan menyerang warga desa tersebut. Bentrokan berlangsung sampai keesokan harinya dan menyebabkan delapan warga tewas, sementara lainnya luka-luka (Thoha, 2001).

Menurut catatan Thoha (2001), sampai tahun 2001 ada sekitar 68 organisasi Pamswakarsa di Lombok. Organisasi dengan jaringan anggota yang luas antara lain Amphibi (100.000 orang anggota; atau 210.000 orang menurut pengakuan pengurus Amphibi), Bujak (80.000 orang), Hisbullah (50.000 orang), Elang Merah (38.000 orang), Ta'awun (30.000 orang), Gunung Pujut (30.000 orang), Hamzan Wadhi (30.000 orang), dan Zulfakar (20.000 orang). Daerah-daerah yang tidak berada dalam jaringan Amphibi, warganya membentuk organisasi Pamswakarsa sendiri dengan berorientasi pada identitas geografis seperti Elang Merah (Sakra), Sapu Jagad, dan Ababil (TGH Bodak) di Lombok Timur, Perkasa Pengsor di Perampuan (Lombok Barat), Pemenang Bersatu di Tanjung (Lombok Utara) dan Pamswakarsa berbasis identitas sosio religius seperti Dharma Wicesa (dibentuk oleh warga minoritas Bali Hindu) dan Langlang Jagat (dibentuk oleh warga Wetu Telu di Lombok

Utara). Munculnya organisasi-organisasi Pamswakarsa ini merupakan bentuk resistensi terhadap dominasi Amphibi (McDougal, 2007, p. 300). Untuk keperluan koordinasi, seluruh organisasi Pamswakarsa kemudian sepakat untuk membentuk Forum Komunikasi Pamswakarsa NTB. Menurut Ketuaanya, TGH Muchlis Ibrahim, forum tersebut bertujuan untuk “menciptakan nuansa internal Pamswakarsa yang timbal balik, meluruskan setiap perilaku anggota yang arogan sesuai koridor hukum dan menjadikannya mitra polisi dengan tugas pokok mengindikasikan tindak kriminal” (Thoha, 2001).

Saat ini, keberadaan Pamswakarsa banyak digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Untuk kepentingan politik, misalnya, Pamswakarsa digunakan untuk mengintimidasi warga supaya memilih salah satu calon bupati/wali kota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk kepentingan ekonomi, Pamswakarsa dimanfaatkan oleh pengusaha yang hendak melakukan pembebasan tanah untuk kebutuhan pariwisata, misalnya di wilayah Kuta, Lombok Tengah.¹⁰² Keberadaan Pamswakarsa kemudian juga dikerahkan sebagai alat pembantu pengamanan, seperti yang terlihat dari apel besar Pamswakarsa se-Pulau Lombok di halaman Kantor Gubernur NTB. Apel ini dihadiri oleh para pejabat, seperti Wakil Gubernur NTB, Wakil Kepala Polda NTB, Pelaksana Harian Kepala Staf Resor Militer (Kasrem) 162/WB, perwakilan dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Mataram, dan perwakilan dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanau) Rembika, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan Pamswakarsa yang ada di Pulau Lombok.¹⁰³ Partisipasi organisasi/kelompok Pamswakarsa dalam membantu pengamanan telah mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari kebijakan “Empat Pilar Kamtibmas”, yang terdiri atas Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pamswakarsa.¹⁰⁴

Dari paparan di atas dapat dilihat dinamika kelembagaan di Nusa Tenggara Barat, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Sebagian lembaga tersebut berperan aktif dalam membangun dan menjaga stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan, sementara yang lain berpotensi menyebabkan instabilitas wilayah akibat sepak terjang mereka yang cenderung menciptakan konflik, baik horizontal maupun vertikal, di provinsi ini.

102 Tokoh masyarakat Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

103 “Apel Besar Lang-Lang se-Pulau Lombok.” Diakses dari <http://koremwirabhakti.blogspot.com/2013/10/apel-besar-lang-lang-se-pulau-lombok.html>

104 Pernyataan Kapolda NTB dalam Harian Umum *Nurani Rakyat*, 24 Januari 2014, “Kapolda Lounching [sic] Empat Pilar Kamtibmas.”

Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat

BANK DUNIA DALAM “Laporan Pembangunan Dunia” pada tahun 2011 mengenai “Konflik, Keamanan, dan Pembangunan” melihat adanya potensi “Kekerasan yang Berulang” (*Cycle of Repeated Violence*) karena masyarakat yang pernah mengalami kekerasan yang serius memiliki kerentanan terhadap konflik dan ketidakmampuan dalam mentransformasi institusi. Terkait kerentanan terhadap kekerasan, Bank Dunia melihat adanya “tekanan” pada tiga dimensi, yaitu keamanan, ekonomi, dan keadilan, yang melekat di dalam kondisi internal dan eksternal suatu masyarakat sehingga memiliki peranan terhadap risiko terjadinya kekerasan. Kerentanan internal dalam aspek *tekanan keamanan*, menurut Bank Dunia (2011, p. 82), terkait dengan warisan kekerasan serta trauma, sedangkan aspek *tekanan ekonomi* terkait dengan permasalahan pengangguran di kalangan pemuda, kekayaan sumber daya alam, korupsi, dan urbanisasi masif. Bank Dunia (2011, p. 82) juga melihat aspek *tekanan keadilan*, seperti persaingan kelompok etnis dan agama, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM yang ada dalam internal masyarakat, membuat kekerasan menjadi rentan terulang kembali.

Dalam konteks internal masyarakat Kalimantan Barat, ketiga “tekanan kerentanan” yang diidentifikasi oleh Bank Dunia dalam laporannya tersebut dapat ditemukan dalam potensi kekerasan yang dipengaruhi oleh komposisi kelompok etnis, kondisi pascakekerasan komunal, dan pengaruh desentralisasi. Dalam aspek *tekanan keamanan*, warisan kekerasan dapat ditemukan dalam masyarakat Kalimantan Barat, di mana prasangka etnis dan trauma warga Madura sebagai bagian dari kondisi pascakekerasan komunal masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek *tekanan ekonomi*, konflik sumber daya alam dan pengangguran terutama di kalangan pemuda dapat membuat masyarakat Kalimantan Barat rentan dengan kekerasan. Terakhir, dalam aspek *tekanan keadilan*, munculnya persaingan antarkelompok etnis dalam memperebutkan kekuasaan politik dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dapat menciptakan kerentanan kekerasan.

Di balik potensi kekerasan terkait pola konflik baru dan kerentanan pada aspek-aspek risiko kekerasan, keadaan Kalimantan Barat yang relatif aman

serta terhindar dari berulangnya kekerasan komunal dalam 16 tahun terakhir ini tidak terlepas dari peran elite kelompok etnis dan peran lembaga pemerintah serta lembaga nonpemerintah. Dinamika ketiga faktor—komposisi kelompok etnis, kondisi pascakekerasan komunal, dan pola konflik baru di era desentralisasi—dapat berpotensi mendorong terulangnya kembali kekerasan berskala besar di Kalimantan Barat. Peran elite, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah menjadi penting dalam mencegah potensi konflik baru dan mencegah bereskalasinya konflik dari satu wilayah ke wilayah lain di Kalimantan Barat.

Bab ini berusaha melihat bagaimana peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam melakukan pencegahan kekerasan pascakekerasan komunal di Kalimantan Barat. Peran pencegahan dan menjaga perdamaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada meliputi berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan pendidikan. Semua aspek tersebut dapat memberikan gambaran seberapa jauh peran yang dilakukan lembaga-lembaga itu dalam pencegahan kekerasan, dan seberapa jauh kontribusinya terhadap kondisi perdamaian dan keamanan di Kalimantan Barat.

Studi kasus pada bab ini juga memperlihatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam mengupayakan pencegahan konflik melalui berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan kekerasan dapat berasal dari kelompok etnis atau kelompok agama yang sama, dapat juga berasal dari kelompok etnis atau kelompok agama yang berbeda. Diharapkan studi kasus di Kalimantan Barat ini dapat memberikan masukan kebijakan untuk peningkatan kapasitas lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat luas agar dapat mengoptimalkan kondisi yang relatif lebih damai dan aman.

3.1. PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NONPEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT

Mengingat banyaknya faktor yang memengaruhi stabilitas dan perdamaian di suatu wilayah, maka upaya pencegahan konflik di Kalimantan Barat tidak dapat bergantung pada peran aktor tunggal. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 6 ayat 2, menyatakan bahwa “*pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*” Pasal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan lembaga nonpemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik. Kapasitas tiap aktor, baik lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat, dalam pencegahan konflik perlu dimaksimalkan dalam rangka membangun

perdamaian melalui sinergisitas dan kerja sama. Peranan lembaga dan partisipasi masyarakat ini sangat krusial demi mencapai tujuan yang digariskan dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2012, yaitu untuk (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat, (b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, (c) meredam potensi konflik, dan (d) membangun sistem peringatan dini.

Salah satu faktor yang memengaruhi perdamaian di masyarakat Kalimantan Barat adalah terakomodasinya kepentingan kelompok mayoritas, seperti kelompok Dayak dan Melayu, di bidang politik. Usman Pelly (1999) melihat bahwa kelompok Madura selama rezim Orde Baru dijadikan penyangga (*buffer*) untuk membangun kelompok elite dan menghadapi kelompok papan bawah yang merupakan kelompok-kelompok pribumi setempat. Bagi Pelly, kelompok Madura dijadikan penyangga karena mereka memiliki kapasitas di kehidupan sosial politik, misalnya dengan menjadi anggota DPRD, dan memiliki kemampuan lebih dibanding rata-rata transmigran dari daerah lain. Dengan runtuhnya Orde Baru, lanskap konfigurasi kekuatan di Kalimantan Barat bergeser dan membuka kesempatan bagi kelompok Dayak dan kelompok Melayu untuk memasuki ranah politik dan berpartisipasi dalam kontestasi memperebutkan kekuasaan politik (*political opportunities*). Ruang partisipasi politik ini terutama telah melepaskan kelompok Dayak dari marginalisasi selama tiga puluh tahun lebih akibat tekanan kekuasaan Soeharto dan rezim Orde Baru.

Menurut Tanasaldy (2012, p. 300), selain terakomodasinya tuntutan politik Dayak melalui posisi pimpinan di dua kabupaten yang baru terbentuk, menurunnya konflik antaretnis di Kalimantan Barat juga ditentukan oleh beberapa faktor lain. *Pertama*, terbentuknya keseimbangan kekuatan di antara kelompok Dayak dan Melayu setelah peristiwa 1999, di mana para elite Dayak menyadari agresivitas mereka dapat memprovokasi kelompok Melayu. Kekerasan sebagai unjuk kekuatan yang terjadi di antara Dayak dengan Madura dan Melayu dengan Madura menjadi dalih (*pretext*) bagi kelompok Dayak dan kelompok Melayu untuk mengklaim serta menunjukkan kekuatan politik mereka. *Kedua*, adanya pembagian dan pengaturan kekuasaan secara informal di antara kelompok Dayak dan Melayu serta munculnya kompetisi di dalam kelompok etnis Dayak dan Melayu itu sendiri. *Ketiga*, adanya tiga undang-undang pemilihan kepala daerah setelah Reformasi membatasi sumber terjadinya ketegangan politik antarkelompok etnis. Pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut telah mendorong partai politik untuk memilih calon legislator yang berasal dari kelompok etnis yang dominan di distrik tertentu (Tanasaldy, 2012, p. 304). Hal ini memungkinkan adanya representasi etnis yang proporsional di DPRD lokal sehingga kepentingan kelompok etnis yang ada dapat terakomodasi (Tanasaldy, 2012, p. 305).

Aspek ekonomi merupakan faktor penting yang menjadi salah satu akar konflik di Kalimantan Barat. Faktor ketimpangan ekonomi antarkelompok etnis menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan dalam hubungan antarke-lompok etnis. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu ditangani dalam pencegahan konflik. Salah satu lembaga nonpemerintah yang menaruh perhatian lebih pada pengembangan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat adalah *Credit Union*. *Credit Union* melihat permasalahan ekonomi yang berkembang di masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak, berupa ketidakberdayaan ekonomi. Istilah ketidakberdayaan ekonomi digunakan karena pada masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang berkembang adalah kemiskinan mental, bukan kemiskinan fisik dalam arti materi. Kemiskinan mental ini telah mengakibatkan masyarakat Dayak tidak hanya mengalami kesulitan keuangan, tetapi juga tertinggal dalam hal pendidikan dan kesehatan (Bamba, 2002, p. 19). Oleh karena itu, *Credit Union* hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan ekonomi yang baik sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri secara ekonomi.

Lembaga keuangan yang dimulai di Jerman pada 1864 ini mulai masuk ke Kalimantan Barat pada tahun 1976. Perkembangan *Credit Union* mengalami turun-naik di Kalimantan Barat. Banyak *Credit Union* yang muncul, tetapi banyak juga yang tidak dapat bertahan dan akhirnya tutup. Hal ini terjadi karena *Credit Union* masih menggunakan sistem asing yang dalam pelaksanaannya tidak mengadaptasi nilai-nilai identitas dan budaya lokal (Bamba, 2002, p. 22). Oleh karena itu, pada tahun 1984 Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, salah satu lembaga yang fokus pada permasalahan sosial masyarakat Dayak, mendirikan *Credit Union* Pancur Kasih.

Credit Union Pancur Kasih bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Dayak. Lembaga ini dipandang sebagai sebuah sarana untuk memberdayakan dan membebaskan masyarakat Dayak dari kemiskinan, serta dari terbatasnya akses kesehatan dan pendidikan. Pada *Credit Union* Pancur Kasih masalah kurangnya nilai-nilai lokal dapat diatasi. *Credit Union* ini sangat mendukung nilai-nilai lokal masyarakat Dayak, sehingga berhasil memperluas jaringannya dan tidak hanya diminati oleh masyarakat Dayak, tetapi juga oleh masyarakat dari etnis lain, seperti masyarakat Melayu dan Madura. Bahkan dari segi bentuk pembangunan ekonomi ini, diakui bahwa pemikiran masyarakat Dayak sudah lebih maju.

Dengan sistem koperasi simpan-pinjam, *Credit Union* memungkinkan para anggotanya meminjam uang dan memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk berinvestasi di sektor-sektor riil. Dengan demikian, setelah pinjaman tersebut lunas, anggota mendapatkan manfaat ganda, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperoleh saldo tabungan (Lingu dan Wahono,

2013, p. 55). Angka pengangguran yang terbilang cukup tinggi di Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor konflik di sana. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh anggota *Credit Union*, potensi ini dapat ditekan. Selain itu, *Credit Union* juga memberikan edukasi yang kontinu kepada anggotanya agar pemahaman mereka akan pentingnya menabung dan melakukan perencanaan finansial di masa depan menjadi lebih baik (Lingu dan Wahono, 2013, p. 55).

Penyebaran *Credit Union* di berbagai wilayah di Kalimantan Barat membuat masyarakat Kalimantan Barat turut serta dalam upaya pencegahan konflik di sana. Baik dengan menjadi pegawai maupun nasabah *Credit Union*, masyarakat akan bersosialisasi tidak hanya dengan orang-orang dari etnis yang sama, tetapi juga dari etnis yang berbeda. Melalui sosialisasi ini, komunikasi antaretnis akan tercipta sehingga rasa kesatuan semakin muncul. Pada gilirannya partisipasi masyarakat menjadi lebih luas lagi karena pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada sesama nasabah *Credit Union*. Seorang tokoh masyarakat Madura menyebutkan bahwa keberadaan *Credit Union* cukup membantu sepanjang ada warga yang memanfaatkannya. Salah satu kendala *Credit Union* untuk bisa diterima masyarakat Melayu di Sambas adalah adanya persepsi pada sebagian kalangan yang memandangnya sebagai bentuk misionaris. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan diberikan penjelasan, perkembangan *Credit Union* di Sambas semakin besar.

Beberapa lembaga pemberdayaan ekonomi selain *Credit Union* juga berkembang di Kabupaten Sambas. Salah satunya adalah Gerakan Ekonomi Masyarakat di kalangan masyarakat Melayu yang dicetuskan oleh salah seorang tokoh masyarakat Sambas. Selain itu, kelompok-kelompok tani juga didorong untuk melakukan pengembangan bagi kepentingan mereka sendiri. Untuk keperluan ini dibentuk organisasi Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) yang coba mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat dengan cara menghidupkan koperasi karet. Meskipun harga karet saat ini sedang mengalami penurunan, namun koperasi ini tetap berguna untuk mewadahi berbagai kegiatan ekonomi. Para kelompok tani juga sering bertukar pemikiran, ide, dan cara untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

Faktor budaya, seperti kurangnya pemahaman budaya di antara anggota-kelompok etnis yang berbeda, berpotensi memunculkan konflik di dalam masyarakat Kalimantan Barat. Oleh karena itu, upaya pengenalan budaya dan menjadikan budaya media pencegahan konflik menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang melakukan pencegahan konflik dari aspek budaya adalah Walubi. Komunitas masyarakat berlatar belakang agama Budha dan didominasi etnis Tionghoa ini selalu melibatkan warga dari etnis dan agama lain dalam kegiatan seni dan budaya mereka. Demikian juga sebaliknya, pada saat ada warga dari etnis atau agama lain yang melakukan kegiatan budaya,

warga Walubi selalu membantu dan turut serta. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sering mengambil lokasi di jalan-jalan protokol atau fasilitas publik juga menjadi salah satu cara pengenalan budaya Tionghoa kepada warga etnis lain.

Masyarakat Madura juga memiliki lembaga yang ikut ambil bagian dalam pencegahan konflik dari aspek budaya. Lembaga tersebut bernama Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM). Selain berlatar belakang etnis tertentu, IKBM juga berlatar belakang agama tertentu, yaitu Islam. Dalam setiap kegiatan budayanya, warga Madura yang tergabung dalam IKBM selalu melibatkan perwakilan-perwakilan dari kecamatan dan desa lain. Perwakilan-perwakilan ini tidak harus berasal dari etnis Madura atau beragama Islam, tetapi masyarakat dari etnis dan agama lain pun dapat turut serta di dalamnya.

Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan bersama ini sangat penting untuk mempersatukan warga di Kalimantan Barat. Hal senada juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat di Sungai Pinyuh. Mereka mengungkapkan bahwa dalam kegiatan budaya yang dilakukan terlihat ada kebersamaan antaretnis. Kebersamaan ini mengikat mereka dalam kerukunan, karena pada setiap kegiatan tersebut mereka berinteraksi dengan masyarakat dari etnis dan agama lain. Misalnya saat warga dari etnis Melayu mengadakan acara kebudayaan, etnis lain seperti Cina dan Madura juga terlibat di sana. Keterlibatan tersebut tidak hanya dilakukan pada level pimpinan, tetapi juga pada semua level masyarakat. Di sana, mereka saling menjaga supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, pemahaman mereka akan etnis lain pun semakin baik sehingga toleransi semakin meningkat. Hal ini pula yang kemudian mendorong diadakannya festival budaya bersama. Festival budaya ini diadakan setiap tahun dengan melibatkan kecamatan-kecamatan dari beberapa kabupaten. Menurut tokoh masyarakat di kecamatan Ambawang, biasanya festival ini melibatkan tiga kabupaten atau lebih. Selain itu, setiap tahun lokasi pelaksanaannya berpindah-pindah dari satu kecamatan di satu kabupaten ke kecamatan lain di kabupaten yang berbeda. Festival budaya ini tidak hanya menyajikan pertunjukan seni budaya, tetapi juga pasar rakyat yang memungkinkan masyarakat antaretnis berinteraksi satu sama lain.

Pendidikan merupakan faktor penting yang juga harus dikembangkan dalam rangka mencegah konflik di Kalimantan Barat. Aktor-aktor pencegahan konflik di Kalimantan Barat sangat menyadari pentingnya faktor ini, sehingga peran untuk meningkatkan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga nonpemerintah. Dari sisi pemerintah, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat memainkan peranan penting dalam proses identifikasi potensi konflik. Selain itu, Kesbangpol juga melakukan upaya pendidikan di masyarakat. Untuk melakukan upaya ini Kesbangpol tidak bergerak sendirian, tetapi melakukan

kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam melakukan pemetaan konflik dan pendidikan terkait hubungan antarkelompok.

Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dan *Centre for Acceleration of Inter Religious and Ethnic Understanding* (CAIREU) IAIN Pontianak pada tahun 2013 bekerja sama mengeluarkan “Laporan Survey; Potensi Kerawanan Konflik Sosial di Kalimantan Barat Tahun 2013”. Laporan ini merupakan kontribusi penting bagi upaya pencegahan konflik di Kalimantan Barat. Dari hasil laporan pemetaan tersebut identifikasi potensi konflik sumber daya alam, misalnya, dapat dilakukan di daerah-daerah dengan lahan kelapa sawit terbesar, seperti Kabupaten Ketapang, Sanggau, Landang (Ngabang), dan Karet di Sintang. Identifikasi ini penting sebagai sumber rujukan bagi lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang rawan potensi konflik sumber daya. Selain itu, laporan Kesbangpol juga memuat tiga belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan profil dan potensi konflik masing-masing.

Kendala terbesar bagi kerja sama di antara kedua lembaga tersebut adalah kurangnya distribusi dan penyebaran hasil laporan mereka ke lembaga-lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Padahal diseminasi pengetahuan yang berasal dari laporan tersebut penting karena bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk merumuskan upaya pencegahan kekerasan di Kalimantan Barat. Suatu lembaga survei, baik dari dalam maupun luar pemerintah, dapat memberikan tekanan melalui data hasil penelitian yang kuat yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Metode ilmiah dalam pemetaan yang dilakukan oleh Kesbangpol juga dapat digunakan, misalnya, untuk melihat apakah benar dalam kasus Sambas seluruh masyarakat di sana menolak kelompok Madura untuk kembali ke Kabupaten Sambas.

Upaya lain yang juga signifikan adalah penyelenggaraan pendidikan multikulturalisme untuk pelajar sekolah yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Melawi, Sekadau, Landak, dan Kota Singkawang. Dari target 100 pelajar SMU dari berbagai sekolah, jenis kelamin, suku bangsa, dan agama, kegiatan pendidikan multikulturalisme ini bahkan diikuti oleh 344 pelajar (Kesbangpol, 2013, p. 7). Dari “Laporan Pelaksanaan Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013” yang dikeluarkan oleh Kesbangpol, tujuan pendidikan multikulturalisme tersebut adalah:

“... guna mereduksi berbagai prasangka akibat stereotip negatif yang melekat dan dilekatkan kepada masing-masing suku bangsa-suku bangsa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan diharapkan akan meminimalisasi konflik yang berbasis etnis di kemudian hari... dengan meningkatkan kembali interaksi dan komunikasi di kalangan generasi muda, diharapkan pula akan

timbul sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan asasi yang dimiliki oleh setiap manusia...” (Kesbangpol, 2013, hal 2)

Tujuan pelaksanaan pendidikan multikulturalisme ini sangat tepat mengingat kondisi pascakonflik komunal menciptakan prasangka di masyarakat, terutama terhadap kelompok etnis Madura, di samping segregasi antarkelompok etnis yang disebabkan oleh pemekaran wilayah.

Salah satu lembaga nonpemerintah yang melakukan pengembangan pendidikan dalam rangka pencegahan konflik adalah Institut Dayakologi. Institut Dayakologi menyelenggarakan pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah yang berada di dalam jaringannya. Pendidikan multikulturalisme ini mempersempit ruang perbedaan di antara murid-murid yang memiliki latar belakang etnis berbeda-beda. Pemahaman mengenai etnisitas dan tenggang rasa bukan hal yang sederhana, terlebih di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik antaretnis. Oleh karena itu, pemberian materi pengajarannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang; harus oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman yang baik mengenai etnis. Peran inilah yang kemudian diambil oleh Institut Dayakologi.

Institut Dayakologi tidak hanya memberikan bahan pengajaran, tetapi juga menyediakan pengajar yang telah mereka latih dan mendapatkan pendidikan multikulturalisme. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, pengajaran dilakukan di sekolah-sekolah yang homogen. Sekolah homogen dipilih karena siswa-siswinya jarang bergaul dengan anak-anak dari etnis lain, sehingga menjadi rentan terhadap kebanggaan berlebih akan identitas etnisnya. Pengenalan etnis dan budaya yang berbeda sangat baik bagi mereka supaya mereka mampu bertenggang rasa dan berempati terhadap etnis lain. Pendidikan multikulturalisme ini tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah homogen yang latar belakang etnisnya Dayak dan beragama Kristen, tetapi juga di pesantren-pesantren yang latar belakang etnisnya Madura dan beragama Islam.

Peran pencegahan konflik dari aspek pendidikan ini ternyata tidak hanya dijalankan oleh lembaga adat seperti Institut Dayakologi. Lembaga dengan latar belakang keuangan seperti *Credit Union* Pancur Kasih pun menjalankan peran pendidikan ini, walaupun bentuknya bukan melalui lembaga pendidikan, tetapi melalui kegiatan-kegiatan bersama yang diadakan dan diikuti oleh anggota *Credit Union* dari berbagai macam etnis. Kegiatan apa pun yang diadakan oleh anggota *Credit Union* (tidak harus kegiatan ekonomi), pasti mendapatkan respons positif dari anggota-anggota lain tanpa melihat latar belakang etnisnya. Hal ini juga membangun rasa memiliki satu sama lain dan memudahkan pembentukan sistem pencegahan konflik dini, baik di lembaga *Credit Union* maupun di wilayah tempat lembaga itu berada.

Pendidikan sebagai upaya untuk mentransformasikan konflik yang pernah terjadi ke arah interaksi yang positif merupakan hal krusial. Transformasi

yang dibutuhkan menyangkut cara berpikir dalam melihat konflik dengan tidak hanya berfokus pada upaya penghentian konflik, tetapi juga langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum konflik itu terjadi. Perubahan paradigma ini diperlukan oleh pemerintah agar peran yang dijalankannya tidak seperti “pemadam kebakaran” belaka, yaitu pasif menunggu adanya konflik dan kekerasan lalu baru mengambil tindakan aktif menyelesaikannya. Selain itu, pendidikan multikulturalisme dan semacamnya diperlukan oleh kelompok perempuan, pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Akan lebih efektif jika upaya menjaga stabilitas berbasiskan masyarakat dengan memperkuat kelompok-kelompok akar rumput untuk menjadi sentra-sentra pengendali konflik. Pendidikan multikulturalisme sendiri masih minim di sekolah-sekolah. Oleh karenanya, untuk menggalakkan nilai-nilai multikulturalisme perlu ada upaya lebih jauh dengan menggunakan berbagai jenis media dan institusi lain seperti universitas, simposium, dan televisi.

Salah satu sistem pencegahan yang baik adalah melalui pendidikan non-formal, misalnya melalui media-media televisi dan media-media kampanye. Upaya pencegahan konflik dengan menggunakan media sudah dilakukan di Kalimantan Barat, yaitu melalui media visual, termasuk film. Metode ini pernah digunakan oleh salah satu organisasi keagamaan di Pontianak untuk mengatasi berkurangnya nasionalisme pemuda di perbatasan. Permasalahan identitas dan nasionalisme di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia dapat menjadi salah satu potensi konflik di wilayah perbatasan. Mudah-mudahan akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi lain di negara tetangga, membuat para pemuda perbatasan kurang merasakan kehadiran pemerintah Indonesia di sana. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi ini adalah kurangnya rasa toleransi dan kebersamaan antaretnis di daerah perbatasan. Atas dasar pertimbangan itu, organisasi keagamaan tersebut membuat film yang di dalamnya melibatkan empat etnis besar di Kalimantan Barat, yaitu Dayak, Melayu, Madura, dan Tionghoa. Film ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme pemuda di wilayah perbatasan.

Terakhir, faktor keamanan merupakan kunci dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian di Kalimantan Barat. Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan bagian terpenting yang secara efektif dapat berfungsi mencegah konflik dan kekerasan. Ketegasan dalam penegakan hukum di Kalimantan Barat, misalnya di Kota Pontianak, menjadi kunci bagi pencegahan kekerasan. Bila orang yang melanggar aturan secara tegas ditindak, maka tidak akan terjadi konflik apa pun. Sebaliknya, jika terjadi pembiaran terhadap pelanggaran hukum, hal ini dapat menjadi salah satu sumber konflik. Oleh karena itu, segenap penegak hukum di Kota Pontianak berupaya keras menegakkan

peraturan, termasuk terhadap permasalahan kecil seperti pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum ini mesti dilaksanakan oleh Polres dan Dandim Kota Pontianak untuk menjaga dan mewaspadai kemungkinan meluasnya kekerasan jika terjadi perkelahian antarpemuda. Potensi membesarnya konflik dipengaruhi oleh keterlibatan pelaku-pelaku perkelahian yang berasal dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda, mengingat kondisi pascakonflik komunal menyebabkan masih berkembangnya prasangka di masyarakat terhadap kelompok-kelompok etnis yang berbeda.

Salah satu kasus yang berpotensi menjadi besar namun berhasil diredam oleh penegak hukum adalah peristiwa bentrokan antara kelompok Madura dan kelompok Melayu akibat pertandingan sepak bola. Pada peristiwa tersebut terdapat korban tewas dari pihak kelompok Melayu. Namun karena pihak penegak hukum segera turun ke lapangan, insiden bentrokan tersebut dapat diatasi. Penegakan hukum dilaksanakan dengan menangkap pelaku dan menenangkan pihak keluarga korban dengan menjanjikan kepastian hukum. Setelah proses tersebut dilaksanakan, hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Mekanisme ini sedikit banyak berhasil mencegah konflik menyebar dan menjadi besar karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada beberapa upaya keamanan yang penting dalam melakukan pencegahan. *Pertama*, penegakan hukum memainkan peranan penting dalam pencegahan kekerasan. Tindakan ini digunakan pemerintah Kota Pontianak untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat kepada aturan hukum. Dengan adanya ketegasan hukum keamanan masyarakat Kota Pontianak relatif lebih terjaga. *Kedua*, menghilangkan eksklusivitas lembaga pemerintah di hadapan masyarakat. Ekses buruk dari eksklusivitas lembaga pemerintah ini adalah tidak terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan baik. *Ketiga*, menggunakan hukum positif dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, ketimbang mekanisme penyelesaian alternatif atau adat. Namun jika suatu permasalahan berkaitan dengan hukum keluarga dan wilayah domestik lain, maka penyelesaiannya dapat dilakukan di luar hukum positif.

Di bidang keamanan, langkah lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan kunjungan dan sosialisasi ke masyarakat. Komponen kepolisian sering kali melakukan kunjungan ke masyarakat untuk memberikan pencerahan tentang hukum, masalah kamtibmas, dan situasi terkini. Selain kepolisian, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat juga sering melakukan upaya penyadaran ke masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan peninjauan hukum untuk melihat potensi konflik yang ada. Sebagai contoh, sewaktu ada pemilu legislatif peninjauan hukum dilakukan dengan mendatangi perkebunan-perkebunan. Peninjauan hukum ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan agar pihak manajemen perusahaan tidak mengarahkan ribuan karyawannya

untuk memilih calon anggota DPR atau DPRD. Pengarahan suara yang dapat berpotensi konflik karena ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Kondisi yang berbeda terjadi di Kota Singkawang. Di Singkawang pendekatan komunikasi dalam ranah sosial sering kali dilaksanakan terlebih dahulu sebelum diproses di instansi hukum yang berwenang. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar permasalahan sosial dapat selesai terlebih dahulu. Pendekatan komunikasi dilakukan melalui kegiatan safari Jumat, Natal bersama, dan lain sebagainya.

Kunjungan dan sosialisasi juga dilakukan di Kabupaten Sambas. Kejaksaan Negeri Sambas memiliki beberapa peran, di antaranya memberikan informasi ke masyarakat dan melakukan koordinasi intelijen dalam rangka pencegahan konflik dan kekerasan. Kejaksaan Negeri Sambas memiliki program yang dinamakan Binmatkum (Bimbingan Materi Hukum), yang terdiri atas penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan instansi terkait di tingkat desa. Program ini biasanya dilaksanakan tiga tahun sekali. Selain itu, karena keterbatasan dana, maka biasanya oleh pemerintah daerah dilakukan bersama dengan Kepolisian Resort Sambas. Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah kegiatan kampanye antikorupsi dengan membangun jaringan melalui pertemuan dengan pihak kecamatan dan mengundang kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala sekolah.

Kejaksaan Negeri Sambas memiliki intelijen yang bekerja mencegah konflik di Kabupaten Sambas dan tergabung dengan Kominda. Pada tahun 2012 terjadi pembunuhan di perbatasan Sarawak, di mana korbannya adalah orang Sambas dan pelakunya adalah orang Madura. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa pembunuhan ini merupakan upaya balas dendam orang-orang Madura terhadap orang-orang Sambas terkait konflik komunal tahun 1999. Pihak kejaksaan yang tergabung dalam Kominda melakukan *counter* informasi dengan melakukan penyuluhan di daerah-daerah dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut murni kriminal sehingga masyarakat tidak perlu terprovokasi. Untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jenazah korban dikawal oleh intelijen Kominda. Guna mencegah potensi konflik pihak kejaksaan meminta fatwa ke Mahkamah Agung untuk memindahkan proses persidangan tindak pidana pembunuhan tersebut dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Singkawang. Permohonan ini dikabulkan. Mahkamah Agung pun membuat fatwa bahwa berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singkawang agar proses persidangan dilakukan di Singkawang. Singkawang dipilih karena kejaksaan dan kepolisian Kabupaten Sambas menilai daerah tersebut merupakan daerah terdekat dan minim potensi konflik antara kelompok Madura dan kelompok Melayu. Dalam rangka mencegah berkembangnya kasus ini menjadi konflik yang lebih besar, baik dari segi keamanan, penegakan hukum, maupun hubungan antarkelompok ada upaya

kerja sama dari pihak aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

3.2. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT

Lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat mengembangkan strategi-strategi pencegahan konflik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat tiga strategi utama yang dilakukan, yaitu koordinasi antarlembaga (baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah), pembangunan sistem peringatan dini, dan mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif. Bagian ini akan membahas ketiga strategi utama tersebut.

3.2.1. Koordinasi Antar-Lembaga (Pemerintah dan Nonpemerintah)

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.11, Permendagri No.16 Tahun 2011, dan Permendagri No. 12 Tahun 2006 untuk menginisiasi pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di setiap daerah. Kominda terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga pemerintah terkait keamanan lainnya. Pembentukan Kominda ini memainkan peranan penting dalam mencegah dan mengantisipasi potensi konflik yang ada. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan pihak aparat keamanan dan penegak hukum dalam Kominda berperan aktif melaksanakan koordinasi antarlembaga pemerintah untuk melakukan pencegahan dan mengantisipasi konflik dan kekerasan.

Kunci dari pencegahan konflik dan kekerasan adalah sinergi dari semua lembaga pemerintah yang tergabung dalam Kominda di tingkat provinsi. Lembaga Kejaksaan Tinggi masuk di dalam Kominda bersama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti pemerintah daerah dan intelijen Kepolisian dan Kodam, Imigrasi, Bea Cukai, Kesbangpol, dan Linmas Pemda. Dalam komunitas intelijen tersebut, berbagai pihak saling berbagi informasi hasil pemantauan dan pendeteksian potensi-potensi konflik di dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh kasus kegiatan deteksi oleh lembaga-lembaga anggota Kominda adalah pemantauan terhadap kegiatan sepak bola antarkampung. Bila terdapat gejala-gejala perkelahian atau keributan antarkelompok etnis, kegiatan sepak bola tersebut akan menjadi perhatian Pangdam, Kapolda, dan Kajati.

Di Kalimantan Barat, gubernur sebagai Ketua Kominda sangat aktif memantau perkembangan keamanan secara rutin.¹ Para anggota Kominda juga secara aktif membahas seluruh faktor yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan konflik. Perbedaan pendapat di antara unsur-unsur lembaga

¹ Pejabat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, wawancara 29 September 2014.

di dalam Kominda sering terjadi, misalnya dalam hal izin perkebunan, masalah perbatasan, dan lain-lain. Namun, khusus menyangkut konflik sosial yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, semua unsur di dalam Kominda memiliki pandangan dan sikap yang sama. Isu konflik sosial bagi lembaga-lembaga pemerintah di bidang keamanan memang mendapatkan prioritas yang sangat tinggi, meskipun potensinya berada pada ukuran dan level terkecil.

Dalam pencegahan konflik di Singkawang, lembaga-lembaga pemerintah sudah menjalankan perannya masing-masing. Ada yang menarik pada strategi pencegahan konflik di Kota Singkawang. Wali kota sebagai pembuat kebijakan dan pihak yang mengepalai Kominda, tidak memiliki kebijakan resmi terkait pencegahan konflik. Wali kota lebih mengedepankan komunikasi dengan masyarakat dan memanfaatkan forum-forum yang ada. Komunikasi dengan masyarakat diadakan rutin setidaknya setiap hari Jumat. Wali kota juga selalu berusaha hadir ketika diundang ke acara-acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga etnis dan agama. Di situ, wali kota menyisipkan himbauan agar setiap etnis atau agama menghormati dan memahami budaya etnis maupun agama lain, untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

Adapun TNI, dalam hal ini Kodim Singkawang,² sebagai komando militer yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan di wilayah teritorial Kota Singkawang, memiliki rutinitas sendiri dalam membuat kegiatan dengan masyarakat. Bentuk kegiatan tersebut misalnya berupa karya bakti yang diadakan sebulan sekali dan kegiatan Jumat bersih yang melibatkan semua elemen masyarakat, baik dari kalangan Muspika maupun tokoh-tokoh pemuda. Kegiatan yang merupakan komando dari Kodam Tanjung Pura ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, ia juga ditujukan untuk mempererat hubungan sipil-militer di sana. Oleh karena itu, dalam kegiatan-kegiatan tersebut selalu disisipkan penyuluhan wawasan kebangsaan selain juga diceritakan kejadian-kejadian konflik masa lalu beserta akibatnya yang merugikan masyarakat, dengan penekanan bahwa konflik sosial yang pernah terjadi jangan sampai terulang kembali. Selanjutnya, Kodim Singkawang juga melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap tokoh-tokoh pemuda karena unsur pemuda merupakan elemen yang rawan konflik. Kegiatan pendekatan dan pembinaan ini tidak hanya dilakukan di level kabupaten/kota, tetapi juga di level desa, melalui Babinsa-Babinsa yang disebar di Koramil-Koramil yang berada di bawah komando teritorialnya.

Pada tingkat kabupaten, misalnya Kabupaten Sambas, setiap lembaga pemerintahan memiliki prosedur kerja intelijennya sendiri, namun di antara polres, kodim, kejaksaan, dan pemerintah daerah tetap saling berkoordinasi

2 Kodim 1402 Singkawang berada di bawah Kodam Tanjung Pura. Kodim ini bertanggung jawab atas wilayah teritorial Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, dan membawahi 17 Koramil yang tersebar di ketiga wilayah tersebut.

di dalam Kominda. Koordinasi ini dipimpin oleh Bupati Sambas dan dilaksanakan minimal dua bulan sekali, sedangkan untuk internal masing-masing lembaga koordinasi dilaksanakan minimal sebulan dua kali. Ada lima instruksi Bupati Sambas yang menjadi garis besar peran anggota Kominda.³ *Pertama*, Kepala Kominda memperingatkan anggota-anggota Kominda dari tiap lembaga pemerintah untuk tidak terlibat dan menjadi bagian dari permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik atau kekerasan. *Kedua*, adanya instruksi agar tidak terjadi diskriminasi perlakuan dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melihat latar belakang kelompok identitasnya. *Ketiga*, masyarakat perlu didengarkan, terutama keluhan-keluhan mereka, termasuk dengan secara maksimal meluangkan waktu untuk mendengarkannya. *Keempat*, secara persuasif merangkul individu-individu di masyarakat yang memiliki motif ekonomi hendak menggunakan peluang-peluang konflik yang ada. *Kelima*, perangkat adat dan budaya dapat digunakan untuk menyosialisasikan nilai dan upaya pencegahan. Penyampaian informasi melalui adat budaya lebih mudah diterima oleh masyarakat.⁴ Salah satu kesempatan yang dapat digunakan adalah pada saat menghadiri undangan perkawinan di hari Sabtu atau Minggu.

Selain Kominda, koordinasi di antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat dilakukan oleh Kesbangpol. Kesbangpol melakukan koordinasi dengan forum-forum yang berada di bawah kewenangannya, seperti FKUB dan FKDM. Pemerintah melalui inisiasi Kementerian Dalam Negeri membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai forum kemitraan untuk membangun kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat. Kesbangpol Singkawang juga menyebar jaringan ke tingkat terendah dalam masyarakat melalui Linmas, tokoh adat, dan tokoh agama. Fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi dalam rangka deteksi dan pencegahan dini potensi gangguan sosial di masyarakat. Secara umum, koordinasi antarlembaga pemerintah di Singkawang sudah berjalan dengan baik. Walaupun untuk lembaga-lembaga yang berada di bawah Kominda, koordinasi masih dilakukan secara informal, belum ada koordinasi formal yang seharusnya rutin dilakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sudah memiliki beberapa forum yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan-permasalahan di suatu daerah.⁵ *Pertama*, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan antarumat beragama dan menjadi tempat koordinasi antarlembaga serta sosialisasi nilai-nilai toleransi di Sambas. *Kedua*, Tim Keamanan Terpadu Dalam Negeri yang berfungsi melaksanakan keamanan di dalam negeri dengan diketuai oleh bupati. *Ketiga*, semua fo-

3 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

4 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, wawancara 11 Februari 2015.

5 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

rum yang difasilitasi oleh pemerintah dengan tujuan agar pemerintah daerah sendiri mendapatkan bantuan dalam proses pencegahan konflik. Bila terjadi perkelahian antarkampung pemerintah akan merangkul ketua atau *dedengkot* kampung. Dedengkot kampung ini kerap diajak dalam pertemuan-pertemuan mediasi agar dapat meredam konflik.

Bila ada sebuah isu konflik yang dipicu oleh insiden-insiden kriminalitas atau sengketa, forum-forum yang mewadahi koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah akan saling bekerja sama.⁶ Dalam forum-forum tersebut tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok identitas di masyarakat secara dua arah akan diberikan informasi yang berasal dari intelijen sekaligus memberikan laporan potensi yang berasal dari anggota kelompoknya. Koordinasi secara vertikal (dari masyarakat di tingkat bawah kepada tokoh-tokoh lembaga) dan horizontal (antarlembaga) secara efektif dapat mencegah berkembangnya potensi konflik menjadi besar. Selain itu, tokoh-tokoh kelompok identitas juga memainkan peranan penting dalam menenangkan anggota masyarakat yang bernaung di bawah lembaga nonpemerintah yang dipimpinnya. Nilai-nilai seperti “hidup gotong-royong” dan “satu Sambas sekeluarga” digunakan untuk memajukan dan menjaga kondisi damai di Sambas.

Inisiatif tokoh-tokoh dari berbagai kelompok identitas untuk membangun akses komunikasi ke bupati sangat efektif pada saat mencegah konflik.⁷ Organisasi berdasarkan identitas seperti FKBM dan DAD juga sering melakukan koordinasi dalam menjaga kondisi kondusif di tengah-tengah masyarakat Sambas. Selain itu, lembaga-lembaga nonpemerintah ini berupaya membuat program inklusi sosial agar kelompok-kelompok masyarakat, termasuk para pendatang, dapat berbaur dengan masyarakat lokal.⁸ Salah satu strategi yang dilakukan dalam program pembauran ini menargetkan kelompok anak dan remaja karena mereka merupakan generasi pemersatu di masa yang akan datang.

Untuk koordinasi di antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah, di Kota Pontianak terdapat Forum Kebangsaan yang berisikan tokoh-tokoh etnis di bawah koordinasi Wakil Wali Kota Pontianak.⁹ Forum ini berfungsi

6 Pejabat Kejaksaan Negeri Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

7 Tokoh masyarakat Sambas, FGD, 8 Februari 2015.

8 Tokoh masyarakat Sambas, FGD, 8 Februari 2015.

9 Pejabat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, wawancara 27 September 2014. Koordinasi di antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang diinisiasi oleh pemerintah Pontianak mendapatkan berbagai tanggapan yang berbeda dari penggiat lembaga nonpemerintah di sana. Salah seorang tokoh keagamaan (wawancara, 22 September 2014) melihat yang perlu dikembangkan oleh Pemda adalah metode komunikasi antarlembaga mengingat di antara lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, seperti LSM, memiliki pola komunikasi yang berbeda. Komunikasi dengan pihak pemerintah harus melewati tahapan-tahapan birokrasi dan berdasarkan perintah dari atasan. Kendala ini dapat memperlambat pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat. Tokoh organisasi keagamaan di Pontianak ini melihat, jika di suatu daerah ada sebuah insiden sebaiknya Pemda dan aparat keamanan langsung melakukan tindakan dan menangani terlebih dahulu ketimbang menunggu perintah atasan. Berlawanan dengan pendapat di atas, akademisi dari IAIN Pontianak (wawancara 23 September 2014) melihat justru sekarang ini pemer-

untuk melakukan pencegahan dengan berkoordinasi setiap tiga bulan sekali, di samping mengadakan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan. Salah satu kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan adalah Parade Budaya Nusantara yang berisikan beragam tarian seperti tarian *cap go meh*, *reog*, dan tarian Melayu, serta ekspresi keberagaman kebudayaan dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, di level atas sedang coba dibangun sebuah forum komunikasi antarkelompok masyarakat dari etnis yang berbeda-beda, dengan nama Forum Komunikasi Antar Etnis. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas komunikasi kelompok-kelompok etnis di level atas, sehingga bisa menjadi teladan bagi kelompok-kelompok etnis di level bawah.¹⁰ Upaya perbaikan komunikasi ini dilakukan karena pada lembaga-lembaga nonpemerintah di Kalimantan Barat, terutama kelompok masyarakat etnis, koordinasi antarlembaga di level bawah masih kurang.¹¹ Tidak hanya itu, koordinasi di dalam satu kelompok etnis, antara level atas dengan level bawahnya, pun masih harus ditingkatkan.

Peran koordinasi dalam upaya pencegahan konflik tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota saja, namun juga di tingkat desa dan kecamatan. Di tingkat desa, Kabupaten Sambas memiliki beberapa mekanisme yang sudah ada dan akan disiapkan untuk menghadapi perubahan di desa yang dapat berguna untuk melakukan pencegahan.¹² Salah satu ormas yang melakukan penyuluhan di tingkat desa adalah Gerbang Desa. Anggotanya terdiri atas sepuluh orang perwakilan yang diambil dari berbagai elemen masyarakat, seperti kelompok petani, kelompok perempuan, pemuda, dan perwakilan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Desa juga disebutkan adanya “pendamping desa” yang kemungkinan besar didatangkan dari Kementerian untuk mengawasi proses yang berjalan di desa.¹³ Selain itu, di desa ada lembaga Tempat Pengelolaan Kegiatan Desa (TPKD) yang bertugas sebagai tempat aspirasi kebutuhan umum masyarakat, seperti jembatan dan jalan.

Di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, para informan dalam FGD di mengatakan ada beberapa strategi yang berperan dalam pencegahan konflik. *Pertama*, melakukan koordinasi di antara anggota masyarakat dengan tokoh-tokoh yang berasal dari masing-masing kelompok etnis, agama, dan golongan. Jika ada konflik yang melibatkan individu atau kelompok dari etnis atau kelompok identitas yang berbeda, langkah pertama yang dilakukan adalah pihak keluarga dipanggil ke Polsek setempat. Selanjutnya, selain pihak-pihak yang terlibat langsung, para tokoh yang mewakili identitas sosial individu atau kelompok bersangkutan dan kepala administratif formal seperti

intah relatif lebih baik dan aktif dalam melakukan koordinasi, termasuk aparat keamanannya.

10 Tokoh agama Budha, wawancara 24 September 2014.

11 Tokoh masyarakat Madura, wawancara 26 September 2014.

12 Tokoh masyarakat Sambas, FGD, 8 Februari 2015.

13 Tokoh masyarakat Sambas, FGD, 8 Februari 2015.

kepala desa atau camat dipanggil untuk memediasi agar konflik tidak membesar menjadi konflik identitas antarkelompok. Terakhir, upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan individu atau kelompok lain.

Pada saat yang bersamaan, secara vertikal lembaga-lembaga nonpemerintah seperti IKBM, MABM, DAD, MABT, mendapatkan laporan dari perwakilan-perwakilannya di daerah tempat terjadinya konflik. Biasanya, proses selanjutnya adalah lembaga-lembaga nonpemerintah ini akan mengirimkan anggota-anggotanya untuk memantau perkembangan dan potensi eskalasi konflik yang terjadi di tingkat lokal agar tidak menyebar ke wilayah lain dan membesar ke isu-isu yang sensitif dalam hubungan antarkelompok di Kalimantan Barat. Oleh masyarakat di tingkat lokal mekanisme ini dirasakan efektif. Setelah konflik 1997 dan 1999, kasus konflik dan kekerasan kecil relatif tidak membesar dan dapat diredam di tingkat lokal.

Kedua, kesadaran warga dari berbagai kelompok masyarakat dalam mengambil pelajaran dari kekerasan-kekerasan komunal yang pernah terjadi memainkan peranan penting dalam mencegah eskalasi konflik di tingkat lokal. Kebersamaan ini dirasakan muncul di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, terutama dari kebijakannya berkenaan dengan keberadaan etnis minoritas.

Secara umum, kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan strategi-strategi pencegahan konflik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat adalah keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam merancang dan melaksanakan pencegahan konflik kekerasan. Salah satu hal yang dirasa penting di dalam koordinasi antarlembaga pemerintah daerah adalah pembuatan *standard operating procedure* (SOP) untuk pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Standarisasi prosedural ini belum dapat terlaksana mengingat keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk alokasi dan koordinasi. Kesbangpol di tingkat provinsi sendiri memiliki rencana untuk membangun sistem pengaduan yang berisikan informasi kejadian dan pelaporan insiden konflik dan kekerasan di dalam FKDM. Metode ini rencananya dibangun melalui *SMS Center*. Namun, rencana ini terkendala di tingkat kabupaten/kota karena dianggap memerlukan dana yang besar dalam pengelolaannya. Kendala pendanaan ini juga dirasakan oleh segenap lembaga pemerintah di Kota Singkawang.¹⁴ Salah satu faktornya adalah kondisi perekonomian Kota Singkawang yang miskin.¹⁵ Selain permasalahan dana, di Kota Singkawang tidak terwujudnya komunikasi rutin juga disebabkan oleh tidak adanya arahan koordinasi struktural yang secara rutin dilaksanakan.

14 Staf Kodim Singkawang, wawancara 8 Februari 2015.

15 Pejabat Pemerintah Daerah Kota Singkawang, wawancara 9 Februari 2015.

3.2.2. Pembangunan Sistem Peringatan Dini

Dalam pencegahan konflik dan kekerasan, selain koordinasi antarlembaga, langkah yang juga perlu dilakukan adalah pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*). Pembangunan sistem peringatan dini ini tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 10 ayat 1. Tujuan dibangunnya sistem peringatan dini adalah untuk mencegah terjadinya dan meluasnya konflik di daerah.¹⁶ Sistem peringatan dini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan sinergisitas antarlembaga, penyampaian informasi terkait potensi konflik atau hal-hal yang bisa menyebabkan konflik bereskalasi, dapat berjalan dengan baik.¹⁷

Penelitian dan pemetaan wilayah konflik di Kalimantan Barat telah dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan IAIN Pontianak. Walaupun baru dilakukan pada 2013, tetapi upaya untuk memetakan potensi konflik ini sudah baik. Sayangnya, publikasi hasil pemetaan ini belum diketahui oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, baik di tingkat I maupun tingkat II.

Di Provinsi Kalimantan Barat sistem peringatan dini dilakukan di bawah koordinasi lembaga-lembaga di bawah Kominda, terutama TNI dan kepolisian. Peringatan dini masih dilakukan dengan perantaraan pesan singkat (SMS) atau laporan yang disampaikan oleh ketua lingkungan setempat kepada Babinkamtibmas atau Babinsa, yang kemudian akan diteruskan ke level yang lebih atas. Adapun untuk lembaga-lembaga nonpemerintah, sistem peringatan dini belum berjalan karena koordinasi di level bawah masih kurang.

Pihak Polda Kalimantan Barat sendiri memiliki unit yang melaksanakan sistem peringatan dini, yaitu Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang ada di desa-desa. Unit ini memiliki 1.260 anggota yang melaksanakan tugas dengan berkunjung ke tiga rumah setiap harinya.¹⁸ Kunjungan ini selain berguna untuk menyosialisasikan pesan-pesan kamtibmas, juga untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berguna bagi deteksi dini potensi konflik di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Informasi-informasi ini dibangun dari jaringan formal dengan mengandalkan data yang berasal dari perangkat pemerintah, mulai dari ketua RT sampai lurah atau kepala desa di tiap-tiap wilayah. Babinkamtibmas bertugas untuk membangun jaringan informasi dan menampung masalah-masalah di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi-informasi dari jaringan ini akan disaring berdasarkan

16 Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b) UU Nomor 7 Tahun 2012.

17 Pembangunan sistem peringatan dini sendiri telah tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 11, yaitu dengan cara (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18 Pejabat Polda Provinsi Kalimantan Barat, wawancara 29 September 2014.

isu-isu tertentu, seperti isu sumber daya alam, ideologi, politik, dan geografis. Langkah berikutnya adalah menganalisis untuk dijadikan dasar bagi rencana kegiatan harian. Langkah-langkah yang dilaksanakan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan mendorong inisiatif peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam jaringan informasi yang dibangun pihak kepolisian. Tantangan dari proses membangun jaringan informasi ini adalah permasalahan pendanaan untuk mendukung operasionalisasi sehari-hari petugas di lapangan.

Permasalahan yang kemudian ditemui oleh TNI dan Polri dalam sistem peringatan dini yang mereka bangun adalah faktor wilayah dan keterbatasan infrastruktur. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat belum didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan memungkinkan penyampaian informasi yang lancar dan merata di seluruh wilayah. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi atau belum memiliki fasilitas jalan raya yang baik. Akibatnya, penyampaian informasi awal dalam sistem peringatan dini agak tersendat dan berdampak pada keterlambatan penanganan.¹⁹

Kendala infrastruktur ini dirasakan oleh Kodim Singkawang yang membawahi tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Pihak Kodim merasa bahwa penetapan tipe kodim sebagai kodim B dirasa tidak sesuai. Dengan tipe kodim B, jumlah Babinsa yang bertugas di seluruh wilayah hanya 14 orang. Karena masih dirasa kurang, maka Kodim Singkawang memutuskan untuk menugaskan lima orang Babinsa untuk setiap wilayah administrasinya. Dalam praktiknya, Babinsa ini akan membawahi 2 desa. Di desa-desa tersebut Babinsa akan bermitra dengan kepala desa atau sekretaris desa.²⁰

Lembaga nonpemerintah di Kalimantan Barat secara konvensional menggunakan mekanisme jaringan internal dalam membangun sistem peringatan dini. Tokoh lembaga adat melihat penggunaan teknologi informasi untuk peringatan dini sangat efektif dalam mengaktifkan jaringan internal masyarakat Melayu di Kalimantan Barat.²¹ Tokoh-tokoh di lingkungan masyarakat Melayu memainkan peran sentral sebagai penyambung aspirasi warga. Dia juga menilai sekarang ini pemerintah lebih responsif dan cepat dalam mengumpulkan segala macam informasi. Seorang tokoh agama Budha melihat bahwa akses informasi itu sangat cepat karena semua ada di lingkungan keramaian, tempat orang Tionghoa menjalankan aktivitas kesehariannya seperti di pasar dan di yayasan.²² Melalui interaksi nonformal di lingkungan aktivitas orang-orang Tionghoa, mereka saling menyebarkan dan mempertukarkan informasi terkait isu-isu seputar potensi konflik yang sedang berkembang di Kalimantan Barat.

19 Anggota staf Kodim Singkawang, wawancara 8 Februari 2015.

20 Anggota staf Kodim Singkawang, wawancara 8 Februari 2015..

21 Tokoh lembaga adat, wawancara 23 September 2014.

22 Tokoh agama Budha, wawancara 24 September 2014.

Kelompok masyarakat Madura di Kalimantan Barat mengandalkan peran sentral tokoh-tokohnya sebagai sumber dan *gatekeepers* informasi-informasi yang datang dari anggota internal komunitas mereka.²³ Bila terjadi konflik atau tindak kekerasan, maka tokoh-tokoh Madura tersebut harus turun untuk menenangkan dan memediasi permasalahan yang ada. Masyarakat Madura yang memiliki Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) melakukan pengumpulan informasi sebagai peringatan dini melalui seksi-seksi di bawahnya. Informasi tersebut kemudian akan dilaporkan kepada ketua mereka untuk ditangani lebih lanjut. Hal serupa juga terjadi di komunitas warga Nahdlatul Ulama (NU); pelaporan potensi konflik akan dilakukan pada level bawah untuk kemudian diteruskan ke jenjang berikutnya, yaitu Satkorwil, Satkorcam, Satkorcab, dan seterusnya sampai ada tanggapan dan penanganan.

Selain jaringan-jaringan nonformal yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok-kelompok etnis seperti IKBM, MABT, MABM, NU, Muhammadiyah, dan lembaga nonpemerintah lainnya, di tingkat desa tokoh-tokoh lokal juga memainkan peranan penting. Biasanya tokoh-tokoh lokal ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat pemerintah seperti kepala desa dan camat.²⁴ Salah satu cara pencegahan yang efisien adalah mendatangi langsung korban kekerasan dan melakukan pendekatan agar mereka tidak terprovokasi atau memperbesar masalah.

Di samping jaringan nonformal yang telah disebutkan, kelompok masyarakat Dayak juga mengembangkan media sebagai salah satu alat pencegahan dan pelaporan potensi konflik dan kekerasan. Ruai TV telah mengembangkan program Ruai SMS di mana setiap anggota masyarakat dapat melaporkan peristiwa atau potensi konflik yang ada.²⁵ Setelah mendapatkan pelaporan, Ruai TV akan melakukan verifikasi kepada narasumbernya, kemudian menyampaikannya kepada aparat keamanan. Hubungan yang baik antara Ruai TV dengan pihak aparat keamanan meningkatkan efektivitas pencegahan konflik. Pihak kepolisian biasanya akan menginstruksikan anggotanya di lapangan untuk menangani permasalahan yang ada.

Ruai TV sendiri sebagai bagian dari jaringan Pancur Kasih memulai siarannya pada tahun 2007 dalam rangka membangun rekonsiliasi dan perdamaian. Media dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran informasi. Ruai TV memiliki program pelatihan yang disebut sebagai jurnalisme damai. Pelatihan jurnalisme ini ditujukan agar pemberitaan dan informasi yang disampaikan melalui media didasarkan pada perspektif damai, bukan provokasi. Ruai TV dalam hal ini telah berperan sebagai lembaga yang memediasi informasi mengenai peristiwa dan potensi kekerasan yang berasal dari masyarakat serta menghubungkannya dengan pihak aparat keamanan.

23 Tokoh masyarakat Madura, wawancara 28 September 2014.

24 Tokoh masyarakat Sungai Pinyuh, FGD 26 September 2014.

25 Tokoh organisasi adat, wawancara 23 September 2014.

Sistem peringatan dini di Kalimantan Barat yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah tentu saja juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Peran masyarakat setempat sangat dibutuhkan sebagai garis depan pengumpulan informasi karena apa pun masalah yang terjadi, tentunya masyarakat di lingkungan itu sendiri yang paling awal mengetahui. Informasi dari masyarakat ini kemudian dilaporkan kepada Babinsa atau Babinkamtibmas di wilayah yang bersangkutan melalui pesan singkat atau verbal. Begitu pula dalam pengumpulan informasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berbasis etnis, keterlibatan masyarakat masih dibutuhkan, walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan merata. Hal ini dikarenakan mekanisme peringatan dini di lembaga etnis masih sebatas diskusi, belum sampai pada pembangunan sistem yang lebih jauh.²⁶

Di tingkat desa, pemetaan yang dilakukan oleh perangkat desa memainkan peranan penting dalam mencegah berkembangnya konflik batas desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan unit administratif desa memiliki pemetaan wilayah yang lengkap. Banyak orang di desa hanya memperhatikan dana Rp 1 miliar yang akan diberikan kepada desa tanpa memikirkan prasyarat-prasyarat yang penting dalam pengelolaan desa, seperti peta dan potensi desa. Sosialisasi di tingkat masyarakat desa belum berjalan efektif terkait permasalahan sumber daya, sedangkan kepala desa masih menunggu aturan yang lebih tinggi terkait pelaksanaan undang-undang desa.

Masyarakat Sambas sendiri selama ini sudah memiliki pengalaman dalam melihat pengelolaan dan penggunaan dana dan proyek yang datang dari pemerintah. Mereka memiliki kesadaran bahwa proyek yang dijalankan oleh orang lain cenderung rusak; apalagi jika desa melaksanakannya sendiri. Kesadaran ini diperlukan dalam mengembangkan pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa. Komunikasi antara warga desa dengan kepala desa dan perangkat aparturnya juga perlu dibangun dalam rangka mencegah konflik. Pengaturan desa penting untuk dilaksanakan. Demikian halnya upaya komunikasi antarkepala desa menyangkut isu batas desa. Setelah kesepakatan terjadi, proses berikutnya adalah menyampaikan kesepakatan tersebut ke tingkat kabupaten sehingga akan difasilitasi secara administratif.

3.2.3. Penyelesaian Perselisihan Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*, ADR)

Perselisihan yang terjadi di masyarakat tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Masyarakat di Kalimantan Barat lebih cenderung pada sistem penyelesaian perselisihan yang menerapkan hukum adat, musyawarah, pendekatan agama, dan pendekatan secara langsung kepada pihak-pihak yang

26 Tokoh organisasi adat, wawancara 23 September 2014.

bertikai. Hal ini dikarenakan mekanisme penyelesaian konflik alternatif tersebut sudah tersedia di masyarakat itu sendiri.²⁷

Sistem penyelesaian perselisihan alternatif dengan menggunakan hukum adat sering diterapkan oleh kelompok etnis Dayak, sedangkan kelompok etnis lainnya belum memiliki mekanisme serupa. Kearifan lokal masyarakat Dayak sebagai etnis dominan di Kalimantan Barat masih tinggi. Masyarakat dari etnis lain pun menghormati nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Hukum adat Dayak sering kali digunakan jika warga Dayak terlibat dalam konflik dengan sesama Dayak atau dengan warga dari kelompok etnis lainnya. Misalnya, ketika orang Dayak berkonflik dengan orang Melayu atau Madura, bila disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik, maka penyelesaiannya akan menggunakan hukum adat Dayak.

Penyelesaian alternatif dengan menggunakan hukum adat Dayak ini²⁸ biasanya dilakukan di balai warga kecamatan dan menghadirkan aparat keamanan, seperti Babinkamtibmas. Ini dilakukan sebagai upaya agar aparat menjadi saksi dan mengetahui proses penyelesaian konflik. Kehadiran aparat penegak hukum juga bertujuan agar konflik tidak dibawa ke lembaga hukum positif di kemudian hari.²⁹

Penggunaan mekanisme penyelesaian konflik ini tidak sepenuhnya didukung oleh pihak pemerintah,³⁰ terutama dalam kasus-kasus pidana. Penyelesaian kasus pidana sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme hukum positif. Namun, apabila konflik yang terjadi masih dalam lingkup keluarga dan bukan merupakan pidana, maka pemerintah mendukung penggunaan penyelesaian secara adat tersebut.

Tidak semua wilayah di Kalimantan Barat menyelesaikan perselisihan secara alternatif dengan menggunakan mekanisme hukum adat Dayak. Kodim Singkawang menggunakan pendekatan persuasif melalui musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Musyawarah dan komunikasi intens sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif juga digunakan oleh pemerintah daerah Singkawang.³¹ Oleh Pemda Singkawang pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dan menjaga stabilitas perdamaian di daerah tersebut. Mekanisme ini telah dilakukan dalam penyelesaian konflik

27 Penggiat lembaga swadaya masyarakat, wawancara 29 September 2014.

28 Mekanisme hukum adat Dayak yang digunakan dan berkembang di masyarakat saat ini diterapkan dalam bentuk sidang adat, dengan menggunakan elemen-elemen seperti peradilan hukum positif pada umumnya. Sebagian kalangan dari kelompok Dayak melihat penerapan hukum adat Dayak seperti ini tidak mencerminkan hukum adat Dayak yang sebenarnya karena pelembagaan hukum adat Dayak yang memasukkan unsur-unsur hukum positif tidak dikenal sebelumnya dalam hukum adat masing-masing subsuku.

29 Tokoh masyarakat Ambawang, FGD 26 September 2014.

30 Pejabat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, wawancara 27 September 2014.

31 Pejabat Pemerintah Daerah Kota Singkawang, wawancara 9 Februari 2015.

Patung Naga dan potensi konflik lainnya di masyarakat Singkawang terkait lahan dan batas wilayah.³² Langkah penyelesaian dan pencegahan konflik yang dilakukan oleh Wali Kota Singkawang ini sesuai dengan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2012, yang menyebutkan (1) penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai, (2) penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Terdapat dilema di antara penegakan hukum positif dengan penggunaan mekanisme hukum adat.³³ Mekanisme hukum adat dapat digunakan di saat kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menggunakan mekanisme tersebut. Adapun pihak pemerintah lebih mengedepankan aspek keadilan hukum, di mana mekanisme adat tertentu tidak boleh digunakan berdasarkan kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu. Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme hukum adat, maka pihak kepolisian tidak akan mempermasalahkannya. Pendekatan *win-win solution* dengan menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan sangat baik selama bukan menyangkut permasalahan pidana yang mengakibatkan kematian. Babinkamtibmas sering kali juga secara efektif menyelesaikan masalah-masalah yang tidak memiliki dampak besar dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan.³⁴

Langkah penyelesaian lain selain musyawarah dan hukum adat adalah pemindahan lokasi sidang ke luar wilayah yang bersangkutan, seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas. Secara hukum, strategi yang dapat dilakukan untuk memproses kasus kriminal yang terjadi di antara dua individu yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda adalah mengajukan permohonan izin ke Mahkamah Agung agar sidang dapat dilakukan di daerah luar kabupaten tempat terjadinya perkara. Pelaku kriminal dapat ditindak secara pidana oleh hukum, namun pada saat yang bersamaan musyawarah dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok identitas juga harus dijalankan untuk meredam konflik yang diakibatkan oleh aksi kriminal tersebut.

Di Sambas, mekanisme alternatif bisa secara efektif menyelesaikan atau mencegah konflik karena beberapa alasan.³⁵ *Pertama*, penyelesaian masalah secara langsung sewaktu insiden konflik atau kekerasan terjadi adalah cara yang paling baik dalam pencegahan. Di daerah tempat kejadian biasanya ada aparat keamanan dan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lainnya, sehingga bisa langsung dicarikan solusi dan upaya mendamaikan. *Kedua*, penanganan konflik bisa lebih cepat dilakukan karena adat kebudayaan masih kental.³⁶ Berdasarkan pengalaman penanganan konflik, dalam satu insiden atau keributan,

32 Pejabat Pemerintah Daerah Kota Singkawang, wawancara 9 Februari 2015.

33 Pejabat Polda Provinsi Kalimantan Barat, wawancara 29 September 2014.

34 Pejabat Polda Provinsi Kalimantan Barat, wawancara 29 September 2014.

35 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

36 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Sambas, wawancara 10 Februari 2015.

pengucapan “salam” dapat memulai proses penyelesaian konflik. Setelah saling mengucapkan salam, langkah berikutnya adalah langsung mengajak pihak-pihak yang terlibat ke masjid untuk melakukan pertemuan dan mediasi.

Hal di atas menunjukkan bahwa agama masih bisa menjadi mekanisme penyelesaian alternatif dan pencegahan konflik. Penyelesaian konflik akan menjadi lebih sulit jika individu atau kelompok yang bertikai terpengaruh oleh minuman keras. Selain itu, mekanisme ganti rugi dalam penyelesaian konflik juga dapat menjadi alternatif. Mekanisme ini pernah digunakan dalam penyelesaian konflik akibat pembebasan tanah dengan mendekati pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan menawarkan ganti rugi yang disepakati bersama.

3.3. KERANGKA KERJA KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT

Tim SNPK-THC pada bab ini menunjukkan dua temuan penting terkait kapasitas kelembagaan, yaitu *peranan lembaga pemerintah dan nonpemerintah* serta *strategi pencegahan konflik* di Kalimantan Barat. Kapasitas lembaga yang dipahami sebagai kemampuan lembaga untuk melaksanakan fungsi utamanya secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) ditemukan dan relatif dilaksanakan di Kalimantan Barat. Ada empat tujuan pencegahan konflik dari UU PKS, yaitu memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Studi kasus kapasitas kelembagaan dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat ini memperlihatkan upaya-upaya dan hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah selama ini dalam mencapai tujuan-tujuan pencegahan konflik dan memelihara perdamaian.

Tujuan pertama dan kedua adalah memelihara kondisi damai serta meredam potensi konflik. Faktor utama *peran* dan *strategi* yang diterapkan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah memperlihatkan kapasitas kelembagaan yang sebenarnya dalam mencegah berulangnya kembali konflik kekerasan berskala besar di Kalimantan Barat. Secara umum, kondisi Kalimantan Barat relatif lebih damai setelah mengalami konflik kekerasan komunal pada tahun 1997 dan 1999. Peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dengan strategi-strateginya telah berhasil melokalisir dan memperkecil potensi konflik yang bermunculan. Salah satu keberhasilan ini terlihat dari pencegahan potensi konflik yang muncul akibat kehadiran FPI di Kalimantan Barat (**lihat kotak 3.1.**).

Tujuan ketiga adalah membangun sistem peringatan dini. Dalam konteks studi ini, upaya membangun sistem peringatan dini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah

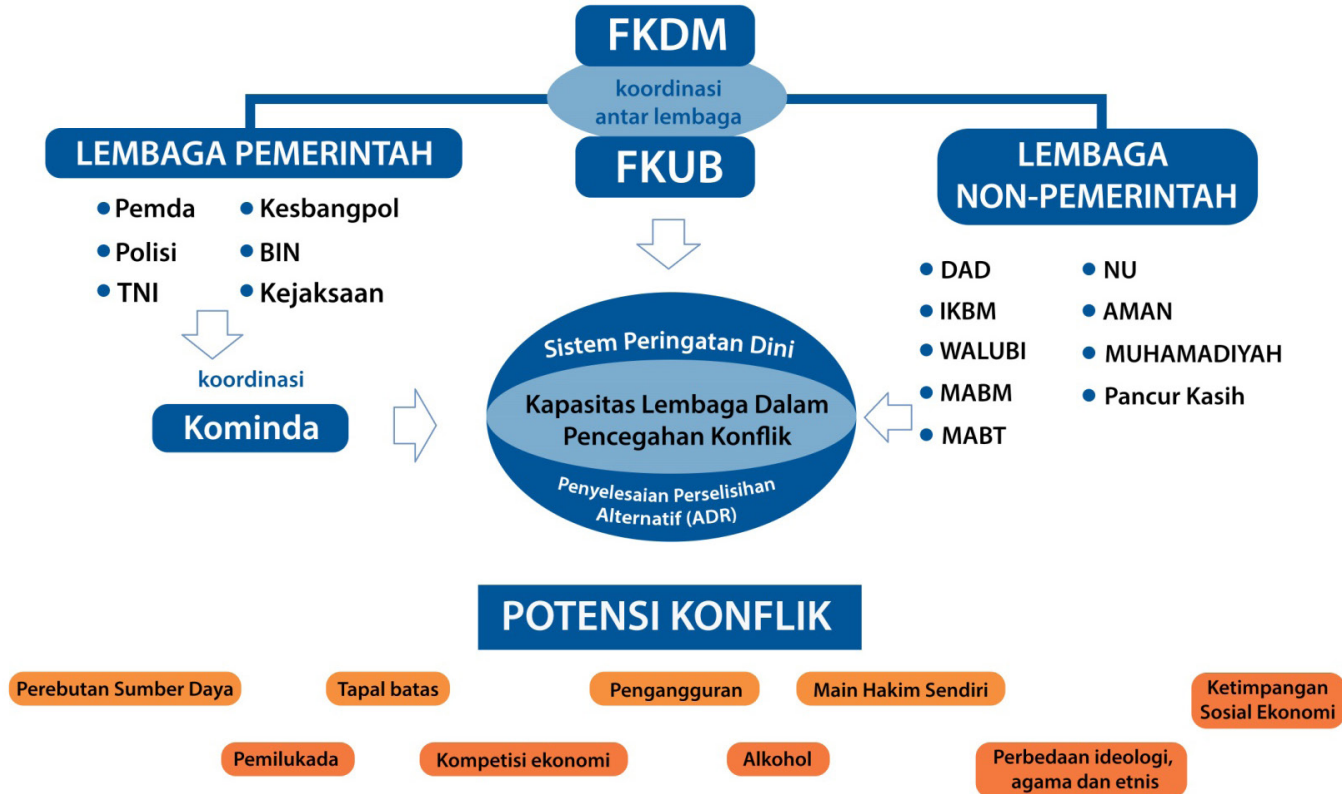
tah di Kalimantan Barat. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, lembaga pemerintah dan nonpemerintah relatif telah berhasil membangun sistem peringatan dini di Kalimantan Barat. Salah satu faktor pentingnya adalah pelajaran dari pengalaman konflik komunal masa lalu telah membentuk kewaspadaan dan kesadaran tiap lembaga, kelompok, dan individu dalam masyarakat Kalimantan Barat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan sistem peringatan dini.

Tujuan keempat adalah mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Salah satu strategi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat adalah mengakomodasi penyelesaian konflik melalui mekanisme alternatif. Pemerintah dengan aparat keamanan dan penegak hukum terbuka terhadap kemungkinan penggunaan mekanisme penyelesaian konflik alternatif yang sudah ada di masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan antara lain penyelesaian dengan menggunakan hukum adat, musyawarah mufakat, pendekatan dengan nilai-nilai agama, dan upaya proses hukum di wilayah yang berbeda dari tempat terjadinya konflik dan insiden kekerasan. Lembaga nonpemerintah dengan segenap tokoh masyarakat dan masyarakat umum berpartisipasi untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam pencegahan konflik. Partisipasi dan kerja sama ini sangat efektif dalam mencegah berkembangnya suatu insiden konflik dan kekerasan menjadi besar dan menyebar.

Kedua strategi di atas tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya strategi koordinasi antarlembaga pemerintah atau antara lembaga pemerintah dengan lembaga nonpemerintah. Dengan kata lain, strategi pembangunan sistem peringatan dini dan strategi penyelesaian perselisihan alternatif tidak dapat berjalan efektif dan efisien jika tidak terdapat strategi koordinasi antarlembaga yang kuat dan solid. Koordinasi antarlembaga itu sendiri di Kalimantan Barat tidak dapat terlaksana secara maksimal jika tidak mengandalkan jaringan-jaringan formal seperti Kominda, FKDM, dan FKUB, serta jaringan-jaringan nonformal di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam bab ini Tim SNPK-THC telah memperlihatkan bahwa **peran kelembagaan** dan **tiga strategi utama** yang diterapkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah—**koordinasi antarlembaga, sistem peringatan dini, dan penyelesaian perselisihan alternatif**—merupakan kunci untuk mencapai tujuan-tujuan pencegahan konflik menurut hukum nasional yang berlaku. Dari hasil temuan mengenai peran dan strategi pencegahan konflik di Kalimantan Barat, Tim SNPK-THC mengidentifikasi kerangka kerja kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat (**gambar 3.1**). Kerangka kerja kapasitas kelembagaan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi proses pencegahan kekerasan yang terjadi di wilayah lain dan wilayah Kalimantan Barat sendiri.

Gambar 3.1. Kerangka Kerja Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat



Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Nusa Tenggara Barat

BAB INI AKAN mendeskripsikan temuan yang berhubungan dengan kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian utama. *Pertama*, peran lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik, *Kedua*, strategi pencegahan konflik yang meliputi koordinasi dan sinergi strategi antarlembaga, pembangunan sistem peringatan dini, dan penyelesaian perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution*, ADR).

4.1. PERAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT

Peran lembaga dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pencegahan konflik. Program dan aktivitas yang dilakukan lembaga formal dan nonformal dapat menentukan apakah sebuah potensi konflik bisa dicegah agar tidak bereskalasi. Dalam hal ini, pencegahan konflik tidak dapat dilakukan secara individual dan terpisah. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), Pasal 6 Ayat 2, menyatakan bahwa pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Terkait hal ini, unsur-unsur pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melihat pentingnya melibatkan lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik.

Permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar berada di Pulau Lombok, mengingat sekitar dua per tiga jumlah penduduk NTB tinggal di pulau tersebut. Dari segi makro, tingkat kejadian dan potensi konflik di wilayah ini lebih tinggi. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa di wilayah lain, seperti Pulau Sumbawa, persoalannya lebih mudah untuk ditangani. Berdasarkan analisis data lapangan, Tim SNPK-THC memandang bahwa peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya, serta pendidikan.

Salah satu upaya pencegahan konflik di NTB dilakukan lewat *jalur politik* melalui keputusan politis yang diambil oleh para pembuat kebijakan. Pen-

dekatan legislasi dianggap penting untuk menata dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini, pembuatan peraturan daerah (Perda) menjadi hal yang penting untuk dilakukan, terutama berkenaan dengan penanganan kesejahteraan sosial. Termasuk dalam perkara ini di antaranya (1) pelarangan dan pencegahan peredaran minuman keras, (2) pengaturan penyelenggaraan kegiatan adat, seperti adat keramaian dalam prosesi perkawinan atau *nyongkolan*, dan (3) pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk menekan kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga masyarakat dapat diuntungkan dengan program penataan ZIS tersebut.¹ Di samping itu, aspek politis dalam pembuatan Perda juga mempertimbangkan beberapa usulan yang dimasukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda), terutama berkenaan dengan rencana peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban (Trantib).²

Beberapa keputusan politik juga diambil pihak pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, di NTB dalam menanggapi beberapa kasus yang dinilai dapat menimbulkan konflik baru. Misalnya, kasus yang berhubungan dengan warga Ahmadiyah yang terusir dari desa/kampung mereka di NTB sehingga harus mengungsi ke Kota Mataram. Para warga Ahmadiyah ini ditampung oleh pemerintah provinsi di Asrama Transito di Kota Mataram. Mereka telah berada di sana selama kurang lebih sepuluh tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, misalnya, mereka memerlukan dokumen. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram berinisiatif memberikan mereka KTP sebagai dokumen kependudukan atas dasar alasan kemanusiaan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Mereka difasilitasi untuk memenuhi hak-hak sipil mereka, seperti pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi dokumen krusial, misalnya untuk mencari pekerjaan, membuka usaha, dan lain-lain.³

Salah satu keluhan yang muncul adalah pemerintah daerah merasa harus menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, padahal penyelesaian persoalan tersebut sebenarnya merupakan tugas pemerintah pusat. Pihak pemerintah daerah sendiri merasa tidak berwenang untuk mengambil tindakan sesuai keputusan pemerintah pusat karena akan menimbulkan gejolak di masyarakat, di samping harus menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.⁴ Di samping itu, untuk menangani kasus Ahmadiyah para pejabat di daerah tidak bisa langsung memberikan instruksi kepada bawahannya, seperti kepala desa atau lurah, untuk mengambil langkah represif sesuai keputusan pemerintah pusat tanpa memikirkan konsekuensi dari instruksi tersebut. Kejelasan mengenai instruksi ini penting karena pada saat berhadapan langsung dengan

1 Anggota DPRD Kota Mataram, wawancara 22 Oktober 2014.

2 Anggota DPRD Kota Mataram, wawancara 22 Oktober 2014.

3 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

4 Pejabat Pemerintah Kota Mataram, 23 Oktober 2014.

masyarakat, para bawahan harus menjelaskan instruksi tersebut. Konsekuensi yang harus dihadapi dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat adalah masyarakat bisa jadi menentang kebijakan tersebut dan melakukan tindakan anarkis terhadap para kepala desa atau lurah dan warga Ahmadiyah yang menjadi fokus dari kebijakan tersebut.⁵

Di sisi lain, lembaga-lembaga terkait juga harus mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi konflik baru antara para pengungsi Ahmadiyah dan anggota masyarakat lain di tempat penampungan. Upaya penanganan warga Ahmadiyah dan Syiah di NTB dilakukan dengan cara persuasif yang berbeda pendekatannya dari yang dulu pernah dilakukan. Kebijakan Pemda NTB untuk menampung mereka di satu tempat dinilai jauh lebih baik dan lebih “murah” daripada membiarkan mereka terpencar tanpa adanya jaminan atas keselamatan dan pemenuhan hak-hak sipil mereka. Gubernur sendiri membentuk Tim Sembilan untuk menangani kasus Ahmadiyah. Tim ini melakukan upaya-upaya persuasif yang ditujukan bagi warga Ahmadiyah agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat lain dan menunjukkan bahwa keislamannya tidak berbeda dengan mayoritas pemeluk Islam di NTB.⁶ Berbaur dengan anggota masyarakat lain merupakan satu cara agar masing-masing pihak dapat membuka diri sehingga penerimaan dapat terjadi. Namun, pihak pemerintah masih menghadapi kendala besar karena masih banyak warga Ahmadiyah yang dianggap masih memprioritaskan identitas kelompoknya dan berpaham eksklusif sehingga menyulitkan upaya pembauran dengan masyarakat lain.⁷

Selanjutnya, pencegahan dari sisi *ekonomi* juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di NTB, terutama upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan akses ekonomi dan lapangan kerja.⁸ Meskipun data statistik tentang jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan adanya penurunan (lihat Bab II), kedua faktor tersebut masih menjadi pemicu mudahnya masyarakat tersulut untuk ikut serta dalam konflik kekerasan. Ketika masyarakat tersebut mendapatkan akses terhadap perbaikan tingkat kehidupan, keterlibatan mereka dalam kekerasan komunal menurun. Sebagai contoh, kekerasan antarkelompok di Mataram yang menurun drastis setelah anggota-anggota masyarakatnya sibuk bekerja di bidang pembudidayaan mutiara atau pariwisata. Dengan meningkatnya taraf kehidupan, masyarakat enggan berpartisipasi dalam konflik kekerasan karena akan menghancurkan apa yang telah mereka bangun selama ini.⁹

5 Ulama dan tokoh pendidikan NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

6 Ulama dan tokoh pendidikan NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

7 Pejabat Pemerintah Kota Mataram, 23 Oktober 2014.

8 Pejabat Pemerintah Provinsi NTB, wawancara Oktober 2014.

9 Budayawan Sasak, wawancara 3 Januari 2014.

Contoh lain, keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) dianggap memberikan efek positif terhadap tingkat ekonomi masyarakat.¹⁰ Dengan adanya akses terhadap lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lain, masyarakat memfokuskan perhatiannya pada bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka sehingga mengurangi kemungkinan mereka ikut berpartisipasi dalam aksi kekerasan antarkelompok.¹¹ Lebih jauh, penyediaan dan akses terhadap lapangan pekerjaan membuat pengangguran dan angka kriminalitas menurun sehingga menyumbang terhadap pengurangan potensi konflik.¹² Meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh dari keberadaan BIL merupakan konsekuensi dari modernisasi teknologi dan akibat langsung dari pasar, dan bukan karena peran pemerintah atau masalah ketenagakerjaan.¹³ Pengukuran tentang perbaikan perekonomian rakyat harus ditinjau kembali karena perekonomian di NTB masih di bawah standar nasional. Meskipun sekarang daya beli masyarakat meningkat dan mayoritas warga memiliki kendaraan, tingkat pendapatan per harinya masih rendah dan sumber keuangan mereka tidak berkelanjutan.¹⁴

Untuk Kabupaten Bima, potensi sumber daya alam seperti pertanian bawang merah, perladangan garam, dan potensi ekonomi lain belum digarap secara optimal. Warga menilai, pemanfaatan sumber daya alam dan produk pertanian yang dimiliki masyarakat akan lebih maksimal jika pemerintah memiliki program yang mendukungnya, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Bagi warga, kegiatan pertanian bisa menjadi lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan jika mendapat dukungan dari pemerintah. Ketersediaan lapangan pekerjaan ini yang mereka anggap akan mampu menghindarkan warga dari konflik. Kegiatan bertani juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas para petani itu sendiri, antara lain dengan pengetahuan dan keterampilan tentang cara bertanam yang baik, efektif, dan efisien.¹⁵

Lebih lanjut, belajar dari konflik-konflik kekerasan yang terjadi sebelumnya di Pulau Lombok, upaya pencegahan dari sisi *keamanan* membuat beberapa lembaga terkait harus siap sedia. Misalnya, pihak kepolisian telah mempersiapkan diri dengan mengoptimalkan Badan Pembinaan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Secara kelembagaan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sendiri berjanji untuk mengoptimalkan perlindungan masyarakat melalui operasi dan kegiatan yang dilakukan oleh badan ini.¹⁶

10 Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah, wawancara 4 Februari 2014.

11 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

12 Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

13 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

14 Tokoh perempuan organisasi Islam, wawancara 27 Oktober 2014.

15 Pejabat Kecamatan Belo, wawancara 5 Februari 2015.

16 *Suara Pembaruan*, 28 Oktober 2013 (<http://sp.beritasatu.com/home/sutarman-janji-optimalkan-operasi-Babinkamtibmas/44103>).

Meskipun bukan hal baru, fungsi lembaga ini mengalami perubahan. Sekarang Babinkamtibmas melekat secara langsung di masing-masing desa. Misalnya, di Kabupaten Lombok Tengah sudah ada kebijakan untuk mewajibkan setiap desa memiliki satu anggota Babinkamtibmas. Dengan adanya kebijakan ini, terdapat 139 Babinkamtibmas di sejumlah desa dan kelurahan. Untuk desa-desa dengan potensi konflik tinggi, kriteria pemilihan aparat Babinkamtibmas didasarkan pada usia, kematangan, dan kemampuan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, sehingga dapat mengadakan pendekatan langsung kepada kelompok masyarakat dan dapat bekerja penuh selama 1x24 jam di desa atau kelurahan di mana mereka ditugaskan.¹⁷

Fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian (Wasdal) terhadap masing-masing Babinkamtibmas dilakukan oleh Kapolsek. *Leading sector* fungsi ini sendiri dipegang oleh Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat (Kabid Binmas) dari markas Kepolisian Resort pada tingkat kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pihak kepolisian menugaskan anggotanya untuk “*all-out*”; para petugas kepolisian yang sedang tidak bertugas di kantor tetap diwajibkan menjalin silaturahmi dengan warga masyarakat, termasuk misalnya dengan mengunjungi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal.¹⁸

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak keamanan cukup efektif, namun masih terkendala oleh keterbatasan jumlah personel dan kemampuan. Hal ini dapat menyebabkan konflik kekerasan sulit dibendung dan diantisipasi sedini mungkin.¹⁹ Meskipun demikian, masyarakat menilai kepolisian masih dapat diandalkan karena beberapa elemen masyarakat dapat diberikan pemahaman untuk menyerahkan permasalahan kepada lembaga penegak hukum.²⁰

Sementara itu, peran pemerintah masih belum optimal dalam pengelolaan konflik dan dinilai lamban dalam melakukan pencegahan konflik.²¹ Upaya intervensi dari pemerintah daerah juga dianggap masih belum terlihat untuk mengatasi bentrok antarkelompok.²² Di lain pihak, upaya positif telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja mulai tahun 2000-an. Keterlibatan LSM ini merupakan upaya penyeimbang untuk mengatasi kurangnya keterlibatan pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan. LSM-LSM ini mendorong interaksi antara masyarakat dan pemerintah.²³ Di samping itu, upaya pendampingan juga dilakukan, misalnya terhadap Jamaah Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggal mereka akibat konflik dengan

17 Peneliti dan aktivis di Mataram, wawancara 6 Februari 2014.

18 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

19 Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

20 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

21 Peneliti dan aktivis di Mataram, wawancara 6 Februari 2014.

22 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

23 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

masyarakat lokal.²⁴ Salah satu permasalahan dalam kegiatan LSM-LSM ini adalah lingkup kerjanya yang cukup terbatas, sehingga di beberapa tempat masyarakat belum melihat implementasinya.²⁵ Hal ini kemudian memunculkan kesan bahwa LSM di NTB belum sepenuhnya bekerja maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Sementara itu, pembinaan-pembinaan berbasis kearifan lokal dianggap masih sangat kurang karena tokoh-tokoh informal yang menjadi panutan semakin sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena para tokoh panutan banyak yang telah meninggal dunia, sementara generasi selanjutnya dianggap masih belum mencapai tingkat ketokohan dan pengaruh seperti mereka. Meskipun secara kelembagaan upaya menjembatani jurang pemisah antara masyarakat dan tokoh telah dibuat, lembaga berbasis kearifan lokal dianggap masih belum mendapat legitimasi dari masyarakat karena sebagian besar pengurusnya adalah pejabat yang dianggap tidak mewakili kearifan masyarakat setempat.²⁶ Peran tokoh panutan masyarakat ini sangat penting karena mereka kerap terjun langsung dan menemui masyarakat untuk memberikan pemahaman pentingnya berada di garis depan dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.²⁷

Untuk Kabupaten Bima, keberadaan aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang bisa mencegah terulangnya konflik. Kedekatan masyarakat dengan aparat memiliki makna ganda, yakni kedekatan fisik dan kedekatan emosional. Kedekatan fisik, seperti keberadaan pos polisi, dibutuhkan oleh aparat sipil desa baik dalam konteks pencegahan maupun penghentian konflik. Pada saat konflik terjadi, letak pos polisi yang cukup jauh dianggap menjadi penyebab lambatnya kehadiran polisi di lokasi insiden. Bahkan aparat sipil desa menginginkan dibangunnya pos polisi di antara dua kampung yang kerap mengalami bentrokan.²⁸

Secara emosional, warga menganggap hubungan mereka dengan aparat kepolisian sekarang tidak sedekat seperti sebelumnya. Kebijakan pemerintah yang memisahkan Polri dengan TNI dianggap menjadi penyebab renggangnya hubungan ini. Padahal di kalangan aparat sipil, kedekatan hubungan dengan kepolisian bisa mencegah munculnya konflik sehingga mereka berharap polisi senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat.

Selain hubungan fisik dan emosional tersebut, warga juga mengeluhkan prosedur penanganan yang digunakan oleh aparat kepolisian. Sebagian warga mengaku polisi bergerak lambat dalam menangani insiden konflik. Namun, sebagian warga lain dapat memaklumi karena aparat harus mematuhi pro-

24 Tokoh perempuan dan pengurus wilayah organisasi Islam NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

25 Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

26 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

27 Pejabat Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

28 Pejabat Kecamatan Belo, wawancara 5 Februari 2015.

sedur standar dalam menjalankan sebuah tindakan kepolisian. Kegelisahan warga ini juga diakui oleh pihak kepolisian sebagai eksese dari kehati-hatian mereka dalam menangani sebuah masalah. Termasuk yang harus menjadi perhatian mereka adalah adanya tuntutan bahwa pelaku kekerasan sudah semestinya diproses dan ditahan di rumah tahanan sebagaimana yang digariskan dalam peraturan penanganan kasus.²⁹

Selain aparat kepolisian, peran aparat pemerintahan sipil di tingkat kabupaten hingga desa juga menyumbang terhadap upaya pencegahan konflik. Peran mereka diawali dengan pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang memberi peluang peningkatan perekonomian yang lebih besar, tata kelola program-program pembangunan, hingga pendampingan langsung oleh aparat desa maupun tokoh masyarakat lain kepada warga yang membutuhkan. Ada pula tuntutan akan keberadaan aparat yang memiliki kompetensi dan kapasitas tata kelola yang baik. Pembinaan ke tiap-tiap desa dilakukan dengan mengumpulkan aparat desa sampai tingkat rukun tetangga (RT), sehingga pemerintah dapat memberi pengayoman bahkan sampai ke tingkat paling bawah.³⁰

Pihak lain yang bisa berkontribusi dalam pencegahan konflik adalah tokoh-tokoh masyarakat lokal. Pemerintah desa memiliki kapasitas untuk melibatkan para tokoh informal tersebut dalam mencegah konflik. Para tokoh ini dianggap mampu meredam potensi konflik karena merupakan individu-individu yang disegani masyarakat. Apabila para tokoh ini memiliki konsep yang dapat mengurangi potensi konflik, maka pemerintah desa harus mengeluarkan surat atau mandat sehingga mereka memperoleh legitimasi secara legal. Dengan demikian, anggota masyarakat dapat pula diberi kesempatan untuk mengawal kegiatan itu.³¹ Pada gilirannya pelibatan para tokoh masyarakat bisa memperkuat pengaruh aparat pemerintah, baik sipil maupun kepolisian.³²

Selanjutnya, salah satu pemicu konflik adalah persoalan pribadi antaranggota masyarakat yang kemudian bereskalasi menjadi kekerasan antarkelompok karena pengaruh minuman keras (miras). Situasi akan semakin sulit apabila insidennya terjadi di momen-momen tertentu, misalnya *nyongkolan* yang merupakan acara adat perkawinan dengan menyertakan iring-iringan seperti karnaval yang memainkan musik-musik tradisional. Anggota masyarakat yang telah terpengaruh minuman keras kerap bertindak di luar norma-norma dan menyinggung anggota masyarakat lain sehingga terjadi perkelahian. Hal ini diperparah oleh ulah sekelompok orang yang berniat menjadikan masalah tersebut konflik antarkampung sehingga menyebabkan konfliknya meluas.³³

29 Pejabat Kepolisian Resort Bima, wawancara 7 Februari 2015.

30 Tokoh masyarakat Cenggu, wawancara 24 September 2014.

31 Tokoh masyarakat Nisa, wawancara 25 September 2015.

32 Pejabat Kecamatan Belo, wawancara 5 Februari 2015.

33 Anggota DPRD Kota Mataram, wawancara tanggal 8 Februari 2015.

Untuk kasus Bima, lahirnya konflik ini berawal dari sudah melemahnya kearifan lokal.³⁴ Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan sosok yang dianggap tokoh panutan di tingkat masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak kepolisian memilih strategi pencegahan dengan lebih melibatkan para tokoh masyarakat, baik formal maupun nonformal, agar para tokoh masyarakat dapat memahami kesulitan yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan masyarakatnya sendiri.³⁵ Strategi pelibatan para tokoh juga didukung berbagai kalangan tokoh masyarakat karena dinilai memungkinkan dilakukannya antisipasi dan pemantauan agar konflik dapat dihindarkan.³⁶ Dalam hal ini, koordinasi dilakukan dengan cara silaturahmi. Kendati situasinya demikian, di daerah-daerah tertentu di Bima nilai-nilai adat tradisional yang masih dipegang teguh tetap menjadi salah satu faktor yang memungkinkan konflik dapat dicegah. Sebagai contoh, di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, sanksi sosial yang tegas diberikan kepada warga yang melanggar aturan adat sehingga di desa itu tidak pernah ada tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.³⁷

Pendekatan *sosial budaya* dalam pencegahan konflik juga dilakukan dengan memanfaatkan beberapa ritual yang sudah membudaya. Misalnya, di Lombok ada ajang adu nyali dan kejantanan bagi para pria suku Sasak yang disebut sebagai Tarung Presean. Dalam praktiknya ajang ini menjadi *outlet* untuk menyalurkan agresivitas para pemuda melalui cara-cara yang diatur oleh adat. Dalam Tarung Presean, para petarung yang bersenjatakan tongkat rotan (*penjalin*) dan perisai dari kulit kerbau baku pukul satu sama lain pada bagian perut ke atas di bawah pengawasan dua orang wasit. Setelah pertarungan selesai dan pemenang diputuskan, para petarung saling bersalaman dan berpelukan sebagai tanda bahwa di antara keduanya tidak ada dendam.³⁸ Ajang ini dapat digunakan untuk membangun pengertian dan solidaritas di antara warga dalam menjaga keamanan. Dari observasi yang dilakukan dalam suatu acara Tarung Presean di halaman Stasiun TVRI NTB pada Oktober 2014, tim peneliti SNPK-THC mendapati bahwa acara ini menarik perhatian masyarakat; arena pertandingannya pun dipadati oleh penonton. Selain itu, para petarung dan wasit juga dimanfaatkan sebagai salah satu ujung tombak keamanan desa/kampung di bawah pembinaan dan koordinasi dengan para petugas Babinkamtibmas dari Kepolisian NTB.³⁹

34 Tokoh masyarakat Bima, 5 Februari 2014.

35 Pejabat Kepolisian Resort Bima, wawancara 7 Februari 2015.

36 Tokoh masyarakat Cenggu, wawancara 24 September 2014.

37 <http://news.detik.com/read/2015/04/12/191346/2884852/10/di-bima-ada-desa-yang-penuh-kedamaian-dan-zero-kriminal>

38 "Presean, Adu Nyali dan Ketangkasan Pria Sejati di Lombok." 29 September 2014. Diakses dari <http://www.wisatadilombok.com/2014/09/presean-adu-nyali-dan-ketangkasan-pria.html>

39 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, FGD, 24 Oktober 2014.

Masyarakat Kabupaten Bima juga memiliki tradisi adu nyali dan kejantanan yang disebut *Ndempa*. Tradisi ini merupakan semacam perkelahian tradisional yang dilakukan secara massal atau melibatkan banyak orang.⁴⁰ Meskipun berupa bentrokan, *Ndempa* memiliki aturan yang ketat, seperti tidak boleh menggunakan senjata, tidak boleh mengganggu anak-anak dan perempuan, serta tidak boleh merusak harta benda. Walaupun perlu penelitian lebih lanjut, tradisi ini dianggap dapat menjadi saluran bagi kebiasaan menunjukkan keperkasaan melalui aktivitas kekerasan sebagai simbol kehormatan bagi para pria di Bima.⁴¹ *Ndempa* sendiri sebenarnya merupakan suatu kegiatan dalam rangka perayaan pascapanen. Yang menjadi penekanan dalam acara ini adalah unjuk kebolehan tanpa senjata yang diakhiri dengan perdamaian⁴² tanpa adanya dendam setelah kegiatan berakhir.⁴³ Namun sayangnya, tradisi *Ndempa* sudah semakin jarang dilakukan dan tidak banyak dikenal lagi. *Ndempa* terakhir kali diadakan sekitar tahun 1978-1979. Lunturnya tradisi ini sebenarnya disebabkan oleh pembatasan yang membuatnya lama-kelamaan hilang dengan sendirinya.⁴⁴

Aspek sosial budaya lain yang juga mengalami pelunturan adalah aplikasi nilai dan praktik keagamaan. Meskipun sudah ada upaya revitalisasi dan sudah dibuatkan peraturannya, hasil yang diharapkan masih belum terlihat. Upaya-upaya yang sudah dijalankan, misalnya, program *Jumat Bersih* di Lombok Barat dan program serupa yang bernama *Maghrib Mengaji* di Bima. Program ini merupakan upaya untuk mengembalikan kebiasaan yang mulai hilang, salah satunya kebiasaan lama anak-anak di Bima yang mengaji setelah salat asar. Di samping itu, ada juga *Jumat Khushuk*—sebuah program yang memiliki payung hukum peraturan daerah (Perda). Berdasarkan program ini, ketika masuk waktu salat Jumat orang-orang tidak boleh berada di jalanan. Namun demikian, program tersebut bukannya tanpa kritik. Sebagian kalangan menilai, karena adanya program tersebut masyarakat justru lebih takut pada konsekuensi melanggar Perda daripada menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat.⁴⁵

Selain sosial budaya, aspek lain yang menjadi perhatian utama dalam rangka pencegahan konflik adalah pemanfaatan sektor pendidikan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Sejak program pendidikan gratis diimplementasikan, tingkat pendidikan masyarakat semakin membaik. Namun demikian, masyarakat tetap harus dimotivasi, termasuk dalam mengupayakan pengelolaan hasil kreativitas dan potensi sumber daya alam (SDA) yang

40 Pejabat Kecamatan Belo, wawancara 5 Februari 2015.

41 Simbol kehormatan lain adalah istri yang baik, rumah, pedang, dan kuda yang baik.

42 Penulis tentang tradisi dan kebudayaan masyarakat Bima, wawancara 24 Oktober 2014.

43 Tokoh masyarakat Nisa dan pelaku *Ndempa*, wawancara 23 September 2014.

44 Penulis tentang tradisi dan kebudayaan masyarakat Bima, wawancara 24 Oktober 2014.

45 Akademisi perempuan Universitas Mataram, wawancara 20 Oktober 2014.

tersedia agar daya jualnya meningkat. Di samping itu, upaya pendampingan kepada kelompok usaha kecil untuk menumbuhkan keterampilan dan etos kerja masyarakat juga harus terus ditingkatkan.⁴⁶

Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian semua pihak. Hal ini perlu mengingat pengolahan SDA oleh masyarakat tidak dianggap bagus, padahal peluang untuk melakukannya terbuka lebar. Untuk itu, pembelajaran yang lebih mengarah kepada peningkatan keterampilan semakin diperlukan. Namun demikian, program pemerintah untuk melahirkan 100 wirausaha baru masih belum memberikan hasil setimpal dengan dana APBD dikeluarkan untuk program tersebut karena sebagian pihak menganggapnya sekadar proyek belaka.⁴⁷

Di bidang pendidikan, persoalan lain yang muncul adalah mutu dari tenaga kependidikan yang dirasa masih jauh dari harapan. Misalnya, ada orang yang terpaksa menjadi guru karena tidak memperoleh pekerjaan lain sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini dinilai sangat menyulitkan proses transfer pengetahuan karena latar belakang pendidikan dan pelatihan orang tersebut masih belum memadai untuk menjadi tenaga pendidik, sehingga upaya penguatan tenaga kependidikan mutlak perlu adanya.⁴⁸ Yang tidak kalah penting adalah upaya mentransformasikan dan mentransfer nilai-nilai kearifan lokal kepada para anak didik sehingga mereka dapat memahami konsep hidup harmonis dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Pendidikan formal melalui sekolah-sekolah umum dianggap kurang mampu melakukan hal tersebut karena budaya lokal tidak dimengerti oleh para tenaga pendidik yang kebetulan berasal dari luar daerah. Hal ini diperparah oleh kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga hanya mengandalkan sekolah dalam mentransfer pengetahuan dan kearifan lokal tersebut.⁴⁹

Pendidikan masyarakat melalui aktivitas penerangan dan jalur nonformal juga penting dilakukan. Salah satu contohnya adalah penyebaran informasi berkenaan dengan aspek hukum, baik pidana maupun perdata, terutama melalui aktivitas penerangan hukum dan penanggulangan keamanan terkait tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh *Satuan Kerja Perangkat Daerah* (SKPD), camat dan lurah, serta semua anggota DPRD yang baru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selain di Bima, kegiatan ini dilakukan juga di kabupaten lain di NTB.⁵⁰ Masyarakat merespons positif penyuluhan hukum tersebut dan meminta agar kegiatan serupa dilakukan lagi dengan topik lain, seperti tin-

46 Tokoh perempuan organisasi Islam, wawancara 27 Oktober 2014.

47 Tokoh perempuan organisasi Islam, wawancara 27 Oktober 2014.

48 Akademisi perempuan Universitas Mataram, wawancara 20 Oktober 2014.

49 Ulama dan tokoh pendidikan NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

50 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

dak pidana korupsi dan lain-lain. Untuk menanggapi permintaan ini, pihak Kejati menyiapkan materi sesuai dengan sasaran upaya penerangan hukumnya.⁵¹ Persoalan klasik terkait pendanaan masih menjadi hambatan besar dalam upaya pendidikan masyarakat. Namun demikian, pihak Kejati tetap melakukan kegiatan penerangan hukum melebihi jumlah yang direncanakan karena upaya untuk memberi pengertian tentang hukum dan penegakannya kepada masyarakat dan aparat pemerintah dianggap lebih penting sebagai upaya preventif.⁵²

Selain jalur formal, jalur informal juga ditempuh sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam kegiatan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat untuk mencegah konflik. Kegiatan di tingkat warga sering menjadi pentas bagi aparat dalam menyampaikan pesan-pesan preventif tersebut, misalnya dalam acara resepsi perkawinan adat. Mengundang dan menghadirkan pejabat pemerintah dalam acara perkawinan masih dianggap sebagai gengsi oleh sebagian anggota masyarakat, terutama di Pulau Sumbawa. Dengan memanfaatkan ajang semacam ini, para pejabat pemerintah dapat memberikan penerangan dan himbauan tentang upaya-upaya pencegahan konflik dan lain-lain.⁵³

Di samping lembaga-lembaga pemerintah, peran lembaga-lembaga nonpemerintah dalam pencegahan konflik juga cukup menonjol di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam beberapa forum yang ditujukan untuk pencegahan konflik, seperti FKDM, FKUB, Forum Pencegahan Terorisme, dan lain-lain. Beberapa anggota FKDM, misalnya, adalah warga yang direkrut secara sukarela. Walaupun mereka memperoleh kompensasi finansial yang kecil, mereka ikut serta dalam upaya pengumpulan informasi untuk pencegahan dini dan penyelesaian konflik alternatif.

Dari perspektif lembaga-lembaga adat, beberapa tokohnya mengkritik minimnya dana yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan mereka. Mereka merasa tidak diapresiasi oleh pemerintah dalam pencegahan konflik. Padahal pencegahan melalui jalur adat merupakan hal yang harus diprioritaskan, mengingat potensi konflik yang diselesaikan melalui adat prosesnya akan lebih cepat. Melalui jalur adat masyarakat juga dapat menyatu kembali dengan cepat. Selain itu, apabila masalah berpotensi konflik masuk ke Kesbangpol dan SKPD, masalah tersebut kerap dijadikan proyek sehingga majelis adat tidak dimanfaatkan untuk menangani konflik secara adat.

Hal lain yang menjadi perhatian banyak pihak adalah peran aktif perempuan dalam kegiatan-kegiatan pencegahan konflik. Peran aktif tersebut disadari masih sangat terbatas karena kaum lelaki di NTB masih lebih domi-

51 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

52 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

53 Pejabat Kabupaten Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

nan dalam urusan kemasyarakatan. Hal ini juga terlihat dari partisipasi perempuan dalam penentuan program pemerintah. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana program-program pemerintah yang dibuat memberikan porsi yang sama antara pembangunan fisik dan mental. Kinerja dari proses partisipatif tersebut dapat dilihat dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang), di mana keterlibatan perempuan untuk ikut serta dalam pembuatan program yang berkenaan dengan isu perempuan dan anak belum terlihat.⁵⁴

Keterlibatan perempuan lebih banyak berhubungan dengan upaya perlindungan anak dan perempuan, misalnya dalam program Telepon Sahabat Anak (TESA) dan Pusat Informasi Keluarga Sakinah (PIKA). Melalui program TESA yang bekerja sama dengan *provider* telekomunikasi, anak-anak yang mempunyai masalah dapat pergi ke telepon umum untuk menghubungi pihak TESA tanpa biaya. Dari pengaduan anak-anak via telepon itu dapat diperoleh laporan tentang kejahatan yang terjadi pada anak-anak, seperti pelecehan dan lain-lain. Program seperti ini, sayangnya, tidak dilanjutkan lagi karena telepon umum sudah hampir tidak dipakai lagi.⁵⁵

Sementara itu, PIKA dikelola oleh para relawan untuk menangani kasus-kasus rumah tangga. Melalui nomor telepon *hotline* yang telah disebarluaskan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menghubungi pihak relawan. Para relawan ini dituntut memiliki pemahaman atas kasus-kasus KDRT dan metode berbicara yang baik supaya bisa memberikan kenyamanan bagi korban. Korban kemudian diantarkan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses pemulihan, penyembuhan, dan proses hukum dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang akan memberikan pelatihan saat korban kembali. Program ini dahulu berjalan baik sampai pada upaya reintegrasi kembali ke masyarakat. Namun program yang mendapatkan bantuan dari United Nations Children's Fund (UNICEF) ini sayangnya tidak diketahui lagi keberlanjutannya.⁵⁶

4.2. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT

Pembahasan mengenai strategi pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu koordinasi dan sinergi strategi antarlembaga, pembangunan sistem peringatan dini, dan penyelesaian perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution*, ADR). Ketiga strategi tersebut akan dijabarkan lebih jauh pada bagian ini.

⁵⁴ Akademisi perempuan Universitas Mataram, wawancara 20 Oktober 2014.

⁵⁵ Akademisi perempuan Universitas Mataram, wawancara 20 Oktober 2014.

⁵⁶ Akademisi perempuan Universitas Mataram, wawancara 20 Oktober 2014.

4.2.1. Koordinasi dan Sinergi Antarlembaga

Koordinasi antarlembaga merupakan unsur strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, pihak pimpinan lembaga formal di NTB melakukan koordinasi dan sinergi melalui berbagai forum. Pada level provinsi, misalnya, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD atau FOKORPIMDA) Provinsi yang beranggotakan Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.⁵⁷ Pada level kabupaten/kota, juga dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD) Kabupaten/Kota yang beranggotakan Bupati/Wali Kota, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Forum-forum tersebut merupakan bagian dari upaya koordinasi guna membahas masalah-masalah aktual yang rentan berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah masing-masing.⁵⁸ Di samping itu, seperti dijelaskan di Bab II, para kepala daerah tingkat II di NTB juga membentuk forum yang disebut sebagai *Regional Managemant* (RM) Jonjok Batur. Forum ini merupakan sebuah wadah kerja sama bagi para kepala daerah tingkat II untuk menyinergikan upaya-upaya pembangunan mereka, terutama program-program pembangunan yang saling berhubungan antardaerah.⁵⁹

Koordinasi intelijen melalui lembaga Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) juga dianggap penting sebagai forum berbagi informasi, menganalisis data potensi konflik, serta mengambil langkah-langkah strategis pencegahan. Secara umum, Kominda sendiri didasarkan pada amanat UU No. 17 Tahun 2011, di mana intelijen dituntut untuk melakukan koordinasi, penyidikan, dan sebagainya untuk mendeteksi potensi dini konflik. Kerja sama antarlembaga telah intensif dilakukan untuk mengumpulkan dan berbagi data terkait konflik sosial, perburuan, konflik SDM. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memetakan konflik dan mencari solusi atas konflik yang terjadi. Lebih lanjut, karena Kominda merupakan sebuah komunitas, maka lembaga-lembaga anggotanya bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Dalam forum ini masing-masing instansi akan mempresentasikan informasi yang bernilai intelijen, membuat rekomendasi, dan mengidentifikasi lingkungan-lingkungan mana saja yang dianggap mengandung kerawanan.⁶⁰

Dalam upaya pencegahan konflik, kinerja Kominda sudah baik, termasuk dalam memfasilitasi aktivitas tukar-menukar informasi yang dilakukan oleh

57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

58 Maga, A. (2013, 20 Desember). *FKPD NTB gelar rakor masalah aktual*. Diakses dari <http://www.antaranntb.com/berita/25608/fkpd-ntb-gelar-rakor-masalah-aktual>

59 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, wawancara 27 Oktober 2014.

60 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

pihak intelijen dari Kesbangpol, Kepolisian, TNI, BIN, dan Kejaksaan. Dalam dua tahun terakhir ini kerja sama itu cukup merekatkan mereka semua.⁶¹ Misalnya untuk daerah Sumbawa, data saling dibagi di antara para anggota Kominda dan disebarluaskan kepada intel masing-masing institusi agar mereka dapat melakukan tindakan pengecekan dan verifikasi atas informasi tersebut. Dari hasil verifikasi ini, dapat diambil kesimpulan siapa pihak yang harus memimpin pencegahan suatu masalah. Kemudian, pemimpin lembaga-lembaga lain akan memberikan dukungan terhadap langkah yang diambil.

Dari sisi penegakan keamanan, kerja sama antarlembaga pemerintah di daerah berjalan dengan cukup baik. Aparat sipil, Kepolisian, BIN, dan TNI melalui Korem telah melakukan sinergi yang baik dalam menghadapi potensi konflik, dimulai dari usaha deteksi dini hingga pencegahan bibit-bibit konflik agar tidak meluas. Sebagai pelaksana intelijen daerah, aparat dari lembaga-lembaga tersebut bertugas memantau situasi dan mengumpulkan serta berbagi informasi. Laporan dan informasi kemudian dibahas hingga rekomendasi dapat diberikan kepada pihak terkait, misalnya aktivitas pengawasan oleh pihak Kesbangpolinmas.⁶² Sementara itu, untuk tindakan yang memerlukan penanganan keamanan dan tindakan langsung oleh pihak kepolisian, aparat yang bertugas siap diterjunkan sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat dapat dicegah dan dihentikan.⁶³

Selain upaya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah, partisipasi para tokoh masyarakat juga berperan dalam upaya-upaya pencegahan konflik di masyarakat.⁶⁴ Pelibatan tokoh-tokoh seperti kepala desa dan tokoh masyarakat mutlak diperlukan karena upaya-upaya intervensi yang dilakukan pihak kepolisian kadang-kadang masih belum mengena. Di samping itu, penguatan peran lembaga pada tingkat desa, seperti Badan Keamanan Desa (BKD), sudah mulai dilakukan sehingga lembaga-lembaga sejenis antardesa dapat saling berkoordinasi.⁶⁵ Kerja sama antara aparat dan masyarakat berlangsung cukup baik. Pelibatan komponen masyarakat diapresiasi dengan cara memberikan dukungan anggaran dari APBD meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pihak pemerintah memanfaatkan anggota masyarakat seperti guru-guru mengaji dan penyuluh-penyuluh agama untuk memberikan penerangan tentang pentingnya pencegahan konflik.⁶⁶ Salah satu contohnya dapat dilihat dari aktivitas organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang berpartisipasi menenangkan anggota dan jamaahnya agar tidak ikut serta dalam kekerasan antaretnis atau agama pada tahun 2013 di Sumbawa.⁶⁷

61 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

62 Pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

63 Pejabat Kepolisian Resort Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

64 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

65 Tokoh masyarakat Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

66 Pejabat Kabupaten Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

67 Tokoh Agama Islam Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

Pada awal tahun 2014 Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Empat Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) untuk menyinergikan upaya-upaya pencegahan konflik. Program Empat Pilar melibatkan empat lembaga, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kesatuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa).⁶⁸ Kabupaten Lombok Tengah dipilih sebagai tempat *pilot project* untuk program tersebut. Dalam hal ini, yang masih menjadi pekerjaan besar adalah merancang sistem atau pola antisipasi terjadinya konflik komunal. Masalah lain yang menjadi fokus program ini adalah bagaimana mengarahkan konsentrasi kegiatan masyarakat untuk upaya-upaya pembangunan, baik di lingkup paling rendah maupun daerah.⁶⁹

Sebenarnya pihak-pihak terkait di Lombok, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah memulai program pencegahan konflik mulai tahun 2012. Pemda menginisiasi program *Lempermadu* (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu) dengan menggunakan masjid dan musala sebagai basis. Peserta program ini adalah para tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, dan para tokoh pemuda. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya di daerah mereka. Salah satu program turunan dari *Lempermadu* adalah *Mantu* (Keamanan Terpadu) yang diluncurkan oleh Kapolda. Pihak yang terlibat dalam program keamanan terpadu ini adalah empat pilar keamanan terpadu desa, yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa (termasuk BKD, Kepolisian PP), dan *Langlang*, yang dulunya disebut Pamswakarsa.⁷⁰

Dari anggota keempat pilar keamanan tersebut, keberadaan Pamswakarsa dianggap cukup kontroversial. Namun demikian, beberapa pihak mengajukan argumentasi tentang perlunya melibatkan mereka. *Pertama*, Pamswakarsa perlu diatur dalam Perda Ketenteraman dan Ketertiban (*Trantib*) agar mereka tidak melampaui kewenangannya saat menjalankan fungsinya, terutama berkenaan dengan aspek keamanan lingkungan. *Kedua*, keberadaan Pamswakarsa cenderung bersifat lintas wilayah, sehingga perlu upaya untuk mengatur kepentingan warga lintas lingkungan, lintas kelurahan, lintas kecamatan, lintas kabupaten dan kota. Bila tidak diatur batasan fungsi dan wewengangnya, organisasi-organisasi Pamswakarsa yang berbasis sosial dan agama (seperti Amphibi dan Dharma Wisesa) ini dianggap riskan dan dapat berkontribusi terhadap terjadinya konflik.⁷¹ Keberadaan Pamswakarsa sendiri, secara legal termuat dalam pasal 3 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang secara tegas menyatakan bahwa pihak Kepolisian

68 "Kapolda Lounching [sic] Empat Pilar kamtibmas." *Nurani Rakyat*, 24 Januari 2014.

69 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

70 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

71 Anggota DPRD Kota Mataram, wawancara tanggal 8 Februari 2015.

dalam mengemban tugasnya dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yaitu “bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.”⁷²

Pengaturan lain tentang pengamanan swakarsa terdapat dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Menurut PP No. 43 Tahun 2012, “Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Dengan demikian, pengamanan swakarsa merupakan salah satu pihak yang turut mengemban fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷³ Tugas dari pengamanan swakarsa itu sendiri adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa, berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.⁷⁴ Pelembagaan Pamswakarsa dalam menjaga keamanan merupakan upaya mengembalikan kedudukannya sebagai pengejawantahan lembaga penjaga keamanan yang sudah ada secara adat. Arti dan fungsi Pamswakarsa perlu diciutkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada, seperti *Pecalang* di Bali atau *Langlang* di Lombok, untuk membantu pengamanan secara swakarsa di desa itu tanpa harus meluaskan fungsinya sampai antar-desa, antarkecamatan, atau antarkabupaten.⁷⁵

Selain itu, pelibatan Pamswakarsa merupakan bagian dari upaya pengawasan, mengingat keberadaan dan aktivitas mereka yang sebelumnya dinilai negatif. Pamswakarsa merupakan lembaga sosial yang tidak terstruktur dan tidak terdaftar, namun memiliki banyak pengikut. Mereka biasanya dilibatkan dalam penyelesaian persoalan-persoalan perdata dan sosial, misalnya, hutang-piutang dan persoalan rumah tangga yang ingin diselesaikan melalui jalur di luar hukum. Hal ini termasuk juga penyelesaian terhadap kejadian kawin curi atau kawin culik.⁷⁶ Upaya pengawasan atas Pamswakarsa merupakan amanat Pasal 16 ayat 1 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tugas Kepolisian dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pengamanan Swakarsa.

72 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2/2002

73 Pasal 1 angka 2 PP No. 43/2012.

74 Pasal 6 PP No. 43/2012

75 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

76 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

Fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk (a) pendataan Pamswakarsa; (b) pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan; (c) pendataan senjata api, amunisi, dan kelengkapannya; (d) izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan; (e) operasionalisasi jasa pengamanan.

Di samping pelibatan pengamanan swakarsa di atas, koordinasi juga dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam upaya pencegahan konflik. Kerja sama dan koordinasi masih belum merata pada level tertentu. Misalnya, di beberapa kecamatan kerja sama itu sudah ada, tetapi belum mapan. Demikian halnya dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang bergerak melibatkan para tetua adat dan tokoh masyarakat.⁷⁷ Hasil yang dicapai dari kerja sama dan koordinasi tersebut adalah menurunnya insiden kekerasan, misalnya di Pulau Lombok dan Sumbawa Barat, yang sebelumnya dianggap memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan. Pelibatan tokoh pemuda dan FKDM telah menyumbang pada kondusifnya situasi di NTB.⁷⁸

Salah satu ilustrasi tentang pentingnya kerja sama antarlembaga dalam pencegahan konflik dapat dilihat dari kasus berikut. Untuk masalah pertambangan, misalnya, pihak keamanan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pertambangan sebelum mereka melakukan penertiban. Mereka kemudian mengirimkan surat untuk meminta bantuan Polresta setelah mengeluarkan teguran pertama dan kedua atas pelanggaran yang terjadi.⁷⁹ Kominda juga melakukan rapat koordinasi untuk mencegah terjadinya konflik terkait lahan, terutama tanah untuk investasi, baik investasi sumber daya mineral, investasi pariwisata, dan lain-lain. Pertemuan ini juga dihadiri unsur pemerintah seperti BPN, Dinas Kehutanan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut.⁸⁰

Selanjutnya, upaya kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat juga dibangun dengan fokus utama pada beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas program yang dibuat oleh lembaga terkait. Misalnya, dua kegiatan yang menjadi fokus utama Kejaksaan Negeri adalah penerangan hukum dan pembangunan jaringan anti-KKN. Yang pertama dilakukan dengan upaya penerangan sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan yang kedua dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaporan sinyalemen adanya tindakan pidana. Pelibatan masyarakat ini dianggap membantu terciptanya perubahan karena upaya pencegahan konflik di tingkat masyarakat berada di tangan mereka sendiri.⁸¹

77 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

78 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

79 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

80 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

81 Pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, wawancara 7 Februari 2015.

Upaya mengoptimalkan koordinasi antarorganisasi yang berorientasi etnis juga dilakukan untuk meredam potensi konflik. Misalnya, keberadaan ikatan keluarga Bima Dompu, ikatan keluarga Lombok, dan ikatan keluarga Sulawesi Selatan difungsikan secara tidak formal dalam upaya pencegahan konflik. Hal tersebut didukung juga dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mengakomodasi unsur-unsur agama dan suku.⁸² Misalnya, kalau ada potensi konflik yang dapat menimbulkan kerawanan akibat aktivitas warga Hindu, maka pihak terkait akan berkoordinasi dengan Parisada Hindu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸³ Lebih lanjut, FKUB memfasilitasi pertemuan antarpemimpin agama yang ada untuk mencegah terjadinya konflik. Dalam hal ini, pada tiap-tiap pertemuan para pemimpin agama dihimbau untuk selalu mengajarkan kerukunan dan toleransi. Dengan demikian, semua tokoh lintas agama dalam FKUB bisa memainkan peran maksimal dalam memfasilitasi, memediasi, dan mendorong pentingnya menjaga kerukunan dan sikap toleransi antarumat beragama, serta mengajarkan kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati, baik dari sisi agama maupun budaya.⁸⁴

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga dapat dilihat dari konflik di Dompu yang dipicu oleh rencana pembangunan pura oleh warga Bali Hindu. Kabar yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa pura tersebut akan dibangun dengan luas 10 hektar dan akan diresmikan saat acara “Tambora Menyapa Dunia” pada 10 April 2015. Untuk mencegah meningkatnya potensi konflik ini, Tim FKUB kemudian menemui warga masyarakat dan memberikan informasi yang sebenarnya. Misalnya, dengan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membangun tempat ibadah sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Kemudian, upaya pelurusan informasi juga dilakukan dengan menerangkan bahwa dari lahan seluas 10 hektar tersebut, hanya 10 persennya saja yang akan dipakai untuk bangunan. Selain itu, pihak pembangun tidak boleh merusak bentangan hutan yang menjadi kawasan yang dilindungi. Tim FKUB juga memberikan masukan tentang beberapa fasilitas yang akan dibangun, seperti WC dan sebagainya, yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga sekitar. Selain FKUB, ada forum-forum lain yang dilibatkan dalam upaya meredam potensi konflik di antara kelompok-kelompok warga masyarakat, misalnya Forum Pembantuan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang merupakan forum binaan dari Kejaksaan.⁸⁵

Hubungan antara pemerintah dan pihak lain juga dipelihara melalui cara-cara informal dan kekeluargaan. Secara kelembagaan mereka hampir tidak

82 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

83 Pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

84 Tokoh Agama Hindu NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

85 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

pernah mengadakan rapat resmi. Kadang-kadang diskusi dilakukan saat makan siang atau makan malam, di mana para aparat intelijen dari Kejaksaan, Kodim, dan Kepolisian melaporkan dan mendiskusikan temuan mereka untuk kemudian mengambil langkah selanjutnya.⁸⁶

Namun demikian, keterbatasan dalam koordinasi internal lembaga keamanan juga ditemukan. Keterbatasan ini terutama berkenaan dengan koordinasi vertikal dengan institusi di level yang lebih tinggi akibat kesenjangan antara aturan pemerintah pusat dan situasi riil di lapangan. Misalnya, perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan latihan gabungan tidak disertai ketersediaan aspek-aspek pendukung seperti pendanaan dan sebagainya.⁸⁷ Di samping itu, salah satu hambatan yang mesti dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan di lapangan. Pekerjaan sebagai petugas humas kepolisian, misalnya, tidak terlaksana dengan baik karena kekurangan sarana dan prasarana pendukung di lapangan, seperti kamera atau *handycam* untuk mendokumentasikan tindakan anarkis masyarakat. Untuk menangani hal itu, para petugas hanya mengandalkan peralatan yang ada, seperti telepon seluler dan sebagainya.⁸⁸

Pemanfaatan lembaga yang ada di level bawah, misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), merupakan salah satu strategi pelibatan masyarakat melalui struktur yang ada di pemerintahan dalam menjaga keamanan mereka sendiri dan mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. Dengan demikian, lembaga ketahanan seperti ini harus didukung dan dikembangkan.⁸⁹

Terakhir, kesiapan dalam merespons potensi konflik juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan konflik di NTB. Misalnya, ketika terjadi insiden pembakaran di Dompu, Kapolda langsung turun ke lapangan dan diikuti oleh dinas-dinas terkait, seperti Dinas Penanggulangan Bencana yang bertugas untuk melakukan pencegahan, termasuk menyediakan anggaran. Dengan demikian, instansi-instansi terkait sudah harus memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang saling berkaitan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan konflik sesuai arahan gubernur. Kalau harus ada tugas pengamanan, dinas mana saja yang harus siap sedia melakukan tugas tersebut dengan cara pagar betis, misalnya. Kemudian, Dinas Instansi Penanganan Bencana langsung memperbaiki kerusakan yang ada, sementara Dinas Sosial mengurus pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik maksimal tiga bulan, termasuk mengambil keputusan apakah, misalnya, tempat penampungan sementara harus dibangun. Dengan demikian, hal-hal yang berkenaan dengan teknis penangan-

86 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

87 Pejabat Kepolisian Resort Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

88 Pejabat Kepolisian Resort Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

89 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 27 Oktober 2014.

an korban secara ekonomi dilakukan oleh dinas terkait dengan dukungan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif.⁹⁰

4.2.2. Pembangunan Sistem Peringatan Dini

Salah satu implikasi dari keberadaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) adalah perlunya upaya yang serius dalam membangun sistem peringatan dini. Implementasi UU PKS merupakan domain pemerintah daerah karena persoalan-persoalan sosial lebih cenderung menjadi wewenang Pemda. Oleh karena itu, tugas dari instansi keamanan, seperti polisi, adalah melakukan deteksi awal atas potensi gangguan dan gangguan nyata.⁹¹ Dalam hal ini, kerja sama di antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga berperan penting dalam usaha deteksi dini. Hal ini dapat dilihat dari upaya pencegahan, di mana konflik yang berpotensi meluas sering kali diselesaikan oleh lembaga atau tokoh masyarakat. Lembaga dan tokoh masyarakat ini melakukan pemantauan terhadap gejala yang muncul karena kedekatan (*proximity*) mereka dengan masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemantauan seperti ini biasanya dilakukan dengan pendanaan terbatas dari APBD kabupaten/kota.⁹²

Gambar 4.1. Pemetaan Konflik Kabupaten Lombok Tengah



Dari data yang dikumpulkan di lapangan terlihat, pihak pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Lombok, terutama melalui Kesbangpol, telah melakukan upaya pemetaan konflik di daerah mereka masing-masing,

90 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

91 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

92 Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015.

seperti yang terlihat pada **Gambar 4.1** yang merupakan peta konflik yang dibuat oleh Kesbangpol Lombok Tengah. Hal ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk membangun sistem peringatan dini, di mana peran intelijen sangat strategis.⁹³ Contoh lain upaya pembangunan sistem peringatan dini dapat dilihat dari upaya Kesbangpol Kota Mataram yang merekrut relawan dari masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Para relawan ini secara terus-menerus melaporkan gejala yang dapat mengakibatkan pecahnya konflik kekerasan di daerah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Upaya pembangunan sistem peringatan dini juga dilakukan dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dalam pembentukan FKDM, masyarakat aktif berpartisipasi. Biasanya tokoh-tokoh pemuda dilibatkan di bawah koordinasi para tetua yang berjumlah dua sampai tiga orang di tingkat kabupaten. Para tetua ini membawahi 10 orang anggota di setiap kelurahan atau desa.⁹⁴ Melalui jaringan ini, para anggota FKDM mengumpulkan informasi potensi konflik dari warga dan langsung mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota. Apabila potensi itu dianggap akan berdampak besar, maka mereka segera melaporkannya kepada pihak berwenang di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kewenangan pembinaan koordinasi di tingkat kecamatan berada di tangan camat, di tingkat kabupaten di tangan wakil bupati, dan di tingkat provinsi di tangan wakil gubernur.

Melalui proses di atas dapat dilihat bahwa para ketua FKDM mengirimkan informasi secara kontinu ke pembina masing-masing. Para anggota FKDM sendiri dibekali dengan buku kerja (**Gambar 4.2.**). Untuk potensi yang membutuhkan penanganan aparat, mereka mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler ke Polres dan Kesbangpol. Kesbangpol kemudian menyebarkan informasi tersebut ke seluruh pihak terkait. Saran tindak lanjut kemudian diberikan kepada pimpinan *leading sector* untuk menangani permasalahan yang ada. Upaya pencegahan dini seperti ini telah dilakukan sehingga jumlah insiden kekerasan tidak sebanyak dahulu.⁹⁵

Contoh lain tindakan kewaspadaan dini dapat dilihat dari keterlibatan beberapa lembaga dalam upaya pencegahan suatu kasus konflik sumber daya. Ketika ada gejala konflik di salah satu desa di Kabupaten Bima, tokoh masyarakat mengontak langsung FKDM setempat dan mengirimkan berita ke Kepolisian dan Kesbangpol. Saat itu juga koordinasi antara Kesbangpol dan

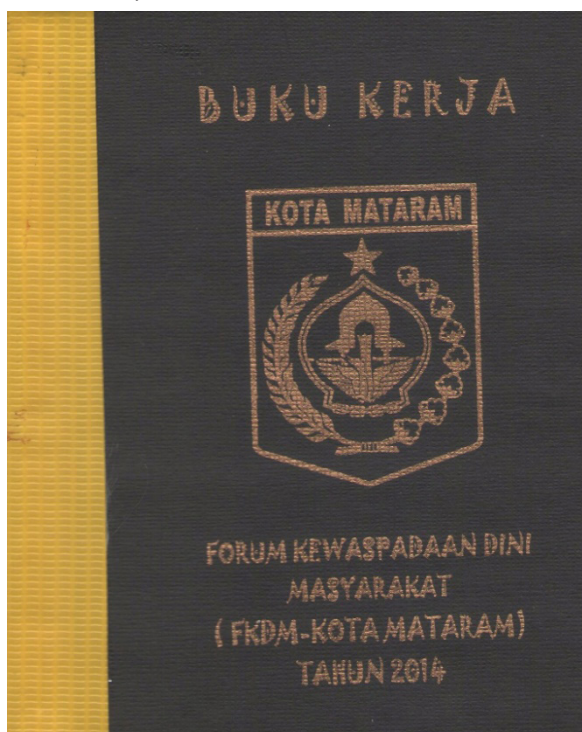
93 Bila dilihat dari sisi pemerintah sekarang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan perlunya peningkatan peran Kesbangpol terutama bila dihubungkan dengan fungsi intelijennya (Republika, 28 Oktober 2014, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/28/ne47mr-tjahjo-kumolo-ingin-kesbangpol-seperti-bin>).

94 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

95 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

Kepolisian dilakukan sehingga pada keesokan harinya aparat keamanan dan tim dari kabupaten sudah dapat diturunkan. Selanjutnya, pihak berwenang berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui kepala desa untuk menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang harus dilakukan guna mencegah meluasnya konflik.⁹⁶ Dalam kasus lain, peran lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diperlukan dalam upaya penanganan dini sebuah konflik. Misalnya, untuk menyelesaikan perselisihan antarkelompok agama berkenaan dengan pembangunan tempat ibadah warga pemeluk agama Hindu di Dompu⁹⁷ dan mencegah terjadinya konflik antarkelompok pemeluk agama yang diakibatkan oleh masalah sepele dan kesalahpahaman kecil di Sumbawa.⁹⁸

Gambar 4.2. Buku Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014



Pembentukan forum-forum seperti FKDM, FKUB, dan lain-lain, secara strategis dianggap sudah benar. Namun demikian, aspek gotong-royong yang semestinya menjadi karakteristik forum-forum berbasis kemasyarakatan tidak ditemukan lagi. Dengan demikian, upaya untuk mempertahankan

⁹⁶ Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

⁹⁷ Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

⁹⁸ Tokoh masyarakat Islam Sumbawa, wawancara 7 Februari 2015, dan tokoh masyarakat Hindu Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

dan mengembangkan forum-forum dan lembaga-lembaga musyawarah yang bersifat *bottom-up* ini hanya dapat dilakukan bila semangat gotong-royong dibangkitkan kembali, termasuk misalnya dengan pendanaan swadaya masyarakat.⁹⁹

Selama ini masalah pendanaan selalu menjadi perhatian utama karena forum-forum dan lembaga-lembaga ini dibentuk oleh pemerintah, namun biaya operasionalnya tidak disediakan secara memadai.¹⁰⁰ Akibatnya, forum-forum dan lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan baik karena dana operasional dari APBD sangat terbatas. Di samping itu, dari aspek *output* usulan strategis dan konsep-konsep bagus dari FKDM sering tidak direalisasikan oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah, karena tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat pihak-pihak yang terlibat dalam FKDM berkecil hati mengingat komitmen pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi mereka dianggap masih rendah.¹⁰¹ Padahal UU PKS telah menggarisbawahi kewajiban pemerintahan untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk mendeteksi persoalan-persoalan di masyarakat dengan mengikutsertakan instansi-instansi terkait, termasuk pihak kepolisian.¹⁰² Atas dasar hal ini, beberapa kalangan menilai bahwa kegiatan deteksi dini masih belum menjadi prioritas dalam politik anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rendah atau tidak adanya alokasi dana untuk program deteksi dini dalam pencegahan konflik. Demikianlah salah satu kritik yang dialamatkan kepada pemerintah daerah.

Kritik lain yang muncul dalam upaya deteksi dini menilai bahwa beberapa wilayah di provinsi Nusa Tenggara Barat terkesan termarginalkan karena tidak terlihat upaya pemerintah di sana untuk membangun sistem deteksi dini, padahal beberapa lembaga seperti FKDM, Babinkamtibmas, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi potensi-potensi konflik dan kekerasan di masyarakat.¹⁰³ Pemerintah daerah sendiri dianggap lebih banyak menyerahkan urusan deteksi dini ini kepada pihak kepolisian dan baru ikut terlibat ketika konflik telah terjadi. Lebih lanjut, meskipun sistem deteksi dini mulai berjalan, ada persoalan lain yang muncul terkait pemanfaatan informasi yang telah dikumpulkan dengan susah payah tersebut. Sampai sekarang masih terdapat kesulitan dari pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan informasi yang tersedia sehingga pencegahan konflik dan kekerasan terkonsentrasi pada pemicu, bukan pada akar masalahnya.¹⁰⁴ Di samping itu,

99 Ulama dan tokoh pendidikan NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

100 Ulama dan tokoh pendidikan NTB, wawancara 26 Oktober 2014.

101 Mantan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014

102 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

103 Peneliti dan aktivis di Mataram, wawancara 6 Februari 2014.

104 Peneliti dan aktivis di Mataram, wawancara 6 Februari 2014.

pembangunan *data processing center* sebagai konsekuensi dari aktivitas deteksi dini masih belum dilakukan, sehingga data masih tersebar di masing-masing instansi pemegang data.

Dari perspektif keamanan, meskipun Babinkamtibmas penting dalam upaya *preventive* dan *pre-emptive*, pihak kepolisian sendiri mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel masih menjadi salah satu kendala dalam upaya deteksi dini. Sejak dicanangkan tiga tahun lalu, konsep satu desa satu Babinkamtibmas masih belum tercapai. Misalnya, jika Lombok Barat memiliki 122 desa, semestinya Babinkamtibmas yang disiagakan dan diturunkan juga berjumlah 122 orang. Namun demikian, pihak Kepolisian hanya mampu menyediakan 66 orang personel Babinkamtibmas. Dengan demikian, seorang anggota Babinkamtibmas harus menangani kurang lebih dua desa. Dari hasil evaluasi sementara oleh pihak Polresta, jumlah yang ada dianggap masih dapat mengatasi permasalahan dan melakukan upaya deteksi dini, sehingga pihak kepolisian tetap dapat memantau situasi walaupun ada keterbatasan sumber daya manusia.¹⁰⁵

Semua kegiatan terkait deteksi dini diakui beberapa kalangan masih belum dijalankan dengan sistematis dan hanya memaksimalkan kegiatan yang selama ini telah rutin dijalankan. Misalnya, Kejaksaan memiliki pos pelayanan hukum terpadu yang sosialisasinya dilakukan melalui siaran-siaran radio. Melalui media tersebut, layanan konsultasi dilakukan dalam upaya pencegahan dini, terutama berkenaan dengan masalah pertanahan dan masalah perdata lain. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya awal penegakan hukum. Bila dari informasi yang diberikan masyarakat, misalnya, terdapat indikasi tindak pidana korupsi, maka pihak Kejaksaan akan menindaklanjutinya.¹⁰⁶

Keberadaan Pamswakarsa juga dimanfaatkan dalam pengumpulan informasi peringatan dini karena lembaga ini merupakan salah satu dari empat pilar keamanan dan ketertiban di NTB. Jika sebelumnya lembaga-lembaga Pamswakarsa terus-menerus berkonflik di antara mereka sendiri atau dengan masyarakat, pelibatan mereka ke dalam program empat pilar secara efektif mengurangi potensi konflik. Lebih lanjut, informasi yang masuk melalui keempat unsur pilar tersebut membantu pihak keamanan melakukan pencegahan awal. Hasilnya, sebagai contoh, di Lombok Timur angka konflik menurun dan di Lombok Tengah dalam dua tahun terakhir terdapat *zero* konflik karena unsur empat pilar tersebut telah berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan konflik.¹⁰⁷

105 Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, wawancara 5 Februari 2015.

106 Pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa, wawancara 8 Februari 2015.

107 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, FGD 24 Oktober 2014.

Gambar 4.3. Buku Saku Babinkamtibmas tentang ISIS 2014



Berkenaan dengan isu terorisme, NTB merupakan salah satu zona merah nasional.¹⁰⁸ Dari sisi instansi keamanan, para petugas Polda yang sudah mengikuti pelatihan dengan sistem *neuro associative conditioning* (NAC) melakukan upaya deradikalisasi, meskipun masih dengan cara yang konvensional, seperti melalui ceramah-ceramah di beberapa kabupaten/kota dan program refleksi untuk negeri. Daerah yang dijadikan target program deradikalisasi adalah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, dan diteruskan ke Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Pulau Lombok. Peserta program ini terdiri atas anggota program empat pilar ditambah dengan tokoh masyarakat, tenaga penjaga Kamtibmas, dan pengurus masjid. Untuk masing-masing kabupaten/kota, peserta yang ditargetkan berjumlah 200 orang. Program ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada para Babinkamtibmas sehingga mereka berkompetensi untuk menyebarkan informasi tentang upaya deradikalisasi.¹⁰⁹ Pihak Babinkamtibmas juga dibekali dengan buku-buku berisi informasi mengenai organisasi radikal, seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), untuk menambah pengetahuan mereka tentang cara mencegah organisasi tersebut muncul dan berkembang di masyarakat (**Gambar 4.3**).

108 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

109 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, FGD 24 Oktober 2014.

Selain secara internal, kepolisian juga menggandeng lembaga lain, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB. Kapolda NTB mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan MUI adalah untuk menyepakati peran dalam hal deradikalisasi di NTB. MUI sendiri diharapkan dapat menyumbang tenaga dalam memberikan pembekalan agama yang benar, baik melalui materi pembelajaran pada instansi pendidikan maupun forum komunikasi masyarakat lintas lingkungan dan daerah. Dengan cara-cara ini, masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam paham yang menyesatkan yang disebarkan oleh kelompok tertentu. Pemantauan sendiri dilakukan di daerah-daerah yang berpotensi menjadi tempat persinggahan terduga teroris, seperti Bima dan Dompu, sehingga pihak keamanan setempat dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menangani masalah ini.¹¹⁰ Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hal ini juga didiskusikan.

Gambar 4.4. Buku Saku untuk Masyarakat tentang ISIS 2014



Pada bulan April 2012 dibentuk Forum Penanggulangan Terorisme yang merupakan lembaga pertama dari 15 lembaga yang direncanakan dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Forum ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pihak pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, dan akademisi. Mengingat strategi pemerintah dalam menangani terorisme adalah lebih mengedepankan pencegahan daripada

110 Kertopati, L. (2014, 9 Oktober). *Basmi terorisme NTB, Polisi gandeng MUI*. Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546584-basmi-terorisme-ntb--polisi-gandeng-mui>

da penindakan, maka tugas pencegahan itu harus dilakukan di mana-mana, termasuk mengupayakan program sosialisasi di pesantren dan sekolah-sekolah. Di saat yang bersamaan, upaya penindakan terhadap para terduga teroris tetap dilakukan oleh pihak kepolisian.¹¹¹ Namun demikian, sebagai langkah pencegahan berkembangnya isu-isu terorisme dan penerangan kepada masyarakat, Polda NTB juga telah menerbitkan *Buku Saku Masyarakat tentang ISIS* (**Gambar 4.4**).

Forum binaan di atas memiliki *contact person* yang menginformasikan bila ada kelompok yang dianggap dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Biasanya petugas dari instansi terkait mengunjungi kelompok tersebut dan melakukan pertemuan informal. Dalam pertemuan itu, kelompok tersebut diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan berkenaan dengan aktivitas mereka agar tidak ada kecurigaan yang dapat mengganggu keberadaan mereka baik secara sosial maupun ekonomi.¹¹²

4.2.3. Penyelesaian Perselisihan Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*, ADR)

Meskipun penyelesaian adat masih digunakan sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian konflik, beberapa pihak menganggap bahwa cara alternatif tersebut secara sistematis telah dilemahkan dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Akibat dari keberadaan undang-undang tersebut, resolusi konflik menjadi formal karena harus melalui satu badan, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).¹¹³ Dengan demikian, upaya penyelesaian secara alternatif semakin terpinggirkan, padahal potensinya dalam menyelesaikan konflik sangat besar.

Pihak kepolisian sendiri mendorong dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan alternatif sehingga penyelesaian konflik tidak harus melalui jalur hukum.¹¹⁴ Sebelumnya hal tersebut masih wacana belaka, namun sekarang sudah dilakukan dengan melibatkan para tokoh yang disegani dan pimpinan pihak keluarga.¹¹⁵ Namun demikian, ADR masih bersifat superfisial karena tidak menyentuh akar permasalahan sehingga upaya tindak lanjut dari Babinkamtibmas mutlak dilakukan melalui pendekatan pribadi dan silaturahmi.¹¹⁶ Lebih lanjut, penyelesaian lewat jalur hukum tidak dijadikan prioritas karena yang dikedepankan adalah aspek penyelesaian melalui musyawarah mufakat.¹¹⁷

111 "Forum Penanggulangan Teroris Dibentuk di NTB," 4 April 2012 diakses dari <http://mata-ramnews.co.id/lombok/item/957-forum-penanggulangan-teroris-dibentuk-di-ntb>

112 Pejabat Kesbangpol Provinsi NTB, wawancara 27 Oktober 2014.

113 Budayawan Sasak, wawancara 3 Januari 2014.

114 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

115 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

116 Pejabat Bidang Binmas Kepolisian Lombok Tengah, wawancara 5 Februari 2014.

117 Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah, wawancara 4 Februari 2014.

Salah satu contoh yang patut dikedepankan adalah konflik di Kota Mataram yang melibatkan dua lingkungan, yaitu Karang Mas-Mas dan Tohpati. Konflik ini dipicu oleh kesalahpahaman pemuda yang kemudian membesar akibat masuknya unsur SARA karena kelompok pemuda yang bertikai kebetulan berasal dari dua etnis yang berbeda. Bentrokan fisik terjadi di antara kedua kelompok warga pada 23 Desember 2012 dan 7 Maret 2013. Bentrokan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Untuk membantu menyelesaikan konflik ini, pihak-pihak terkait sepakat untuk mendirikan posko pengaduan di Universitas 45 Mataram.¹¹⁸ Pelibatan institusi pendidikan dan akademisi merupakan sebuah terobosan yang dapat diterima semua pihak. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengaduan, tetapi juga sebagai tempat konsultasi dan mediasi. Kampus dipilih karena bersikap tidak memihak dan lokasinya berada di wilayah konflik. Upaya tindak lanjut perdamaian dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan pertimbangan tersebut, pihak kampus ditunjuk menjadi mediator. Pihak Universitas 45 kemudian melakukan pertemuan-pertemuan sepihak dengan masing-masing kelompok yang bertikai. Pertemuan-pertemuan ini diikuti dengan pertemuan bersama-sama, di mana seluruh pejabat Polres Mataram dan SKPD ikut serta untuk mengungkapkan keinginan pihak Karang Mas-Mas dan Tohpati dalam penyelesaian konflik tersebut.¹¹⁹ Selanjutnya, dengan disaksikan oleh camat, Babinsa, petugas Koramil, dan Polsek, perjanjian perdamaian disepakati. Konsep isi perjanjian ini sendiri dibuat oleh pihak rektorat dengan bantuan kepolisian.¹²⁰

Adanya intervensi ini menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani perwakilan dari dua keluarga dan lingkungan yang bertikai pada 20 April 2013.¹²¹ Dokumen kesepakatan itu juga ditandatangani oleh para saksi yang berasal dari pihak masyarakat, pemerintah, dan keamanan (Polri dan TNI). Upacara penandatanganan dihadiri oleh para pejabat Kota Mataram, pimpinan DPRD Kota Mataram, organisasi pemuda, warga masyarakat kedua lingkungan, dan Rektor Universitas 45 Mataram selaku mediator. Keberhasilan mediasi ini mendorong Pemerintah Kota Mataram meminta pihak Universitas 45 untuk juga terlibat dalam pemulihan sosial akibat konflik dengan dukungan pemerintah kota. Untuk melengkapi proses rekonsiliasi tersebut, diadakan prosesi *Saling Ngejot* sebagai sebuah bentuk kearifan lokal. Prosesi ini berupa pemasangan ikat kepala tradisional dan kopiah oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang sebelumnya bertikai.¹²² Meskipun perdamaian

118 Kesbangpol Kota Mataram, *FGD* 21 Oktober 2014.

119 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, *FGD* 24 Oktober 2014.

120 Tokoh Hindu Mataram, wawancara 26 Oktober 2014.

121 "Dua lingkungan tanda tangani kesepakatan damai." Portal Entebe, 21 April 2013 diakses dari <http://www.portalentebe.com/2013/04/dua-lingkungan-tandatangani-kesepakatan.html>

122 "Dua lingkungan tanda tangani kesepakatan damai." Portal Entebe, 21 April 2013 diakses dari <http://www.portalentebe.com/2013/04/dua-lingkungan-tandatangani-kesepakatan.html>

sudah dicapai, proses penegakan hukum tetap berjalan dan upaya rehabilitasi dilakukan dengan dukungan Pemda.¹²³

Penyelesaian konflik melalui jalur alternatif seperti contoh di atas juga dilakukan oleh lembaga masyarakat lain. Sebagai contoh, ketika terjadi Kasus 171 terjadi penyerangan terhadap gereja-gereja dan umat Kristiani. Dalam kasus ini, tokoh-tokoh agama dari Nahdlatul Ulama berpartisipasi dalam mediasi kelompok yang berkonflik, terutama antarkelompok agama. Untuk kasus lain, misalnya berkenaan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, seperti Jamaah Ahmadiyah, para aktivis juga ikut turun tangan membela kelompok tersebut. Meskipun posisi para aktivis ini sangat rawan karena dilabeli sebagai kelompok Islam liberal, mereka tetap bekerja dan membantu kelompok tersebut mendapatkan hak-hak layanan sipil dari pemerintah dan hak-hak publik lainnya.¹²⁴

Pengalaman lain juga dapat dilihat dari kasus Sumbawa, di mana pencegahan awal tidak berhasil mende eskalasi konflik karena isunya sudah menyangkut SARA. Setelah upaya penghentian kekerasan oleh pihak kepolisian (termasuk penangkapan terhadap pelaku perusakan, penjarahan, dan provokasi) berhasil dilakukan, upaya rekonsiliasi mulai dilaksanakan. Pihak Pemda Sumbawa mempertemukan perwakilan dan tokoh-tokoh dari pihak-pihak yang bertikai sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan. Upaya ini sulit dilakukan sedari awal karena adanya masalah dengan respons dan kecepatan bertindak pihak berwenang. Masalah ini sangat sensitif karena menyangkut isu SARA antara warga keturunan Bali dan warga asli Sumbawa. Selain itu, lemahnya kohesi sosial di antara kedua kelompok warga tersebut juga berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan. Belajar dari pengalaman tersebut, pihak kepolisian segera bertindak ketika di kesempatan lain ada kasus pembunuhan di mana tersangkanya adalah warga Bali dan korbannya perempuan Sumbawa. Pihak kepolisian segera mengirimkan pasukan dan mempertemukan para tokoh kedua kelompok untuk menginformasikan kepada warganya bahwa kasus itu tidak ada kaitannya dengan masalah suku, melainkan murni pidana. Dengan demikian, kecepatan dalam pencegahan, baik menyangkut proses penegakan hukuman maupun mempertemukan kedua kelompok, dapat meminimalkan terjadinya letupan.¹²⁵

4.3. KERANGKA KERJA KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT

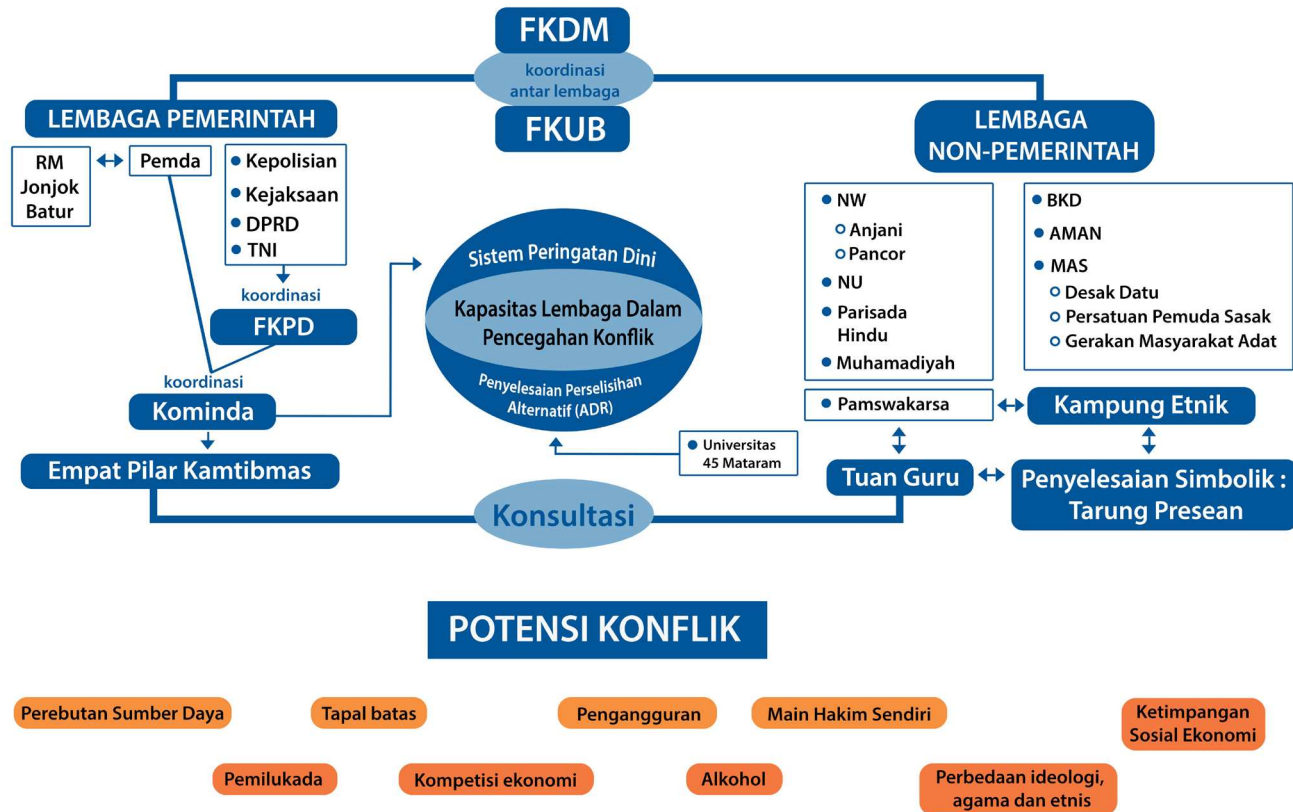
Dengan memperhatikan dinamika kelembagaan dalam pencegahan konflik, maka Tim SNPK-THC menggambarkan bagaimana kerangka kerja da-

123 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, *FGD* 24 Oktober 2014.

124 Tokoh Perempuan organisasi Islam, wawancara 27 Oktober 2014.

125 Jajaran Kepolisian Daerah NTB, *FGD* 24 Oktober 2014.

Gambar 4.5. Kerangka Kerja Pencegahan Konflik di Pulau Lombok



lam pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat dengan mengambil Lombok sebagai contoh (**Gambar 4.5**).¹²⁶

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa koordinasi kasus Lombok dapat dilihat dari dua sisi, yaitu koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Untuk koordinasi internal, kegiatan dilakukan dalam dua tingkat: provinsi dan kabupaten/kota. Di level provinsi, lembaga-lembaga pemerintah melakukan koordinasi melalui FKPD provinsi yang beranggotakan unsur pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi, Komando Resort Militer (Korem), Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan DPRD Provinsi. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dilakukan dalam FKPD kabupaten/kota yang beranggotakan unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari), dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, koordinasi internal juga dilakukan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wadah *Regional Management* Jonjok Batur dalam mensinkronisasikan kebijakan pembangunan antardaerah. Koordinasi ini juga dilakukan dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang merupakan sarana untuk berbagi informasi dan penyatuan langkah dalam merespons potensi konflik yang dideteksi dari hasil pengumpulan informasi sistem peringatan dini masing-masing lembaga. Kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan Polda, diluncurkanlah program “Empar Pilar Kamtibmas” yang beranggotakan unsur-unsur keamanan daerah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian, Kesatuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), ditambah dengan lembaga nonpemerintah, Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa).

Untuk koordinasi eksternal, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah melakukannya melalui forum yang telah dibentuk, seperti FKUB dan FKDM, serta pelibatan Pamswakarsa dalam langkah pengamanan daerah. Selanjutnya upaya koordinasi juga dilakukan dengan pimpinan nonformal, seperti tuan guru. Kegiatan ini bersifat konsultatif untuk membahas upaya-upaya pencegahan tersebut potensi konflik. Sementara itu, koordinasi eksternal juga dilakukan dalam hal penyelesaian perselisihan alternatif dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga adat dan agama serta melibatkan lembaga yang dianggap netral, seperti lembaga pendidikan tinggi, misalnya pelibatan Universitas 45 Mataram dalam penyelesaian konflik antara warga Muslim dan warga Hindu di Lingkungan Karang Mas-Mas dan Tohpati, Kota Mataram. Upaya konsultatif dan mediatif ini ternyata cukup berhasil dalam menyelesaikan konflik dan mencegah agar konflik tersebut tidak menyebar ke wilayah lain. Di samping itu, keberadaan penyelesaian konflik secara simbolik melalui, misalnya, kegiatan *paresean*, dapat menjadi *outlet*

126 Terima kasih kepada Dr. Thung Ju Lan atas bantuan *mapping* alur berpikir penyelesaian konflik di Lombok.

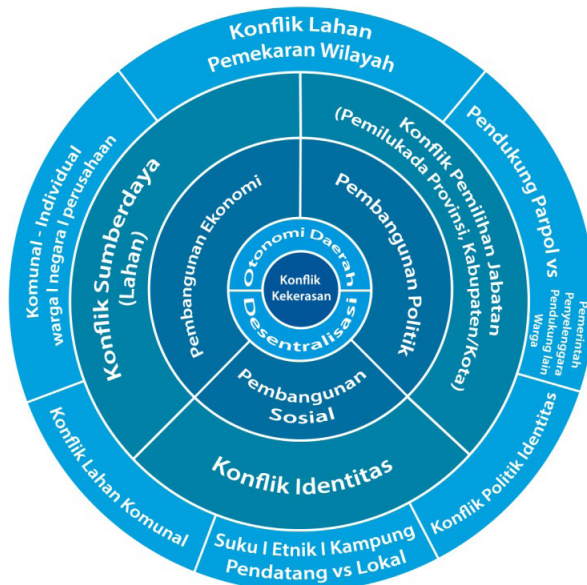
untuk menyalurkan potensi kekerasan dalam kegiatan yang sportif dan selalu berada di bawah pengawasan lembaga keamanan formal dan perangkat adat.

Alur berpikir di atas dapat menjadi contoh bagaimana upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan koordinasi antarlembaga, pembangunan sistem peringatan dini, dan penyelesaian perselisihan alternatif. Meskipun ada kemungkinan pendekatan yang diambil berbeda untuk setiap potensi konflik yang ada, ketiga strategi tersebut dapat menjadi rujukan dalam merancang upaya-upaya pencegahan konflik di daerah.

Refleksi atas Peran Lembaga dalam Pencegahan Konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat

MENURUT BEBERAPA STUDI yang dilakukan Tim SNP-K-THC terkait tren kekerasan, pada periode 2005-2013 terdapat isu-isu yang berkembang dalam pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial (**Gambar 5.1**). Bila dicermati, ada tiga kecenderungan konflik kekerasan yang muncul, yaitu kekerasan dalam pemilukada di bidang politik, kekerasan terkait konflik lahan dan sumber daya di bidang ekonomi, serta kekerasan identitas terkait hubungan antarkelompok di masyarakat.¹ Secara umum, tiga isu kekerasan yang menjadi tren dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan tantangan bagi pemerintah di tingkat subnasional, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa. Ketiga jenis isu ini dapat bersinggungan satu sama lain, sehingga menambah kompleksitas konflik dan kekerasan di masa yang akan datang.

Gambar 5.1. Tren dan Isu Konflik Kekerasan di 13 Provinsi Pantauan SNP-K (2005-2013)²



1 Lihat Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center, Edisi 04, 05, 06, 07.

2 Sumber: Fathun Karib (2014), *THC Review*, Vol 2/2014, hal 52.

Mengingat ketiga jenis isu konflik dan kekerasan tersebut juga ditemukan dalam studi ini, maka bab ini akan mendiskusikan refleksi atas hasil temuan penelitian Tim SNPK-THC tentang kapasitas lembaga dalam dinamika pencegahan konflik di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu refleksi peran lembaga dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat, refleksi peran lembaga dalam pencegahan konflik di Nusa Tenggara Barat, dan refleksi penutup.

5.1. REFLEKSI KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT

Refleksi untuk kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat terdiri atas dua bagian, yaitu refleksi tentang peran dan strategi lembaga, serta tantangan pencegahan konflik di masa depan.

5.1.1. Peran dan Strategi Lembaga dalam Pencegahan Konflik

Setelah berakhirnya konflik komunal, kondisi keamanan di Kalimantan Barat relatif lebih damai. Yang dimaksud dengan kondisi relatif damai dalam konteks studi ini adalah tidak terulangnya kembali konflik kekerasan komunal berskala besar di Kalimantan Barat selama 16 tahun terakhir. Konflik kekerasan yang berkembang pascaperiode 1997-2001 lebih bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu, dengan motivasi konflik yang lebih bersifat pragmatis daripada primordial. Selain itu, juga tidak terbentuk konflik akibat permasalahan dalam hubungan antarkelompok masyarakat di Kalimantan Barat. Perdamaian dan transformasi konflik ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting, seperti kondisi politik dan keamanan di tingkat nasional yang relatif stabil, terakomodasinya kepentingan elite-elite politik yang berasal dari kelompok-kelompok mayoritas lokal, dan *power sharing* di antara elite-elite kelompok yang ada di Kalimantan Barat.

Pada tingkat nasional, selama lebih dari 16 tahun perubahan kekuasaan politik nasional dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya relatif lebih damai dan aman.³ Perubahan rezim nasional melalui proses demokratis pemilihan umum yang relatif damai menutup peluang politik (*political opportunities*) elite-elite lokal ataupun kelompok-kelompok lain yang ingin memanfaatkan kondisi transisi politik. Selain itu, dalam konteks elite politik lokal di Kalimantan Barat dan daerah lainnya, artikulasi kepentingan politik kelompok mayoritas yang pada era sebelumnya tidak terakomodasi, telah mendapatkan ruang dalam struktur kekuasaan politik.

3 Sebagai catatan, transfer kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Presiden Megawati berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan karena melalui proses *impeachment* DPR.

Pada sisi lain, secara perlahan artikulasi ini menemukan titik baliknya, di mana perebutan kekuasaan melalui kekerasan yang terjadi silih berganti memberikan sinyal kepada elite-elite lokal yang saling bertikai bahwa masing-masing pihak memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama untuk menggunakan kekerasan. Kesadaran ini muncul dan terlihat dalam konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok Dayak–Madura pada tahun 1997 dan Melayu–Madura pada tahun 1999. Sebagai jalan keluar dari persaingan politik ini, kesepakatan untuk saling berbagi kekuasaan menjadi pilihan yang ditempuh. Langkah ini merupakan solusi yang diambil setelah semua pihak harus mengalami kekerasan berskala besar yang banyak mengakibatkan kerugian jiwa dan material.

Desentralisasi, otonomi daerah, dan pemilihan umum kepala daerah secara langsung pasca-1998 telah membuka ruang bagi pemenuhan hasrat para elite lokal untuk berkompetisi memperebutkan kekuasaan politik. Setidaknya selama sepuluh tahun terakhir ini kesempatan-kesempatan politik tersebut dapat meredam kemungkinan-kemungkinan membesarnya konflik-konflik berskala lokal dan terbatas (lihat Bab III). Pemekaran sebagai bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok elite di masyarakat. Studi ini memperlihatkan bagaimana kasus pemekaran yang terjadi di Sambas menjadi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang, dapat mengakomodasi kepentingan politik masing-masing kelompok. Sampai saat ini, setidaknya, setiap kelompok etnis dapat berbagi dan membagi wilayah kekuasaannya sehingga perdamaian dan keamanan dapat relatif terjaga. Temuan tersebut mengafirmasi klaim Kobayashi (2011) bahwa desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk membangun tata kelola lokal yang sesuai dengan situasi khusus mereka dalam pencegahan konflik. Lebih lanjut, Kobayashi menyatakan bahwa kerja sama antarorganisasi etnis dapat mencegah peluasan kekerasan; peran pemerintah daerah juga menjadi penting untuk memfasilitasi kerja sama dalam pencegahan konflik.

Studi ini juga memperlihatkan, selama periode sepuluh tahun terakhir (2005-2015) lembaga pemerintah dan nonpemerintah memainkan peranan penting di berbagai aspek (politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan keamanan) untuk menjaga perdamaian dan mencegah terulangnya kembali konflik dan kekerasan berskala besar di Kalimantan Barat. Ada tiga temuan penting dari studi ini terkait dengan peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat.

Pertama, selain faktor eksternal seperti stabilitas di tingkat nasional, faktor internal berupa peran lembaga nonpemerintah yang diwakili oleh elite politik kelompok-kelompok etnis dominan memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya konflik pada aspek politik. Kehendak politik (*political*

will) elite lokal untuk berbagi kekuasaan, serta keseimbangan kekuatan di antara kelompok dominan Dayak dan Melayu, telah menciptakan stabilitas politik di Kalimantan Barat. Stabilitas politik yang tercipta melalui kehendak politik dan pembagian kekuasaan ini merupakan salah satu faktor penting bagi pencegahan konflik di provinsi tersebut.

Kedua, studi ini memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah memainkan peranan yang berbeda di setiap faktor terkait kompleksitas konflik yang ditemukan oleh Tim Peneliti SNPK-THC. Pada *faktor keamanan*, peran lembaga pemerintah seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Daerah terlihat kuat dan menonjol. Ini terlihat dari berfungsinya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kalimantan Barat yang berada di bawah kendali kepala daerah dalam melaksanakan koordinasi guna mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. Prakondisi utama yang berkontribusi terhadap kapasitas lembaga pemerintah ini adalah sudah relatif mapannya struktur dan infrastruktur intelijen, termasuk jaringan yang ada. Dengan kata lain, lembaga pemerintah memiliki kesiapan dan sumber daya keamanan yang lebih baik dalam memainkan peran pencegahan konflik dan kekerasan dibanding dengan lembaga nonpemerintah. Selain itu, lembaga pemerintah di bidang keamanan memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat untuk melakukan pencegahan dari aspek penegakan hukum. Absennya legitimasi dari aspek hukum ini membuat peranan keamanan lembaga-lembaga nonpemerintah tidak sekuat lembaga pemerintah.

Kinerja lembaga pemerintah dalam bidang keamanan di masa yang akan datang dapat ditingkatkan dengan berbagai strategi dan program pencegahan konflik. Peningkatan kinerja ini tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan untuk mendukung strategi dan program yang akan dieksekusi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, dapat lebih dimaksimalkan apabila didukung oleh pendanaan yang kuat. Program-program tersebut di antaranya pemetaan konflik dan implementasi program multikulturalisme. Pemetaan konflik yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi dapat dikembangkan pada tingkat kabupaten dan kota agar gambaran pemetaan lebih komprehensif. Diseminasi hasil penelitian juga diperlukan agar lembaga-lembaga pemerintah lain, lembaga-lembaga nonpemerintah, dan publik, terutama masyarakat lokal Kalimantan Barat, dapat mengakses informasi yang akan bermanfaat untuk pencegahan konflik.

Program multikulturalisme yang pernah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kalimantan Barat di beberapa wilayah dapat dikembangkan ke wilayah lain sebagai strategi untuk mengikis segregasi dan sekat-sekat sosial yang membatasi hubungan antarkelompok etnis di Kalimantan Barat. Pemilihan remaja sebagai target peserta didik multikulturalisme oleh Kesbangpol sudah tepat,

mengingat banyak konflik dan kekerasan berawal dari permasalahan remaja. Dengan dukungan pendanaan yang baik, kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan kelompok minoritas berpotensi menjadi peserta didik multikulturalisme dan program sosial lainnya.

Peran lembaga dalam *bidang pendidikan* untuk mencegah konflik dan kekerasan di Kalimantan Barat tidak hanya dijalankan oleh lembaga pemerintah seperti Kesbangpol, tetapi juga oleh lembaga nonpemerintah seperti Institut Dayakologi. Salah satu program Institut Dayakologi adalah melakukan *training for trainers* untuk menyiapkan tenaga pengajar yang mampu memberikan materi multikulturalisme kepada anggota kelompok lain. Kerja sama antara lembaga nonpemerintah dengan pemerintah, yakni antara Institut Dayakologi dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, tidak hanya menjangkau sekolah-sekolah yang homogen secara demografis, tetapi juga institusi-institusi pendidikan berbasis agama, seperti pesantren. Materi-materi multikulturalisme, baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah diperlukan sebagai upaya transformasi konflik dengan melakukan edukasi bagi masyarakat yang tersegregasi menurut identitas etnis, agama, dan golongan. Selain itu, lembaga-lembaga nonpemerintah, baik yang berbasis etnis dan agama seperti Pancur Kasih, Muhammadiyah, MABM, IKBM, MABT, DAD, maupun kelompok masyarakat lain, secara informal juga melakukan edukasi dan menyosialisasikan nilai-nilai toleransi antarkelempok melalui jaringan-jaringan internal yang mereka miliki. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat arus bawah melalui pendidikan merupakan salah satu strategi pencegahan konflik yang efektif. Di masa yang akan datang, program-program pencegahan yang berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan ketahanan masyarakat sangat diperlukan untuk membendung kepentingan-kepentingan politik yang ingin memanfaatkan perbedaan sosial budaya di masyarakat untuk kepentingan politik praktis mereka.

Upaya pemberdayaan dan pembangunan ketahanan di tingkat akar rumput dalam *bidang kebudayaan* dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti Walubi, IKBM, dan lain-lain. Pencegahan konflik dan kekerasan dilakukan dengan menjalankan proses kebudayaan yang bertujuan merekatkan hubungan antarkelompok. Lembaga nonpemerintah dari kelompok Tionghoa, seperti MABT, dan kelompok Madura, seperti IKBM, sering melibatkan warga dari etnis dan agama lain dalam kegiatan seni dan budaya mereka. Dengan cara ini diharapkan pengenalan dan pertukaran antarbudaya dapat menghilangkan sekat-sekat antarkelompok di masyarakat. Bersama dengan program pendidikan, kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti pertunjukan kesenian, secara tidak langsung memiliki fungsi edukatif dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang dianut kelompok lain. Pemerintah daerah juga berperan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan ini,

misalnya dengan memberikan izin penggunaan ruang publik. Lembaga pemerintah juga telah memberikan dukungan bagi upaya-upaya yang dilakukan lembaga-lembaga nonpemerintah di dalam aspek kebudayaan ini.

Pemberdayaan masyarakat *di bidang ekonomi* dilakukan oleh lembaga nonpemerintah di Kalimantan Barat. Ketimpangan ekonomi dapat mendorong terjadinya kecemburuan sosial di antara kelompok etnis yang ada. Lembaga nonpemerintah Pancur Kasih sejak tahun 1980-an berperan penting dalam pemberdayaan perekonomian kelompok Dayak dan kelompok masyarakat lain melalui *Credit Union*. Pascakonflik komunal, *Credit Union* telah berkembang sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok Dayak, tetapi juga oleh kelompok-kelompok etnis lain. Pada masa yang akan datang, permasalahan ketimpangan ekonomi di Kalimantan Barat dapat kembali menjadi faktor yang menegaskan perbedaan antarkelompok. Masalah pengangguran di kalangan pemuda menjadi tantangan yang harus diatasi bukan hanya oleh lembaga nonpemerintah, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Akses ekonomi terhadap sumber daya alam bila tidak dikelola dengan baik juga dapat menciptakan kontestasi klaim di antara kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, kondisi setelah konflik pada 1997 dan 1999 berdampak pada pemenuhan hak perdata kelompok Madura, terutama terkait masalah properti mereka yang ditinggalkan karena harus mengungsi pada periode konflik komunal.

Ketiga, strategi-strategi yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah turut berkontribusi bagi kondisi damai di Kalimantan Barat. Melalui mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah, pembangunan sistem peringatan dini, dan mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif yang melibatkan partisipasi masyarakat, potensi konflik yang muncul selama sepuluh tahun terakhir dapat dicegah sehingga tidak menyebar dan bereskalasi menjadi konflik berskala besar. Strategi-strategi ini saling terkait dan mendukung proses pencegahan konflik dan kekerasan yang ada (lihat **Gambar 5.1**). Dalam studi ini, lembaga pemerintah dan nonpemerintah saling mengisi kekurangan masing-masing. Peran ini merupakan upaya yang diharapkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2012, bahwa pencegahan konflik dilakukan melalui kerja sama dan peran lembaga pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat.

Mekanisme penting yang berperan menyeimbangkan peran satu lembaga dengan lembaga lain dalam proses pencegahan konflik dan kekerasan adalah ***koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah***. Koordinasi antarlembaga bersifat internal dan eksternal. Secara internal, koordinasi terjadi antarlembaga pemerintah di bawah Kominda. Secara eksternal, di antara lembaga pemerintah dengan nonpemerintah. Baik lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah seperti IKBM, MABM, DAD, juga melaksanakan koordinasi internal dengan masing-masing anggotanya

dan masyarakat, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan unit terkecil di desa. Secara formal, mekanisme koordinasi antarlembaga ini dapat terlihat dari pembentukan forum-forum, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Antar Etnis, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Inisiatif peran formal koordinasi antarlembaga lebih sering dilakukan oleh lembaga pemerintah karena memiliki legitimasi sebagai penegak hukum, serta memiliki struktur dan infrastruktur yang sudah mapan. Adapun secara nonformal, lembaga nonpemerintah lebih berperan melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat melalui pendekatan yang lebih mengakar pada budaya dan nilai-nilai dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Koordinasi antarlembaga merupakan mekanisme yang efektif dalam mencegah potensi konflik dan meredam penyebaran serta membesarnya kekerasan. Di masa yang akan datang, dinamika yang terjadi dalam hubungan antarkelompok dengan potensi konflik dan kekerasannya dapat dibawa ke arah yang positif melalui koordinasi antarlembaga dan kerja sama antareleman kelompok di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, koordinasi strategi pencegahan menjadi signifikan dan menonjol untuk diperhatikan dalam menjaga keamanan dan perdamaian di sana.

Sistem peringatan dini yang dibangun selama sepuluh tahun terakhir relatif mampu mencegah meluasnya konflik di Kalimantan Barat. Baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah menggunakan teknologi informasi yang dengan cepat dapat mengirimkan informasi-informasi genting yang berasal dari daerah yang berpotensi konflik. Selain penggunaan teknologi informasi, sistem peringatan dini lembaga pemerintah juga memanfaatkan struktur dan infrastruktur yang ada, termasuk perangkat pemerintah di berbagai tingkat, misalnya ketua RT, kepala desa/lurah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian di Kalimantan Barat, jaringan ini dapat dikatakan aktif dan efektif berperan dalam memberikan peringatan dini sampai ke tingkat provinsi. Arus informasi peringatan dini serupa juga dimiliki oleh lembaga-lembaga nonpemerintah di berbagai tingkat sampai dengan level desa. Sistem peringatan dini yang berjalan melalui jaringan lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga saling berkoordinasi, sehingga kegiatan berbagi informasi dapat dilakukan. Kendala terbesar dalam pemeliharaan sistem peringatan dini bagi lembaga pemerintah adalah pendanaan yang mencakup kebutuhan infrastruktur teknologi dan pembiayaan harian anggota pengumpul informasi di pelosok pedesaan yang tergabung di bawah institusi-institusi anggota Kominda. Sementara itu, sebagian besar lembaga nonpemerintah masih mengandalkan media konvensional sebagai jaringan sistem peringatan dini. Salah satu media yang dipakai adalah televisi dengan program interaktif, seperti yang dikembangkan oleh lembaga Pancur Kasih melalui Ruai TV-nya. Sebagai alat peringatan dini, pemirsa dan anggota masyarakat dapat

melaporkan langsung ke program TV tersebut apabila mereka melihat hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik.

Hasil studi di Kalimantan Barat ini juga menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dan nonpemerintah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda dalam membangun sistem peringatan dini di wilayah tanggung jawab kelembagaannya masing-masing. *Keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan konflik* penting guna mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah tersebut. Salah satu kontribusi terbesar masyarakat adalah dengan terlibat menjadi ujung rantai sistem peringatan dini yang dibangun oleh lembaga-lembaga ini. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat di berbagai tingkatan wilayah memainkan peran sentral dalam mengarahkan arus informasi peringatan dini yang hendak dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain. Pendekatan penyelesaian permasalahan yang cepat sering kali juga dilakukan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu dengan mendatangi lokasi dan mengunjungi masyarakat sekitar tempat terjadinya konflik awal. Tindakan ini cukup efektif dalam menghentikan atau mencegah konflik membesar.

Terakhir, terkait dengan sistem peringatan dini dan partisipasi masyarakat di wilayah berpotensi konflik dan lokasi terjadinya insiden, *penyelesaian perselisihan alternatif* dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah meluasnya konflik dan kekerasan. Strategi ini dapat dilakukan melalui musyawarah antarkelompok etnis atau menggunakan mekanisme penyelesaian adat bila terjadi konflik di antara satu kelompok etnis yang sama. Namun demikian, untuk kasus-kasus tindak pidana berat yang berdampak kematian, penyelesaiannya memang harus melalui intervensi proses hukum positif karena otoritas dan legitimasi formal diperlukan sebagai bentuk ketegasan penegakan hukum. Ketegasan hukum yang tetap terjaga dapat meningkatkan kewibawaan hukum di mata publik, sehingga berkontribusi dalam mencegah anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum di saat sedang berkonflik dengan pihak lain.

5.1.2. Tantangan Pencegahan Konflik dan

Kekerasan di Kalimantan Barat di Masa Depan

Potensi konflik dan kekerasan di Kalimantan Barat dari studi kualitatif ini menunjukkan kecenderungan yang sama dengan isu-isu dan tren kekerasan yang ditemukan pada data SNPK selama periode 2005-2013, yaitu kekerasan dalam pemilukada di bidang politik, kekerasan terkait konflik lahan dan sumber daya di bidang ekonomi, serta kekerasan identitas terkait hubungan antarkelompok di masyarakat (lihat **Gambar 5.1**).

Selanjutnya, potensi konflik dan kekerasan yang telah diidentifikasi melalui studi ini menjadi tantangan ke depan bagi lembaga pemerintah di tingkat

daerah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat Kalimantan Barat dalam upaya menjaga perdamaian dan mencegah terulangnya kembali konflik berskala besar. Secara umum, untuk menjawab tantangan konflik dan kekerasan di masa mendatang, dinamika di antara tiga faktor utama yang ada pada masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan. Ketiga faktor tersebut adalah komposisi kelompok etnis, sejarah pascakekerasan komunal, dan pola konflik baru di era desentralisasi dan otonomi daerah. Peran lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam melakukan upaya pencegahan akan diuji saat ketiga faktor utama ini bertemu dengan kondisi-kondisi yang muncul akibat akumulasi potensi konflik yang ada ataupun peristiwa-peristiwa baru yang memicu konflik di masa depan.

Secara sosiologis, ketiga faktor yang melekat dalam potensi konflik ini bersentuhan dengan berkembangnya ketimpangan horizontal (*horizontal inequality*) dalam dimensi politik, ekonomi, dan sosial di Kalimantan Barat. Pascakonflik kekerasan komunal, kelompok yang mengalami marginalisasi hampir di setiap daerah adalah kelompok masyarakat Madura, sedangkan ketiga kelompok lainnya (Tionghoa, Melayu, dan Dayak) saling berkompetisi di arena politik dan ekonomi. Ketimpangan horizontal tersebut didefinisikan Stewart (2002) sebagai ketimpangan yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang mendefinisikan diri berdasarkan perbedaan kebudayaan dan identitas yang sama. Ketimpangan horizontal ini menjadi potensi konflik di saat perbedaan budaya dan identitas tersebut dimanfaatkan untuk memobilisasi kelompok demi kepentingan politik dan ekonomi. Menurut Stewart ketimpangan horizontal ini meliputi empat area, yaitu partisipasi politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan status budaya.

Dari seluruh potensi konflik yang ada di Kalimantan Barat, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. **Tantangan pertama** terkait dengan konfigurasi hubungan antarkelompok etnis menjelang berlangsungnya pemilu-kada serentak yang secara nasional akan diadakan pada akhir tahun 2015. Konfigurasi kelompok etnis selama sepuluh tahun ini menempatkan Dayak dan Melayu sebagai kelompok etnis dominan dalam bidang politik. Kontestasi dalam perebutan kekuasaan politik pada tingkat provinsi nantinya akan berpotensi konflik bila kedua kelompok etnis dominan ini memiliki aliansi politik yang berbeda. Seberapa dalam toleransi dan kerukunan antaretnis di Kalimantan Barat akan diuji pada pemilu-kada yang akan datang. Selain itu, bangkit dan berkembangnya politisi-politisi muda dari kelompok etnis Tionghoa juga dapat meramaikan kontestasi kekuasaan di tingkat daerah. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika nasional, di mana Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, merepresentasikan bangkitnya figur-figur politik dari kelompok Tionghoa setelah pada masa Orde Baru hak-hak politik mereka ditekan.

Dari deskripsi di atas muncul pertanyaan, apakah perdamaian dan keamanan yang selama ini terwujud merupakan hasil dari kesepakatan antarelite kelompok etnis serta peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah semata, yang bersifat *top-down*? Atau justru ketahanan (*resilience*) masyarakat bawah dari berbagai anggota kelompok etnis dalam merajut hubungan yang positif dan harmonislah yang secara *bottom-up* menjadi mekanisme perekat perdamaian? Partisipasi politik masyarakat dalam mekanisme demokrasi ditentukan salah satunya oleh suara mayoritas. Kenyataan ini dapat mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas, seperti warga Madura, tidak mendapatkan tempat dalam kekuasaan. Padahal pada saat yang bersamaan mereka masih harus berjuang dalam arena politik, menghadapi stereotip yang terbangun selama masa Orde Baru.

Tantangan Kedua, kemunculan dan keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Barat dapat menambah kompleksitas konfigurasi hubungan antarkelompok etnis yang ada selama ini. Untuk sementara waktu, lembaga pemerintah dan nonpemerintah telah berhasil berperan meminimalkan dan meredam peran “penegakan hukum” nonformal yang biasanya dilakukan oleh FPI di tempat lain (lihat **Kotak 3.1** di **Bab 3**). Namun demikian, di masa yang akan datang pertarungan kekuasaan di arena politik dan perebutan sumber ekonomi dengan memobilisasi penanda identitas etnis dapat bertautan dengan penanda identitas agama. Mengingat kelompok etnis tertentu di Kalimantan Barat identik dan berafiliasi dengan identitas agama tertentu. Di satu sisi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para elite politik untuk memobilisasi pembeda budaya yang berlapis di saat saling berhadapan dalam arena politik dan ekonomi. Kehadiran dan aktivitas FPI di Kalimantan Barat, bila tidak dikelola dengan baik oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah dapat mempertajam perbedaan di antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan afiliasi etnis-agama. Di sisi lain, penanda agama yang dibawa oleh FPI dalam kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat dapat membuka peluang kelompok yang termarginalisasi di arena politik untuk berafiliasi dalam mendapatkan sumber kekuatan secara politik.

Tantangan Terakhir, konflik sumber daya dalam arena ekonomi dapat beririsan dengan isu politik dan sosial. Perebutan sumber daya tidak hanya terjadi secara vertikal di antara warga dengan pemerintah dan warga dengan perusahaan, tetapi juga terpolarisasi di antara warga dengan warga dengan identitas etnis yang sama dan warga dengan warga dengan identitas etnis berbeda. Berbagai kemungkinan konflik sumber daya dengan aktor-aktor yang beragam ini sangat kompleks. Bila tidak ditemukan formula untuk mengatasinya oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah, maka hal ini berpotensi memperluas terjadinya konflik multidimensi di Kalimantan Barat. Konflik sumber daya ini secara sosial dapat bertambah kompleks di saat kelompok

rentan di masyarakat, yaitu kalangan pemuda, mengalami ketimpangan horizontal akibat pengangguran dan kemiskinan. Kelompok pemuda ini sangat rentan melakukan tindak kekerasan sebagai penyalur rasa frustrasi mereka karena tidak berdaya dalam mengakses sumber-sumber ekonomi.

Dalam arena politik, konflik sumber daya dapat terjadi akibat proses desentralisasi dan otonomi daerah. Pemekaran dapat menjadi solusi sementara melalui pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis di Kalimantan Barat. Namun demikian, pada masa mendatang tidak tertutup kemungkinan bahwa pemekaran akan mengakibatkan reaksi balik (*backlash*). Permasalahan baru, seperti batas desa antarwilayah pemekaran, pada ruang dan waktu yang bersamaan dapat bersentuhan dengan isu antarkelompok etnis. Seperti yang sedang berkembang di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang, permasalahan batas wilayah di tingkat desa berpotensi menyebabkan konflik yang melibatkan tiga kelompok etnis yang berbeda.

Persinggungan antara ketiga faktor yang melekat dalam masyarakat dengan ketimpangan horizontal ini di masa yang akan datang dapat secara struktural berpengaruh terhadap perdamaian dan keamanan di Kalimantan Barat. Semua lembaga pemerintah dan nonpemerintah terkait keamanan dan perdamaian di Kalimantan Barat menghadapi tantangan yang berat, yang berasal dari kondisi-kondisi sebelumnya. Permasalahan akan muncul sebagai konsekuensi dari pembiaran ketimpangan horizontal. Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan menyeluruh di segala bidang, baik keamanan, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan untuk membangun ketahanan masyarakat, menjadi kunci bagi perdamaian di masa yang akan datang.

5.2. REFLEKSI KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT

Refleksi kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu refleksi tentang peran lembaga dan tantangan pencegahan konflik di masa depan.

5.2.1. Peran dan Strategi Lembaga dalam Pencegahan Konflik

Becermin pada **Gambar 5.1** tentang isu-isu dan tren kekerasan dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial yang ditemukan pada data SNPK selama periode 2005-2013, Tim Peneliti SNPK-THC melihat bahwa tiga kecenderungan konflik kekerasan yang muncul (kekerasan dalam pemilu-kada di bidang politik, kekerasan terkait konflik lahan dan sumber daya di bidang ekonomi, serta kekerasan identitas terkait hubungan antarkelompok

di masyarakat) juga ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Isu-isu yang termuat pada gambar tersebut menuntut lembaga-lembaga di Nusa Tenggara Barat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan konflik. Hubungan antarlembaga yang dinamis, baik antarlembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan nonpemerintah, maupun antarlembaga nonpemerintah, merupakan satu modal besar dalam membangun kerja sama yang baik dalam menangani konflik.

Sebagaimana di Kalimantan Barat, ada beberapa temuan penting dari studi ini yang berkaitan dengan peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan konflik. *Pertama*, peran pimpinan lembaga dalam menjaga situasi agar tetap kondusif dan dalam menangani konflik. Stabilitas di tingkat lokal, selain dipengaruhi oleh politik nasional, juga oleh politik lokal terutama terkait peran elite lokal dalam meredam potensi konflik yang ada. Di samping para pemimpin formal yang membawahi lembaga formal kenegaraan, keberadaan pemimpin informal, seperti pemimpin agama dan tokoh adat, masih dianggap sebagai faktor yang menentukan terjaganya stabilitas keamanan di Nusa Tenggara Barat.

Kedua, faktor geografis dan demografis juga menjadi alasan adanya perbedaan antara intensitas konflik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Faktor geografis berupa terpisahnya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok memunculkan adanya anggapan bahwa pembangunan berfokus di Pulau Lombok semata. Sementara itu, faktor demografis di mana dua per tiga penduduk Nusa Tenggara Barat berdomisili di Pulau Lombok menjadikan pulau ini memiliki potensi konflik sosial yang lebih besar.

Ketiga, meskipun mendapat kritikan, keberadaan lembaga-lembaga formal dan nonformal masih diperlukan dalam upaya pencegahan konflik. Permasalahan klasik seperti koordinasi, sosialisasi program, pendanaan, dan lain-lain, masih ada. Namun demikian sebagian kalangan berpendapat, kendati dengan dana minim, beberapa program pencegahan konflik masih bisa dilakukan meski harus dengan mengurangi jumlah personalia dan menyediakan dana yang kecil sekali untuk kegiatan operasional seperti pengumpulan informasi dalam rangka pencegahan dini.

Keempat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah kadang-kadang menjadi solusi sekaligus bagian dari masalah. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Pamswakarsa yang ada kalanya menjadi pemicu konflik, tapi pada saat yang bersamaan juga direkrut untuk bersama-sama dengan tiga unsur lain (kepolisian, militer, dan satuan polisi pamong praja) melakukan upaya pencegahan dan penghentian konflik.

Kelima, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah memainkan peranan yang berbeda dalam pencegahan konflik di setiap aspek yang ditemukan Tim SNPK-THC. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang ber-

usaha untuk diatasi oleh lembaga-lembaga tersebut dalam upaya pencegahan konflik. Untuk *faktor politik*, pencegahan konflik dilakukan sebagian besar oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan melalui pembuatan rancangan peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa hal yang selama ini ditengarai menjadi memicu terjadinya konflik. Di samping itu, inisiatif yang diambil pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak sipil masyarakat yang menjadi korban konflik merupakan terobosan politik yang patut diperhatikan. Upaya-upaya di *bidang keamanan* masih dipegang oleh lembaga-lembaga yang secara yuridis formal memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, Kepolisian masih menjadi *leading sector* dengan dukungan dari instansi terkait, seperti TNI dan Kejaksaan. Untuk *bidang pendidikan*, upaya-upaya lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah lebih pada pemberian penerangan kepada masyarakat melalui pertemuan formal dan informal. Misalnya, pihak Kejaksaan memberikan upaya penerangan hukum, pihak Kepolisian melakukan upaya deradikalisasi, dan lain-lain. Untuk *bidang sosial budaya*, pemanfaatan tokoh masyarakat dan etnis serta lembaga-lembaga adat untuk melakukan pendekatan persuasif dalam upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan secara adat merupakan hal penting untuk terus dilanjutkan. Di samping itu, taktik beberapa lembaga memanfaatkan beberapa tradisi dan ritual adat untuk menyalurkan hasrat kekerasan warga merupakan langkah strategis, di samping untuk membangun kohesi sosial sesuai dengan nilai-nilai adat. Terakhir, untuk *bidang ekonomi*, inisiatif masih datang dari pemerintah sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun ekonominya sendiri masih perlu ditingkatkan.

Keenam, strategi-strategi yang dilakukan lembaga pemerintah dan non-pemerintah turut berkontribusi bagi kondisi damai di Nusa Tenggara Barat. Beberapa langkah yang dilakukan sudah cukup berarti dalam upaya pencegahan konflik, seperti koordinasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah, membangun sistem peringatan dini, membangun partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan konflik, dan membangun mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif. Langkah-langkah tersebut bukannya tanpa kritik. Banyak pihak memandang bahwa beberapa hal harus diperbaiki, yaitu efisiensi dana, sosialisasi program dan temuan, pembagian informasi, koordinasi strategis, dan lain-lain.

Ketujuh, sebagaimana disebutkan oleh Delima (2013), studi ini juga melihat adanya mekanisme penyelesaian konflik alternatif, misalnya di Lombok bagian barat antara Etnis Bali dan Sasak dengan memanfaatkan kearifan lokal. Studi ini juga menemukan adanya upaya pelibatan sistem adat terkait pertahanan dan keamanan yang berbasis pada kesukarelawanan untuk menciptakan ketahanan masyarakat, seperti sistem *Pecalang* pada warga Bali di

Nusa Tenggara Barat dan *Langlang* (Pamswakarsa) pada masyarakat Sasak. Meskipun beberapa kekhawatiran dan kritik masih dialamatkan kepada Pamswakarsa karena sejarah kekerasan mereka di masa lalu, sistem ini dianggap merupakan upaya sinergi antara masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari strategi kreatif dalam upaya pencegahan konflik.

5.2.2. Tantangan Pencegahan Konflik dan Kekerasan di Nusa Tenggara Barat di Masa Depan

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik di masa depan. ***Tantangan pertama*** adalah merevitalisasi nilai-nilai lokal yang dapat menjadi referensi bagi generasi muda. Beberapa pihak menengarai bahwa lunturnya nilai-nilai luhur lokal dapat menjadi persoalan ketika permasalahan yang mestinya bisa diselesaikan dengan kearifan lokal harus menjelma menjadi sebuah konflik. Usaha revitalisasi ini mengalami kendala dalam proses transfernya, yakni masih sedikitnya jumlah pendidik di Nusa Tenggara Barat yang mampu melakukan upaya itu karena pemahaman atas nilai-nilai kearifan lokal masih kurang. Harapan yang disampirkan kepada para pemimpin adat juga kurang berhasil karena mereka menganggap transfer tersebut merupakan salah satu tugas lembaga pendidikan formal.

Tantangan kedua adalah meningkatkan kohesi sosial. Hal ini masih berhubungan dengan tantangan pertama, mengingat lunturnya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial menyebabkan mudah terjadinya ketegangan antarwarga karena perbedaan etnis, agama, geografis, dan kepentingan politik. Toleransi yang rendah dalam menyikapi perbedaan membuat masyarakat tidak lagi memandang kohesi sosial sebagai sesuatu yang penting. Dengan demikian, upaya untuk membangun ketahanan masyarakat yang tidak mudah berkonflik masih merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan ketiga adalah membangun ekonomi yang berbasis inisiatif masyarakat. Pembangunan ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada kebijakan dan program pemerintah merupakan kendala dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat. Misalnya, pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang merupakan program pemerintah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Namun demikian, inisiatif perbaikan ekonomi yang berbasiskan rakyat masih menjadi tantangan di masa depan.

Tantangan keempat adalah mengatasi potensi konflik sumber daya. Dengan semakin tingginya tingkat kompetisi untuk mengakses sumber daya, pemerintah dan masyarakat akan saling berhadapan, di samping para investor di berbagai bidang yang berkenaan dengan sumber daya dan pemanfaatan lahan, misalnya dalam pembangunan fasilitas serta usaha pariwisata dan per-

tambahan. Potensi perebutan akses terhadap sumber daya ini akan berimbas pada banyak hal. Misalnya, pemanfaatan kelompok tertentu seperti Pamswakarsa untuk menghadapi kelompok masyarakat lain dalam perselisihan kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Tantangan kelima adalah menangkal terorisme. Sebagai wilayah yang termasuk dalam zona merah nasional untuk isu terorisme, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang dapat menjadi *breeding ground* gerakan radikal dan terorisme. Meskipun berbagai upaya deradikalisasi telah diinisiasi oleh kepolisian, terorisme masih menjadi bahaya laten yang dapat menyumbang munculnya pola kekerasan baru yang tidak hanya memengaruhi situasi keamanan di Nusa Tenggara Barat, tapi juga di wilayah lain di Indonesia.

5.3. REFLEKSI PENUTUP

Berdasarkan temuan studi ini, lembaga-lembaga di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat telah mengimplementasikan lima langkah prioritas untuk mencegah konflik seperti yang diajukan oleh Lan, Yanuarti, dan Tryatmoko (2013). Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. *Kelembagaan pencegahan konflik*

Beberapa lembaga yang sering dirujuk dalam upaya pencegahan konflik, seperti FKDM, FKUB, dan Kominda, telah dibentuk. Beberapa pertanyaan dan kritik masih muncul terkait keberadaan lembaga-lembaga tersebut di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Misalnya, berkenaan dengan efektivitas kerja mereka dalam pencegahan konflik ketika mereka sendiri harus berjuang untuk tetap menjalankan tugasnya meski dengan dukungan dana APBD yang sangat terbatas. Di samping itu, kelembagaan pencegahan konflik terlihat lebih berorientasi pada lembaga formal, terutama di Nusa Tenggara Barat, sehingga mengurangi kemungkinan cara-cara informal.

2. *Pengenalan potensi konflik*

Di kedua provinsi telah dilakukan upaya pemetaan daerah rawan konflik pada level provinsi. Di Kalimantan Barat upaya pemetaan ini diinisiasi oleh Kesbangpol Provinsi, sedangkan di Nusa Tenggara Barat oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi. Di samping itu, beberapa instansi keamanan, seperti kepolisian, memiliki pemetaan sendiri. Yang masih harus dibenahi adalah upaya sosialisasi hasil pemetaan tersebut di lembaga-lembaga terkait. Kurangnya sosialisasi ini dapat dilihat, misalnya, di Kalimantan Barat informasi hasil pemetaan yang sudah dibukukan dan diterbitkan belum mencapai lembaga-lembaga lain baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat upaya pemetaan hanya mencakup lima dari

sepuluh kabupaten/kota karena keterbatasan waktu dan data. Sebagai langkah awal, upaya pemetaan daerah rawan konflik sosial ini harus diapresiasi sebagai panduan bagi pencegahan konflik, terutama dalam upaya deteksi dini secara sistematis berdasarkan data.

3. *Manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik*

Langkah ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik. Masing-masing lembaga memiliki data yang masih belum dikumpulkan dalam satu unit pemrosesan terpusat. Meskipun berdasarkan hasil temuan lapangan, masing-masing lembaga mengaku saling berbagi informasi, data yang tidak terpusat dapat menyulitkan upaya manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik. Hal ini dapat juga berimbas pada kualitas keputusan yang diambil pada saat informasi potensi konflik masuk.

4. *Perancangan strategi pencegahan konflik berdasarkan isu*

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, strategi pencegahan konflik masih didominasi oleh pendekatan keamanan. Perancangan strategi yang terpadu masih belum partisipatif sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terutama menjadi masalah besar ketika lembaga-lembaga nonpemerintah belum dilibatkan dalam perancangan strategi, terutama dalam upaya menyelesaikan akar permasalahan penyebab konflik, seperti kesenjangan ekonomi, akses terhadap layanan publik, perebutan akses sumber daya, politik identitas, dan lain-lain. Padahal mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi upaya pencegahan konflik sesuai afiliasi dan fokus masing-masing.

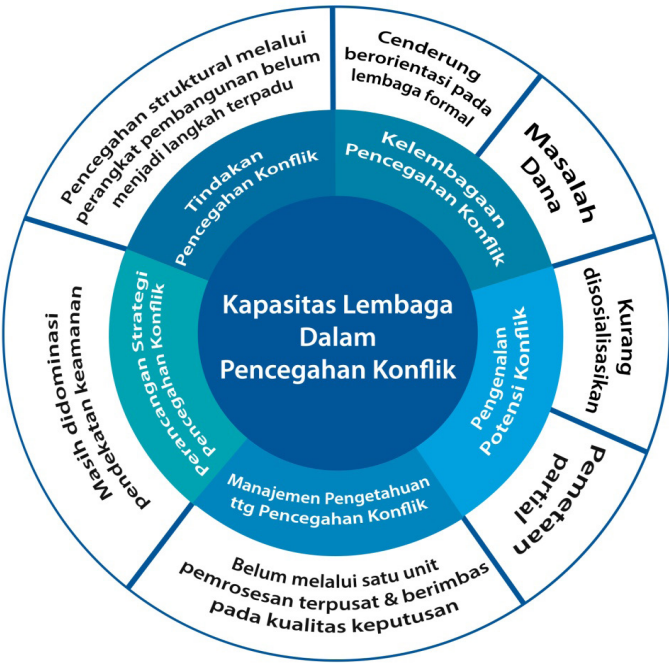
5. *Tindakan pencegahan konflik*

Karena strategi pencegahan masih bertumpu pada pendekatan keamanan, tidak heran beberapa tindakan pencegahan lebih mengedepankan aspek keamanan. Akibatnya, upaya-upaya operasional dengan memanfaatkan cara-cara politik atau militer untuk mencegah dan mendeeskalasi konflik (Wulf & Debiel, 2009) masih dominan. Sementara itu, pencegahan struktural melalui perangkat pembangunan atau ekonomi untuk mengatasi akar penyebab konflik (Wulf & Debiel, 2009) belum sepenuhnya menjadi langkah terpadu. Hal ini dapat dilihat dari intervensi ekonomi yang secara kasatmata justru dilakukan secara aktif dan agresif oleh lembaga nonpemerintah, seperti lembaga keuangan *Credit Union* milik Pancur Kasih yang menyebar di Kalimantan Barat. Sementara itu, upaya intervensi ekonomi di Nusa Tenggara Barat masih bertumpu pada kebijakan pemerintah dan investasi dari luar, sehingga peningkatan partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah lokal dalam peningkatan ekonomi masyarakat masih belum terlihat. Secara umum, beberapa lembaga di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat telah

mengaplikasikan strategi pencegahan melalui aspek-aspek lain, yaitu politik, sosial budaya, dan pendidikan. Namun demikian, langkah-langkah tersebut secara antarlembaga masih belum sinergis sehingga hasil optimum masih belum dapat tercapai.

Dari temuan di atas, dapat dilihat beberapa persoalan yang masih perlu dibenahi dalam langkah-langkah implementasi kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik (**Gambar 5.2**).⁴

Gambar 5.2. Masalah dalam Pelaksanaan Kapasitas Lembaga dalam Pencegahan Konflik



Masalah-masalah yang disebutkan pada gambar di atas menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh lembaga-lembaga terkait. Masalah-masalah ini telah menjadi isu klasik dan berulang kali selalu muncul, ketika pertanyaan kenapa upaya pencegahan konflik belum efektif mengemuka. Apabila masalah-masalah ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan langkah untuk mengintegrasikan upaya pencegahan konflik di masa depan menjadi lebih sulit.

Untuk daerah pascakonflik seperti Kalimantan Barat, apa yang disebutkan oleh Hartzell dan Hoddie (dalam Wolff, 2011) bahwa daerah pascakonflik akan lebih stabil apabila melembagakan pembagian kekuasaan di empat dimensi, yaitu politik, ekonomi, militer, dan teritorial (wilayah desentralisasi), tidak terbukti. Politik identitas berdasarkan etnisitas masih dirasakan kuat sehingga yang terjadi adalah segregasi secara politik dan spasial, di mana

⁴ Terima kasih kepada Dr. Thung Ju Lan atas bantuan *mapping* hasil penelitian.

beberapa daerah tertentu identik dengan identitas etnis tertentu sebagai mayoritas pemegang kekuasaan. Selanjutnya, apa yang disarankan oleh McGarry dan O'leary (dalam Wolff, 2011) bahwa pada kawasan yang plural pembagian kekuasaan di ranah institusi pusat sangat perlu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kalangan minoritas, masih minimal. Partisipasi politik warga minoritas telah terbukti dalam beberapa kali pemilihan umum, baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Namun apakah kepentingan kelompok minoritas telah terakomodasi, masih harus diteliti lebih seksama lagi. Di samping itu, keterlibatan keseluruhan kelompok etnis di Kalimantan Barat sangat diperlukan dalam pembangunan demokrasi pascakonflik di masyarakat yang sebelumnya terpecah belah, terutama untuk membangun *consociational institutions*—lembaga yang bersifat *power-sharing* (Wolff, 2011)—yang secara kasatmata masih belum terbangun di Kalimantan Barat. Untuk Nusa Tenggara Barat yang tidak mengalami konflik besar sebagaimana Kalimantan Barat, identitas kesukuan juga terlihat menonjol terutama di wilayah-wilayah di mana satu kelompok etnis merupakan mayoritas, seperti Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Mbojo di Bima/Dompu. Identitas masih menjadi bagian dari penyelesaian dan penyebab masalah yang pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari politik lokal. Selain itu, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari akses terhadap partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya.

Dari temuan di lapangan dapat dilihat bahwa lembaga-lembaga di kedua provinsi sepakat tentang penting upaya membangun sistem peringatan dini. Dari tiga komponen yang harus dilihat dalam peringatan dini (Woocher dalam Wulf & Debiel, 2009), beberapa upaya telah dilakukan untuk (1) memperkirakan tingkat dan waktu risiko ancaman yang muncul dengan melakukan upaya pemetaan dan pengembangan jaringan informasi sehingga setiap potensi konflik dapat diidentifikasi sedini mungkin; (2) melakukan analisis karakteristik ancaman dan skenario penanganan melalui pengumpulan informasi—meskipun belum terpusat, tetapi dapat dibagi antarlembaga terkait; (3) mengomunikasikan analisis peringatan kepada pengambil keputusan melalui upaya koordinasi sehingga pengambil keputusan seperti gubernur, bupati, dan wali kota memiliki cukup informasi (*well informed*) dalam mengambil keputusan sesuai masukan yang diberikan lembaga-lembaga terkait.

Apabila dikaitkan dengan konsep Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS), hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa pemerintah telah melaksanakan kapasitasnya dalam memfasilitasi dialog antar-*stakeholder* berkenaan dengan isu struktural agar intervensi pemerintah, misalnya dalam sektor bisnis, dapat memberikan pengaruh (positif) terhadap kehidupan sosial budaya. Hal ini tercermin dari kebijakan dan terobosan kedua pemerintah daerah untuk membangun partisipasi para

stakeholder dalam membangun daerah. *Kedua*, kapasitas sektor swasta yang berfokus pada kemampuan mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal terlihat dari hasil penelitian ini. Salah satunya adalah kapasitas lembaga nonpemerintah sebagai penggerak perbaikan ekonomi sehingga potensi konflik akibat faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, dapat ditekan. *Ketiga*, kapasitas komunitas masyarakat juga terlihat, yakni dalam upaya mereka untuk menyelenggarakan dialog-dialog seperti forum warga, forum masyarakat adat, forum lintas agama, sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga perdamaian. Keterlibatan organisasi sipil kemasyarakatan dalam membangun dialog sebagai upaya pencegahan konflik dapat dilihat di kedua provinsi.

Terakhir, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di kedua provinsi pada tingkat tertentu telah mengupayakan beberapa hal. *Pertama*, mengembangkan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas dan eskalasi konflik, meskipun masih mengedepankan pendekatan keamanan di mana kepolisian menjadi *leading sector*-nya. *Kedua*, membangun mekanisme peringatan dini agar tiap-tiap lembaga dapat memantau hubungan-hubungan yang ada di tingkat masyarakat dan negara melalui perluasan jaringan informan sampai ke level terendah di desa-desa. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas masyarakat yang rawan konflik. Namun demikian, masih perlu usaha terpadu agar intervensi lewat jalur ekonomi seperti di Kalimantan Barat atau jalur keagamaan seperti di Nusa Tenggara Barat dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya konflik kekerasan di masa depan.

Simpulan dan Rekomendasi

6.1. SIMPULAN

Lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat secara umum telah melakukan upaya pencegahan konflik sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kapasitas ini ada yang dilekatkan melalui peraturan yang telah ditetapkan, terutama pada lembaga-lembaga pemerintah, ada juga yang unik dan disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat di kedua provinsi. Lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di kedua provinsi telah berusaha mencapai tujuan dari pencegahan konflik sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), yaitu *memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai*.

Peran lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat dalam kapasitas tertentu telah relatif berhasil *meredam potensi konflik* yang ada dan *memelihara kondisi damai*. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya tiap-tiap lembaga untuk memaksimalkan sumber daya yang ada guna mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik, seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan keamanan. Dengan segala keterbatasan yang sudah diidentifikasi pada studi ini, berhasil atau tidaknya lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah mencapai tujuan *meredam potensi konflik dan memelihara perdamaian* di masa yang akan datang sangat bergantung pada seberapa jauh *political will* dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki masalah-masalah prioritas yang ada.

Studi ini menunjukkan bahwa untuk menopang tujuan utama *peran lembaga* dalam pencegahan konflik, yaitu *memelihara perdamaian* dan *meredam potensi konflik*, diperlukan tujuan pencegahan lainnya, seperti *membangun sistem peringatan dini* dan *mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai*. Tim SNPK-THC telah mengidentifikasi strategi-strategi utama dalam pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat yang dianggap turut berkontribusi memelihara kondisi damai dan meredam potensi konflik di kedua provinsi tersebut:

- *Pertama, pembangunan sistem peringatan dini* dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, baik

lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, sampai ke tingkat desa. *Information sharing* telah dilakukan di antara lembaga-lembaga terkait, namun masih bersifat parsial dan belum diproses secara terpusat.

- *Kedua, pengembangan penyelesaian perselisihan alternatif* dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Beberapa kasus kekerasan antarwarga di daerah penelitian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga tidak bereskalasi dan tidak meluas ke daerah lain.
- *Ketiga, tujuan pencegahan konflik, yaitu membangun sistem peringatan dini dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan alternatif, dapat berjalan dengan lebih maksimal melalui koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah.* Pembangunan koordinasi antarlembaga ini dilakukan melalui forum-forum seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD atau FOKORPIMDA) Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FPKD) Kabupaten/Kota, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Koordinasi dan komunikasi juga diupayakan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat masing-masing etnis dan lembaga-lembaga keamanan masyarakat.
- *Terakhir, melalui ketiga strategi di atas, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengupayakan keterlibatan partisipasi masyarakat umum.* Cara pandang dan upaya ke arah ini penting sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan (*resilience*) masyarakat dalam menghadapi potensi konflik di dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kapasitas pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat sangat bergantung pada perbaikan peran lembaga dan strategi-strategi di atas, terutama berkenaan dengan penyediaan dana, sosialisasi program dan temuan pemetaan, pembagian dan pemrosesan informasi, serta koordinasi strategis dalam memformulasikan langkah-langkah terpadu pencegahan konflik berdasarkan isu. Secara spesifik, ada beberapa fenomena yang patut mendapat perhatian, yaitu:

1. Upaya pencegahan konflik masih menitikberatkan pada pendekatan keamanan. Kepolisian sebagai *leading sector* dalam penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih merupakan lembaga yang paling dominan. Di kedua provinsi, institusi kepolisian daerah telah berinisiatif membangun jaringan informasi dalam rangka deteksi dini dan penyebaran informasi untuk menanggulangi isu tertentu, seperti radikalisme dan konflik sumber daya. Pendekatan keamanan ini juga didukung oleh lembaga pemerintah lain (Kejaksaan dan Kes-

- bangpol) serta lembaga nonpemerintah, seperti lembaga adat yang turut berkontribusi menghimpun informasi dalam sistem peringatan dini dan penyelesaian konflik alternatif.
2. Lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga mengambil inisiatif pencegahan konflik dengan pendekatan nonkeamanan. Langkah ini diambil misalnya oleh lembaga keuangan *Credit Union* di Kalimantan Barat. Pengembangan jaringan lembaga keuangan ini dapat mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, upaya pencegahan konflik juga dilakukan dengan memasukkan pendidikan multikulturalisme ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta. Melalui langkah ini, diharapkan dapat terbangun pengertian dan toleransi di kalangan generasi muda, terutama di daerah-daerah yang sangat heterogen dari sisi identitas, baik identitas etnis maupun agama. Sementara itu, inisiatif membangun kohesi sosial melalui pendekatan budaya, misalnya dengan memanfaatkan ajang tradisi dan ritual di NTB, merupakan langkah alternatif untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik di daerah masing-masing.
 3. Langkah-langkah yang diambil lembaga-lembaga pemerintahan dalam pencegahan konflik kadang-kadang masih bersifat individual dan tidak didiskusikan dengan lembaga-lembaga lain. Selain itu, hasil dari program yang dijalankan acap kali tidak disosialisasikan kepada pihak-pihak lain yang terkait, sehingga keefektifan dan tindak lanjut program tersebut belum maksimal. Persoalan kurangnya koordinasi ini kadang-kadang juga diakibatkan oleh ego sektoral serta kepentingan ekonomi dan politik masing-masing lembaga tersebut.
 4. Lembaga-lembaga bentukan masyarakat dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik, namun sekaligus juga dapat menjadi sumber masalah. Di Kalimantan Barat, misalnya, keberadaan lembaga-lembaga adat masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam berhubungan dengan kelompok yang mereka representasikan. Hal ini karena adanya kecenderungan pihak pimpinan lembaga tersebut untuk tidak memiliki hubungan emosional dengan komunitas yang mereka klaim mereka wakili, sehingga lembaganya tidak mengakar. Akibatnya, keberadaan mereka terkadang menjadi sumber masalah karena persoalan legitimasi, apalagi kalau kepentingan ekonomi dan politik ikut bermain. Namun demikian, dalam upaya menyelesaikan atau mende eskalasi konflik, mereka biasanya menjadi pihak yang dihubungi oleh pemerintah dan pihak keamanan. Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat keberadaan Pamswakarsa yang menjadi sumber masalah dan konflik telah dima-

sukkan menjadi bagian dari upaya penegakan Kamtibmas, bersama-sama dengan institusi kepolisian, militer, dan polisi pamong praja. Keberadaan Pamsakarsa ini telah dimanfaatkan dalam pengumpulan informasi guna melakukan deteksi dini konflik mengingat luasnya jaringan yang mereka miliki.

5. Politik identitas masih menjadi faktor penentu interaksi antarkelompok di kedua provinsi. Keberadaan lembaga yang sarat dengan kepentingan golongan terlihat gamblang saat dilangsungkan ajang politik seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Hal ini beberapa kali menimbulkan ketegangan antarkelompok, yang memerlukan biaya mahal dan upaya lebih keras untuk meredamnya. Sejarah kekerasan yang pernah terjadi di daerah penelitian juga tidak mudah hilang. Potensinya selalu muncul setiap kali terjadi ketegangan, dan turut mewarnai dinamika interaksi antarlembaga yang berbasis identitas etnis, agama, dan politik. Oleh karena itu, trauma masa lalu masih sulit untuk dibuang apabila ketegangan seperti ini secara reguler muncul ke permukaan.

Perhatian terhadap kelima poin di atas dapat menjadi pelajaran dan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat di kedua provinsi dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik.

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan analisis, Tim SNPK-THC memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu rekomendasi akademis dan rekomendasi praktis.

6.2.1. Rekomendasi Akademis

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, Tim SNPK-THC memformulasikan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat akademis sebagai berikut:

1. Ketika proses penulisan hasil penelitian ini dilaksanakan, pada bulan Februari 2015 pemerintah pusat mengeluarkan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai langkah-langkah yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pencegahan konflik. Tim SNPK-THC, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu, tidak dapat mengelaborasi lebih jauh hasil temuan-temuan studi ini dalam konteks peraturan pemerintah tersebut. Namun demikian, kontribusi terpenting studi ini terletak pada upaya mengidentifikasi

kerangka kerja pencegahan konflik di Kalimantan Barat dan NTB yang khas daerah tersebut dengan karakter lokalitas yang lebih spesifik. Di masa depan, baik Tim SNPK-THC, lembaga pemerintah, maupun lembaga nonpemerintah di seluruh provinsi di Indonesia harus mengelaborasi hasil temuan studi ini dalam kerangka peraturan pemerintah tersebut untuk memformulasikan kerangka kerja kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik yang lebih komprehensif. Kerangka kerja dapat dibangun melalui pengintegrasian kebijakan penanganan konflik yang bersifat *top-down*, seperti peraturan pemerintah, dengan keunikan *bottom up* di tiap-tiap daerah, seperti yang ditemukan dalam studi ini. Dengan elaborasi dan integrasi ini, instrumen serta indikator evaluasi dapat dibangun, kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik pun dapat lebih ditingkatkan.

2. Dengan dukungan sumber daya yang baik, Tim SNPK-THC memandang perlunya dilakukan studi untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dengan menghubungkan tahapan pencegahan konflik dengan tahapan penanganan konflik lainnya, yaitu penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Dengan mengintegrasikan ketiga tahapan penanganan konflik ini, diharapkan kapasitas lembaga di bidang-bidang lain selain bidang keamanan dapat diidentifikasi.
3. Melihat dinamika pencegahan konflik dan peran lembaga pada tingkat desa di berbagai daerah di Indonesia, diprediksi bahwa pada masa depan konflik dan kekerasan di berbagai daerah akan mengambil ruang di pedesaan. Dengan demikian, studi dan intervensi untuk memperkuat kapasitas lembaga dan ketahanan masyarakat di tingkat desa harus dilakukan agar pencegahan konflik secara dini pada unit terkecil dapat terlaksana.
4. Studi di masa mendatang perlu memperhatikan peran dan keterlibatan perempuan dalam penanganan konflik. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan melihat ketiga tahapan penanganan konflik di suatu wilayah tertentu. Upaya identifikasi ini hanya dapat dilakukan melalui penelitian yang komprehensif dengan dukungan dari berbagai pihak dan sumber daya yang memadai.

6.2.2. Rekomendasi Praktis

Saran-saran praktis yang diberikan oleh Tim SNPK-THC berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk kelembagaan pencegahan konflik, dua hal mesti diperhatikan. *Pertama*, masalah pendanaan harus mendapatkan prioritas karena sangat memengaruhi kegiatan operasional pencegahan konflik. Pendanaan, terutama untuk pengumpulan informasi dalam sistem peringatan dini, harus ditingkatkan. Demikian halnya dana operasional untuk

forum-forum dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dan masyarakat mencegah konflik, seperti FKDM, FKUB, dan lembaga-lembaga lain. *Kedua*, langkah pencegahan konflik yang cenderung berorientasi pada lembaga-lembaga formal harus mulai dikurangi dengan melibatkan lembaga-lembaga nonformal.

2. Untuk pengenalan potensi konflik, dua hal mesti diperhatikan. *Pertama*, upaya pemetaan potensi konflik di masing-masing provinsi harus tetap didorong dan didukung dengan pendanaan dan kerja sama antarlembaga. Upaya pemetaan konflik ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari lembaga terkait di bawah koordinasi Kesbangpol Provinsi dan dengan memanfaatkan *database* yang telah tersedia, misalnya *Database Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)* yang aksesnya terbuka untuk publik. Selain itu, kerja sama sebaiknya juga dibangun dengan kalangan akademisi di daerah masing-masing. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dihimpun sebagai sumber data dalam upaya pemetaan potensi konflik. *Kedua*, pemetaan potensi konflik dari tingkat desa sampai provinsi harus disosialisasikan ke seluruh instansi dan lembaga terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun *awareness* (kesadaran) para aparat dan anggota masyarakat akan potensi konflik. Selain itu, sosialisasi hasil pemetaan tersebut dapat digunakan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sesuai dengan potensi di daerah dan lingkungan masing-masing.
3. Berkenaan dengan manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik, lembaga-lembaga pemerintah harus merencanakan pembangunan satu unit pemrosesan data terpusat, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan dalam penentuan langkah-langkah pencegahan konflik.
4. Sehubungan dengan perancangan strategi pencegahan konflik, pencegahan konflik dari bidang lain selain keamanan, seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya, harus ditingkatkan. Pencegahan konflik yang terlalu bertumpu pada pendekatan keamanan akan memberikan beban yang terlampau besar pada lembaga-lembaga keamanan di daerah. Di samping itu, partisipasi masyarakat akan lebih meningkat bila perancangan strategi pencegahan konflik dilakukan dengan memasukkan seluruh bidang tersebut.
5. Dalam pencegahan konflik, pencegahan struktural melalui perangkat pembangunan harus menjadi langkah terpadu. Oleh karena itu, koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah masih harus ditingkatkan. Penilaian masyarakat bahwa koordinasi masih kurang dalam merespons potensi konflik merupakan masukan berharga. Dalam hal ini, ego sektoral serta kepentingan ekonomi dan politik

- masing-masing lembaga harus dikesampingkan. Selain itu, masing-masing lembaga sebaiknya tidak lagi membuat program eksklusif yang sebenarnya dapat dibuat secara kolektif untuk menghindari duplikasi program dan penghamburan anggaran.
6. Pembangunan ekonomi berbasis inisiatif masyarakat perlu didorong. Perbaikan ekonomi daerah dianggap dapat menyumbang terhadap penurunan potensi konflik yang dipicu oleh faktor kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan lembaga keuangan seperti *Credit Union* di Kalimantan Barat, yang dapat diakses semua orang tanpa memandang identitas etnis, agama, dan geografis, perlu didorong. Daerah-daerah lain di Indonesia dapat belajar dari berkembang-suburnya lembaga keuangan alternatif ini di Kalimantan Barat.
 7. Netralitas dan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum menjadi kunci dalam pencegahan konflik dan upaya meredam potensi konflik yang ada. Sikap dan tindakan aparat keamanan dan penegak hukum dalam mencegah eskalasi dan penyebaran konflik sangat menentukan perkembangan konflik yang terjadi.
 8. Penguatan kapasitas tenaga pendidikan perlu dilakukan, terutama berkenaan dengan upaya transformasi nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda.
 9. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu dilibatkan sesuai dengan fokus pekerjaan mereka. Pengikutsertaan lembaga-lembaga ini dapat memperkaya upaya yang telah dilakukan sebelumnya di bidang sosial, pendidikan, hukum, keagamaan, dan budaya.
 10. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mencari solusi-solusi di bidang ekonomi agar kebutuhan mendasar masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, pengaturan terhadap akses ekonomi juga penting guna mencegah terjadinya perebutan sumber daya dan ketimpangan ekonomi di masa yang akan datang.
 11. Untuk menghindari dilema antara penggunaan mekanisme musyawarah atau hukum adat dan pelaksanaan hukum positif, pihak penegak hukum harus melakukan fungsi pengawasan untuk menjamin berlangsungnya keadilan di antara pihak-pihak yang bertikai.
 12. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait sebaiknya bekerja sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pascakonflik yang masih tersisa dan potensi-potensi konflik yang berakar di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi antara konflik yang sudah mengakar dalam sejarah masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dengan potensi-potensi konflik baru yang muncul di era otonomi daerah dan desentralisasi pasca-Reformasi.

Referensi

- Acharya, A. (1999). Realism, institutionalism, and the Asian economic crisis. *Contemporary Southeast Asia*, 21(1), 1-29.
- Ahyat I. S. (2014). The dynamics of Malay culture in West Kalimantan in the 20th century. *Journal of Education and Learning*, 8(3), 273-280.
- Agustiana, E. T., & Pakpahan, M. (2005). *Women and peace-building in Central Sulawesi and North Maluku*. Jakarta: UNDP and Kementerian PPN/Bappenas.
- Alqadrie, S. I. (2013). *Konflik dan konflik kekerasan di Kalimantan Barat dalam perspektif budaya: Studi pada 3 (tiga) kawasan pedalaman yang potensi konflik mereka berbeda*. Paper presented in Kongres Budaya IV, Yogyakarta, 8-11 October 2013.
- Anand, P. B. (2013). Addressing infrastructure needs in post-conflict reconstruction: An introduction to alternative planning approaches. In D. Jensen and S. Lonergan (eds.), *Assessing and restoring natural resources in post-conflict peacebuilding* (pp. 289-295). New York, NY: Routledge.
- Anau, N., van Heist, M., Iwan, R., Limberg, G., Sudana, M., & Wollenberg, E. (2001). *Pemetaan desa partisipatif dan penyelesaian konflik batas: Studi kasus di desa-desa Daerah Aliran Sungai Malinau Januari s/d Juli 2000*. Jakarta, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Bamba, J. (Ed.). (2008). *Mozaik Dayak: Keberagaman subsuku dan bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak, Indonesia: Institut Dayakologi.
- Bappenas. (2009). *Pidato kenegaraan tahun 2009*. Diakses 5 Juni 2012 dari <http://bappenas.go.id/node/42/2158/pidato-kenegaraan-tahun-2009/>
- Bappenas. (2010). *Lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014*. Jakarta, Indonesia: Author.
- Beale, B., Cole, R., Hillege, S., McMaster, R., & Nagy, S. (2004). Impact of in-depth interviews on the interviewer: Roller coaster ride. *Nursing and Health Sciences*, 6, 141-147.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). *Research in education* (8th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2014). *Kalimantan Barat dalam angka 2014*. Pontianak, Indonesia: Author.

- Braithwaite, J. (2010). *Anomie and violence*. Canberra, Australia: ANU E-Press.
- Cahyono, H. (2008). *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan panjang meretas perdamaian*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Carter, J. (2001). *Believing in peace: The potential of religious beliefs and actors to contribute to conflict prevention, management, resolution and post-conflict peacebuilding* (Unpublished master thesis). University of Calgary, Canada.
- Collier, P., Hoeffler, A., & Söderbom, M. (2006). *Post-conflict risks*. CSAE Working Paper Series 2006-12. Oxford, UK: Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
- Delima, S. P. (2013). *Pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat* (Master thesis). Universitas Pertahanan, Jakarta.
- Denzin, N. K. (2001). The reflexive interview and a performative social science. *Qualitative Research*, 1(1), 23-46.
- de Jonge, H., & Nooteboom, G. (2006). Why the Madurese? Ethnic conflicts in West and East Kalimantan compared. *Asian Journal of Social Science* 34(3), 456-474.
- Diprose, R. (2007). *Passing on the challenges or prescribing better management of diversity? Decentralization, power-sharing and conflict dynamics in Central Sulawesi, Indonesia*: CRISE Working Paper No. 38. Paper presented in CRISE Policy Conference, 9-10 July 2007, Oxford, UK.
- Diprose, R. (2009a). Decentralization, Horizontal Inequalities and Conflict Management in Indonesia. *Ethnopolitics*, 8(1), 107-134.
- Diprose, R. (2009b). Inequalities and indirect conflict interventions: The evidence on perceptions of difference, social cohesion, and sub-national variations in violence in Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2, 95-147.
- Dorn, A. W. (2004). Early and late warning by the UN Secretary-general of threats to peace: Article 99 revisited. In A. Schnable & David carment (eds.), *Conflict prevention: From rhetoric to reality* (pp. 305-344). Latham, ML: Lexington Books.
- Efendi, J. (2013). *Civic Engagement and Collaborative Governance in Post-Conflict Societies: Case Study, Ambon, Indonesia* (Master thesis). Retrieved from Dissertations and Theses database. (UMI No. 1542705).
- Hamdi, S. (2014). *Nahdlatul Wathan di era reformasi: Agama, konflik komunal dan peta rekonsiliasi*. Yogyakarta, Indonesia: KKS dan Nawa Institute.
- Haryanto, J. T. (2012). Interaksi dan harmoni umat beragama. *Walisongo*, 20(1), 211-234.
- Hendrix, C. (2010). Measuring state capacity: Theoretical and empirical implications for the study of civil conflict. *Journal of Peace Research*, 47(3), 273-285.

- Hendry Ar., E. et al. (2013). Integrasi sosial dalam masyarakat multietnik. *Walisongo*, 21(1), 191-218.
- Holtzman, S., Elwan, A., & Scott, C. (1998). *Post-conflict reconstruction: The role of the World Bank*. Washington, DC: The World Bank.
- Hussein, M. Z., & Ikhwanto, A. (2012, 17 Februari). *Bisnis ormas-ormas paramiliter*. Diakses dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/02/17/bisnis-ormas-ormas-paramiliter/>
- Jansen, D. (2008). Relations among security and law enforcement institutions in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia* 30(3), 429-454.
- Jenson, J., & Mérand, F. (2010). Sociology, institutionalism and the European Union. *Comparative European Politics*, 8, 74-92.
- Jetly, R. (2003). Conflict management strategies in ASEAN: Perspectives for SAARC. *The Pacific Review*, 16(1), 53-76.
- Kamaruddin et al. (2013). Model penyelesaian konflik di lembaga adat. *Walisongo*, 21(1), 39-70.
- Karsiman. (2014). *Jangan ada lagi kekerasan di Tana' Samawa: Sebuah sentuhan humanis seorang polisi*. Sumbawa Besar, Indonesia: Author.
- Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. (2013). *Laporan survey potensi kerawanan konflik sosial di Kalbar tahun 2013*. Pontianak, Indonesia: Author.
- Kivimäki, T. (2012). Southeast Asia and conflict prevention: Is ASEAN running out of steam? *The Pacific Review*, 25(4), 403-427.
- Kobayashi (2011). *Civic associations, local governance and conflict prevention in Indonesia* (Doctoral dissertation). Retrieved from Dissertations and Theses database. (UMI No. 3487922).
- Kumar, K. (1989). *Conducting key informant interviews in developing countries: A.I.D. program design and evaluation methodology report no. 13*. Washington, DC: Center for Development Information and Evaluation, A.I.D.
- La Ode, M. D. (2013). *Politik tiga wajah*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lan, T. J., Yanuarti, S., & Tryatmoko, M. W. (2013). *Panduan implementasi kerangka kerja pencegahan konflik*. Jakarta, Indonesia: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Lan, T. J., Yanuarti, S., Triatmoko, M. W., Mulyani, L., Permana, Y. S., Suryani, C., & Masnun, L. (2013). *Kerangka kerja pencegahan konflik sosial di Indonesia: Strategi dan tindakan penanganan isu konflik*. Jakarta, Indonesia: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Nathan, L. (2009). Africa's early warning system: An emperor with no clothes? *South African Journal of International Affairs*, 14(1), 49-60.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). Introduction. In H. S. Nordholt & G. van Klinken (eds.), *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Soeharto Indonesia* (pp. 1-30). Leiden, The Netherlands: KITLV.

- Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2007). *Encouraging effective evaluation of conflict prevention and peacebuilding activities*. Paris, France: OECD.
- Pelly, U. (1999). Akar kerusuhan etnis di Indonesia: Suatu kajian awal konflik dan disintegrasi nasional di era Reformasi. *Jurnal Antropologi*, 23(58), 45-60.
- Percik. (2007). *Proses dan implikasi sosial-politik pemekaran: Studi kasus di Sambas dan Buton*. Jakarta, Indonesia: Author.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Prabowo, J. B. S., & Khafid, S. (2000, 14-20 Februari). Rumpuk-rumpuk kering di Mataram. *TEMPO, Selingan* 28(50).
- Putra, N. A., & Djuweng. (1999). *Sisi gelap Kalimantan Barat*. Jakarta, Indonesia: ISAI.
- Rahman, B. (2009). *Kebijakan sistem kelembagaan pengelolaan irigasi: Kasus Provinsi Banten. Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1), 1-19.
- Siswo, I. (2014). *Metode penanganan konflik di wilayah Kota Mataram*. Mataram, Indonesia: Kesbangpol Kota Mataram.
- Souaré, I. K. (2007). Conflict prevention and early warning mechanisms in West Africa: A critical assessment of progress. *African Security Review*, 16(3), 96-109.
- Steni, B. (2011) Akses masyarakat adat atas tanah adatnya sendiri di tengah kepungan negara, migran dan perusahaan: Studi kasus di Desa Tuva, Sulawesi Tengah. [The access of adapt groups to adapt land caught between the state, migrants and industry: A case-study from Desa Tuva, Central Sulawesi]. In W. J. Berenschot, A. W. Bedner, E. Riyadi Laggut-Terre, & D. Novirianti (eds.), *Akses terhadap keadilan: Perjuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung untuk menuntut hak di Indonesia* (pp. 73-93). Jakarta, Indonesia: HuMa Jakarta.
- Stewart, F. (2002). *Horizontal inequalities: A neglected dimension of development*. Working Paper Number 81. QEH Working Paper Series.
- Suada, I. N. (2013). *Pemahaman semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI dalam peristiwa Lampung dan Sumbawa (akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013): Orang Hindu asal Bali menjadi sasaran kerusuhan; Dikaji dari perspektif sejarah dan agama*. Denpasar, Indonesia: Author.
- Tanasaldy, T. (2012). *Regime change and ethnic politics in Indonesia: Dayak politics of West Kalimantan*. Leiden, The Netherlands: KITLV.
- Thoha, D. (2001, 12 Maret). Pengamanan swakarsa di Lombok: Memulihkan rasa aman tanpa kekerasan. *Kompas*. Diakses dari <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/03/11/0064.html>

- Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA). (2004). *Penyelesaian konflik agraria dan usulan pelebagaannya di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Turner, M. (2005). From centralized authoritarianism to decentralized democracy: Regional autonomy and the state in Indonesia. In M. Weller and S. Wolff (eds.), *Autonomy, self-governance and conflict resolution* (pp. 186-204). London, UK: Routledge.
- van Walraven, K., & van der Vlugt, J. (1996). *Conflict prevention and early warning in the political practice of international organizations*. Den Haag, The Netherlands: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'.
- Wahono, F. X. (ed.). (2013). *Gerakan pemberdayaan Pancur Kasih*. Pontianak, Indonesia: Institut Dayakologi.
- Weidmann, N. B., & Salehyan, I. (2010, May 1). *Violence and ethnic segregation: A computational model applied to Baghdad*. Paper presented in the New Faces in Political Methodology III Conference, Pennsylvania State University.
- Whittall, J. (2010). Humanitarian early warning systems: Myth and reality. *Third World Quarterly*, 31(8), 1237-1250. DOI: 10.1080/01436597.2010.542967.
- Wiseman, J. P., & Aaron, M. A. (2001a). Observation. In E. Ksenych & D. Liu (eds.), *Conflict, order and action: Reading in sociology* (pp. 443-447). Toronto, Canada: Canadian Scholar's Press.
- Wolff, S. (2011). Post-conflict state building: The debate on institutional choice. *Third World Quarterly*, 32(10), 1777-1802.
- World Bank. (2011). *World development report 2011: Conflict, security, and development*. Washington, DC: Author.
- Wulf, H., & Debiel, T. (2009). *Conflict early warning and response mechanisms: Tools for enhancing the effectiveness of regional organisations? A comparative study of the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF*. Working Paper no. 49, Regional and Global Axes of Conflict.
- Zenko, M., & Friedman, R. R. (2011). UN early warning for preventing conflict. *International Peacekeeping*, 18(1), 21-37.

Indeks

A

adat 9, 16, 17, 24, 29, 30, 32, 34, 42, 59, 61, 64, 68, 72, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 97, 98, 101, 106, 107, 117, 121, 130, 134, 135, 136, 141, 144, 145, 149, 157
Ahmadiyah 59, 92, 93, 95, 119, 157
Alternative Dispute Resolution (ADR) 86, 91, 102, 117, 157

B

Babinkamtibmas 82, 83, 85, 86, 87, 94, 95, 98, 105, 113, 114, 115, 117, 157
Babinsa 77, 82, 83, 85, 105, 118, 157
Bima vi, 14, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 111, 115, 116, 140, 157

C

Credit Union ix, 45, 68, 69, 72, 128, 138, 145, 149, 157

D

Dayak 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 45, 67, 68, 72, 73, 84, 86, 87, 125, 126, 128, 131, 157
deeskalasi vii, viii, ix, 3, 5, 7, 20, 29, 157
deradikalisasi 115, 116, 135, 137, 157

desentralisasi vii, 1, 4, 32, 37, 38, 41, 65, 66, 123, 125, 131, 133, 139, 150, 157
Dompu 46, 51, 61, 108, 109, 112, 115, 116, 140, 157

E

empat pilar keamanan 105, 114, 157
etnisitas 34, 36, 58, 72, 139, 157

F

FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) viii, 44, 60, 78, 81, 90, 101, 107, 111, 112, 113, 121, 129, 137, 144, 148, 157
FKUB (Forum Keamanan Umat Beragama) viii, 44, 60, 61, 62, 78, 90, 101, 108, 112, 121, 129, 137, 144, 148, 157
FPI (Front Pembela Islam) 36, 89, 132, 157

H

hak asasi manusia 9, 33, 92, 171
Hindu 25, 56, 60, 63, 108, 112, 118, 121, 157
hukum adat 24, 86, 87, 89, 149, 157
hukum positif 74, 86, 87, 130, 149, 157

I

identitas ix, 1, 2, 8, 19, 25, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 68, 72, 73, 79, 81, 87,

93, 123, 127, 130, 131, 132, 133,
138, 139, 140, 145, 146, 149, 167
Institut Dayakologi 24, 45, 72, 127,
157
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)
115, 116, 117, 157
Islam vi, 25, 45, 48, 51, 56, 60, 61,
62, 63, 70, 71, 72, 93, 94, 96, 100,
104, 112, 119, 132, 170

K

Kalimantan Barat v, viii, 1, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
137, 138, 139, 140, 141, 143, 144,
145, 147, 149, 167
Kamtibmas (Keamanan dan Ket-
ertiban Masyarakat) 64, 105, 115,
120, 144, 146, 157
kapasitas lembaga v, vii, viii, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 16, 17, 66, 90, 91, 124,
126, 133, 136, 138, 139, 141, 146,
147, 157
kearifan lokal 86, 96, 98, 100, 106,
118, 135, 136, 149, 157
kelemahan institusional vii, 15, 158
kerapuhan sosial vii, 4, 5, 158
Kesbangpol viii, 23, 34, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 55, 57, 59, 60, 70,
71, 72, 76, 78, 81, 82, 88, 92, 95,
96, 101, 104, 107, 108, 110, 111,
112, 115, 117, 118, 126, 127, 137,
144, 148, 158
kohesi sosial 4, 119, 135, 136, 145,
158
Kominda (Komunitas Intelijen

Daerah) viii, 43, 44, 60, 75, 76,
77, 78, 82, 90, 103, 104, 107, 120,
126, 128, 129, 137, 144, 161
konflik antaragama 59, 158
konflik antaretnis 67, 72, 158
konflik kekerasan vii, 1, 2, 3, 5, 6,
7, 10, 11, 13, 14, 32, 38, 41, 50, 81,
89, 93, 94, 95, 111, 123, 124, 133,
141, 158
konflik kekerasan episodik 1, 2, 158
konflik komunal 1, 2, 3, 21, 27, 30,
33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 57, 58,
75, 89, 105, 124, 128, 158
konflik sumber daya 19, 38, 65, 71,
111, 132, 133, 136, 144, 169
korupsi 9, 65, 101, 114, 158
Kristen 25, 60, 72, 158

L

Lembaga Pancur Kasih 158
Lombok v, 14, 16, 17, 19, 45, 46, 48,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 91, 94, 95, 96, 98, 99,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 113, 114, 115, 117, 120,
134, 135, 136, 140, 158

M

Madura 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 41, 45, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 80, 84, 86, 125,
127, 128, 131, 132, 158
masyarakat heterogen 158
masyarakat homogen 158
Melayu 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
45, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 80,
83, 86, 125, 126, 131, 158
multikulturalisme 71, 72, 73, 126,
127, 145, 158

musyawarah mufakat 89, 117, 158

N

Nahdlatul Wathan (NW) 61, 158
ndempa 158

Nusa Tenggara Barat v, viii, 2, 13,
16, 17, 19, 45, 46, 48, 50, 51, 57,
58, 59, 60, 61, 64, 91, 101, 102,
105, 113, 119, 120, 123, 124, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 143, 144, 145, 167

nyongkolan 59, 92, 97, 158

O

Orde Baru 26, 33, 51, 61, 67, 131,
132, 158

otonomi daerah 1, 4, 20, 22, 32, 37,
41, 123, 125, 131, 133, 150, 158

P

Pamswakarsa (Pengamanan Swa-
karsa) 52, 59, 62, 63, 64, 105,
106, 107, 114, 121, 134, 136, 137,
145, 158

partisipasi masyarakat 66, 67, 69,
76, 91, 100, 128, 130, 135, 144,
148, 163

pembagian kekuasaan (Power Shar-
ing) 125, 126, 133, 139, 140, 158

pemberdayaan ekonomi masyarakat
158

pemekaran 19, 20, 21, 22, 37, 38,
39, 72, 125, 133, 158

pemetaan konflik 71, 110, 126, 148,
158

pemilihan umum 124, 125, 140,
146, 158

pemilukada (pemilihan umum
kepala daerah) 4, 5, 37, 123, 130,
131, 133, 158

penanganan konflik v, vii, 4, 5, 8, 9,

10, 11, 17, 70, 77, 88, 91, 101, 105,
107, 113, 125, 147, 161

pencegahan konflik v, vii, viii, ix,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 42, 43, 44,
59, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84,
87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 113, 114, 119, 120, 121, 124,
125, 126, 127, 128, 130, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 167

penegakan hukum 55, 57, 58, 73,
74, 76, 78, 87, 106, 114, 119, 126,
130, 132, 158

politik identitas ix, 33, 138, 158

Polri 83, 85, 96, 105, 116, 118, 158

potensi konflik viii, ix, 6, 9, 13, 19,
20, 22, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 66, 67,
70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 84,
87, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 101, 103,
104, 108, 109, 111, 113, 114, 120,
121, 128, 129, 130, 131, 134, 136,
137, 138, 140, 141, 143, 144, 145,
148, 149, 150, 163

provokasi 30, 56, 57, 85, 119, 159

R

Reformasi vii, 1, 4, 22, 26, 32, 37,
51, 57, 67, 150, 159

S

Samawa 48, 51, 61, 140, 159

Sambas v, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 69, 71, 75, 77, 78,
79, 80, 83, 85, 87, 88, 125, 133,
159

SARA (suku, agama, ras, dan antar-
golongan) 1, 38, 118, 119, 159

sistem peringatan dini (*early warning system*) vii, ix, 6, 8, 10, 43, 59, 60, 67, 76, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 102, 110, 111, 120, 121, 128, 129, 130, 135, 140, 143, 144, 145, 147, 163
Sumbawa vi, 16, 19, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 91, 101, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 119, 134, 140, 159

T

Tarung Presean 98, 159
terorisme 115, 116, 117, 137, 159
Tionghoa 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 48, 69, 70, 73, 84, 127, 131, 159
TNI 16, 32, 43, 52, 53, 54, 56, 61, 64, 77, 82, 83, 85, 96, 104, 105, 110, 116, 118, 121, 126, 135, 159

W

Walubi 44, 45, 69, 70, 127, 159

Lampiran-lampiran

LAMPIRAN 1: DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

Pencegahan konflik

Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Unsur lembaga pemerintah:

- Bagaimana peta potensi konflik di daerah ini? Apa faktor utama penyebab konflik? Bagaimana *conflict assessment* dilakukan? Apakah sudah ada cetak biru pencegahan konflik di daerah ini?
- Apa saja sasaran dan strategi pencegahan konflik di daerah ini? Apa peran tiap lembaga? Bagaimana menyinergikan strategi dan pendekatan tersebut?
- Data apa saja yang dikumpulkan untuk identifikasi konflik? Bagaimana data tersebut dikumpulkan? Bagaimana data tersebut dikelola?
- Apa peran Kominda dan elemen intelijen lembaga dalam pencegahan konflik? Bagaimana pelaporan disampaikan dan dibagi sesama lembaga pemerintah dan seberapa efektif tindak lanjut yang dilakukan?
- Adakah lembaga yang berperan dalam pencegahan konflik di daerah ini? Kalau ya, lembaga apa yang memegang peranan utama dalam pencegahan konflik? Seberapa efektif peran itu dilakukan? Bagaimana lembaga tersebut melakukan koordinasi antarlembaga?
- Bagaimana peran lembaga untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif khas daerah digunakan dalam pencegahan konflik?
- Bagaimana akuntabilitas dari masing-masing lembaga?
- Bagaimana hubungan sipil–militer dibangun dan dijaga untuk mencegah konflik?
- Seberapa profesional aparat dari lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya?
- Bagaimana lembaga-lembaga terkait membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik, terutama berkenaan dengan sistem peringatan dini?

- Bagaimana masyarakat memandang legitimasi dari lembaga-lembaga dalam menjalankan tugas mereka dalam pencegahan konflik?
- Seberapa besar faktor inflasi dan pengangguran menyumbang terhadap potensi konflik?
- Apa peran lembaga-lembaga terkait untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi informal?
- Bagaimana lembaga-lembaga terkait menjaga akses terhadap sumber daya dan perdagangan?
- Seberapa besar akses terhadap pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap potensi konflik?
- Apa peran lembaga-lembaga terkait dalam mengurangi ketegangan sosial?
- Bagaimana lembaga-lembaga mengatasi ketidakadilan struktural dan masalah pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam?
- Bagaimana peran lembaga untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan eskalasi konflik?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif khas daerah digunakan dalam pencegahan eskalasi konflik?

Unsur lembaga nonpemerintah dan masyarakat:

- Apa saja yang dilakukan untuk menguatkan hubungan antarkelompok masyarakat?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif khas daerah digunakan dalam pencegahan konflik?
- Bagaimana kinerja lembaga formal dalam pencegahan konflik? Peran dan tanggung jawab apa yang sudah berjalan dan yang harus dibenahi?
- Bagaimana peran lembaga untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik?
- Peran apa yang dimainkan kaum perempuan dalam pencegahan konflik?
- Lembaga apa yang memegang peranan utama dalam pencegahan konflik? Seberapa efektif peran itu dilakukan? Bagaimana lembaga tersebut melakukan koordinasi antarlembaga?
- Bagaimana peran lembaga untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif khas daerah digunakan dalam pencegahan konflik?
- Bagaimana akuntabilitas dari masing-masing lembaga dalam mencegah konflik?
- Bagaimana hubungan sipil–militer dibangun dan dijaga untuk mencegah konflik?

- Seberapa profesional aparat dari lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya?
- Bagaimana lembaga-lembaga masyarakat membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik, terutama berkenaan dengan sistem peringatan dini?
- Bagaimana sesama anggota masyarakat memandang legitimasi dari lembaga-lembaga nonpemerintah dalam menjalankan tugas mereka dalam pencegahan konflik?
- Seberapa besar pengangguran menyumbang terhadap potensi konflik di kalangan masyarakat?
- Apa peran lembaga-lembaga masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi informal?
- Seberapa besar akses terhadap pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap potensi konflik?
- Apa peran lembaga-lembaga masyarakat dalam mengurangi ketegangan sosial?
- Bagaimana lembaga-lembaga masyarakat mengatasi ketidakadilan struktural dan masalah pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam?
- Bagaimana peran lembaga nonpemerintah untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan eskalasi konflik?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif khas daerah digunakan dalam pencegahan eskalasi konflik?

LAMPIRAN 2: FORMULIR TRANSKRIPSI WAWANCARA

Wawancara # :
Nama :
Usia :
Gender :
Pekerjaan :
Afiliasi :

Tanggal dan waktu :
Lokasi wawancara :
Peneliti :

Latar Belakang (informasi yang relevan tentang narasumber)

Wawancara:

Q:

A:

LAMPIRAN 3: FORMULIR INFO DEMOGRAFI NARASUMBER

[illegible]

LAMPIRAN 4: KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA: STUDI KASUS PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DAN KALIMANTAN BARAT

PROTOKOL WAWANCARA

Tanggal :
Pewawancara :
Lokasi :

Protokol Pembuka

Dalam wawancara ini kami akan mencatat dan merekam secara audio jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Apabila Anda keberatan untuk direkam secara audio, kami akan merekam jawaban Anda secara tertulis. Sebagai informasi, hanya peneliti saja yang memiliki akses atas hasil wawancara ini. Pada dasarnya, seluruh informasi yang diberikan bersifat konfidensial dan bila Anda merasa tidak nyaman atas wawancara ini, Anda berhak untuk berhenti kapan saja. Sesuai permintaan, identitas Anda dapat dinyatakan secara terbuka atau disembunyikan saat pelaporan hasil wawancara. Apakah Anda setuju dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan?

Pengantar

Anda kami pilih untuk wawancara ini karena Anda merupakan orang yang kami anggap tepat dalam mendiskusikan permasalahan konflik di daerah ini. Penelitian ini berfokus pada masalah pencegahan konflik di daerah ini. Diharapkan sumbangan pemikiran dan pengalaman Anda dapat menjadi referensi dan pembelajaran bagi daerah lain dan pemerintah dalam upaya-upaya menangani masalah serupa.

Wawancara # :
Tanggal/Waktu :
Lokasi :
Nama Narasumber :
Pekerjaan :
Afiliasi Lembaga :
Pewawancara :

LAMPIRAN 5: KAPASITAS LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA: STUDI KASUS PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DAN KALIMANTAN BARAT

PROTOKOL FGD

FGD # :

Tanggal/Waktu:

Lokasi :

Pewawancara :

Protokol Pembuka

Dalam FGD ini kami akan mencatat dan merekam secara audio jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Apabila Anda keberatan untuk direkam secara audio, kami akan merekam jawaban Anda secara tertulis. Sebagai informasi, hanya peneliti saja yang memiliki akses atas hasil FGD ini. Pada dasarnya, seluruh informasi yang diberikan bersifat konfidensial dan bila Anda merasa tidak nyaman atas FGD ini, Anda berhak untuk berhenti kapan saja. Sesuai permintaan, identitas Anda dapat dinyatakan secara terbuka atau disembunyikan saat pelaporan hasil FGD. Apakah Anda setuju dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan?

Pengantar

Anda semua kami pilih untuk ikut serta dalam FGD ini karena Anda merupakan orang-orang yang kami anggap tepat dalam mendiskusikan permasalahan konflik di daerah ini. Penelitian ini berfokus pada masalah pencegahan konflik di daerah ini. Diharapkan sumbangan pemikiran dan pengalaman Anda dapat menjadi referensi dan pembelajaran bagi daerah lain dan pemerintah dalam upaya-upaya menangani masalah serupa.

FGD #:

Nama-nama narasumber/usia/gender/pekerjaan/afiliasi:

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 3. | 5. |
| 2. | 4. | 6. |

Profil Peneliti dan Penulis

Rudi Sukandar adalah penasihat tim dan peneliti di Program SNPK-THC, serta staf pengajar di STIKOM London School of Public Relations-Jakarta (LSPR-Jakarta). Ia meraih gelar Ph.D. dari School of Communication Studies, Ohio University, Amerika Serikat, pada 2007. Topik penelitiannya meliputi komunikasi dan konflik antarpribadi, organisasi, dan komunal.

Fathun Karib adalah peneliti di Program SNPK-THC, serta staf pengajar di Jurusan Sosiologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, dan Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina. Ia menyelesaikan studi masternya di bidang studi Asia Tenggara di University of Passau, Jerman, pada tahun 2013. Minat studinya meliputi pembangunan, konflik sumber daya alam, dan bencana sebagai fenomena sosial politik.

Nurina Vidya Hutagalung adalah peneliti di program SNPK-THC. Ia menyelesaikan pendidikan masternya pada Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN). Minat penelitiannya mencakup isu-isu konflik internasional dan Indonesia, pertahanan, dan pembangunan perdamaian.

Sofyan Cholid adalah peneliti di Program SNPK-THC dan Sekretaris Program Sarjana Jurusan Kesejahteraan Sosial (Kessos), Universitas Indonesia. Ia meraih gelar master dalam bidang geografi di Universitas Indonesia. Minat penelitiannya mencakup bidang perencanaan sosial dan lebih banyak berfokus pada pendekatan kuantitatif.

Imron Rasyid adalah *project manager* program SNPK-THC. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia memiliki minat dan aktif dalam berbagai studi tentang konflik dan kekerasan, serta terlibat dalam berbagai evaluasi program di beragam lembaga.

Sopar Peranto adalah peneliti di program SNPK-THC. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Penelitiannya banyak berfokus pada isu-isu konflik dan kekerasan di Indonesia.

R. Praditya Andika Putra adalah peneliti di program SNPK-THC. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Minat studinya berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan *economic instability and conflict*, hubungan korporasi–komunitas lokal, *community development* sebagai model resolusi konflik, dan kekerasan geng di wilayah urban.

Mohammad Hasan Ansori adalah peneliti di program SNPK-THC dan staf pengajar di Jurusan Sosiologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ia meraih gelar Ph.D. di bidang Sosiologi dari University of Hawaii at Manoa, USA, pada tahun 2011. Fokus Penelitiannya meliputi kajian konflik dan perdamaian, gerakan sosial, konsumerisme dan budaya kelas, serta relasi etnis.

Johari Efendi adalah peneliti pada program SNPK-THC dan salah satu pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto. Ia menyelesaikan studi master tentang *Conflict and Dispute Resolution* di Law School, University of Oregon, Amerika Serikat, pada 2013. Minat dan perhatiannya meliputi isu-isu pembangunan perdamaian, pascakonflik, mediasi, negosiasi, fasilitasi, *collaborative governance*, dan konflik perkotaan.

Tentang The Habibie Center (THC) dan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)

The Habibie Center (THC) didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, nonpemerintah, dan nonprofit sejak tahun 1999. Visi The Habibie Center adalah menciptakan masyarakat demokratis secara struktural berdasarkan moralitas dan integritas nilai-nilai budaya dan agama. The Habibie Center memiliki dua misi utama. Pertama, untuk mendirikan masyarakat demokratis secara struktural dan kultural yang mengakui, menghormati, dan mempromosikan hak asasi manusia; melakukan studi dan advokasi isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan sosialisasi teknologi.

Alamat: The Habibie Center building

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 12560, Indonesia

Telp. +62 21 780-8125 / 62 21 781-7211 | Fax. +62 21 780-8125/62 21 781-7212

E-mail: nvms@habibiecenter.or.id | www.habibiecenter.or.id

Facebook: facebook.com/habibiecenter | Twitter: [@habibiecenter](https://twitter.com/habibiecenter)

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) merupakan sebuah terobosan dalam sistem informasi yang menyediakan data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek SNPK dipimpin oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center. Program SNPK memiliki beberapa kegiatan utama. *Pertama*, pengumpulan data secara rinci dan berkala tentang kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa kekerasan terjadi, serta apa saja dampaknya. Data SNPK dikumpulkan sejak 1998 dan dimutakhirkan setiap bulan; disajikan melalui portal SNPK (www.snpk-indonesia.com). *Kedua*, analisis atas data yang telah dikumpulkan dan penelitian mengenai konflik dan kekerasan. SNPK ditujukan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan serta program penanganan kekerasan. Sejak 2 Desember 2014, SNPK telah memantau seluruh provinsi di Indonesia.

